



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2013 – 2018**

BUPATI BARITO UTARA



H. NADALSYAH

WAKIL BUPATI BARITO UTARA



Drs. OEMPY HERBY



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilantiknnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara periode 2013-2018 maka untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4598);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor

PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2013-2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJP Nasional dan RPJM Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN BARITO UTARA

Pasal 2

- (1) RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Bupati / Wakil Bupati, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- e. BAB V : PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
- j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan ditindaklanjuti dalam RKPD, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Agustus 2014

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 19 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,**


**BAMBANG EDHY PRAYITNO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2014 NOMOR 9**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H. FAKHRI FAUZI, MH
NIP.19710911 988003 1 004**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013-2018**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional.

Sedangkan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 tersebut menetapkan tujuan dari pada sistem perencanaan pembangunan nasional adalah : (a) mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional (RPJM) sebagaimana tercantum dalam RPJM Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan RPJM Nasional 2010-2014. RPJM Daerah Kabupaten Barito Utara disusun mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, terbagi dalam tahap-tahap yang dituangkan RKPD I Tahun 2013 – 2014, RKPD II Tahun 2014 – 2015, RKPD III 2015 – 2016, RKPD IV tahun 2016 – 2017 dan RKPD V Tahun 2017 – 2018.

Periodisasi RPJMD Kabupaten Barito Utara tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Disamping itu, kepala daerah paling lambat 6 (Enam) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD. Pentahapan Rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Barito Utara yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai Kabupaten Barito Utara, serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Bila visi telah dirumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 terdiri dari 3 BAB dan 5 Pasal. Yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJM Daerah Kabupaten Barito Utara, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM

Daerah yang telah ada, serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari peraturan daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 – 2018 yang berisi Visi, Misi dan arah pembangunan jangka Menengah 2013 – 2018.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 9

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK... ..	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	1-1
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-6
1.5 Maksud dan Tujuan	1-7
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-4
2.2 Aspek Perekonomian Daerah	II-5
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-5
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-22
2.2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-28
2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-30
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.2 Neraca Daerah	III-8
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-8
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-12
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-13
3.3 Kerangka Pendanaan	III-15

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama -----	III-15
3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu -----	III-18
3.3.3 Perhitungan Kerangka PendanaanIII -----	III28
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS -----	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah-----	IV-1
4.2 Isu-isu Strategis -----	IV-47
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN -----	V-1
5.1 Visi Pembangunan -----	V-1
5.2 Misi Pembangunan -----	V-5
5.3 Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai -----	V-6
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	VI-1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN -----	VIII-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH -----	IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN DAERAH -----	X-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah per Kecamatan	II-2
Tabel 2.2	Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan jenis Kelamin Kab. Barito Utara Tahun 2003–2012.....	II-4
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2010 (Hasil Sensus Penduduk oleh BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2010)	II-5
Tabel 2.4.	Perkembangan PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 – 2012 (dalam juta)	II-6
Tabel 2.5.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar ADHBDan ADHK Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 - 2012 (Tahun 2000 = 100).....	II-6
Tabel 2.6.	PDRB Perkapita Barito Utara, Tahun 2007-2011	II-7
Tabel 2.7.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kab. Barut Tahun 2007-2012 (Dalam %)	II-8
Tabel 2.8.	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Barito Utara Tahun 2007 -2012 (Dalam %).....	II-9
Tabel 2.9.	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 – 2012.....	II-9
Tabel 2.10	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kab. Barito Utara Tahun 2007 – 2012	II-10
Tabel 2.11.	Jumlah dan Status Ijin Usaha Pertambangan Pertambangan (IUP) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2013	II-18
Tabel 2.12.	IPM Barito Utara dan Kabupaten Lainnya di Kalimantan Tengah Tahun 2008–2012	II-24
Tabel 2.13.	Komponen IPM Barito Utara dan Kabupaten Lainnya di Kalimantan Tengah Tahun 2012	II-25
Tabel 2.14.	Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lainnya di Kalimantan Tengah tahun 2009	II-26

Tabel 2.15	Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/ Kota Kalimantan Tengah Tahun 2009	II-26
Tabel 2.16	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lainnya di Kalimantan Tengah tahun 2010.....	II-27
Tabel 2.17.	Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Energi Listrik dan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lainnya Tahun 2012	II-28
Tabel 2.18.	Aksesibilitas Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lainnya Terhadap Infrastruktur Dasar Tahun 2009.....	II-29
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009 s/d 2012 Kabupaten Barito Utara	III-5
Tabel 3.2.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2012.....	III-10
Tabel 3.3.	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Barito Utara 2009-2011	III-11
Tabel 3.4.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2012.....	III-12
Tabel 3.5.	Defisit dan Surplus Riil APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2012	III-13
Tabel 3.6.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Utara 2009-2012	III-14
Tabel 3.7.	Realisasi sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Barito Utara.....	III-14
Tabel 3.8	Belanja Prioritas Utama untuk Belanja Pelayanan Dasar Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Urusan 2009-2011	III-16
Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 s/d 2018	III-22
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2012	III-26
Tabel 3.11	Target Belanja APBD TA.2013.....	III-27
Tabel 3.12	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 s/d 2018	III-31
Tabel 4.1.	Kondisi Jalan Kabupaten Barito Utara tahun 2012	IV-17
Tabel 4.2.	Kondisi Lingkungan Perumahan Kabupaten Barito Utara tahun 2012	IV-17
Tabel 4.3.	Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Barito Utara Tahun 2011	IV-18

Tabel 4.4.	Banyaknya Pelanggan PLN menurut Kelompok Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Terjual Kabupaten Barito Utara Tahun 2012.....	IV-19
Tabel 4.5.	Produksi Air Minum dan Air Yang Dijual Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2010-2012.....	IV-19
Tabel 4.6	Pengukuran Hasil Kualitas Udara Tahun 2012	IV-20
Tabel 4.7	Sarana Kebersihan Kabupaten Barito Utara Tahun 2011-2012	IV-21
Tabel 4.8	Data Landasan Container dan Bak Sampah (TPS) se-Kabupaten Barito Utara Tahun 2011-2012	IV-21
Tabel 4.9.	Jumlah Titik Genangan Tahun 2010-2012.....	IV-23
Tabel 4.10.	Daftar Saluran Air Hujan Menurut Fungsi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012	IV-23
Tabel 4.11.	Hasil Pemantauan Kualitas dan Kuantitas Air Badan Air (Sungai) Sungai Barito yang ditetapkan di Kab. Barito Utara Tahun 2012	IV-26
Tabel 4.12	Hasil Pemantauan Kualitas Air Bersih dari Sumur Penduduk	IV-27
Tabel 4.13	Jumlah Penderita Penyakit Diare Tahun 2007 – 2010	IV-28
Tabel 4.14.	Jumlah Obyek, Jenis Obyek dan Nama Obyek Wisata Kabupaten Barito Utara 2012	IV-45
Tabel 4.15.	Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Barito Utara.....	IV-46
Tabel 5.1	Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran.....	V-8
Tabel 6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara	VI-10
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan.....	VII-2
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.....	VIII-2
Tabel 8.2	Arah prioritas program	VIII-35
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018	IX-2

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1: Profil Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah periode Maret 2007 sampai dengan Maret 2013 II-23
- Grafik 2.2: Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah periode 2011-2012 II-23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-5
Gambar 3.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2012.....	III-7



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran program pembangunan Kepala Daerah terpilih yang memuat gambaran kebijakan keuangan daerah, kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, strategi dan arah kebijakan umum serta program pembangunan daerah. Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan serta penetapan indikator kinerja daerah.

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025. RPJMD tahap ketiga disusun dengan berlandaskan realisasi pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ke-2.

Dengan demikian maka RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing komparatif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas dengan menjunjung kearifan lokal kehidupan sosial budaya masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

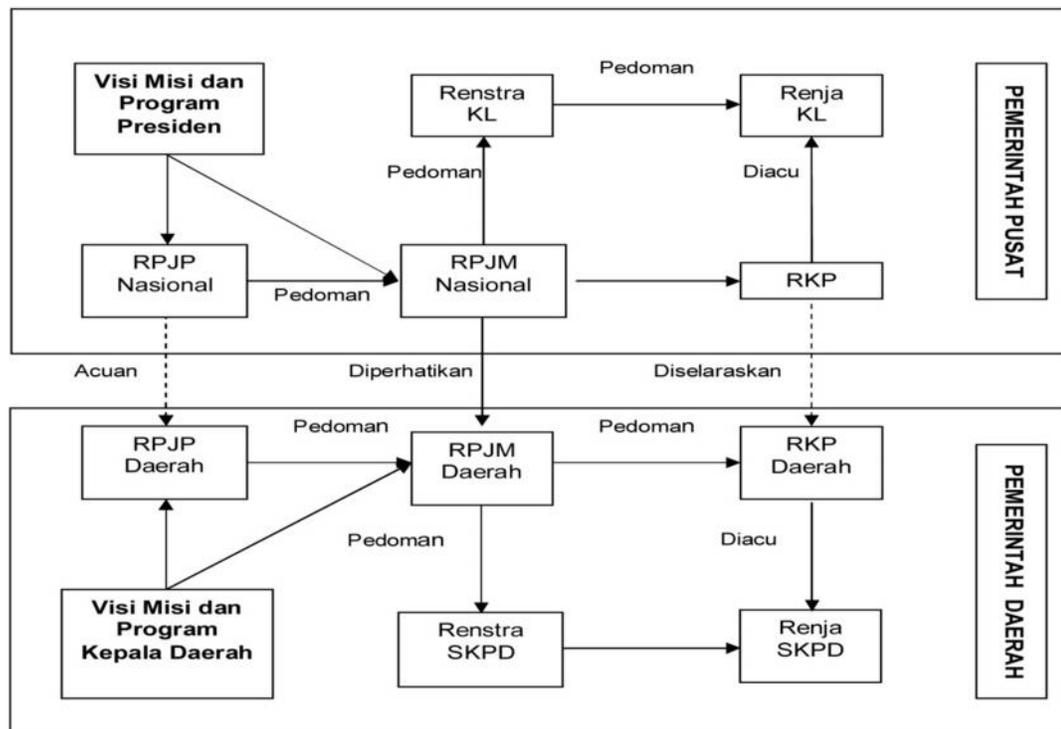
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8).

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, yang bertujuan untuk mendukung harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan. RPJMD Kabupaten Barito Utara harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.



Gambar I.1 Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 diterjemahkan dari visi dan misi Bupati terpilih periode 2013-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rancangan Perarturan Daerah RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

Penyelarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang sebagaimana diatur di dalam Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011-2031.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013–2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1.5. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk memberikan gambaran visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013-2018, yang harus dilaksanakan secara harmonis, sinkron dan sinergis dengan kebijakan nasional dan provinsi Kalimantan Tengah.

2. Tujuan

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2013-2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;
- b. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah dan pembiayaan pembangunan untuk periode TA. 2013-2018;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2013-2018.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD lingkup pemerintah daerah kabupaten Barito Utara, merumuskan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018, serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2013-2018.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kabupaten Barito Utara, termasuk distribusi penggunaan lahan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara serta batas administrasi wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta penduduk dan pertumbuhannya.

2.1.1 Aspek Geografi

a. Letak Geografis

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi $114^{\circ} 20'3,32''$ – $115^{\circ}50'47''$ Bujur Timur dan $0^{\circ}49'00''$ Lintang Utara – $1^{\circ} 27'00''$ Lintang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Kapuas dan Murung Raya.

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Barito Utara secara hukum tertuang dalam Perda Provinsi Nomor 08 Tahun 2003 tentang peta RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluas 8.300Km^2 (830.000 Ha). Selanjutnya berdasarkan data publikasi BPS Kabupaten Barito Utara tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Barito Utara adalah 8.300Km^2 (830.000 Ha) atau seluas 5,4% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan.

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Barito Utara adalah Kecamatan Lahei dengan luas wilayah 1.655,00 km², atau 19,94 persen terhadap luas Kabupaten Barito Utara, kemudian Kecamatan Gunung Purei seluas 1.468,00 km² atau 17,69 persen dari luas Kabupaten Barito Utara; sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Teweh Selatan yaitu 485,64 km² atau 5,85 persen dari luas Kabupaten Barito Utara.

Tabel 2. 1. Luas Wilayah Kabupaten Barito Utara per Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Montallat	553,00	6,66
2	Gunung Timang	890,00	10,72
3	Gunung Purei	1.468,00	17,69
4	Teweh Timur	494,84	5,96
5	Teweh Tengah	634,14	7,64
6	Lahei	1.655,00	19,94
7	Teweh Baru	861,38	10,38
8	Teweh Selatan	485,64	5,85
9	Lahei Barat	1.258,00	15,16
	Total Luas Wilayah	8.300,00	100,00

Sumber : BPS Barito Utara, 2013 dan Studi Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Barut

c. Keadaan Topografi

Topografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu kecamatan Montallat dan Teweh Tengah seluas 165 km² (29,2%). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 4.785 km² (21,5%). Kemiringan 15-40% tersebar di semua

kecamatan seluas 4.275 km² (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km² (25%).

d. Jenis Tanah

Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu *Aluvial* terdapat dialiran sungai, *regosol* terdapat menyebar di bagian selatan wilayah kabupaten Barito Utara, *podsolik* merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku terdapat di wilayah perbukitan, *kambisol* dan *okisol (laterit)* terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan bergelombang dan berbukit.

e. Klimatologi

Keadaan klimatologi di Kabupaten Barito Utara pada saat ini, bagian timurnya termasuk daerah beriklim tropis yang lembab dan panas. Sesuai pengamatan Station Meteorologi Beringin Muara Teweh, keadaan temperatur udara rata-rata maximum lebih kurang 32,3⁰ C dan minimum kurang lebih 22,7⁰ C dengan kelembaban nisbi rata-rata 86%. Berdasarkan data dari Stasiun Beringin Muara Teweh tahun 2003-2010, curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni hingga September setiap tahunnya. Pada bulan-bulan ini curah hujan hanya berkisar antara 154 – 162 mm dan hari hujan hanya berkisar antara 11 – 15 hari. Sedangkan untuk bulan Oktober hingga Desember curah hujan mencapai antara 244 – 449 mm, dengan hari hujan diatas 20 hari per bulannya. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember setiap tahunnya.

f. Hidrologi

Sungai utama yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito. Sungai Barito mengalir dari daerah hulu di Kabupaten Murung Raya melewati Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, hingga ke Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai ini tercatat mempunyai panjang lebih kurang 900 km (dapat dilayari 780 Km), lebar rata-rata 650 meter dengan kedalaman 8 meter dan bermuara ke Laut Jawa. Selain itu sungai yang cukup berperan dalam

sistem hidrologi di Kabupaten Barito Utara adalah sungai Montallat, Sungai Teweh dan sungai Lahei yang merupakan anak sungai Barito.

g. Penguasaan Tanah

Salah satu wujud peran pemerintah sebagai fasilitator untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa masyarakat di sektor perumahan dan pemukiman, antara lain dengan diterbitkannya surat-surat keputusan pemerintah mengenai hak-hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya melalui institusi pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan data yang tersedia, nampaknya status kepemilikan tanah ini harus menjadi perhatian utama pada masa-masa mendatang, karena tercatat hanya di kawasan perkotaan saja yang sudah memiliki sertifikat Hak Milik yaitu di Kecamatan Teweh Tengah, sedangkan kecamatan lainnya belum tercatat adanya sertifikat hak milik. Hal ini berarti kawasan pedesaan belum memiliki status penguasaan lahan/tanah yang jelas.

2.1.2 Aspek Demografi

a. Gambaran umum Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 (per 31 Desember 2012) adalah 178.789 jiwa berdasarkan registrasi penduduk per 25 September 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan sensus penduduk oleh BPS jumlah penduduk di Barito Utara pada tahun 2010 adalah 121.573 jiwa, tahun 2011 berjumlah 123.602 jiwa dan tahun 2012 berjumlah 123.781 jiwa dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) 108 dan kepadatan penduduk rata-rata 15 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Teweh Tengah sedangkan yang terjarang penduduknya adalah Kecamatan Gunung Purei. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kalimantan Tengah, maka persentase jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara berkisar antara 17,2% - 18,84%, atau rata-rata 18,10% dari penduduk Kalimantan Tengah. Selama kurun waktu tahun 2003-2010 pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Utara terus

meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 1,19% setiap tahunnya.

Tabel.2.2 Perkembangan Jumlah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan jenis Kelamin Kab. Barito Utara Tahun 2003–2012.

Tahun	Jenis Kelamin		Pertumbuhan	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2003	56.823	54.159	110.982	0,32
2004	56.798	53.349	110.147	-0,75
2005	57.396	53.938	111.335	1,08
2006	58.016	54.521	112.537	1,08
2007	58.643	55.110	113.753	1,08
2008	61.356	60.433	121.789	7,06
2009	61.851	60.925	122.776	0,08
2010	63.106	58.467	121.573	-0,97
2011	64.160	59.442	123.602	2,06
2012	64.249	59.532	123.781	0,01

Sumber : BPS Barito Utara, 2012.

b. Sex Rasio Penduduk

Data *Sex Ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan *gender*, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa *sex ratio* penduduk Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 108, yang artinya adalah penduduk laki-laki di kabupaten ini 8% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya. Data pada tabel 2.3 berikut ini memperlihatkan kondisi tersebut.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2010 dan 2012

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Jumlah Total	Rata-rata
	Male		Female			
Age Group	2010	2012	2010	2012	Sex Ratio	
0 – 4	6.390	6.505	6.094	6.203	12.484	12.708
5 – 9	7.203	7.336	6.663	6.785	13.866	14.121
10 – 14	6.343	6.460	6.061	6.164	12.404	12.624
15 – 19	5.417	5.516	5.199	5.315	10.616	10.831
20 – 24	5.034	5.122	5.105	5.241	10.139	10.363
25 – 29	5.963	6.067	5.931	6.055	11.894	12.122
30 – 34	5.837	5.940	5.241	5.385	11.078	11.325
35 – 39	5.369	5.465	4.970	5.033	10.339	10.498

40 – 44	4.663	4.747	3.985	4.089	8.648	8.836	117
45 – 49	3.595	3.661	3.115	3.135	6.710	6.796	115
50 – 54	2.732	2.782	2.024	2.069	4.756	4.851	135
55 – 59	1.647	1.678	1.296	1.288	2.943	2.966	127
60 – 64	1.202	1.225	1.052	1.028	2.254	2.253	114
65 – 69	757	772	743	709	1.500	1.481	102
70 – 74	481	490	459	508	940	998	105
75 +	473	482	529	526	1002	1.008	89
Jumlah	63.106	64.248	58.467	59.533	121.573	123.781	108

Sumber: Barito Utara Dalam Angka Tahun 2013, BPS Kab. Barito Utara.

2.2 Aspek Perekonomian Daerah

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi Barito Utara

Kondisi Perekonomian di Kabupaten Barito Utara yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011, tercatat laju pertumbuhan PDRB-ADHK tahun 2007 sebesar 4,15 persen, angka ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2008 laju pertumbuhan PDRB-ADHB tercatat sebesar 5,53 persen, tahun 2009 (5,57%), tahun 2010 (5,80 %), tahun 2011 (6,35%) dan 2012 (6,37%).

Tabel 2.4. Perkembangan PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 – 2012 (dalam juta)

TAHUN	PDRB ADHB	PDRB ADHK
2007	1.683.217,82	905.839,30
2008	1.872.061,83	955.948,23
2009	2.089.456,32	1.009.240,07
2010	2.354.223,09	1.067.822,63
2011*)	2.697.983,82	1.135.589,74
2012**)	2.980.624,90	1.207.893,00

Sumber: BPS Kab. Barito Utara, Juni 2011

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar ADHBD dan ADHK Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 - 2012 (Tahun 2000 = 100)

TAHUN	PDRB ADHB	PDRB ADHK
2007	12,43	4,15
2008	11,22	5,53
2009	11,61	5,57
2010	12,67	5,80
2011*)	14,60	6,35
2012**)	10,48	6,37

Sumber: BPS Kab. Barito Utara, Juni 2011

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Barito Utara bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011 sebesar Rp 1.135.589,74 naik menjadi Rp.1.207.893,00 pada tahun 2012 atau meningkat 6,37 persen. Laju pertumbuhan yang positif tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Utara secara kuantitatif dapat dikatakan lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) tahun 2011 tercatat sebesar Rp.2.697.983,82 dan tahun 2012 sebesar Rp.2.980.624,90. Ini berarti bahwa telah terjadi pertumbuhan PDRB-ADHB sebesar 10,48 persen.

b. Pendapatan Perkapita

Tingkat pertumbuhan nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, maka terjadi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita diperoleh dari pembagian besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB dengan penduduk pertengahan tahun, demikian juga berlaku pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Konstan Tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita ini dapat menggambarkan besarnya pendapatan yang diperoleh setiap perkapita/tahun secara rata-rata, meskipun untuk tingkat pemerataannya diperlukan kajian lebih lanjut lagi.

Kabupaten Barito Utara tahun 2007 sampai tahun 2011 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selalu terjadi kenaikan. Pada tahun 2007 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten Barito Utara sebesar Rp.14.051.170,54, angka ini terus mengalami kenaikan menjadi Rp.19.384.687,02 pada tahun 2010, pada tahun 2011 naik lagi menjadi Rp. 21.826.582,12 dan pada tahun 2012 menjadi Rp.24.079.825,63. Demikian juga PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) terus

mengalami peningkatan dari Rp.7.561.767,92 (Tahun 2007) menjadi sebesar Rp.9.758.307,- (Tahun 2012).

Tabel 2.6. PDRB Perkapita Barito Utara, Tahun 2007-2012

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
2007	14.051.170,54	7.561.767,92
2008	15.544.942,09	7.937.857,40
2009	17.262.670,07	8.338.139,49
2010	19.384.687,02	8.783.386,37
2011	21.826.582,12	9.186.875,95
2012	24.079.825,63	9.958.307,00

Sumber: BPS Barito Utara Tahun 2013

c. Pertumbuhan Sektoral

Sebagaimana halnya dengan daerah lainnya di Kalimantan Tengah dan khususnya Kabupaten Barito Utara, sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan, meskipun peranan sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan setiap tahunnya. Dominasi sektor pertanian di Kabupaten Barito Utara karena didukung oleh sumber daya alam dengan lahan pertanian termasuk perkebunan karet rakyat yang relatif luas hampir disetiap desa di wilayah Kabupaten Barito Utara, dimana para petani mengusahakannya secara turun temurun.

Kontribusi atau peranan sektor pertanian terhadap PRDB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara tercatat tahun 2007 kontribusinya sebesar 29,49 persen Tahun 2008 (27,57%), tahun 2009 menjadi 25,84 persen, pada tahun 2010 turun menjadi 24,62 persen dan pada tahun 2011 menjadi 24,62 persen dan tahun 2012 menjadi sebesar 23,32 persen. Peranan Subsektor kehutanan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun menjadi penyebab utama turunnya peran sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara ini.

Kontribusi sektor pertambangan dan galian terhadap perekonomian Kabupaten Barito Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2007, peran sektor ini terhadap PDRB-ADHB

hanya sebesar 17,4 persen mengalami kenaikan menjadi sebesar 21,78 persen (Tahun 2010) dan menjadi sebesar 23,11% (Tahun 2012).

Pada Tabel 2.8 berikut ini disajikan potret pertumbuhan sektoral Kabupaten Barito Utara dari berbagai sisi meliputi : laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada Tabel 2.9 disajikan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, Tabel 2.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Tabel 2.11 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kab. Barut Tahun 2007-2012 (Dalam %)

Sektor	Tahun						Laju Pertumbuhan
	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**	
1. Pertanian	(0,16)	2,80	2,10	(1,94)	0,85	1,51	0,23
2. Pertambangan dan Penggalian	6,99	8,59	13,96	18,46	11,59	12,10	2,49
3. Industri Pengolahan	5,37	3,26	5,54	3,77	2,57	3,58	0,13
4. Listrik gas dan Air Bersih	5,47	3,89	2,73	4,18	12,81	6,91	0,06
5. Bangunan/Konstruksi	6,65	6,31	6,14	4,76	10,53	6,57	0,72
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,55	4,28	3,67	4,26	7,45	5,79	1,15
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,37	4,67	5,38	3,81	5,11	3,65	0,39
8. Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	13,95	20,63	3,79	19,75	8,49	12,22	0,34
9. Jasa-jasa	4,86	7,19	4,92	5,19	7,06	7,56	0,82
PDRB	4,15	5,53	5,57	5,80	6,35	6,37	5,70

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, 2013.

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.8. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Barito Utara Tahun 2007 -2012 (Dalam %)

Sektor	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011*	2012**
1. Pertanian	29,4	29,09	27,56	25,84	24,62	23,32
2. Pertambangan dan Penggalian	17,4	17,34	19,82	21,78	22,96	23,11
3. Industri Pengolahan	5,29	5,21	5,23	5,01	4,73	4,69
4. Listrik gas dan Air Bersih	0,72	0,71	0,67	0,66	0,68	0,69
5. Bangunan/Konstruksi	6,98	7,09	7,15	6,97	7,22	7,36
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	17,3	16,98	16,45	16,41	16,88	17,41
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,15	8,95	8,83	8,58	8,21	8,15
8. Keuangan Persewaan dan JasaPerusahaan	3,25	3,92	3,80	4,15	4,07	4,36
9. Jasa-jasa	10,3	10,70	10,49	10,60	10,60	10,91
PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Barito Utara, 2013.

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.9. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 - 2012

Sektor	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
1.Pertanian	496.356,83	544.589,80	575.808,39	608.428,18	664.215,00	695.227,49
2.Pertambangan dan Penggalian	293.695,18	324.669,16	414.218,36	512.866,86	619.442,36	688.808,68
3.Industri Pengolahan	89.034,09	97.575,74	109.361,86	117.876,90	127.497,61	139.804,81
4.Listrik gas dan Air Bersih	12.181,68	13.216,88	13.975,97	15.507,30	18.412,13	20.559,80
5.Bangunan/ Konstruksi	117.417,32	132.747,54	149.419,94	164.151,04	194.890,67	219.384,92
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran	291.539,66	317.937,10	343.666,24	386.394,92	455.314,75	518.857,38
7.Pengangkutan dan Komunikasi	154.064,42	167.622,92	184.508,48	201.917,19	221.523,96	242.835,11
8.Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan	54.771,34	73.442,53	79.366,28	97.649,85	109.799,64	129.908,85
9.Jasa-jasa	174.157,30	200.260,16	219.130,81	249.430,85	286.887,71	325.237,87
PDRB	1.683.217,82	1.872.061,83	2.089.456,32	2.354.223,09	2.697.983,82	2.980.624,90

Sumber: BPS Kabupaten Barito Utara, 2013.

Keterangan :*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.10. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Barito Utara Tahun 2007 - 2012

Sektor	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011*)	2012**)
1.Pertanian	282.49,64	290.36,56	296.4,25	290.729,26	293.210,14	297.634,89
2.Pertambangan dan Penggalian	156.734,87	170.201,10	193.961,00	229.764,88	256.395,13	287.410,19
3.Industri Pengolahan	49.157,36	50.759,89	53.571,99	55.594,13	57.021,35	59.061,33
4.Listrik dan Air Bersih	4.855,39	5.044,42	5.182,12	5.398,84	6.090,49	6.511,43
5.Bangunan/ Konstruksi	61.954,03	65.863,33	69.907,34	73.235,19	80.943,34	86.257,62
6.Perdagangan, Hotel dan Restoran	146.079,41	152.332,57	157.924,52	164.658,96	176.927,85	187.168,18
7. Pengangkutan dan Komunikasi	71.515,51	74.856,53	78.884,41	81.889,75	86.074,26	89.215,43
8.Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan	28.824,95	34.771,68	36.087,94	43.216,63	46.883,66	52.611,23
9.Jasa-jasa	104.258,15	111.752,14	117.249,50	123.334,99	132.043,51	142.022,70
PDRB	905.839,30	955.948,23	1.009.240,07	1.067.822,63	1.135.589,74	1.207.893,00

Sumber: Data BPS Kab. Barito Utara, 2013.

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

d. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian nasional telah mengalami pergeseran mulai tahun 1992 dimana sektor pertanian yang semula mendominasi perekonomian nasional digantikan oleh sektor industri pengolahan.

Namun tidak demikian halnya dengan daerah Kalimantan Tengah dan khususnya Kabupaten Barito Utara. Di Kabupaten Barito Utara sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan, meskipun peranannya turun tiap tahunnya, dominasi sektor ini karena didukung oleh sumber daya alam yang tersedia yakni relatif luasnya lahan pertanian yang digarap petani, termasuk subsektor perkebunan terutama karet rakyat yang hampir disetiap desa di wilayah Kabupaten Barito Utara mengusahakannya secara turun temurun.

Kontribusi atau peranan sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2007 kontribusinya sebesar 29,49 persen, pada Tahun 2008 tercatat (29,09%), Tahun 2009 menjadi 27,56 persen, pada tahun 2010 turun menjadi 25,84 persen dan pada tahun 2011 menjadi 24,62 persen dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi sebesar 23,32 persen. Subsektor yang dominan terhadap turunnya peran sektor pertanian ini adalah subsektor kehutanan.

Data BPS Barito Utara, kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Barito Utara adalah sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2012 peranan sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara sebesar 23,11 persen atau mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 22,96 persen pada tahun 2012 sebesar 21,78 persen. Dari sektor pertambangan dan penggalian ini Subsektor yang mempunyai *share* terbesar adalah subsektor pertambangan dengan batu bara sebagai komoditi utamanya.

Kenaikan ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah perusahaan pertambangan yang sudah melakukan tahap eksploitasi atau operasi produksi yang sebelumnya masih dalam tahap eksplorasi, sehingga jumlah produksi dari sektor ini mengalami kenaikan. Sedangkan sektor penunjang sektor primer yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati posisi ketiga penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara, dengan peranannya pada tahun 2012 sebesar 17,41 persen meningkat dibandingkan tahun 2011 sebesar 16,88 persen. Setelah sektor sektor tersebut diatas berturut

turut peranannya terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara adalah sektor jasa-jasa dengan peranannya sebesar 10,91 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,15 persen, sektor bangunan/konstruksi sebesar 7,36 persen, sektor industri pengolahan sebesar 5,03 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4,36 dan yang terakhir sektor listrik, gas dan air bersih dengan peranannya sebesar 0,69 persen.

Besarnya peran masing-masing sektor mengindikasikan kemampuan ekonomi kabupaten Barito Utara pada sektor mana yang paling dominan dan pada sektor mana yang perlu ditingkatkan peranannya. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 peran beberapa sektor terhadap PDRB yang mengalami peningkatan yaitu sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel & restoran, dan jasa-jasa.

e. Inflasi

Secara umum perkembangan harga komoditas kebutuhan rumah tangga khususnya untuk sembilan bahan pokok di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2012 relatif tidak mengalami perubahan yang berarti. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2008, rata-rata harga kebutuhan pokok tersebut mengalami kenaikan berkisar antara 25% - 40%. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini adalah merupakan sumber inflasi utama bagi Kabupaten Barito Utara.

f. Perkembangan PDRB Per Kelompok Sektor

1. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan Dan Perikanan

Sektor ini mencakup subsektor tanaman bahan makanan (tabama), tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian merupakan andalan Kabupaten Barito Utara dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2007 sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara sebesar 29,49 persen.

Kontribusi yang diberikan semakin menurun dari tahun ke tahun. Kontribusi yang diberikan sektor ini terhadap PDRB tahun 2010 turun menjadi 25,84 persen dan pada tahun 2011 turun menjadi sebesar 24,62 persen dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi sebesar 23,32 persen. Subsektor tanaman bahan makanan dan sub sektor perkebunan memegang peranan yang cukup berpengaruh bagi kontribusi sektor pertanian, sehingga naik turunnya subsektor ini akan sangat berpengaruh pada sektor pertanian.

Pada tahun 2012 subsektor perkebunan kontribusinya terhadap PDRB sebesar 10,02 persen termasuk didalam subsektor ini antara lain karet, kelapa/kelapa sawit, kopi dan lain sebagainya sedangkan subsektor tanaman bahan makanan kontribusinya terhadap PRDB tahun 2012 sebesar 5,90 persen, termasuk di dalam subsektor ini adalah padi, jagung, ketela, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Komoditi-komoditi tersebut merupakan komoditas yang strategis, sehingga bila terjadi kenaikan atau penurunan produksi akan berpengaruh besar terhadap peran subsektor ini.

Peran subsektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara selalu menurun dari tahun ke tahun. Penyebab turunnya persentase subsektor ini adalah turunnya nilai tambah subsektor ini. Hal ini terkait dengan upaya-upaya penertiban terhadap penebangan kayu hutan dan luas lahan kehutanan yang semakin berkurang.

2. Pertambangan dan Penggalian

Sektor ini mencakup subsektor minyak dan gas bumi, subsektor pertambangan non migas dan subsektor penggalian. Kabupaten Barito Utara hanya terdapat subsektor pertambangan non migas hingga tahun 2010 dan pada tahun 2012 telah ada pertambangan gas yaitu di Karendan Kecamatan Lahei. Kontribusi sektor pertambangan dan Penggalian terhadap perekonomian

Kabupaten Barito Utara, pada tahun 2007 kontribusinya terhadap PDRB sebesar 17,45 persen, pada tahun 2010 naik menjadi 21,78 persen, sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 22,96 persen dan tahun 2012 menjadi 23,11 persen. Kontribusi sektor ini didominasi oleh subsektor pertambangan dimana lebih dari 97 persen peranannya terhadap sektor ini sedangkan subsektor penggalian kurang dari 3 persen sehingga naik turunnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian bisa dikatakan karena pengaruh dari subsektor pertambangan khususnya komoditi yang berpengaruh terutama adalah batu bara.

3. Industri Pengolahan

Perekonomian Kabupaten Barito Utara tidak dapat dipisahkan dari peranan sektor industri Pengolahan, seperti halnya sektor pertambangan dan penggalian. Pada sektor ini hanya mencakup subsektor Industri non migas, karena di Barito Utara tidak terdapat Industri migas, sehingga kontribusi sektor industri pengolahan hanya dari subsektor industri non migas. Pada tahun 2007 kontribusinya sebesar 5,29 persen mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 5,01 persen dan pada tahun 2012 turun lagi menjadi 4,69 persen, penurunan kontribusi ini dimungkinkan karena laju pertumbuhan sektor lain di luar sektor industri dan pengolahan yang lebih besar.

4. Listrik, Gas Dan Air Bersih

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih merupakan sektor yang menunjang seluruh kegiatan ekonomi, dan sebagai infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi sektoral maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produksi Listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagiannya lagi oleh listrik Non PLN.

Air bersih diproduksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sedangkan produksi gas akan dihasilkan di Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara oleh PT.

Salamander Energy untuk dibeli dan digunakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Produksi gas dilakukan pada tahun 2013 sehingga peran sektor ini terhadap pembentukan PDRB Barito Utara cenderung statis/ tidak mengalami perubahan yang berarti sejak tahun 2007 peran sektor ini sebesar 0,72 persen. Pada tahun 2009 dan tahun 2010 peran sektor ini sebesar 0,67 persen dan 0,66 persen, dan pada tahun 2011 naik menjadi 0,68 persen. Dari sembilan sektor ekonomi yang ada, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memiliki kontribusi yang paling kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Utara dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

5. Bangunan/ Konstruksi

Akibat dari krisis perekonomian pada dekade terakhir ini berdampak pada sektor bangunan/ konstruksi. Pembangunan di bidang properti yang dipasarkan untuk memenuhi permintaan domestik yang semakin menurun. Namun demikian, dengan semakin membaiknya perekonomian Kabupaten Barito Utara, peran sektor ini pun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan PDRB-ADHK tercatat pada tahun 2012 sektor ini mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi yakni sebesar 6,57 persen tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 dimana laju pertumbuhan sebesar 10,53 persen.

Apabila dilihat perannya terhadap PDRB-ADHK maka sektor ini mengalami peningkatan peran dalam penyusunan PDRB. Pada tahun 2007 kontribusi sektor ini sebesar 6,98 persen, tahun 2008 (7,09 persen), tahun 2009 (7,15 persen), Tahun 2010 (6,97 persen), Tahun 2011 (7,22 persen) dan pada Tahun 2012 menjadi 7,36 persen.

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor ini berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang dan jasa. Laju pertumbuhan PDRB-ADHK sektor ini pada tahun 2012 sebesar 5,79 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 sebesar 7,45 persen, tetapi meningkat dibanding laju pertumbuhannya pada tahun 2010 (4,28 persen) tahun 2009 (3,67 persen) dan tahun 2008 (4,28 persen). Laju pertumbuhan sektor ini secara tidak langsung juga diakibatkan oleh sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan serta permintaan domestik yang menjadi komponen dalam pembentukan sektor perdagangan besar dan eceran yang juga mengalami kenaikan.

Jika dilihat dari peran sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB-ADHB Kabupaten Barito Utara cukup besar dalam penciptaan nilai tambah sektoral yakni sebesar 17,41 persen pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2011 sebesar 16,88 persen. Sektor ini merupakan sektor ketiga terbesar perannya setelah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian dalam perannya menyumbang PDRB-ADHK Kabupaten Barito Utara.

7. Pengangkutan Dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki peranan sebagai pendorong aktivitas setiap sektor ekonomi. Dalam era globalisasi peranan sektor ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa komunikasi. Subsektor transportasi memiliki peran sebagai jasa pelayanan bagi mobilitas perekonomian.

Laju pertumbuhan PDRB-ADHK sektor ini pada tahun 2010 sebesar 3,39 persen, pada tahun 2011 naik menjadi 5,11 persen dan pada tahun 2012 turun menjadi 3,65 persen. Naik dan turunnya laju pertumbuhan PDRB-ADHK sektor ini terkait dengan

naik dan turunnya komponen-komponen pendukungnya seperti: subsektor pengangkutan udara yang mengalami kenaikan sebesar 13,31 persen pada tahun 2012 dan juga adanya kenaikan laju pertumbuhan pada subsektor angkutan jalan darat, menjadi 5,92 persen pada tahun 2012. Sebagai sektor yang mendukung aktivitas sektor riil, sektor pengangkutan dan komunikasi berkaitan erat dengan sektor-sektor lain. Dinamisnya mobilisasi masyarakat dan aktivitas ekonomi mendorong laju pertumbuhan sektor ini.

Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB-ADHB Kabupaten Barito Utara tahun 2008 (8,83 persen), tahun 2009 (8,58 persen), tahun 2010 (8,21 persen) dan pada tahun 2011 (8,21 persen). Kontribusi terbesar diberikan oleh subsektor pengangkutan yang memberikan kontribusi lebih dari 94 persen terhadap sektor ini yakni sebesar 7,64 persen terhadap PDRB-ADHB Kabupaten Barito Utara Tahun 2012.

8. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan

Secara garis besar sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terbagi atas empat kelompok kegiatan utama yaitu : usaha perbankan, lembaga keuangan bukan bank, usaha persewaan bangunan dan jasa perusahaan. Sektor ini disebut sebagai sektor finansial, karena secara umum kegiatan utamanya berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan yang berupa penarikan dana dari masyarakat maupun pengalirannya (penyalurannya) kembali.

Laju pertumbuhan ekonomi sektor ini terhadap PDRB-ADHK pada tahun 2008 mencapai 20,63 persen dan pada tahun 2009 mengalami perlambatan menjadi 3,79 persen. Perlambatan laju sektor ini sedikit banyak dipengaruhi pertumbuhan subsektor bank yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,30 persen dengan share terhadap sektor ini sebesar 38 persen. Tahun 2011 laju sektor ini sebesar 8,49 persen melambat dari tahun sebelumnya, dimana laju sektor ini sebesar 19,75 persen.

Kontribusi sektor ini terhadap PDRB tahun 2010 sebesar 4,15 persen, pada tahun 2011 turun tipis menjadi sebesar 4,07 persen.

9. Jasa-Jasa

Pada klasifikasi ini sektor jasa-jasa digolongkan menjadi dua subsektor yaitu jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. Jasa pemerintahan umum mencakup administrasi pemerintah dan pertahanan dan jasa pemerintahan lainnya seperti jasa pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan lainnya. Subsektor jasa swasta meliputi jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi, dan jasa perorangan dan rumah tangga. Sejalan dengan perkembangan sektor penghasil barang, sektor ini meningkat dan memiliki prospek yang cukup baik, terutama subsektor swasta menunjukkan perkembangan yang lebih baik.

Laju pertumbuhan ekonomi (PDRB-ADHK) pada sektor ini dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan sektor ini sebesar pada tahun 2008 (7,19 persen), 2009 (4,92 persen), 2010 (5,19 persen), pada tahun 2011 naik menjadi sebesar 7,06 persen dan pada tahun 2012 sebesar 7,56 persen. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barito Utara dari tahun 2009-2012 cenderung meningkat. Kontribusi terbesar sektor jasa-jasa pada tahun 2012 diberikan oleh subsektor jasa pemerintahan umum yakni sebesar 7,44 persen atau lebih dari 85 persen terhadap penyusunan sektor ini, begitu pula pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada subsektor jasa swasta pada tahun 2012 kontribusinya hanya sebesar 6,37 persen.

g. Gambaran Singkat Sektor

1. PertanianTanaman pangan

Pada tahun 2010 dan tahun 2011, perbandingan antara produksi dan luas panen (produktivitas) tanaman bahan makanan terutama untuk jenis padi sawah dan padi ladang mengalami kenaikan. Dengan produksi 24.664 ton dan luas panen 11.083 ha pada 2011, pada tahun 2011 produktivitasnya naik menjadi 2,14 ton/ha naik dari produktivitasnya 2,27 ton/ha pada tahun 2010.

2. Perkebunan dan Kehutanan

Luas areal tanaman perkebunan besar negara, perkebunan swasta dan perkebunan rakyat tahun 2011 sama dengan tahun 2010. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral terutama dalam penanaman modal di bidang perkebunan, jenis tanaman perkebunan kelapa sawit luas arealnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan di bidang kehutanan, makin berkurangnya kawasan hutan di Kabupaten Barito Utara tercermin dengan menurunnya hasil produksi kayu bundar dan kayu olahan dari tahun ke tahun.

3. Peternakan dan Perikanan

Pada sektor peternakan dan perikanan, populasi ternak besar sampai dengan tahun 2011 mencapai 2.140 ekor sedangkan untuk jenis ternak kecil peningkatan populasi tertinggi adalah ternak babi yaitu mencapai 19.426 ekor. Selanjutnya jenis unggas, ayam buras menempati populasi terbanyak yang dikembangkan masyarakat. Pada sektor pembangunan perikanan, capaian produksi tahun 2011 mencapai 3.321 ton terdiri dari hasil penangkapan perairan umum sebesar 1.044 ton dan produksi budidaya sebesar 2.276,5 ton.

4. Pertambangan dan Penggalian

Pada sektor pertambangan perkembangan usaha pertambangan dan penggalian dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup berarti baik dalam bentuk perijinan yang dikeluarkan dan juga produksi terutama untuk tambang batubara. Pada subsektor ini terjadi kenaikan yang sangat berarti bagi perekonomian Barito Utara. Sektor ini telah berkembang dengan signifikan sehingga nampaknya sangat potensial menjadi sumber penggerak perekonomian daerah pada masa-masa mendatang. Tercatat bahwa pada sektor pertambangan dan penggalian, perkembangan izin usaha pertambangan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2013

terjadi perubahan berarti yaitu kenaikan jumlah untuk jenis kontrak karya dan jenis kuasa pertambangan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang terdiri atas tahap penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi atau operasi produksi.

Tabel 2.11. Jumlah dan Status Ijin Usaha Pertambangan Pertambangan (IUP) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2013.

Tahun	Jumlah IUP		
	Eksplorasi	Eksploitasi	Jumlah
2009	148	51	199
2010	150	49	199
2011	138	60	198
2012	137	61	198
2013	144	87	231

Sumber: Distamben Kabupaten Barito Utara, 2013.

5. Listrik dan Air Minum

Tinggi rendah pemakaian listrik dan air minum (air bersih) oleh masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adanya peningkatan yaitu banyaknya listrik PLN yang terjual dan banyaknya air bersih yang disalurkan. Nampaknya sektor ini terus berkembang dengan semakin banyaknya rumah tangga yang dapat menikmati listrik dan air bersih dari tahun ketahun.

6. Industri, Perdagangan dan Koperasi Industri

Keadaan Industri di Kabupaten Barito Utara tergambar dari jumlah perusahaan industri dan penyerapannya terhadap tenaga kerja. Pada umumnya industri di Kabupaten Barito Utara meliputi industri pertanian dan kehutanan serta industri non pertanian dan kehutanan.

Jumlah perusahaan industri kecil di Kabupaten Barito Utara tahun 2010 sebanyak 382 perusahaan sedangkan pada tahun 2011 berkurang menjadi 340 perusahaan. Demikian pula untuk tenaga kerjanya, pada tahun 2010 terserap 1.384 orang kemudian naik menjadi 1.354 orang pada tahun 2011. Di sisi lain, untuk industri kecil (formal dan non formal) jumlah unit

usaha kecil pertanian dan kehutanan naik dari 177 di tahun 2010 menjadi 181 ditahun 2011 dengan jumlah tenaga kerja 711 orang dan nilai investasi sebanyak 8,170 milyar rupiah.

7. Perdagangan

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Barito Utara jumlah perdagangan dengan klasifikasi Pedagang Besar, Menengah dan Kecil pada tahun 2011 sebanyak 200 perusahaan dan 2012 sebanyak 215 perusahaan. Jumlah pemasukan beras di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami kenaikan sebanyak 10% (dari 18.745 ton pada tahun 2010 menjadi 20.620 ton pada tahun 2011). Hal ini menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan bertambahnya penduduk di Kabupaten Barito Utara.

8. Koperasi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian berorientasi pada perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan tujuan mensejahterakan anggota khususnya. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2010 sebanyak 208 unit (16.658 anggota), tahun 2011 sebanyak 212 unit (16.863 anggota) dengan omzet Rp.16.075.627.532,- serta tahun 2012 sebanyak 228 unit (17.124 anggota) dengan omzet Rp.48.696.332.445,- meningkat 202,92 persen.

9. Pariwisata

Keadaan Objek wisata di Kabupaten Barito Utara secara umum terdiri dari tiga kelompok yaitu: (1) Obyek wisata alam yang meliputi: taman wisata, taman hutan rakyat, sungai, danau, dataran tinggi; (2) Obyek wisata budaya yang meliputi pengelolaan peninggalan sejarah, pusat-pusat kesenian dan budaya, taman rekreasi, tempat hiburan, taman satwa, festival-festival budaya, bentuk fisik perkampungan tradisional, upacara adat, kehidupan masyarakat tradisional; dan (3) Obyek wisata khusus yang

meliputi, wisata tirta, wisata petualangan alam, wisata goa, pusat budaya, dan pusat kerajinan. Objek wisata di Kabupaten Barito Utara memang masih pada tahap belum berkembang.

10. Produktifitas Tenaga Kerja

Kemajuan di bidang pembangunan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Tengah. Struktur ekonomi mengalami pergeseran yang relatif lambat dari ekonomi agraris tradisional menjadi perekonomian yang lebih maju dengan struktur lebih kokoh, yaitu perekonomian yang didukung industri makin kuat dan sektor jasa yang tangguh sehingga perekonomian relatif stabil. Belum berkembangnya sektor industri dan jasa menyebabkan ekonomi masih mengandalkan sektor primer. Struktur perekonomian yang disusun oleh sektor *tradeable* biasanya tidak begitu bermasalah dengan kondisi tenaga kerja.

Dengan karakteristik yang padat karya, sektor ini secara bertahap akan selalu membutuhkan supply tenaga kerja. Kontras dengan kondisi tersebut, struktur perekonomian yang disusun oleh sektor *non tradeable* biasanya akan cenderung rapuh dan tidak ramah terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor ini biasanya mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu yang harus dimiliki oleh calon tenaga kerjanya. Pada bagian lain, struktur perekonomian yang demikian biasanya didominasi oleh tenaga kerja informal.

Sektor *tradeable* terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan industri merupakan sektor-sektor padat karya, sedangkan sektor lainnya adalah sektor *non tradeable* yaitu sektor padat modal. Pertumbuhan sektor *tradeable* di Kabupaten Barito Utara cenderung meningkat, sedangkan sektor *non tradeable* cenderung melambat.

Beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang didukung laju pertumbuhan penduduk yang semakin kecil menimbulkan perubahan struktur lapangan kerja yang seimbang

dan produktif. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian, peningkatan produktivitas tenaga kerja masyarakat per sektor dan efisiensi guna mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang terus produktif menyebabkan tingkat produktifitas tenaga kerja perlu dihitung di masing-masing sektor.

Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Barito Utara, pada tahun 2010, tercatat bahwa 79,31 % berumur 15 tahun ke atas merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Sebagian besar (62,64%) penduduk berumur 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor lembaga keuangan yakni 0,51%. Relatif masih rendahnya tingkat pendidikan SDM yang bekerja, terlihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja itu sendiri.

Berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar tercermin adanya ketidakseimbangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Rata-rata setiap tahunnya tidak lebih dari 27,9% seluruh jumlah pencari kerja terdaftar yang mendapat pekerjaan, dan sisanya sekitar 72,1% masih belum mendapatkan kesempatan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Kependudukan

Pada pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Barito Utara. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan *eksisting* di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

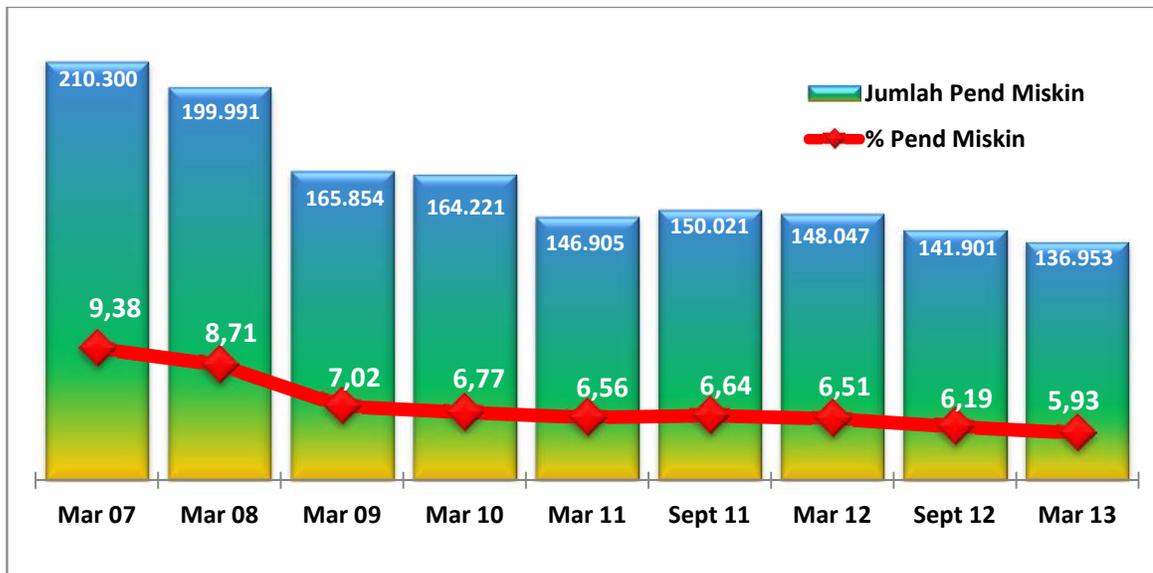
BPS Kabupaten Barito Utara mencatat bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Barito Utara per tahun selama 8 (delapan) tahun terakhir yakni dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sebesar 1,19%. Pertumbuhan penduduk ini apabila dibandingkan dengan Kalimantan Tengah cukup rendah karena dalam periode tahun 2000-2010 untuk seluruh Kalimantan Tengah laju pertumbuhan penduduk adalah mencapai 2,01%. Dengan pertumbuhan demikian sangat mungkin akan mempengaruhi perkembangan perekonomian.

b. Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan.

Pada bagian ini kita akan melihat perkembangan pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat Barito Utara yang meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan yang penyajiannya bersama-sama dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga kita mengetahui bagaimana posisi Kabupaten Barito Utara dibandingkan dengan Kabupaten lainnya. Data tersebut adalah bersumber dari publikasi yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNPK) yang meliputi:

1. Jumlah penduduk miskin
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Usia Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Riil Perkapita.
3. Bidang kesehatan yang terdiri dari Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran, Jumlah kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis, Penduduk dengan keluhan kesehatan, angka morbiditas, rata-rata lama sakit dan penduduk yang melakukan pengobatan.
4. Bidang Pendidikan yang terdiri dari Angka Partisipasi pendidikan (APP) dan Angka Putus Sekolah usia 7-15 tahun, dan;
5. Bidang ketenagakerjaan yang terdiri dari Angka Partisipasi Angkatan Kerja, Pengangguran Terbuka dan Pekerja di Sektor Informal.

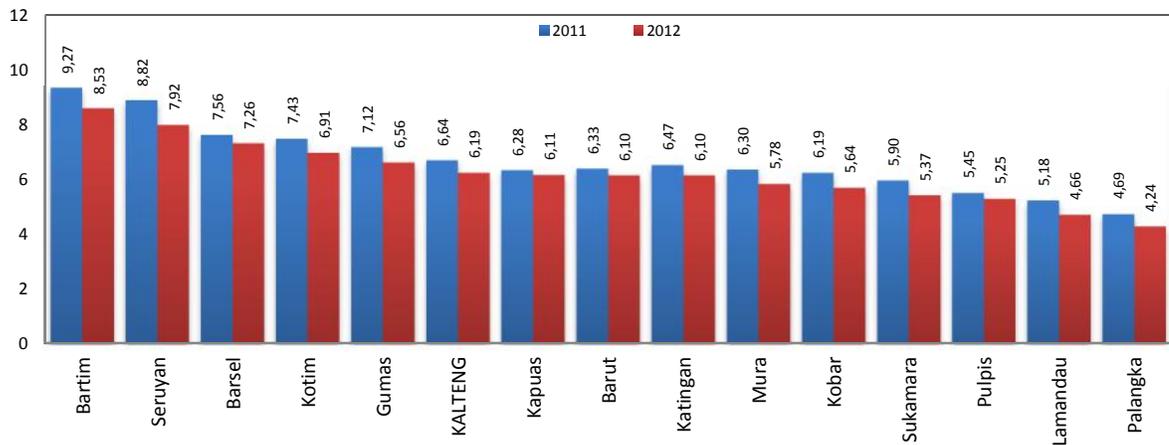
Grafik 2.1: Profil Penduduk Miskin di Kalimantan Tengah periode Maret 2007 sampai dengan Maret 2013.



Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2013.

Persentase kemiskinan Kabupaten Barito Utara menempati posisi ke delapan dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dengan besaran 6,33 persen pada tahun 2011 yang mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 6,10 persen.

Grafik 2.2: Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah periode 2011-2012.



Sumber: BPS Kalimantan Tengah, 2013.

Ditinjau dari sudut pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2008-2012, Kabupaten Barito Utara mencapai prestasi yang cukup membanggakan pada tahun 2012 mencapai angka 75,97

berada pada peringkat kedua untuk tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah Kota Palangka Raya yang mencapai 79,30.

Posisi ini berada di atas Kabupaten induk lainnya seperti Kotawaringin Barat 74,69 dan Kotawaringin Timur yang mencapai angka 75,14 sedangkan Kabupaten Kapuas yang hanya meraih Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,33. Suatu hal yang patut untuk terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tabel 2.13 disajikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.12. IPM Barito Utara dan Kabupaten Lainnya di Kalimantan Tengah Tahun 2008 – 2012.

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012
1	Kotawaringin Barat	72,86	73,3	73,79	74,19	74,69
2	Kotawaringin timur	73,36	73,97	74,34	74,74	75,14
3	Kapuas	72,89	73,22	73,6	74,00	74,33
4	Barito Selatan	72,96	73,29	73,6	74,01	74,34
5	BARITO UTARA	74,57	74,85	75,15	75,50	75,97
6	Sukamara	71,00	71,62	71,98	72,42	72,88
7	Lamandau	71,98	72,08	72,32	72,74	73,13
8	Seruyan	72,00	72,28	72,55	72,93	73,24
9	Katingan	72,06	72,33	72,65	73,32	73,67
10	Pulang Pisau	70,63	71,18	71,53	72,37	72,75
11	Gunung Mas	72,85	73,13	73,43	73,73	74,08
12	Barito Timur	72,17	72,72	73,00	73,33	73,75
13	Murung Raya	72,18	72,46	72,84	73,34	73,70
14	Kota Palangka Raya	77,90	78,02	78,30	78,78	79,30
15	KALTENG	73,88	74,36	74,64	75,06	75,46

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2013.

Adapun komponen yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran riil perkapita.

Tabel 2.13. Komponen IPM Barito Utara dan Kabupaten Lainnya di Kalimantan Tengah Tahun 2012

No.	Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Pengeluaran riil per kapita yang d disesuaikan (000)	IPM
1	Kotawaringin Barat	71,47	94,93	7,71	634,83	73,79
2	Kotawaringin Timur	69,56	98,72	8,03	641,69	74,34
3	Kapuas	70,78	97,19	7,32	634,51	73,60
4	Barito Selatan	68,28	98,97	8,43	636,69	73,60
5	Barito Utara	72,36	98,71	8,40	639,09	75,97
6	Sukamara	67,85	95,57	7,09	641,43	71,98
7	Lamandau	67,21	98,66	7,63	636,44	72,32
8	Seruyan	67,99	99,31	7,76	630,75	72,55
9	Katingan	67,50	99,47	7,99	632,80	72,65
10	Pulang Pisau	67,56	94,32	7,31	639,16	71,53
11	Gunung Mas	67,96	99,60	8,75	631,92	73,43
12	Barito Timur	67,85	97,98	8,54	633,90	73,00
13	Murung Raya	68,11	99,94	7,35	635,61	72,84
14	Palangka Raya	73,39	99,48	10,55	639,04	78,30
15	Kalimantan Tengah	71,20	97,78	8,03	636,47	74,64

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2011 data aslinya dari BPS Indonesia, 2013.

Dari data pada tabel tersebut diketahui bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Barito Utara mencapai 72,36 tahun, angka melek huruf 98,71%, rata-rata lama sekolah 8,40 tahun dan pengeluaran riil perkapita mencapai Rp. 639.090,-. Dengan angka-angka tersebut dapat diketahui pada bidang apa upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekaligus upaya penanggulangan kemiskinan mesti difokuskan.

Pada bidang kesehatan nampaknya Kabupaten Barito Utara telah cukup berhasil meningkatkan keterjangkauan pelayan kesehatan dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini terlihat dari angka kematian bayi yaitu mencapai hanya 5 jiwa dalam 1000 kelahiran, proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis sudah mencapai 88,88%. Sementara itu Kabupaten lainnya memiliki angka kematian bayi yang masih tinggi diatas 30 kecuali Kota Palangka Raya yang hanya 18 jiwa per seribu bayi yang dilahirkan. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan juga rendah hanya 56,53% lebih rendah dibanding Kabupaten Lainnya dan Provinsi

Kalimantan Tengah. Oleh karena itu pembangunan dalam sektor kesehatan khususnya dalam persalinan harus tetap menjadi perhatian utama untuk sektor kesehatan.

Tabel 2.14. Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lainnya di Kalimantan Tengah tahun 2012

Kabupaten/ Kota	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup (jiwa)	Kelahiran ditolong oleh Tenaga Medis (%)	Penduduk dengan keluhan kesehatan (%)	Angka Morbiditas (%)	Rata- rata Lama Sakit (%)	Penduduk yang Melakukan Pengobatan Sendiri (%)
Kotawaringin Barat	24	66,59	30,95	22,41	5,07	81,50
Kotawaringin Timur	31	59,39	24,24	12,39	4,99	68,80
Kapuas	26	65,37	21,79	14,48	4,42	76,40
Barito Selatan	35	53,75	34,26	15,73	4,89	79,79
Barito Utara	5	88,88	33,68	24,57	3,87	86,36
Sukamara	37	72,28	26,97	14,91	5,60	77,93
Lamandau	40	60,18	34,42	17,81	4,92	66,12
Seruyan	36	56,49	26,22	21,31	4,03	85,90
Katingan	38	65,46	36,94	21,43	4,38	82,50
Pulang Pisau	38	43,68	32,61	27,58	4,37	87,43
Gunung Mas	37	56,88	29,15	18,42	4,18	80,14
Barito Timur	37	84,76	33,34	13,46	4,77	69,65
Murung Raya	36	24,02	9,18	5,27	3,50	71,40
Kota Palangka Raya	18	96,91	31,37	15,25	3,80	73,78
Kalimantan Tengah	25	63,55	28,05	17,17	4,49	77,86

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2011 data aslinya dari BPS Indonesia, 2013.

Pada bidang pendidikan Kabupaten Barito Utara cukup berhasil Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun (SD dan SMP sederajat) hanya 1,06% berada lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 1,57%. Secara umum sesuai dengan Tabel 2.16 Angka partisipasi pendidikan di Barito Utara untuk sekolah dasar dan sekolah menengah atas berada di atas rata-rata provinsi kecuali angka partisipasi pendidikan disekolah menengah pertama yang berada dibawah rata rata provinsi.

Tabel 2.15 Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/ Kota Kalimantan Tengah Tahun 2012.

Kabupaten/ Kota	Angka Partisipasi Pendidikan						Angka Putus Sekolah Penduduk usia 7-15 tahun (%)
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)		
	APK	APM	APK	APM	APK	APM	
Kotawaringin Barat	112,23	97,52	76,32	66,10	66,95	45,03	1,76
Kotawaringin Timur	115,53	97,32	74,39	63,15	61,22	41,15	0,92
Kapuas	113,27	96,35	75,29	55,06	35,94	27,91	2,58
Barito Selatan	124,13	97,62	63,79	47,70	49,15	39,15	2,93
Barito Utara	110,76	95,03	79,62	59,35	49,60	36,75	1,06
Sukamara	117,48	94,49	69,47	52,61	50,84	37,13	1,46
Lamandau	119,88	97,05	75,98	63,62	57,90	47,65	1,14
Seruyan	113,84	96,90	62,27	54,69	41,90	35,51	0,76
Katingan	107,48	91,26	111,87	76,77	37,37	31,94	1,55
Pulang Pisau	115,77	98,12	74,38	62,63	59,93	44,05	2,68
Gunung Mas	114,59	98,26	87,75	72,36	53,50	42,15	1,15
Barito Timur	110,04	93,68	92,92	73,32	66,51	55,60	1,43
Murung Raya	117,65	99,21	48,90	41,90	25,01	20,17	0,61
Palangka Raya	110,15	89,24	93,82	62,23	82,15	54,00	0,81
Kalimantan Tengah	114,77	96,14	77,24	60,59	53,19	39,27	1,57

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2011 data aslinya dari BPS Indonesia, 2013

Posisi Barito Utara masih cukup baik dimana angka partisipasi tenaga kerja mencapai 79,31%, pengangguran terbuka hanya 2,30%, namun yang bekerja di sektor informal masih cukup tinggi yaitu 73,20%. Hal ini mengharuskan pemerintah dan masyarakat memperhatikan dengan seksama pengembangan peluang kerja formal yang diyakini akan lebih bisa memberikan kepastian mengenai penghasilan dan keberlanjutannya. Berikut dalam tabel 2.16 disajikan ketenagakerjaan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010.

Tabel 2.16 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lainnya di Kalimantan Tengah tahun 2010

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Pengangguran Terbuka (%)	Pekerja di Sektor Informal (%)
Kotawaringin Barat	65,41	4,46	40,79
Kotawaringin Timur	69,12	4,16	51,32
Kapuas	78,14	4,17	75,56

Barito Selatan	67,74	5,51	71,40
Barito Utara	79,31	2,30	73,20
Sukamara	67,67	5,32	48,44
Lamandau	69,60	2,95	62,45
Seruyan	66,80	4,46	45,44
Katingan	59,42	3,34	71,40
Pulang Pisau	68,11	2,11	81,63
Gunung Mas	71,93	4,45	67,50
Barito Timur	79,64	1,35	77,97
Murung Raya	75,51	1,03	81,61
Palangka Raya	62,51	8,48	37,89
Kalimantan Tengah	69,86	4,14	61,63

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2011 data aslinya dari BPS Indonesia, 2011 (Hasil Sakernas Agustus 2010)

2.2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Kondisi pelayanan dasar dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan. Sedangkan kondisi pelayanan penunjang dapat diketahui dari beberapa bidang yakni penanaman modal, KUKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan KS, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemuda dan olah raga. Uraian mengenai kondisi pelayanan umum di Kabupaten Barito Utara yang akan dibahas pada bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pelayanan umum yang telah dicapai sampai dengan saat ini.

Untuk *mereview* aspek pelayanan umum ini akan digunakan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar yang juga sangat penting untuk dipergunakan dalam rangka untuk menilai bagaimana melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan umum disamping juga bidang kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur dasar yang dianggap penting dalam hubungannya dengan tingkat kesejahteraan adalah infrastruktur energi, air bersih, dan sanitasi serta aksesibilitas untuk infrastruktur tersebut.

Kemampuan untuk mencapai indikator aksesibilitas adalah aksesibilitas rumah tangga dan desa terhadap energi listrik, sanitasi layak dan air minum yang layak. Tercatat bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Tabel 2.17, posisi Barito Utara untuk aksesibilitas rumah tangga terhadap listrik cukup tinggi yaitu 30.495 dari PLN dan 1.823 dari Non PLN dengan rasio elektrifikasi 61,6% namun Rasio Desa berlistrik cukup rendah yaitu 51,5%.

Tabel 2.17. Aksesibilitas Rumah Tangga Terhadap Energi Listrik dan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lainnya Tahun 2012

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Berlistrik		Rasio Elektrifikasi (%)	Rasio Desa Berlistrik (%)
	PLN	Non-PLN		
Kotawaringin Barat	41.514	357	44,5	56,4
Kotawaringin Timur	55.888	9.797	65,4	60,5
Kapuas	49.060	2.078	56,2	62,1
Barito Selatan	23.877	4.564	86,4	77,7
Barito Utara	30.495	1.823	61,6	51,5
Sukamara	5.545	1.476	43,2	78,1
Lamandau	5.539	2.307	34,3	55,4
Seruyan	8.585	2.470	33,2	43,6
Katingan	14.191	1.159	42,0	59,6
Pulang Pisau	21.311	2.369	62,8	84,7
Gunung Mas	7.689	1.987	44,4	48,8
Barito Timur	14.447	1.003	81,3	91,8
Murung Raya	10.385	12.327	84,8	84,7
Kota Palangka Raya	49.136	742	98,7	93,3

Sumber : Distamben Provinsi Kalimantan Tengah, Oktober 2012

Pelayanan dasar lainnya yang penting adalah aksesibilitas rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum. Diketahui bahwa di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2009 akses Rumah Tangga ke sanitasi yang layak adalah mencapai 37,91% dan akses ke sumber air minum layak adalah 41,7%. Aksesibilitas dan ketersediaan Air bersih dan sanitasi ini apabila dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah adalah cukup rendah sebagaimana disajikan dalam tabel 2.18 berikut ini.

Tabel 2.18. Aksesibilitas Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lainnya Terhadap Infrastruktur Dasar Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih (%)	Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi (%)
Kotawaringin Barat	55,4	17,46
Kotawaringin Timur	46,5	28,18
Kapuas	18,9	31,86
Barito Selatan	49,5	42,62
Barito Utara	41,7	37,91
Sukamara	60,6	36,56
Lamandau	36,5	41,98
Seruyan	26,7	20,07
Katingan	19,7	32,10
Pulang Pisau	18,1	27,28
Gunung Mas	32,2	29,89
Barito Timur	48,3	18,06
Murung Raya	12,4	77,02
Kota Palangka Raya	66,8	7,48
Kalimantan Tengah	38,11	29,22

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2011 data aslinya dari BPS Indonesia, 2010

Berdasarkan pada beberapa capaian dimaksud maka tantangan kedepan adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk terus meningkatkan pelayanan umum dengan terus meningkatkan keterjangkauan ketersediaan listrik terutama listrik PLN, sanitasi dan air minum yang bersih dan layak.

2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berikut disajikan keadaan terkini yang menyangkut kemampuan ekonomi daerah dan iklim berinvestasi. Sedangkan mengenai keadaan infrastruktur dapat dilihat pada uraian

mengenai Aspek Pelayanan Umum dan tentang sumber daya manusia pada Fokus Kesejahteraan Sosial.

2.2.5. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan Wilayah dievaluasi dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan, dan pendukung dan transportasi. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Barito Utara didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh Kabupaten Barito Utara dan untuk mensinkronkan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah Kecamatan agar pengembangannya tidak saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing daerah dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi.

Potensi pengembangan wilayah Barito Utara dengan memperhatikan beberapa aspek seperti luas dan letak wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, penggunaan lahan dan kondisi geografi, maka disusunlah beberapa kawasan strategis pengembangan wilayah Barito Utara yaitu :

1. Pembangunan Pusat Kawasan ekonomi strategis meliputi Kawasan cepat tumbuh di Koridor Jalan Nasional, yang berada di Koridor Kandui – Muara Teweh – Lahei dan Muara Teweh – Benangin – Lampeong; kawasan strategis perkotaan Kota Muara Teweh Baru; Kawasan ini diarahkan pengembangannya sebagai pusat perekonomian, perdagangan.
2. Pembangunan Kawasan budidaya Kehutanan Kawasan hutan produksi sebagaimana terdapat di Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Lahei, Teweh Timur, dan Kecamatan Gunung Purei, dengan luas 129.929,17 (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas) hektar. Sedangkan Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Lahei, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Teweh Timur dan Gunung Purei, dengan luas 326.461,69 (tiga ratus

dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu koma enam puluh sembilan) hektar.

3. Pembangunan kawasan Permukiman Perkotaan ditetapkan seluas 8.512,67 (delapan ribu lima ratus dua belas koma enam puluh tujuh) hektar, yang terdiri atas kawasan perkotaan di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan, pengembangan Ibukota Kabupaten, pengembangan Kota Muara Teweh Baru serta pengembangan Ibukota Kecamatan.

Kawasan Permukiman Perdesaan, ditetapkan seluas 43.998,35 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma tiga puluh lima) hektar yang terdiri atas pusat-pusat permukiman desa dan pengembangan permukiman pedesaan. Areal Transmigrasi sebagaimana ditetapkan seluas 31.757,33 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tiga puluh tiga) hektar, yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Teweh Tengah, Teweh Timur, Gunung Timang dan Montallat.

4. Pembangunan dan pembinaan Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana ditetapkan menyesuaikan dengan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dengan luas 367.645 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima) hektar dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) yang ada di Kabupaten Barito Utara, yaitu terdapat di 6 (enam) Kecamatan dengan luas 203.288 (dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan) hektar.

Kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi terdapat di Kecamatan Lahei pada Desa Karendan dan Desa Haragandang, yaitu seluas 24.378,40 (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh) hektar.

5. Pembangunan Kawasan untuk mendukung sistim jaringan kereta api. Sistem jaringan perkeretaapian yang akan dibangun pemerintah provinsi Kalimantan Tengah adalah Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang, melintasi

Puruk Cahu – Kecamatan Lahei – Kecamatan Teweh Baru – Kecamatan Gunung Timang – Bangkuang – Batanjung). Rencana Stasiun kereta api di kabupaten barito Utara terdapat di Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Gunung Timang.

6. Pembangunan Bandara Baru di desa Trinsing, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi serta mobilitas barang dan jasa serta meningkatnya laju investasi di bidang perkebunan dan pertambangan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara sedang membangun bandara baru secara bertahap yang nantinya dapat menampung operasi jenis pesawat berbadan lebar sehingga peningkatan jasa transportasi udara dapat diatasi dimasa yang akan datang.
7. Pembangunan Kawasan Agroindustri Pengembangan Agro industri dengan pusat industri diarahkan di sekitar Desa Butong Kecamatan Teweh Tengah, Desa Kamawen Kecamatan Montallat, Desa Mukut Kecamatan Lahei dan di sekitar Kota Kandui Kecamatan Gunung Timang, peruntukan ruang untuk pengembangan Agroindustri seluas 969,04 (sembilan ratus enam puluh sembilan koma nol empat) hektar.
8. Pembangunan Kawasan Pariwisata ditetapkan seluas 2.038,34 (dua ribu tiga puluh delapan koma tiga puluh empat) hektar, yang terdiri :
 - a. Kawasan Wisata Kota, terdiri atas Taman Rekreasi Remaja, Taman samping Pemda dan Bundaran Kota.
 - b. Kawasan Wisata Alam, terdiri atas Bumi Perkemahan Panglima Batur, Cagar Alam Pararawen, Dam Trahean, Dam Trinsing, Kawasan Gunung Lumut, Liang Idai, Air Terjun Inih, Air Terjun Jantur Doyam, Danau Butong, Jeram Pemantu, Balai Warik dan Janah Gemuntur.
 - c. Kawasan Cagar Budaya, terdiri atas bangkai Kapal Onrust, rumah betang Teluk Malewai, rumah betang Tambau, rumah betang Dambung Sirang dan Bekas Benteng Belanda.
 - d. wisata Ziarah, terdiri atas eks makam Pangeran Antasari, Makam Panglima Batur, Makam Mangkusari, Makam Anak Gusti Arsyad dan Makam Datuk.

9. Pembangunan Kawasan cagar alam terdiri atas Kawasan Cagar Alam Pararawen I dan II yang luasnya ditetapkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 85/Kpts-II/1999 Tanggal 25 Pebruari 1999 yaitu 5.885 (lima ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar.
10. Pembangunan Kawasan Pertanian.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan (DI & DR) ditetapkan seluas 8.538,28 (delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan koma dua puluh delapan) hektar yang tersebar secara parsial di seluruh kecamatan. Sebagian besar kawasan pertanian tanaman pangan berada di Kecamatan Gunung Timang dan Montallat.

Kawasan pertanian lahan kering (padi ladang dan palawija) dialokasikan pada kawasan budidaya lainnya. Pengembangan sentra pertanian lahan kering diarahkan di Kecamatan Gunung Purei, Teweh Timur dan Kecamatan Lahei.

Pencadangan lahan untuk pengembangan pertanian dialokasikan di Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Gunung Timang, dan Kecamatan Montallat, dengan luas 1.872,23 (seribu delapan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh tiga) hektar.

Kawasan perkebunan dan hortikultura ditetapkan seluas 69.183,28 (enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan) hektar, yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Lahei, Teweh Tengah, Gunung Timang dan Montallat. Komoditi perkebunan unggulan yang dikembangkan meliputi kelapa sawit, karet, kopi dan komoditi potensial lainnya. Untuk pengembangan komoditi perkebunan dan hortikultura ini diarahkan dengan konsep Agropolitan.

Adapun Pembangunan potensi Kawasan Perikanan Kawasan Budidaya Perikanan ditetapkan 2 (dua) kelurahan di wilayah Kecamatan Teweh Tengah dan di Ibukota Kecamatan Lahei serta 4 (empat) desa di Kecamatan Teweh Selatan menjadi kawasan terintegrasi untuk

seluruh kegiatan perikanan atau minapolitan. Adapun kawasan yang ditetapkan sebagai minapolitan itu meliputi;

- Kelurahan Melayu dan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah;
- Muara Lahei, Ibukota Kecamatan Lahei;
- Desa Butong, Kecamatan Teweh Selatan;
- Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Selatan;
- Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan; dan
- Desa Transbangdep, Kecamatan Teweh Selatan.

Kawasan Pengolahan Ikan, diarahkan pada kawasan budidaya lainnya di Kecamatan Teweh Tengah.

11. Pembangunan Kawasan peruntukan lainnya, diperuntukan sebagai areal pengembangan kegiatan budidaya yang akan dikembangkan dimasa yang akan datang dengan luas kawasan 200.585,95 Ha (dua ratus ribu lima ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh lima) hektar, yang tersebar diseluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara termasuk dalam kawasan peruntukan budidaya lainnya yang terdiri atas :

- a. Kodim 1013 / Muara Teweh di Kecamatan Teweh Tengah;
- b. Koramil yang terdapat di kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah kabupaten;
- c. Rencana pengembangan fasilitas pertahanan dan keamanan di sekitar Desa Sikuy Kecamatan Teweh Tengah.

2.2.6. Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu

tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Pembangunan di Kabupaten Barito Utara selain memperhatikan aspek potensi pengembangan wilayah, yang tidak kalah pentingnya adalah memperhitungkan aspek rawan bencana yang mungkin terjadi di wilayah Barito Utara. Beberapa potensi rawan bencana yang dominan terjadi antara lain Tanah longsor, banjir, kebakaran *hutan dan lahan*.

Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Bencana tanah longsor biasanya terjadi bersama dengan curah hujan yang sangat tinggi atau longsor juga terjadi pada saat terjadi gempa bumi.

*Daerah yang termasuk rawan longsor di Kabupaten Barito Utara meliputi lembah Sungai Barito, terletak di 4 kecamatan, yaitu Montallat, Teweh Tengah, Lahei, dan Kecamatan Lahei Barat. Secara umum penyebab utama banjir adalah perubahan dan eskalasi perilaku manusia dalam mengubah fungsi lingkungan. Di kawasan budidaya telah terjadi perubahan tata ruang secara massive, sehingga daya dukung lingkungan menurun drastis. Pesatnya pertumbuhan permukiman dan industri telah mengubah keseimbangan fungsi lingkungan, bahkan kawasan retensi banjir (*retarding basin*) yang disediakan alam berupa situ-situ telah juga dihabiskan.*

Daerah yang termasuk kawasan rawan banjir di Kabupaten Barito Utara terdapat di sepanjang koridor Sungai Barito dan Kawasan yang dilewati aliran anak Sungai Barito antara lain meliputi Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Montallat, Teweh Timur, Gunung Purei, Gunung Timang, Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan.

Langkah-langkah yang dilakukan selama ini untuk mengantisipasi terjadinya banjir antara lain : (1) normalisasi daerah aliran sungai (DAS) dan pembuatan siring; (2) rehabilitasi hutan; (3)

mendorong pemerintah pusat untuk moratorium pertambangan dll. Kebakaran hutan dan lahan terutama terjadi di kawasan-kawasan di mana hutan alam ditebang habis oleh perambah, pembalak liar, pembukaan ladang berpindah atau oleh perusahaan terkait dengan APL/APP/ kelapa sawit lebih dulu, kemudian pembakaran digunakan di kawasan pembalakan guna membersihkan lahan. Berdasarkan kondisi lapangan potensi kebakaran yang sedang terjadi *di Kab. Barito Utara*, adalah kebakaran lahan/padang rumput dan semak-semak yang terjadi pada saat musim kemarau dan kebakaran rumah yang terjadi di daerah padat penduduk dengan lingkungan perumahan yang tidak tertata dengan baik.

Daerah yang termasuk rawan kebakaran lahan/padang rumput dan rumah di wilayah Kabupaten Barito Utara tersebar di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Montallat, Teweh Timur, Gunung Purei, Gunung Timang, Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan.



BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah Kabupaten Barito Utara dikelola sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau

tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) antara pemerintah dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyalurkan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum APBD seperti: terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) Laporan realisasi anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan arus Kas dan (4) Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pendanaan daerah dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara 2013–2018 berisi gambaran kemampuan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Barito Utara untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Rencana pendanaan pada RPJMD ini menjadi dasar dalam penetapan kerangka penganggaran untuk pembangunan tahunan baik dalam Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Renja SKPD.

Dalam konteks visualisasi dan aktualisasi perubahan yang diinginkan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/ pengendalian keuangan daerah.
2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
5. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah dibagi menjadi empat pokok arah kebijakan yaitu Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah, Arah Pengelolaan Belanja Daerah, Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara

meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah/hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 2008-2012 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan DBH bukan pajak.

Berdasarkan data tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Utara dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 4,39.% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 94,82% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,79%.

Lebih jelasnya rata-rata pertumbuhan realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2009-2012 dapat dilihat pada tabel Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 - 2012 di bawah ini :

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009 s/d 2012
Kabupaten Barito Utara

Uraian	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.500.838.053,03	20.872.844.369,58	19.955.692.040,63	28.659.428.341,88	13,68
1. Pendapatan Pajak Daerah	1.334.099.791,00	1.302.707.754,00	2.584.709.208,00	3.185.381.518,00	39,77
2. Pendapatan Retribusi Daerah	6.182.803.821,00	8.999.185.259,60	8.346.310.919,03	13.399.928.898,00	32,95
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	2.687.299.022,53	2.198.092.868,55	2.824.037.213,96	3.371.549.337,88	9,89
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.296.635.418,50	8.372.858.487,43	6.200.634.699,64	8.702.568.588,00	(1,43)
PENDAPATAN TRANSFER	426.545.211.564,00	480.584.564.587,00	568.791.443.544,00	618.556.412.139,74	13,26
1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	415.091.679.324,00	454.863.777.288,00	502.906.987.366,00	567.580.548.870,00	11,00
2. Transfer Pemerintah Pusat-lainnya	0,00	9.682.000.000,00	48.353.868.800,00	25.818.023.000,00	117,60
3. Transfer Pemerintah Provinsi	11.453.532.240,00	16.038.787.299,00	17.530.587.378,00	25.157.840.269,74	30,95
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.708.125.000,00	-	3.564.396.260,00	5.118.820.815,30	(18,80)
6. Pendapatan Lainnya	5.708.125.000,00	-	3.564.396.260,00	5.118.820.815,30	(18,80)
PENDAPATAN DAERAH	452.754.174.617,03	501.457.408.956,58	592.311.531.844,63	652.334.661.296,92	13,00

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barito Utara, 2013.

Proporsi Pendapatan Transfer cenderung meningkat dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2009, proporsi Dana Perimbangan mencapai 94,21% dan pada tahun 2011 naik menjadi 96,03%. Namun pada tahun 2012 proporsinya mengalami penurunan menjadi 94,82% namun secara umum proporsi dana perimbangan dari tahun 2009-2012 menunjukkan kemandirian daerah. Kenaikan proporsi dana perimbangan diikuti dengan peningkatan proporsi PAD. Selama tahun 2009-2012, pergeseran proporsi PAD hanya berkisar 4,11%. Proporsi PAD pada tahun 2009 adalah sebesar 4,53% dan pada tahun 2012 menjadi 4,39%. Pergeseran proporsi pendapatan yang signifikan bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pada tahun 2009, proporsinya hanya sebesar 1,26% dan pada tahun 2012 mencapai 0,78%.

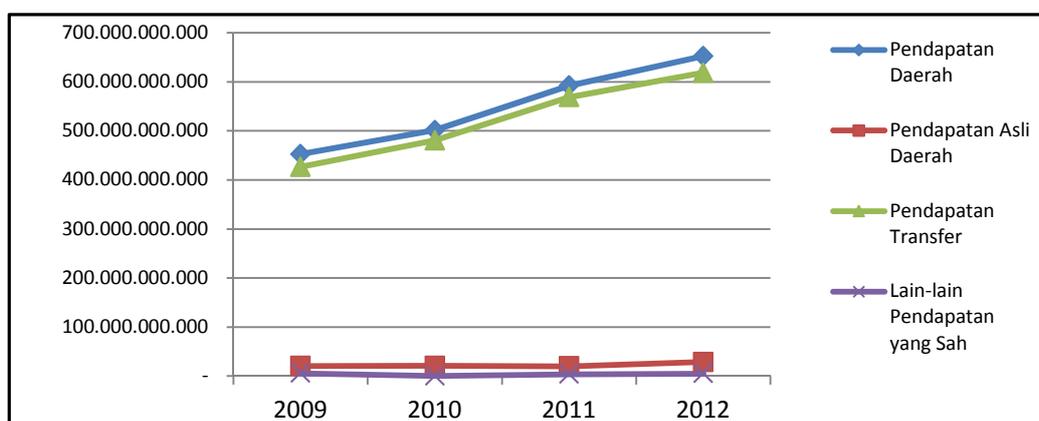
Dari analisis di atas menunjukkan bahwa struktur pendapatan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Berdasarkan hal tersebut diatas pengelolaan pendapatan daerah tahun 2013-2018 perlu dilakukan optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan PAD dilakukan dengan peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan / penagihan pajak. Ekstensifikasi, upaya penambahan jenis pajak dan retribusi belum dapat dilaksanakan karena potensi untuk itu belum ada, sedangkan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan adalah mengungkap obyek dan wajib pajak

yang belum terdata dan juga telah dilakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan dengan melakukan pendekatan dan pemetaan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah sehingga potensi PAD dapat diketahui, baik secara kuantitatif maupun kualitatif .

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan;
- b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya paratur dibidang pendapatan melalui bintek secara bertahap;
- d. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran;
- e. Peningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
- f. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.



Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2012

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan (**posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana**) pada tanggal tertentu.

Aset Adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang. Aset dapat dikelompokkan menjadi: Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

Aset Lancar Adalah aset yang terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang Contoh: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Kas dan setara Kas. Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang yang mempunyai karakteristik: Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan berisiko rendah. Contoh: Deposito berjangka waktu 3-12 bulan, Pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dikelompokkan menjadi: Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya.

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.

Aset Non Lancar Adalah aset yang terdiri dari: Investasi jangka panjang, Asset tetap, Dana cadangan dan asset lainnya.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya yaitu Investasi non permanen dan Investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan Contohnya Investasi dalam bentuk dana bergulir Obligasi atau surat utang, Penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Investasi Tetap adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan Contoh: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara, atau badan hukum lainnya. Dan Investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

a) Ekuitas Dana Lancar; b) Ekuitas Dana Investasi; dan c) Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan serta Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset

tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya dan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang. Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Utara disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2012

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	62,07
1.1.1.	Kas	74,51
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	(33,33)
1.1.3.	Piutang	1.619,88
1.1.4.	Piutang Lain-lain	57,07
1.1.5.	Persediaan	102,97
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	15,94
1.2.1.	Investasi Non Permanen	-
1.2.2.	Investasi Permanen	15,94
1.3.	ASET TETAP	8,54
1.3.1.	Tanah	(0,26)
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	9,99
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	7,99
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	10,15
1.3.5.	Aset tetap lainnya	6,69
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.122,79
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-
1.4.	DANA CADANGAN	1.161,09
1.4.1.	Dana Cadangan	1.161,09
1.5.	ASET LAINNYA	469,49
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	361,35
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(33,33)
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
1.5.4.	Aset Tidak Berwujud	-
1.5.5.	Aset Lain-lain	-
JUMLAH ASET		12,31
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.051,60
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(19,13)
2.1.2.	Utang Bunga	-
2.1.3.	Utang Pajak	-
2.1.4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-
2.1.5.	Pendapatan Diterima Dimuka	-
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	32,83
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	-
2.2.2.	Utang Luar Negeri	-
JUMLAH KEWAJIBAN		1.051,60

3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	70,19
3.1.1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	74,51
3.1.2.	Cadangan untuk Piutang	-
3.1.3.	Cadangan untuk Persediaan	136,65
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	102,97
3.1.5.	Pendapatan yang Ditangguhkan	-
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	9,23
3.2.1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	15,94
3.2.2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	8,57
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	1.554,25
3.2.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	-
3.3.	EKUITAS DANA CADANGAN	-
3.3.1.	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-
JUMLAH EKUITAS DANA		12,27
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		12,28

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barito Utara, 2013.

Rata-rata pertumbuhan neraca pemerintah kabupaten barito utara dari kurun waktu tahun 2009-2012 meliputi jumlah ekuitas dana sebesar 12,27% dan jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar 12,28.

Pada sisi aktiva, nilai aset terdiri dari aset lancar rata-rata pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 62,7%, Rata-rata pertumbuhan Investasi Jangka Panjang tahun 2012 sebesar 15,94%. dan pertumbuhan Aset Tetap tahun 2012 sebesar 8,54%.

Pada sisi Pasiva terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dengan rata-rata pertumbuhan sebagai berikut kewajiban jangka pendek sebesar 1051,60% dan Kewajiban Jangka Panjang nilai 0%.

Rata-rata pertumbuhan ekuitas dana sebagai berikut: Ekuitas Dana Lancar sebesar 70,19 % dan Ekuitas dana Investasi tahun sebesar 9,23. Adapun analisis rasio keuangan Kabupaten Barito Utara tahun 2009-2011 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Barito Utara 2009-2011

No.	Uraian	2009	2010	2011
1.	Rasio Lancar (current ratio)	2496,16	10365,60	522,17
2.	Rasio quick (quick ratio)	2469,70	10178,09	512,27
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	-	-	-
4.	Rasio hutang terhadap modal	-	-	-
5.	Rata-rata umur piutang	-	-	-
6.	Rasio. (lainnya)	-	-	-

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barito Utara, 2013

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara selama tahun 2009-2012 menunjukkan proporsi pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur atau belanja pegawai mengalami turun naik. Pada tahun 2009, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran hanya mencapai 43,79%, meningkat menjadi 54,03% pada tahun 2010, lalu turun menjadi 47,60% pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 50,13%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa APBD Kabupaten Barito Utara memberikan pelayanan yang optimal bagi publik karena sebagian besar APBD Kabupaten Barito Utara digunakan untuk belanja langsung atau belanja publik.

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2012

No.	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x 100%
1.	2009	223.611.962.757,00	510.611.517.636,00	43,79
2.	2010	247.804.047.765,69	458.608.022.348,69	54,03
3.	2011	256.788.314.994,00	539.484.000.075,00	47,60
4.	2012	295.228.694.387,00	588.955.279.799,00	50,13

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barito Utara

Dalam penyusunan APBD tahun sebelumnya terjadi perubahan yang signifikan baik menyangkut prosedur penyusunan anggaran maupun pelaksanaannya hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan dari Undang- undang/Peraturan yang berkenaan dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pada komponen belanja daerah, regulasi peraturan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat menunjukkan perubahan sistem kearah yang lebih baik, dengan penggunaan mekanisme perencanaan mulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD sampai Renja SKPD penganggaran sampai evaluasi pengendalian. Pada kenyatannya sampai saat ini kondisi keuangan belum mampu menutupi berbagai kebutuhan pembangunan sesuai yang direncanakan oleh SKPD sehingga obyektifitas seluruh SKPD dalam memilih prioritas kegiatan sangat diperlukan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat 2 berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan.

Selama kurun waktu 2009-2012, secara riil APBD Kabupaten Barito Utara mengalami tiga kali surplus anggaran dan sekali defisit anggaran. Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2009-2013, APBD Kabupaten Barito Utara mengalami defisit anggaran mencapai Rp. 57.857.343.018,97,-. Kemudian pada tahun 2010 mengalami surplus anggaran sebesar Rp. 42.849.386.607,89,-. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi Rp. 52.827.531.769,63. Dan pada tahun 2012 kembali mengalami surplus anggaran sebesar Rp. 57.013.381.497,92,-.

Tabel 3.5.
Defisit dan Surplus Riil APBD Kabupaten Barito Utara 2009-2012

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	452.754.174.617,03	501.457.408.956,58	592.311.531.844,63	652.334.661.296,92
	Dikurangi realisasi ;				
2.	Belanja Daerah	509.563.089.896,00	457.559.594.608,69	533.118.000.075,00	588.955.279.799,00
3.	Pengeluaran pembiayaan daerah	1.048.427.740,00	1.048.427.740,00	6.366.000.000,00	6.366.000.000,00
	Surplus (defisit) riil	(57.857.343.018,97)	42.849.386.607,89	52.827.531.769,63	57.013.381.497,92

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barito Utara

Pada Tabel 3.6 dana cadangan dianggarkan pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 pencairan dana cadangan pada tahun 2011 dan tahun 2012 tidak direalisasikan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 memang tidak ada. Penerimaan pinjaman daerah tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 memang tidak ada realisasi.

Tabel 3.6. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Utara 2009-2012

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya		85.913.941,878	52.827.532,00	195.635.087,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	5.000.000.000,00	-	-
6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barito Utara

Tabel 3.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Barito Utara

No	Uraian	2010		2011		2012	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	85.913.941,878	18,7	52.827.532,00	9,90	195.635.087,00	33,2
2.	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-
3.	Pelampauan penerimaan dana	-	-	-	-	-	-

4.	Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	--	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Barito Utara

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar. Di Kabupaten Barito Utara belanja pelayanan dasar termuat dalam belanja yang di klasifikasikan berdasarkan urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu belanja prioritas juga dialokasikan untuk bantuan sosial dan hibah.

Pertumbuhan belanja periodik prioritas utama untuk urusan wajib di Kabupaten Barito Utara yaitu berkisar 3,41% per tahun, dan urusan pilihan hanya 0,13% per tahun. Porsi anggaran Belanja periodik yang sangat besar terkonsentrasi pada urusan pendidikan, urusan kesehatan dan urusan pekerjaan umum, dengan rata-rata pertumbuhan untuk urusan pendidikan 7,96% per tahun, urusan kesehatan berkisar 7,71% per tahun dan urusan pekerjaan umum dengan rata-rata pertumbuhan 6,95% per tahun. (Tabel 3.8).

Tabel 3.8 Belanja Prioritas Utama untuk Belanja Pelayanan Dasar
Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Urusan 2009-2011

Uraian	2009			2010			2011			Pertumbuhan (%/tahun)
	Realisasi	Capaian (%)	Struktur (%)	Realisasi	Capaian (%)	Struktur (%)	Realisasi	Capaian (%)	Struktur (%)	
I. URUSAN WAJIB	457,301,574,647.00	91.69	89.61	414,558,863,555.69	57.37	90.45	481,578,853,816.00	81.59	90.33	3.41
1.01. Urusan Wajib Pendidikan	139,783,360,276.00	102.91	27.39	153,437,204,202.90	94.78	33.48	162,875,316,032.00	83.53	30.55	7.96
1.02. Urusan Wajib Kesehatan	44,462,895,061.00	85.02	8.71	46,249,913,098.00	86.97	10.09	51,518,692,501.00	85.85	9.66	7.71
1.03. Urusan Wajib Pekerjaan Umum	93,596,749,086.00	94.99	18.34	67,829,218,904.00	94.24	14.80	95,925,926,379.00	80.29	17.99	6.95
1.04. Urusan Wajib Perumahan	-	0	0.00	612,549,700.00	99.47	0.13	29,953,800.00	3.95	0.01	2.45
1.05. Urusan Wajib Penataan Ruang	-	0	0.00	905,993,780.00	91.10	0.20	464,985,300.00	52.65	0.09	25.66
1.06. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan	5,892,716,998.00	75.51	1.15	4,810,275,708.00	81.23	1.05	5,348,485,778.00	60.43	1.00	-3.59
1.07. Urusan Wajib Perhubungan	7,608,746,337.00	86.33	1.49	4,947,423,182.00	91.26	1.08	5,223,680,064.00	61.26	0.98	-14.70
1.08. Urusan Wajib Lingkungan Hidup	4,594,210,285.00	95.06	0.90	7,585,724,610.00	87.19	1.66	7,578,377,670.00	78.86	1.42	32.51
1.09. Urusan Wajib Pertanahan	-	0	0.00	696,434,000.00	28.73	0.15	937,006,750.00	36.33	0.18	67.27
1.10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	2,039,365,495.00	82.40	0.40	2,438,593,398.00	93.58	0.53	4,492,945,285.00	82.28	0.84	51.91
1.11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	0	0.00	401,406,000.00	100.	0.09	552,278,100.00	97.49	0.10	68.79
1.12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	3,825,319,823.00	74.79	0.75	3,874,611,680.00	86.80	0.85	4,612,302,166.00	86.97	0.87	10.16
1.13. Urusan Wajib Sosial	4,195,329,737.00	89.28	0.82	3,436,826,993.00	85.38	0.75	4,332,608,960.00	81.96	0.81	3.99
1.14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan	4,791,471,010.00	95.47	0.94	142,502,000.00	97.76	0.03	434,413,500.00	99.15	0.08	53.91
1.15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,233,801,556.00	86.89	0.44	2,083,481,209.00	93.88	0.45	2,589,960,699.00	73.47	0.49	8.79
1.16. Urusan Wajib Penanaman Modal	-	0	0.00	149,128,600.00	81.51	0.03	287,904,025.00	66.5	0.05	96.53

1.17. Urusan Wajib Kebudayaan	-	0	0.00	507,676,000.00	98.98	0.11	445,968,800.00	91.52	0.08	43.92
1.18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga	-	0	0.00	598,780,500.00	98.49	0.13	862,821,000.00	98.69	0.16	72.05
1.19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	7,303,448,482.00	97.87	1.43	5,521,576,270.00	94.44	1.20	6,233,425,241.00	80.02	1.17	-5.75
1.20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian	132,409,455,397.00	83.91	25.94	102,748,106,471.79	87.83	22.42	121,046,906,709.00	82.25	22.71	-2.30
1.21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan	-	0	0.00	1,384,403,700.00	90.04	0.30	1,570,029,351.00	91.67	0.29	56.70
1.22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	3,252,635,834.00	79.18	0.64	3,105,590,534.00	92.44	0.68	3,284,562,902.00	78.62	0.62	0.62
1.24. Urusan Wajib Kearsipan	1,312,069,270.00	93.89	0.26	1,095,649,915.00	80.78	0.24	924,562,304.00	70.27	0.17	-16.05
1.25. Urusan Wajib Komunikasi	-	0	0.00	-	0	0.00	5,740,500.00	19.14	0.00	50.00
II. URUSAN PILIHAN	53,045,615,249.00	83.00	10.39	43,781,916,153.00	72.83	9.55	51,539,146,259.00	78.84	9.67	0.13
2.01. Urusan Pilihan Pertanian	18,242,070,413.00	92.64	3.57	20,672,578,455.00	92.18	4.51	21,535,036,537.00	84.12	4.04	8.75
2.02. Urusan Pilihan Kehutanan	25,591,755,110.00	76.19	5.01	12,170,984,481.00	47.74	2.66	15,930,333,838.00	72.14	2.99	-10.78
2.03. Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	2,605,648,251.00	86.94	0.51	2,356,938,541.00	88.56	0.51	3,638,535,010.00	82.15	0.68	22.42
2.04. Urusan Pilihan Pariwisata	3,594,421,905.00	88.65	0.70	2,550,213,747.00	87.51	0.56	2,630,033,416.00	77.93	0.49	-12.96
2.05. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	-	0	0.00	2,664,631,579.00	98.78	0.58	2,762,568,255.00	73.84	0.52	51.84
2.06. Urusan Pilihan Perdagangan	-	0	0.00	820,774,500.00	97.14	0.18	1,792,286,750.00	87.03	0.34	109.18
2.07. Urusan Pilihan Perindustrian	3,011,719,570.00	84.13	0.59	2,431,393,350.00	82.03	0.53	3,134,055,453.00	79.16	0.59	4.82
2.08. Urusan Pilihan Ketransmigrasian	-	0	0.00	114,401,500.00	99.48	0.02	116,297,000.00	95.34	0.02	50.83
Belanja	510,347,189,896.00		100.00	458,343,694,608.69		100.00	533,118,000,075.00		100.00	

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Indonesia dan khususnya kabupaten/kota dengan penyumbang PDRB terbesar dari sektor pertambangan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan masih rendah. Hal ini disebabkan besaran dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Barito Utara merupakan penyumbang proporsi terbesar terhadap total pendapatan Barito Utara.

Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, sudah seharusnya strategi perolehan pendapatan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus ditambah dengan strategi perolehan pendapatan melalui optimalisasi perolehan Dana Bagi Hasil. Adalah tidak mungkin bagi sebuah daerah penghasil pertambangan untuk memiliki angka kemandirian PAD yang tinggi, hal ini bukan hanya dialami oleh Kabupaten Barito Utara saja, tetapi sudah umum terjadi di kabupaten/kota lain di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, yaitu antara lain :

- Peraturan Perundang-Undangan
- Sumber Daya Manusia
- Faktor Geografis
- Adanya kebijakan Pemerintah untuk mengurangi Subsidi BBM yang secara langsung mempengaruhi pola Konsumsi Masyarakat dan Perusahaan yang menjadi obyek Pajak dan Retribusi Daerah.

Kebijakan Umum

Kondisi perekonomian Kabupaten Barito Utara menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun tetapi dengan magnitud yang landai. pada Tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,53 %, tahun 2009 tercatat sebesar 5,57 %, sedangkan tahun 2010 pertumbuhannya mencapai 5,8 % dan Tahun 2011 ekonomi tumbuh sebesar 6,35%.

Laju pertumbuhan ekonomi ini di pengaruhi oleh peran sektor Pertanian,

pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut diperkirakan perkembangan ekonomi di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 akan mengalami peningkatan. Peningkatan perekonomian daerah tersebut akhirnya membuat multiplier effect positif seperti terjadi peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan investasi.

Dalam rangka memenuhi pendanaan untuk pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, Pemerintahan Kabupaten Barito Utara akan terus menggali semua potensi dan sumber-sumber Pendapatan untuk dikembangkan pada tahun 2013 dan tahun-tahun yang akan akan datang, sesuai dengan undang undang Nomor 34 Tahun 2000 pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sehingga pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan.

Kebijakan Operasional

Guna mengoptimalkan Penerimaan Keuangan dan dalam rangka menjamin likuiditas pendanaan kegiatan Pembangunan dan Pelayanan kepada Masyarakat yang nantinya akan dipergunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara maka :

- Menghindari Perhitungan realisasi Pendapatan yang terlalu Optimistis.
- Penyediaan Payung hukum yang lebih memadai dalam pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Mengoptimalkan kinerja Unit Kerja Penghasil Pendapatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah.
- Rasionalisasi target sumber-sumber pendapatan dengan kemungkinan pencapaian yang dapat dipertanggungjawabkan
- Peningkatan Bimbingan dan Pengawasan terhadap kinerja Aparat dan Satuan kerja Pengelola Pendapatan Daerah.

- Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan PAD serta pemberian biaya pemungutan pajak daerah secara lebih proporsional dan berkeadilan
- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan melalui Peningkatan Kesadaran membayar kewajiban sebagai wujud nyata kepedulian terhadap Pembangunan Daerah.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah berusaha merealisasikan penerimaan daerah yang sudah ditargetkan dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah. Adapun upaya yang sudah ditempuh oleh pemerintah daerah dalam hal kegiatan intensifikasi penerimaan yaitu :

1. Melakukan revisi dasar hukum penerimaan atau menyesuaikan tarif pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
2. Pendataan wajib pajak dan retribusi, sosialisasi dan penagihan;
3. Sedangkan pada kegiatan ekstensifikasi yaitu melakukan penelitian identifikasi potensi penerimaan daerah yang belum digali; dan
4. Melakukan pertukaran informasi penerimaan daerah dengan daerah lain yang lebih maju.

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan di bidang anggaran pendapatan, strategi dalam bidang pendapatan lebih ditekankan pada kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan kebijakan pelayanan penerimaan pendapatan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi potensi pajak serta pendapatan lain-lain yang sah pada subjek pajak perusahaan-perusahaan yang mempunyai skala ekonomi tinggi di daerah. Optimalisasi meliputi peningkatan penerimaan pada objek pajak : a) Pajak Bahan Galian golongan C; b) Pajak Penerangan Jalan Umum; c) Jasa usaha pertambangan; d)Produksi Usaha Perkebunan.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pemungutan PAD terutama pada Unit Pendapatan yang ada dikecamatan serta pemberian biaya pemungutan pajak daerah secara lebih proporsional dan berkeadilan;

4. Melakukan peremajaan data (*updating data*) atas sumber-sumber pendapatan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, serta bagi hasil dari produksi.
5. Melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi dana-dana bagi hasil ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
6. Melakukan penjajagan dana-dana block grant dan specific grant yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendukung pendanaan atas pembangunan dan prasarana struktur dan infrastruktur yang diperlukan daerah berdasarkan skala prioritas.
7. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antar dinas-dinas penghasil pendapatan.
8. Peningkatan produk hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan.
9. Peningkatan sistem pengawasan pengelolaan pendapatan khususnya dalam pengelolaan surat-surat berharga yang digunakan dalam pemungutan pendapatan daerah.
10. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
11. Peningkatan sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan di bidang pendapatan.
12. Pembentukan tim evaluasi dan pembinaan aparat pengelola pendapatan.

Target Pendapatan

Target Pendapatan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13 % yang meliputi PAD, dana transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2014 s/d 2018

Uraian	Rata-rata pertumbuhan	Proyeksi Tahunan				
		2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan	13%	759.496.397.249,00	858.230.928.891,37	969.800.949.647,25	1.095.875.073.101,39	1.238.338.832.604,57
1. Pendapatan Asli Daerah	13%	35.000.000.000,00	39.550.000.000,00	44.691.500.000,00	50.501.395.000,00	57.066.576.350,00
2. Pendapatan Transfer	13%	680.045.062.894,00	768.450.921.070,22	868.349.540.809,35	981.234.981.114,56	1.108.795.528.659,46
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	13%	41.821.651.579,00	47.258.466.284,27	53.402.066.901,23	60.334.335.598,38	34.821.651.579,00
<i>Dikurangi :</i>						
Belanja	6%	787.646.227.657,00	890.040.237.252,41	1.005.745.468.095,22	1.136.492.378.947,60	1.284.236.388.210,79
1. Belanja Operasional	6%	567.409.059.741,00	641.172.237.507,33	724.524.628.383,28	818.712.830.073,11	925.145.497.982,61
2. Belanja Modal	6%	217.953.067.916,00	246.286.966.745,08	278.304.272.421,94	314.483.827.836,79	355.366.725.455,58
3. Belanja Tidak Terduga	6%	1.500.000.000,00	1.695.000.000,00	1.915.350.000,00	2.164.345.500,00	2.445.710.415,00
4. Transfer	6%	784.100.000,00	886.033.000,00	1.001.217.290,00	1.131.375.537,70	1.278.454.357,60
Surplus (defisit)		(30.779.513.184,00)	(34.780.849.897,92)	(39.302.360.384,65)	(44.411.667.234,65)	(50.185.183.975,16)

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara

Perkembangan Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2014 sampai dengan awal tahun 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dapat di capai dengan upaya dari pada pemerintah daerah dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada secara optimal melalui dinas terkait.

Perkembangan proyeksi penerimaan APBD Kabupaten Barito Utara selama kurun waktu 4 (empat) tahun periode 2013-2018 diproyeksi meningkat dengan angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 total penerimaan keseluruhan terealisasi sebesar Rp. **759.496.397.249,00,-** (*Tujuh ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh enan juta tigaratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Sedangkan proyeksi pada tahun 2018 sebesar Rp. **1.238.338.832.604,57,-** (*satu trilyun dua ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat dan lima puluh tujuh sen rupiah*).

Penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari 3 (tiga) bagian penerimaan diantaranya PAD, Bagian Perimbangan dan bagian lain-lain penerimaan yang sah, dengan rata rata pertumbuhannya diproyeksikan sebesar 13 %.

Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program pembangunan daerah. Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan perencanaan keuangan, dengan selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan. Penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa, berdasarkan pada patokan harga dasar yang telah ditetapkan dalam HSPK (harga satuan Pokok Kegiatan).

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Berdasarkan klasifikasi organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Sedangkan menurut klasifikasi fungsi terdiri dari : (a). Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan, dan (b). Untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.

Sementara berdasarkan urusan pemerintahan, diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan Kabupaten *Barito Utara*. Sedangkan menurut klasifikasi untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara, terdiri dari : (a). Pelayanan umum, (b). Ketertiban dan keamanan, (c). Ekonomi, (d). Lingkungan hidup. (e). Perumahan, (f). Kesehatan, (g). Pariwisata dan budaya, (h). Agama, (i). Pendidikan, (j). Perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran daerah, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan pengelolaan belanja daerah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap satuan kerja pemerintah daerah serta pemeliharaan aset daerah melalui pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dengan tetap mengedepankan orientasi pada keuntungan bagi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- c. Mengarahkan belanja bantuan sosial yang dapat langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin
- d. Mendukung koordinasi dan sinkronisasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui penyusunan dan perumusan kebijakan dalam penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Bukan Pajak termasuk Dana Reboisasi
- e. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan
- f. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain terkait dengan ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan manajemen keuangan daerah, pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah, serta pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan daerah.
- g. Melanjutkan langkah-langkah pemutakhiran data yang menyangkut perumusan kebijakan dana perimbangan.

Target dan Realisasi APBD

Komponen belanja APBD diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tak langsung. Belanja langsung dimaksudkan sebagai belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Adapun kelompok belanja ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan serta sulit untuk diukur dalam pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Jumlah Belanja Daerah Kabupaten *Barito Utara* yang dialokasikan dalam APBD tahun 2012 sebesar **Rp.732,931,879,591.36** setelah perubahan meningkat dari tahun 2011 Rp. **655,617,039,370.00** atau meningkat sebesar 10,55 %, secara rinci realisasi belanja periode tahun 2009 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009-2012

Uraian	2009			2010			2011			2012		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Belanja Operasi	377,123,828,741.00	339,522,571,724.00	90.029	403,238,941,471.00	357,522,391,160.69	88.66	468,535,374,489.00	391,440,143,978.00	83.545	561,514,350,694.80	432,832,924,300.00	77.08
- Belanja Pegawai	240,012,814,023.00	223,611,962,757.00	93.17	275,724,146,633.00	247,804,047,765.69	89.87	310,044,589,556.00	256,788,314,984.00	82.823	401,148,913,091.00	295,228,694,387.00	73.60
- Belanja Barang	87,967,896,930.00	73,073,458,893.00	83.07	87,951,485,574.00	72,731,206,675.00	82.69	119,620,707,628.00	97,865,261,261.00	81.813	118,252,128,191.00	96,758,165,643.00	81.82
- Belanja Subsidi	1,390,000,000.00	717,311,090.00	51.61	496,000,000.00	436,047,860.00	87.91	-	-	-	-	-	0.00
- Belanja Hibah	13,366,062,500.00	13,016,062,500.00	97.38	8,468,248,000.00	6,918,248,000.00	81.70	5,796,120,500.00	5,746,120,500.00	99.137	24,696,883,600.00	24,233,949,600.00	98.13
- Belanja Bantuan Sosial	17,517,494,000.00	15,357,333,400.00	87.67	14,274,500,000.00	13,311,885,000.00	93.26	17,250,992,000.00	15,439,908,849.00	89.502	630,000,000.00	200,000,000.00	31.75
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	16,869,561,288.00	13,746,443,084.00	81.49	16,324,561,264.00	16,320,955,860.00	99.98	15,822,964,805.00	15,600,538,384.00	98.594	16,786,425,812.00	16,412,114,670.00	97.77
2. Belanja Modal	183,760,866,682.00	169,747,018,172.00	92.374	111,121,080,790.00	99,818,992,448.00	89.83	184,114,064,881.00	140,395,961,987.00	76.255	168,117,708,896.56	155,079,530,499.00	92.24
- Belanja Tanah	13,679,902,000.00	11,069,157,600.00	80.92	1,712,440,000.00	562,824,000.00	32.87	2,387,105,000.00	827,822,000.00	34.679	2,814,900,000.00	1,026,800,000.00	36.48
- Belanja Peralatan dan Mesin	28,399,657,279.00	27,483,412,024.00	96.77	11,223,428,459.00	9,663,707,629.00	86.10	25,534,322,243.00	21,414,860,089.00	83.867	25,642,544,515.00	23,442,623,317.00	91.42
- Belanja Gedung dan Bangunan	60,124,694,488.00	54,996,445,473.00	91.47	33,529,480,796.00	28,891,932,174.00	86.17	39,966,158,807.00	26,058,429,071.00	65.201	56,522,572,408.56	52,245,094,063.00	92.43
- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	81,229,975,915.00	75,977,532,325.00	93.53	64,023,931,535.00	60,083,474,845.00	93.85	112,342,201,831.00	91,944,050,827.00	81.843	78,935,794,533.00	74,390,032,514.00	94.24
- Belanja Aset tetap lainnya	256,637,000.00	220,470,750.00	85.91	631,800,000.00	617,053,800.00	97.67	3,884,277,000.00	150,800,000.00	3.8823	4,201,897,440.00	3,974,980,605.00	94.60
3. Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	293,500,000.00	29.35	362,357,200.00	218,211,000.00	60.22	2,183,500,000.00	497,794,100.00	22.798	2,515,720,000.00	258,725,000.00	10.28
- Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	293,500,000.00	29.35	362,357,200.00	218,211,000.00	60.22	2,183,500,000.00	497,794,100.00	22.798	2,515,720,000.00	258,725,000.00	10.28
4. Transfer	784,100,000.00	784,100,000.00	100.00	784,100,000.00	784,100,000.00	100.00	784,100,000.00	784,100,000.00	100	784,100,000.00	784,100,000.00	100.00
- Bagi Hasil Retribusi	784,100,000.00	784,100,000.00	100.00	784,100,000.00	784,100,000.00	100.00	784,100,000.00	784,100,000.00	100	784,100,000.00	784,100,000.00	100.00
Belanja	562,668,795,423.00	510,347,189,896.00	90.70	515,506,479,461.00	458,343,694,608.69	88.91	655,617,039,370.00	533,118,000,075.00	81.32	732,931,879,591.36	588,955,279,799.00	80.36

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara

Untuk Tahun Anggaran 2013 APBD Kabupaten Barito Utara dianggarkan sebesar Rp.669.068.845.740, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Target Belanja APBD TA. 2013

No.	Uraian	Target
A	BELANJA DAERAH	669.068.845.740,00
1.	Belanja Operasi	1.706.000.000,00
	Belanja Pegawai	301.405.449.084,00
	Belanja Barang dan Jasa	130.778.908.905,50
	Belanja Bunga	-
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Hibah	35.778.702.200,00
	Belanja Bantuan Keuangan	21.933.305.880,00
2	Belanja Modal	175.682.379.670,50
	Tanah	
	- Peralatan dan Mesin	
	- Gedung dan Bangunan	
	- Jalan, irigasi dan jaringan	
	- Aset Tetap Lainnya	
	- Aset Lainnya	
3.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
4.	Transfer	784.100.000,00
	Bagi Hasil Ke Desa	784.100.000,00
	- Bagi Hasil Pajak	
	- Bagi Hasil Retribusi	
	- Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara

Terjadi peningkatan Jumlah Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.**563.778.037.828,00** sedangkan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.**669.068.845.740,00** atau meningkat sebesar 18,67%.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

3.3.3.1. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Barito Utara. Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 – 2018 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan sumber penerimaan lainnya.

Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikelompokkan ke dalam tiga komponen yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Kebijakan pendapatan Kabupaten Barito Utara diarahkan untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku, yang dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut :

1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2013, optimalisasi pendapatan akan dititikberatkan pada intensifikasi PAD. Hal ini sejalan dengan proses revisi UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang sedang dilaksanakan di tingkat pusat, yang akan mengatur *closed-list* jenis-jenis pajak dan retribusi sehingga tidak dimungkinkan lagi ekstensifikasi jenis-jenis pajak dan retribusi oleh daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

sehingga pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan. Tantangan peningkatan PAD melalui ekstensifikasi dengan dikeluarkannya undang-undang dan peraturan ini merupakan langkah strategis yang memerlukan perhatian dan sinergi yang maksimal dari setiap lini pemerintahan yang disebabkan kebijakan pengaturan pajak dan retribusi oleh pemerintah yang belum begitu memihak kepada daerah ditambah kesediaan membayar pajak daerah yang masih belum memuaskan.

- 2) **Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan, ekosistem dan kelestarian alam.**
- 3) **Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD.**
- 4) **Efektifitas dan efisiensi penggunaan PAD.**
- 5) **Menekan biaya pemungutan sumber PAD.**
- 6) **Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan daerah.**
- 7) **Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah** sebagai upaya untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh.
- 8) **Mempromosikan Kabupaten Barito Utara** dalam rangka menarik investor pada level lokal, regional maupun internasional.
- 9) **Memberikan kemudahan, fasilitas dan kesempatan investor yang akan menanam modalnya di Kabupaten Barito Utara.**
- 10) **Pengelolaan Belanja Daerah**
Arah pengelolaan belanja daerah 5 tahun mendatang difokuskan pada :
 - a. Peranan belanja daerah dapat memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Belanja daerah sebagai instrumen fiskal diharapkan memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha di berbagai sektor.

- c. Belanja daerah diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan madani.
- d. Belanja daerah lima tahun mendatang lebih ditekankan pada upaya menambah daya tarik investasi dengan cara mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor untuk menanam modal.
- e. Belanja daerah diarahkan untuk menambah dan atau memperbaiki infrastruktur jalan antara lain meningkatkan kualitas jalan raya, kualitas jalan yang menghubungkan daerah sekitarnya serta akses jalan ke pedesaan, jembatan, drainase, penerangan jalan/listrik, sarana pendidikan serta kesehatan dan sarana lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan dunia usaha serta terwujudnya infrastruktur yang memadai untuk menambah daya tarik investasi dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi.
- f. Belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana air bersih dan listrik.
- g. Belanja daerah diarahkan untuk penyediaan fasilitas umum (taman kota, water front city, jalur hijau, lapangan olah raga dll).
- h. Belanja daerah diarahkan untuk Rekayasa lingkungan dan Pengendalian lingkungan Kabupaten Barito utara sesuai aturan yang berlaku.
- i. *Mendukung sarana transportasi bandara baru Trinsing* Memfasilitasi penyediaan pasar, pertokoan serta memfasilitasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Barito Utara.
- j. Memberi bantuan modal usaha, teknologi, dan manajemen usaha serta memfasilitasi usaha kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan besar.

A. Pendapatan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk

mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2013 - 2018 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dimana perkiraan kenaikannya didasarkan atas komposisi dan pertumbuhan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008-2013. Berdasarkan analisa kecenderungan, maka pendapatan Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2013 hingga tahun 2018 dapat diprediksikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2014 s/d 2018

Uraian	Rata-rata pertumbuhan	Proyeksi Tahunan				
		2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan	13%	759.496.397.249,00	858.230.928.891,37	969.800.949.647,25	1.095.875.073.101,39	1.238.338.832.604,57
1. Pendapatan Asli Daerah	13%	35.000.000.000,00	39.550.000.000,00	44.691.500.000,00	50.501.395.000,00	57.066.576.350,00
2. Pendapatan Transfer	13%	680.045.062.894,00	768.450.921.070,22	868.349.540.809,35	981.234.981.114,56	1.108.795.528.659,46
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	13%	41.821.651.579,00	47.258.466.284,27	53.402.066.901,23	60.334.335.598,38	34.821.651.579,00
<i>Dikurangi :</i>						
Belanja	6%	787.646.227.657,00	890.040.237.252,41	1.005.745.468.095,22	1.136.492.378.947,60	1.284.236.388.210,79
1. Belanja Operasional	6%	567.409.059.741,00	641.172.237.507,33	724.524.628.383,28	818.712.830.073,11	925.145.497.982,61
2. Belanja Modal	6%	217.953.067.916,00	246.286.966.745,08	278.304.272.421,94	314.483.827.836,79	355.366.725.455,58
3. Belanja Tidak Terduga	6%	1.500.000.000,00	1.695.000.000,00	1.915.350.000,00	2.164.345.500,00	2.445.710.415,00
4. Transfer	6%	784.100.000,00	886.033.000,00	1.001.217.290,00	1.131.375.537,70	1.278.454.357,60
Surplus (defisit)		(30.779.513.184,00)	(34.780.849.897,92)	(39.302.360.384,65)	(44.411.667.234,65)	(50.185.183.975,16)

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara

Berdasarkan tabel diatas, komponen PAD yang berasal dari sektor Lain- lain PAD yang sah selama lima tahun kedepan diprediksi mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada komponen Dana Perimbangan, penerimaan yang cukup tinggi diprediksi berasal dari sektor Bagi Hasil Bukan Pajak. Peningkatan penerimaan ini berdasarkan asumsi bahwa harga minyak dunia diperkirakan tetap bertahan seperti dasar perhitungan tahun lalu.

Penerimaan pada sektor Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi diprediksi mengalami kenaikan karena adanya peningkatan

penerimaan dari bagi hasil Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Hal ini diasumsikan bahwa pengenaan pajak penjualan minyak selama ini hanya berlaku pada penjualan minyak non-subsidi kedepan akan berlaku pada seluruh penjualan minyak baik bersubsidi maupun non-subsidi. Sedangkan meningkatnya prediksi penerimaan dari Bantuan Keuangan Propinsi diasumsikan penerimaan propinsi yang bersumber dari Kabupaten *Barito utara* terus meningkat. Disamping itu dana hibah dari Propinsi Kalimantan tengah juga diasumsikan akan terjadi peningkatan untuk pembangunan infrastruktur dan utilitas perkotaan.

Walaupun prosentasenya kecil PAD juga dapat menjadi andalan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk lima tahun kedepan, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD yaitu melalui langkah-langkah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan menganut prinsip :

- a. Tidak memberatkan masyarakat, dan pengusaha terutama usaha kecil menengah;
- b. Tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam; dan
- c. Penerapan tarif progresif dan proporsional.

B. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2013–2018 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien yang memperhatikan fungsi dan prioritas kegiatan tahun 2013-2018.
2. Anggaran Daerah yang mengutamakan target kinerja th 2013-2018.
3. Anggaran Daerah bertumpu pada kepentingan publik.
4. Anggaran Daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*).
5. Anggaran Daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
6. Anggaran Daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun

pendapatan.

7. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
8. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*.

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

- a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
- b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018.

3.3.3.2. Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah diprioritaskan pada pembiayaan yang tidak memberatkan beban anggaran di tahun-tahun mendatang dan mempersulit likuiditas keuangan daerah. Oleh karena itu optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan transfer dari dana cadangan serta surplus penerimaan.

Disamping itu, kebijakan terhadap pemanfaatan pinjaman/obligasi di masa datang sudah perlu mendapat perhatian sebagai alternatif penerimaan pembiayaan untuk mengoptimalkan pembangunan sepanjang memberikan hasil maksimal bagi masyarakat dan tidak mempersulit kemampuan keuangan daerah.

Untuk itu perlu suatu kajian kearah tersebut dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Syarat pinjaman hendaknya dengan bunga lunak dan ada masa tenggang.
- b. Tujuan pinjaman, hendaknya mempunyai *multiplier effect* yang besar dan *cost recovery*.
- c. Sumber dana pinjaman dari pihak lain yang tidak mempunyai persyaratan politik.
- d. Tata cara pengesahan pinjaman tidak berbelit-belit, sehingga akan mengakibatkan biaya yang mahal/ kebocoran yang mengakibatkan kerugian bagi peminjam.
- e. Pengawasan yang efektif dan efisien.

Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Kabupaten Barito Utara pada penyusunan APBD adalah melalui kebijakan defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari Sisa Lebih Anggaran Tahun yang Lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil dengan pertimbangan :

- 1) Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi skala prioritas.
- 2) Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian Kabupaten Barito Utara dengan penambahan jumlah uang yang beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang masuknya investasi swasta.

A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan

pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) agar dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional.
- 2) Pemerintah daerah dalam rangka menutup defisit dapat melakukan pinjaman daerah berupa pinjaman jangka menengah/panjang proses dan prosedurnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Selain itu perlu diperhatikan bahwa:
 - a. Pinjaman daerah agar dilakukan secara selektif dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan memperhitungkan jangka waktu pengembalian pinjaman yang akan dilunasi dalam kurun waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah.
 - b. Terkait dengan suku bunga bank atas pinjaman dimaksud agar dilakukan negosiasi seksama dengan calon pemberi pinjaman dan memperhatikan tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasar maupun SBI kekinian, serta laju inflasi yang terjadi sehingga diperoleh tingkat suku bunga yang memadai, kompetitif dan tidak berpotensi membebani keuangan daerah.
 - c. Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir setelah selesai masa perguliran dana, dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Penganggaran dana bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan

daerah, jenis pemberian pinjaman daerah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan.

- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
 - a. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga (BPD Cabang Kalteng/Barito Utara, PDAM, BUMD)
 - b. Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud diatas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro kecil dan menengah.
- 3) Agar Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMD dapat berkompetisi tumbuh dan berkembang.
- 4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).
 - a. Dalam hal masih terdapat program dan kegiatan yang dibutuhkan, serta target atau sasaran yang belum terpenuhi, Pemerintah Daerah agar menghindari terjadinya dana yang menganggur (*Idle Money*), dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Tahun berjalan dalam APBD.
 - b. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan digunakan untuk menganggarkan sisa lebih antara pembiayaan netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran

pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

- c. Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan yang dianggarkan pada APBD Induk bersifat estimasi, berhubung jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SilPA) yang dicantumkan dalam APBD Induk juga masih bersifat estimasi.
- d. Dalam perubahan APBD sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menjadi nihil.

Dalam sistem pengelolaan penganggaran daerah, pembiayaan digunakan untuk menutupi selisih kurang antara pendapatan dan belanja, menampung selisih lebih antara pendapatan dan belanja, dan menampung penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali.

Khususnya berkenaan dengan pengeluaran daerah pada pembiayaan, beberapa item pengeluaran seperti penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan daerah dan pembentukan dana cadangan, harus terlebih dahulu didukung oleh studi komprehensif terhadap keputusan penanaman modal dan pencadangan pendanaan yang kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah.



B.AB IV
.ANALISIS PER.MAS.ALA.H.A.N D.A.N ISU STR.ATEGIS

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1 Permasalahan Bidang Pemerintahan

a. Opini Disclaimer

Pengelolaan aset daerah dan pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Barito Utara belum berjalan secara baik, tertib dan optimal. Nilai aset tetap belum dihitung berdasarkan hasil inventarisasi oleh Tim Inventarisasi dan belum didukung dengan penetapan Surat Keputusan Bupati Barito Utara sebagai dasar hukum telah dilakukannya koreksi dan penyesuaian atas Nilai Aset Tetap di Neraca Dokumen dan Catatan Akuntansi yang tersedia saat saat belum cukup memungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk meyakini Nilai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Didalam pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Barito Utara masih ditemukan adanya kelemahan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), kekurangpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, indikasi kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah didalam penilaian audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010, 2011 dan 2012 menolak memberikan opini (disclaimer).

b. Terdapatnya Kesenjangan Pembangunan antar Kecamatan dan Desa

Pemerataan pembangunan pada berbagai bidang di wilayah kabupaten Barito Utara masih belum optimal. Masih ada kesenjangan dan ketidakserasian pembangunan antar wilayah kecamatan dan desa, masih terdapat desa dan daerah yang tertinggal. Dengan demikian, Pemerintah Daerah perlu memadu serasikan pembangunan antar kecamatan melalui progran Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) yang memperhatikan potensi serta pemanfaatan ruang. sesuai yang diamanatkan oleh Permendagri No 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah terpadu

c. Belum Tuntasnya Penataan Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa

Kegiatan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) antara Kabupaten Barito Utara, Kapuas dan Barito Selatan mengalami hambatan karena merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah terhambat karena belum dicapai kesepakatan dalam negosiasi harga antara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dengan pemilik tanah. Disamping itu juga karena proses pengukuran tanah sering terhambat karena pemilik tanah belum memiliki surat menyurat sebagai bukti sah kepemilikan tanah.

Terkait perbatasan dengan kabupaten tetangga Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen penuh dalam penyelesaiannya dengan difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Penyelesaian tata batas ini sangat penting untuk penyelesaian Perda RTRWK yang saat ini masih di bahas DPRD. Selain itu dengan adanya ketetapan tata batas akan memudahkan koordinasi integrasi pembangunan dengan kabupaten tetangga. Sampai saat ini kabupaten Barito Utara merupakan salah satu kabupaten yang menandatangani komitmen kerjasama pembangunan antar wilayah yang meliputi 12 Kabupaten di tiga Provinsi yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.

d. Kesejahteraan Sosial.

Masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan. Diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang untuk peningkatan kehidupan beragama di Kabupaten Barito Utara. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten berencana membangun *Islamic Centre* di Kelurahan Jingah yang terdiri dari pusat peribadatan (Masjid) dan pusat pendidikan Islam serta dilengkapi dengan jembatan gantung yang menyeberangi sungai Barito.

e. Birokrasi penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Hal ini disebabkan masih relatif rendahnya disiplin, dedikasi kerja dan kualitas SDM aparatur pelaksana. Disamping itu belum sepenuhnya berfungsi secara optimal mekanisme, prosedur dan pola kerja dalam penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan pelayanan prima yang mudah, aman, cepat, efisien, ekonomis, adil, transparan dan tepat sasaran.

f. Masalah kepegawaian dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Kenaikan pangkat/golongan tidak berbanding lurus dengan kompetensi;
 2. Distribusi pegawai tidak merata;
 3. Pelaksanaan diklat prajabatan belum mampu memberikan pemahaman dan penghayatan sebagai “yanmas” dan peningkatan kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan.
 4. Anggaran pengembangan pegawai masih minim;
 5. Prosedur pemberhentian pegawai sangat sulit dan panjang;
 6. Sistem penggajian tidak mencerminkan kinerja (pegawai yang berprestasi dan tidak berprestasi digaji sama);
 7. Rendahnya upaya penegakan hukum kepegawaian;
 8. Belum efektifnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 9. Kurangnya kuantitas aparatur pengelola kepegawaian;
 10. Belum adanya sarana kegiatan yang memenuhi standar penyelenggaraan milik pemerintah daerah;
 11. Kurangnya prasarana yang menunjang penyelenggaraan kegiatan;
 12. Terbatasnya dukungan anggaran, baik untuk operasional Badan Kepegawaian Daerah maupun penyelenggaraan kegiatan;
- Diperlukan perubahan signifikan pada elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik yang dilakukan secara sadar dalam rangka memposisikan diri (birokrasi) kembali dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten guna peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang terukur melalui peningkatan angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

g. Permasalahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

1. Karena banyaknya desa yang terpencil dan kurang lancarnya transportasi baik karena faktor cuaca maupun karena sulitnya transportasi sehingga mengakibatkan kurang lancarnya pengiriman laporan penduduk dari desa ke kecamatan menuju kabupaten.
2. Belum maksimalnya pengoprasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) agar tersedianya Data Base Kependudukan

dengan terbentuknya Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang nanti sebagai dasar proses penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional serta akta-akta Pencatatan sipil yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), penerbitan NIK menjadi dasar untuk perekaman e-KTP.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi data kependudukan kepada petugas pendata (RT), serta belum adanya petugas register pada tiap desa/ kelurahan.

h. Permasalahan penyediaan sarana/ prasarana perkantoran pemerintah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah yang representatif, maka perlu peningkatan kualitas dan kuantitas gedung perkantoran. Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara merencanakan pembangunan kompleks perkantoran baru Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Kecamatan Teweh Baru, lanjutan pembangunan Kantor Kecamatan (Kecamatan Teweh Baru, Teweh Selatan dan Lahei Barat) dan rehab/ pembangunan baru kantor kecamatan lama beserta kantor pelayanan terpadu di tingkat kecamatan meliputi UPTD Dinas Pendidikan, UPTD KB dan PP, UPTD Disdukcapil dan Mantri Tani/ Penyuluh pertanian sebagai antisipasi peningkatan beban tugas dan peningkatan layanan umum.

4.1.2 Permasalahan Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Kabupaten Barito Utara antara lain berupa masih rendahnya pembangunan di bidang pendidikan serta kualitas manajemen pelayanan pendidikan.

1) Masih rendahnya APK dan APM Jenjang Pendidikan SMA/SMK.

Permasalahan mengenai masih rendahnya APK dan APM pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK, minat anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangat rendah, hal tersebut dikarenakan biaya pendidikan pada jenjang tersebut cukup tinggi sehingga banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, disamping itu kurang tersedianya sekolah di daerah tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prosentase APK dan APM Jenjang Pendidikan Menengah yaitu membangun unit sekolah baru (USB) pada setiap Kecamatan yang belum ada SMA dan SMK, membangun ruang kelas baru (RKB), pemberian bantuan siswa miskin (BSM) dan mengupayakan Pendidikan Gratis pada semua Jenjang Pendidikan Menengah Universal (PMU).

2) Penyebaran guru tidak merata untuk semua jenjang pendidikan.

Permasalahan mengenai penyebaran guru tidak merata untuk semua jenjang pendidikan hal itu di karenakan banyaknya istri yang mengikuti suami yang bertugas di perkotaan, adanya guru yang enggan bertugas di daerah pedesaan karena adanya kesenjangan kesejahteraan antara guru yang bertugas di desa dengan di perkotaan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diatas, dengan melaksanakan penataan kembali dalam rangka pemerataan guru Sesuai Keputusan Bersama 5 (lima) Menteri, pemberian insentif bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil, menempatkan tenaga pendidik di utamakan untuk putra/putri daerah.

3) Kualifikasi dan Kompetensi Guru masih rendah.

Permasalahan Kualifikasi dan Kompetensi Guru masih rendah, dikarenakan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan bidang yang diajarkannya, kualifikasi jenjang pendidikannya tidak sesuai undang-undang sistem pendidikan nasional.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diatas dengan meningkatkan kualifikasi dan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang keahliannya, menempatkan guru sesuai dengan latar belakang pendidikannya, meningkatkan profesionalisme guru melalui workshop, diklat dan studi banding serta lokakarya.

4) Prosentase Akreditasi sekolah/Madrasah untuk tingkat Akreditasi A masih rendah.

Permasalahan Presentase Akreditasi untuk tingkat Akreditasi A masih rendah dikarenakan belum terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Upaya untuk meningkatkan presentase Akreditasi yaitu dengan meningkatkan pemenuhan kebutuhan Delapan (8) Standar Nasional Pendidikan pada semua Jenis dan Jenjang Pendidikan dan meningkatkan standar kompetensi Kepala Sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan serta pengawas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5) Kurang tersedianya buku-buku referensi guru dan siswa.

Permasalahan Kurang tersedianya buku referensi pegangan guru, siswa dikarenakan tidak merata nya pendistribusian buku yang di perlukan oleh sekolah, kurangnya pengadaan buku-buku yang relevan sesuai dengan

jenjang pendidikannya, buku yang tersedia sudah tidak sesuai dengan kurikulum yang ada.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pengadaan buku-buku referensi pegangan guru, siswa yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, pendistribusian buku-buku yang merata sesuai dengan kebutuhan sekolah.

- 6) Kurang tersedianya Alat – alat peraga sebagai penunjang proses belajar mengajar untuk semua Jenjang Pendidikan.

Permasalahan kurang tersedianya alat-alat peraga guru sebagai penunjang proses belajar mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan dikarenakan alat peraga yang tersedia sekolah sudah tidak layak pakai, dan tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Upaya unuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan kreatifitas guru ntuk membuat alat peraga sesuai dengan bidang keahliannya, dan melalui pengadaan alat-alat peraga untuk semua jenis dan jenjang pendidikan.

- 7) Perlu diberikan biaya Insentif untuk Guru – guru yang bertugas didaerah terpencil dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Permasalahan Tidak tersedianya Dana Insentif bagi Guru-guru yang bertugas didaerah terpencil yang menimbulkan kesenjangan sosial antara guru-guru yang bertugas di daerah terpencil dengan perkotaan, sehingga guru-guru enggan bertugas didaerah terpencil. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan dana insentif bagi guru-guru yang bertugas didaerah terpencil.

- 8) Masih rendahnya APK dan APM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

Permasalahan mengenai rendahnya APK dan APM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) karena masih belum optimalnya pendirian PAUDNI pada Desa-desa, banyak desa-desa yang belum memiliki PAUDNI, sehingga anak – anak pada usia dini banyak yang belum tertampung.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut diatas yaitu dengan membangun PAUD pada setiap desa dan berkerjasama dengan perangkat desa untuk menghimbau kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya yang berusia PAUD (umur 0–6 tahun). Sesuai Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- 9) Masih adanya yang tuna aksara bagi lanjut usia.

Permasalahan masih adanya yang tuna aksara bagi lanjut usia dikarenakan masih adanya angka kemiskinan di pedesaan, disamping itu minat dan kemauan masih rendah.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut diatas, dengan menyelenggarakan program penerima bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), antara lain belajar membaca menulis berhitung, menganyam dan ketrampilan lainnya.

10) Masih adanya anak yang putus sekolah, terutama pada Jenjang Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Permasalahan Masih adanya anak yang putus sekolah, terutama pada Jenjang pendidikan SLTP dan SLTA dikarenakan kurangnya pemahaman orangtua akan pentingnya pendidikan, adanya pernikahan pada usia dini, dan cukup tingginya biaya sekolah.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut diatas, dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada orangtua akan pentingnya pendidikan untuk anak demi masa depannya, mencegah adanya pernikahan pada usia dini, menggratiskan Pendidikan Menengah Universal (PMU), dan pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) serta pemberian bantuan bagi siswa yang berprestasi.

Mengingat pentingnya peran pendidikan dalam pembangunan pemerintah Kabupaten Barito Utara sangat mendukung program “Kalteng Harati” yang telah dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah dan telah di apresiasi pemerintah pusat dan menjadi program percontohan nasional dan dianggap mampu meningkatkan mutu pendidikan. Dana pendamping dialokasikan pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara untuk mendukung pelaksanaan program tersebut yang mengedepankan lima prioritas yakni kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, beasiswa untuk siswa berprestasi, penyediaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran, meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar.

4.1.3 Permasalahan Kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Barito Utara terkait dengan belum mantapnya kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Hal mana berkaitan dengan aspek distribusi obat dan perbekalan kesehatan, kesehatan masyarakat, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Kabupaten Barito Utara. Selain itu masalah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, gizi, kualitas lingkungan, penanggulangan

penyakit menular, standarisasi pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat miskin, sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu.

Disamping itu diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh melalui pembangunan gedung baru yang lebih representatif untuk 20 tahun ke depan.

Diperlukan kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan lansia, kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Hal penting lainnya adalah peningkatan kualitas pembangunan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pelayanan kontrasepsi, pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR. Juga promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat, pusat pelayanan informasi dan konseling, penanggulangan narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS. Diperlukan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, tenaga pendamping kelompok bina keluarga, model operasional BKB-Posyandu-Pendidikan Anak Dini Usia (PADU).

1) Kesehatan ibu hamil.

Selama masa kehamilan ibu hamil semestinya mendapatkan perawatan secara teratur paling sedikit 4 kali selama kehamilan, baik melalui bagian kebidanan di puskesmas, dokter umum atau bidan. Hal ini untuk memastikan bahwa ibu hamil dan bayi dalam keadaan sehat dan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat masalah berkenaan dengan kandungan. Berdasarkan data dari dinas kesehatan, pemeriksaan yang dilakukan ibu hamil di Kabupaten Barito Utara belum secara rutin dilakukan pada tiap tri semester. Perlunya pendampingan dan pemberian pengertian kepada ibu hamil agar rutin melaksanakan pemeriksaan kandungan harus ditingkatkan, membangun kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungan.

Pada pelayanan pemeriksaan, kunjungan pertama mayoritas ibu hamil mendapatkan pemeriksaan pra-kelahiran mereka yang pertama dan terlama pada usia kehamilan sekitar 8 - 12 minggu. Semakin awal ibu hamil melakukan pemeriksaan, semakin baik. Kunjungan berikutnya, setelah kunjungan pra-kelahiran pertama, pengecekan biasanya dilakukan setiap 4 minggu selama 28 minggu, tiap 2 minggu selama 36 minggu, dan setiap minggu hingga sang bayi lahir.

Kesadaran bagi masyarakat, khususnya dukungan dari keluarga pada

ibu hamil sangat diperlukan demi tercapainya kesehatan ibu dan bayi. Pemeriksaan kehamilan begitu penting bagi ibu hamil karena dalam pemeriksaan tersebut akan dilakukan monitoring secara menyeluruh baik mengenai kondisi ibu maupun janin yang sedang dikandungnya. Dengan pemeriksaan kehamilan maka dapat diketahui perkembangan kehamilan, tingkat kesehatan kandungan, kondisi janin, dan bahkan penyakit atau kelainan pada kandungan yang diharapkan dapat dilakukan penanganan secara dini. Deteksi dini terhadap resiko kehamilan dan resiko persalinan perlu terus dipantau secara teratur melalui program pemantauan wilayah setempat (PWS). Kedekatan ibu dan anak untuk mendapatkan pelayanan lebih awal sehingga resiko kematian dapat ditekan.

2) Kesehatan balita

Pertahanan tubuh bayi dan balita belum sempurna. Itulah sebabnya pemberian imunisasi, baik wajib maupun lanjutan penting bagi mereka untuk membangun pertahanan tubuh. Dengan imunisasi, diharapkan anak terhindar dari berbagai penyakit yang membahayakan jiwanya. Terutama penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti penyakit TBC, difteri, partosis, tetanus, campak dan polio serta hepatitis. Teknik pemberian imunisasi pada umumnya dilakukan dengan melemahkan virus atau bakteri penyebab penyakit lalu diberikan kepada seseorang dengan cara disuntik atau ditelan. Setelah bibit penyakit itu masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan terangsang untuk melawan penyakit itu dengan membentuk antibodi. Selanjutnya, antibodi itu akan terus ada di dalam tubuh orang yang telah diimunisasi untuk kemudian melawan penyakit yang mencoba menyerang.

Menurut Depkes RI (2001), tujuan pemberian imunisasi adalah untuk mencegah penyakit dan kematian bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh wabah yang sering muncul. Pemerintah Indonesia sangat mendorong pelaksanaan program imunisasi sebagai cara untuk menurunkan angka kesakitan, kematian pada bayi, balita/anak-anak pra sekolah.

Temuan yang terjadi di Kabupaten Barito Utara adalah imunisasi *drop out*/tidak kembali dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kegunaan dan manfaat dari imunisasi bagi balita. Selain itu pengetahuan ibu tentang imunisasi memang diperlukan agar meningkatkan kesadaran bagi orang tua terhadap anaknya tentang pencegahan penyakit dan kesehatan anak. Meskipun demikian keterlibatan pamong/pihak pemerintah dalam

memotivasi ibu dalam upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan pengetahuan ibu sangat diperlukan.

Kepercayaan dan perilaku kesehatan ibu juga hal yang penting, karena penggunaan sarana kesehatan oleh anak berkaitan erat dengan perilaku dan kepercayaan ibu tentang kesehatan dan mempengaruhi status imunisasi. Masalah pengertian dan keikutsertaan orang tua dalam program imunisasi tidak akan menjadi halangan yang besar jika pendidikan kesehatan yang memadai tentang hal itu diberikan. Peran seorang ibu pada program imunisasi sangatlah penting. Karenanya suatu pemahaman tentang program ini amat diperlukan untuk kalangan tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak balita dipantau melalui upaya kesehatan di posyandu.

3) Makanan pendamping ASI balita

Penggalakan pemberian Air Susu Ibu (ASI) terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan sejak 1990 dijadikan sebagai gerakan nasional. Setelah bayi berumur 6 bulan, mutu dan jumlah ASI berkurang sehingga bayi perlu mendapat makanan. Kecukupan konsumsi makanan dalam jumlah dan mutu yang memadai sangat diperlukan oleh bayi. Pemberian makanan pendamping ASI (MP- ASI), selain cukup jumlah dan mutunya, perlu diperhatikan pula kebersihannya karena dapat menyebabkan anak menderita infeksi.

Asi merupakan makanan yang ideal secara fisiologis dan biologis bagi bayi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi pada usia 4-6 bulan pertama. Pemberian MP ASI sebelum bayi berusia 4 bulan mengakibatkan kenaikan berat badan yang lebih rendah dan kurang gizi dibandingkan dengan bayi yang tetap diberi ASI eksklusif sampai usia 3-4 bulan. Masih dijumpai kebiasaan salah dalam pemberian ASI dan MP ASI diberikan terlalu dini sehingga berdampak pada status gizi. Pengetahuan orang tua, khususnya ibu sangat penting dalam menjaga kesehatan dan gizi anak. Peran pemerintah dalam penyuluhan kesehatan juga diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Barito Utara.

Kasus yang ditemukan di Kabupaten Barito Utara salah satunya adalah belum terpenuhinya makanan pendamping untuk balita untuk keluarga miskin. Masalah yang ditemui ini disebabkan oleh tidak lancarnya makanan pendamping ASI balita makanan pendamping ASI balita yang berasal dari pusat yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pemenuhan makanan pendamping ASI balita bagi keluarga miskin

terkendala/tergantung kiriman dari pusat.

4) Kasus pneumonia balita (penderita penyakit paru-paru pada usia balita)

Selama beberapa tahun ini penyakit ISPA selalu menempati urutan pertama dalam 10 Besar Penyakit di Puskesmas se Kabupaten Barito Utara. Hingga bulan Oktober 2010, berdasarkan laporan LB1 (Laporan Bulanan Data Kesakitan) jumlah penderita ISPA mencapai 48.351 orang (20,8 % dari seluruh penderita baru yang berkunjung ke puskesmas) dan jumlah penderita Pneumonia sebanyak 747 orang (0,3 %). Kegiatan Pengendalian Penyakit ISPA, pengamatan perlu dilakukan lebih intensif terutama penderita Pneumonia pada usia balita, karena penyakit ini secara nasional masih sering menimbulkan kematian. Jumlah penderita yang ditemukan cukup tinggi walaupun tidak setinggi perkiraan yang ditetapkan secara nasional. Menurut perkiraan (nasional) 10 % dari jumlah balita akan menderita pneumonia setiap tahunnya. Bila angka itu diterapkan di Barito Utara maka diperkirakan dalam tahun 2010 ini terdapat lebih dari 2500 penderita.

Data kasus pneumonia balita yang dimiliki dinas kesehatan masih terbatas. Untuk kasus pneumonia ini data yang berasal dari PUSKESMAS maupun dengan pelayanan kesehatan lain (seperti RS dan layanan dokter praktek), data belum di *share* antar instansi kesehatan.

5) Rujukan yang diberikan PUSKESMAS untuk masyarakat umum dan khusus bagi keluarga miskin.

Data rujukan yang diberikan PUSKESMAS untuk keluarga miskin saat ini masih menjadi satu dengan data rujukan untuk masyarakat umum melalui Jamkesda. Terjadinya *missing* data untuk kasus rujukan bagi keluarga miskin dikarenakan perbedaan pemahaman indikator capaian data rujukan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkadang justru menjadi kendala dalam pelaksanaan Jamkesda ini.

Puskesmas, termasuk dengan petugas Surveilans Kelurahan yang setiap hari melakukan survei di wilayah kerjanya, dalam tahun ini hanya berhasil menemukan penderita pneumonia sebanyak 548 penderita usia balita. Penemuan penderita di Kabupaten Barito Utara sudah diupayakan secara aktif maupun pasif, namun hasilnya masih menunjukkan rendahnya jumlah penderita yang ada. Penemuan secara aktif dilakukan ke setiap wilayah RT setiap hari oleh petugas surveilans kelurahan, sedangkan penemuan secara pasif dilakukan dengan cara menunggu kedatangan penderita berobat ke puskesmas.

Sosialisasi tentang tanda-tanda dan gejala pneumonia pada balita perlu agar selalu digiatkan, demikian juga dengan penatalaksanaan penemuan dan pengobatan kasus pneumonia. Di samping tanda/gejala umum pada penderita infeksi pernafasan, nafas cepat merupakan tanda yang perlu diwaspadai sebagai pneumonia, apalagi bila disertai dengan adanya tarikan dinding dada. Penderita perlu segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit bila ada tanda-tanda pneumonia.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kita berhasil menekan penyakit-penyakit menular keluar dari kelompok 10 penyakit terbanyak, namun penyakit-penyakit tidak menular dan ada hubungannya dengan perilaku dan gaya hidup mereka baik untuk pada kelompok 10 penyakit terbanyak, seperti hipertensi (darah tinggi). Ini pintu masuk penyakit-penyakit dengan biaya tinggi untuk pemulihannya apalagi kalau sampai stroke/sakit jantung.

6) PHBS dan Kesehatan lingkungan

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah tindakan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau masyarakat yang sesuai dengan norma- norma kesehatan, menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Banyak penyakit dapat dihindari dengan PHBS, mulai dari Diare, DBD, flu burung, atau pun flu babi yang akhir-akhir ini marak. Salah satu faktor yang mendukung PHBS adalah kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perawatan komunitas. Maka guna tercapainya keberhasilan intervensi perawatan komunitas perlu adanya pembahasan khusus mengenai PHBS kesehatan lingkungan.

PHBS dalam tatanan rumah tangga yang masih perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Barito Utara adalah indikator tidak merokok, Indikator Olahraga dan kepesertaan JPKM. Masih banyak masyarakat Kabupaten Barito Utara yang merokok sehingga diasumsikan semua anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut mempunyai kemungkinan terpapar asap rokok yang dapat menimbulkan berbagai penyakit akibat asap rokok baik aktif maupun pasif. Sedangkan untuk kasus JPKM, masyarakat Kabupaten Barito Utara yang belum sadar akan pentingnya ikut menjadi anggota JPKM/Asuransi Kesehatan bagi dirinya sendiri maupun anggota keluarganya. Namun kemungkinan yang lain adalah karena adanya Jamkesos/Askeskin/KMS yang diberikan kepada masyarakat miskin

sehingga mereka merasa sudah difasilitasi oleh Pemkot Barito Utara dan tidak perlu menjadi anggota JPKM di wilayahnya. Sedangkan pada kasus olah raga, masyarakat Kabupaten Barito Utara masih cukup banyak yang belum sadar akan pentingnya melakukan olahraga setiap hari.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara sangat mendukung program program “Kalteng Berigas” yang merupakan program strategis dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, yakni dengan mengalokasikan dana pendamping yang dianggarkan setiap tahunnya untuk pelaksanaan fisik dilapangan. Program ini di alokasikan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian MDGs Kabupaten Barito Utara, melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta untuk mendukung pelaksanaan Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan

4.1.4 Permasalahan Infrastruktur Berbasis Lingkungan

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau yang disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial dimasyarakat dan pemerintahan.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat sehingga kita harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Barito Utara karena merupakan akses penting yang dapat menjadi tolak ukur pembangunan. Pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung percepatan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Laju pertumbuhan ekonomi yang pesat, penambahan penduduk, dan peningkatan arus urbanisasi merupakan akibat yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada era otonomi daerah ini. Perkembangan tersebut berdampak pada perubahan tata guna lahan dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Untuk mengantisipasi hal tersebut Kabupaten Barito Utara harus melakukan penyeimbangan jaringan pada sarana dan prasarana utama. Perimbangan dengan penambahan

peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, kecamatan sampai perdesaan yang terintegrasi dengan jaringan jalan negara dan jalan provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/169/2013 tentang Status Jalan Kabupaten menunjukkan bahwa total panjang jalan kabupaten telah mencapai 617,94 Km yang terdiri dari 127 ruas jalan. Dari total panjang jalan kabupaten tersebut 43,17% atau 266,79 Km masih berupa jalan tanah dan 14,40 % atau 88,99 Km sudah mendapat perkerasan serta 42,42% atau 262,16 Km berupa jalan aspal.

Tinjauan data berdasarkan kondisi jalan dari total panjang tersebut 40,42% dalam kondisi baik atau sepanjang 249,76 Km dan jalan dalam kondisi sedang 17,51% atau 108,19 Km, selebihnya dalam kondisi rusak 42,07% atau 259,99 Km. Buruknya kondisi jaringan jalan kabupaten disebabkan oleh kualitas konstruksi jalan yang belum optimal (tidak terpenuhinya umur rencana jalan), beban berlebih, bencana alam (banjir & longsor) serta genangan air sebagai akibat tidak berfungsinya sistem drainase. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi. Faktor penting lain penyebab kerusakan jalan adalah masih lemahnya pemeliharaan (belum dilakukan sebagaimana mestinya) yang mengakibatkan munculnya genangan air pada badan jalan serta kerusakan permukaan jalan (seperti retak, lubang, bergelombang dan mengelupas) yang tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Namun demikian, faktor air merupakan penyebab utama kerusakan jalan khususnya perkerasan lentur. Air dapat memberi pengaruh dan dampak dalam berbagai kondisi seperti air permukaan, air yang terkepung/terjebak dalam konstruksi dan air intrusi dari lapis bawah tanah.

Data fisik pembangunan jembatan di Kabupaten Barito Utara memiliki 135 buah jembatan dengan total panjang 3.289 meter yang terdiri dari jembatan permanen rangka baja sebanyak 3 buah (220 meter), jembatan semi permanen rangka baja sebanyak 3 buah (150 meter), jembatan gantung sebanyak 7 buah (972 meter), jembatan beton balok T/girder sebanyak 37 buah (899 meter) dan jembatan kayu ulin sebanyak 85 buah (1.048 meter). Ditengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jembatan-jembatan dalam kondisi rusak (terutama yang berbahan kayu) Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berupaya melakukan penanganan/perbaikan

dan penggantian jembatan yang terbuat dari kayu ulin dengan konstruksi yang lebih permanen.

Dari uraian diatas dapat diungkapkan permasalahan utama dalam pembangunan jalan dan jembatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan prasarana jalan & jembatan dan penataan jaringan jalan & jembatan kabupaten sebagai sistem transportasi yang memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan guna mendukung perekonomian masyarakat;
2. Pembiayaan untuk pembangunan dan penataan infrastruktur jalan dan jembatan masih terbatas dialokasikan
3. Masih belum maksimalnya upaya dalam meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
4. Belum terhubungnya secara baik 16 ruas Jaringan Jalan Strategis kabupaten.
5. Belum tuntasnya penanganan ± 85 buah jembatan kayu ulin.

Salah satu solusi yang diambil untuk percepatan penanganan Jaringan Jalan Strategis Kabupaten Barito Utara adalah dengan melakukan kegiatan peningkatan 6 (enam) ruas jalan strategis kabupaten dengan menggunakan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Year*) yang rencananya akan dibiayai dalam 4 (empat) tahun anggaran, yang dimulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2017. Dengan menggunakan kontrak tahun jamak diharapkan keuntungan yang dapat diambil yaitu : menghemat waktu untuk pelelangan, menghemat biaya mobilisasi, pelaksanaan fisik dapat berkesinambungan sehingga ruas jalan bisa tetap fungsional dan arus transportasi lancar serta masa pemeliharaan yang lebih lama.

4.1.4.1 Perkotaan

a) Sistem drainase perkotaan

Secara umum pembangunan sistem drainase terutama saluran air hujan di Kabupaten Barito Utara sampai saat ini sudah cukup mendapat perhatian. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat lokasi-lokasi rawan genangan dan banjir terutama pada saat curah hujan tinggi. Terdapatnya area genangan ini terutama disebabkan faktor alam (morfologi lahan), wilayah Barito Utara banyak terdapat cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase, tersumbatnya saluran drainase yang

ada oleh sampah lingkungan maupun sudah tingginya sampah oleh endapan tanah di saluran-saluran drainase yang ada.

Salah satu saluran utama dalam sistem drainase adalah saluran air hujan. Masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan saluran air hujan, terdapat saluran air hujan yang juga dipergunakan untuk pembuangan air limbah dan terdapat juga berfungsi sebagai saluran irigasi. Ada saluran yang difungsikan untuk keduanya (limbah dan irigasi) yaitu sungai Montallat.

Saluran air hujan terutama saluran primer, sering difungsikan sebagai saluran sudetan (*over-flow*), yang membuang kelebihan volume air hujan. Pada saluran tertutup di tepi jalan banyak dijumpai kios/toko yang berdiri diatas saluran, sehingga fungsi saluran akan terganggu dan kualitas air di saluran menjadi jelek karena saluran tersebut diperlakukan sebagai tempat pembuangan air limbah, sampah dan sebagainya oleh pemilik/pemakai kios/toko tersebut seperti yang ditemui di sungai Butong.

Upaya Perbaikan saluran air hujan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara berdampak pada berkurangnya saluran air hujan dengan kondisi rusak dalam empat tahun terakhir. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pembangunan saluran air Limbah kondisi baik meningkat dari 200 m pada tahun 2009 menjadi 600 m pada tahun 2011, sedangkan total saluran air limbah menjadi 1,150 km pada tahun 2012.

b) Sistem transportasi

Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah aksesibilitas atau keterjangkauan. Aksesibilitas menjadi penting dalam pertimbangan pembangunan daerah perkotaan dan perdesaan karena dengan aksesibilitas yang baik maka mobilitas penduduk, barang dan jasa di daerah akan menjadi semakin lancar sehingga dapat mendorong peningkatan aspek perekonomian.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan aksesibilitas adalah laju pertumbuhan jumlah tonase kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan ruas jalan dan daya dukung jalan, sehingga menimbulkan kerusakan dini terhadap ruas jalan yang tersedia.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan perhubungan, pada tahun 2008-2012 telah dilakukan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di 12 ruas jalan, pengadaan dan pemasangan *counter down* di 1 simpang (simpang dermaga pasar bebas banjir).

Melalui upaya tersebut jumlah prasarana dan fasilitas lalu lintas yang direhabilitasi terhadap keseluruhan fasilitas lalu lintas meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun demikian, target pemenuhan 100% rehabilitasi fasilitas lalu lintas harus tetap terus diupayakan.

Tabel 4.1. Kondisi Jalan Kabupaten Barito Utara tahun 2012

Kondisi jalan	Panjang (Km)
a. Baik	217,87
b. Sedang	76,30
c. Rusak	51,00
d. Rusak Berat	177,10
Jumlah	422,27

Sumber : Dinas PU Kab. Barito Utara, 2012

Sementara itu, dari segi prasarana perhubungan, hasil pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan pekerjaan umum dalam tahun 2012 dapat dilihat dari panjang jalan dengan kondisi baik 217,87 Km. Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat dominasi jalan kondisi baik daripada kondisi kurang baik, sehingga menjadi dukungan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan survei penjangkaran aspirasi masyarakat (jaring asmara) yang dilaksanakan tahun 2012, diketahui bahwa fasilitas transportasi seperti jalan, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, rambu/marka jalan, polisi tidur, kendaraan umum dan pribadi, jalur transportasi, masih perlu untuk ditingkatkan.

Dalam rangka peningkatan sarana prasarana transportasi umum, Pemerintah Kabupaten Barito Utara sedang membangun bandara baru bertaraf nasional di Desa Trinsing, Kecamatan Teweh Baru dengan spesifikasi panjang runway direncanakan sepanjang 3.000 meter dan pada tahap awal dibangun sepanjang 1.400 meter, lebar 30 meter.

c) Bangunan rumah layak huni

Persentase rumah layak huni dibandingkan dengan seluruh rumah selama ini menunjukkan kondisi yang mengembirakan. Walaupun demikian, di Kabupaten Barito Utara masih saja terdapat rumah yang tidak layak huni. Sebagian besar rumah tidak layak huni berada di perdesaan karena keterbatasan infrastruktur pendukung ketersediaan bahan baku bangunan.

Tabel 4.2. Kondisi Lingkungan Perumahan Kab. Barito Utara Tahun 2012

No.	Keterangan	Prosentase	Keterangan
1.	Persentase rumah layak huni dibandingkan seluruh rumah	-	-
2.	Persentase penduduk berakses air minum (perpipaan)	60%	Dari 50.000 penduduk perkotaan
3.	Persentase RT pengguna air bersih (non perpipaan)	82,95 %	Dari seluruh jumlah penduduk kab
4.	Persentase penggunaan MCK yang layak	45%	Sebagian besar MCK di sungai

Sumber : Dinas PU Kab. Barito Utara, 2012

d) Sistem pengelolaan prasarana lingkungan

Berdasarkan penjarangan aspirasi masyarakat tahun 2013 untuk perencanaan pembangunan 2014 terdapat permasalahan terkait penyediaan fasilitas pelayanan umum yang memadai di beberapa bagian Kabupaten Barito Utara. Permasalahan tersebut yaitu penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas, puskesmas pembantu serta poskesdes), fasilitas lainnya (air bersih, sanitasi, SAH/drainase, sumur resapan, jalan, trotoar, parkir semrawut, aliran listrik) kurang memadai di beberapa Kecamatan kota dan luar kota. Berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan, dilakukan dengan kegiatan penyediaan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan terutama berkaitan dengan sanitasi, berupa pemasangan *water treatment* sejumlah 8 (delapan) unit di 9 (sembilan) Kecamatan.

4.1.5 Permasalahan Lingkungan

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Barito Utara antara lain pencemaran udara, permasalahan sampah, drainase, Bantaran Sungai Barito, Sungai Teweh dan Sungai Lahei, sanitasi dan Pencemaran air tanah serta manajemen penanggulangan bencana.

1) Pencemaran Udara

Sebagaimana pada umumnya perkotaan, pencemaran udara merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara. Pencemaran udara meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2010 berjumlah 121.573 jiwa, jumlah tersebut meningkat tahun 2012 menjadi 123.781 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk akan diikuti peningkatan aktifitas, termasuk aktifitas yang menghasilkan emisi. Adapun aktifitas yang menghasilkan emisi antara lain terkait konsumsi bahan bakar fosil, listrik, dan air.

Tabel 4.3. Jumlah Kendaraan Bermotor Kab. Barito Utara Tahun 2011

Tahun	Jenis Kendaraan			
	Sedan/Station	Truk	Bus	Sepeda Motor
2011	1.617	465	75	23.589

Sumber : BPS Kab. Barito Utara

Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi dapat dilihat dari angka jumlah kendaraan bermotor penduduk Kabupaten Barito Utara yang meningkat dari tahun ke tahun. Selang waktu 5 tahun, jumlah berbagai jenis kendaraan bermotor meningkat secara drastis, terutama untuk jenis kendaraan bus yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dan sepeda motor yang meningkat hampir dua kali lipat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, berimbas pada peningkatan konsumsi bahan bakar fosil, baik berupa bensin premium, maupun solar. Padahal, menurut IPCC (1996) setiap liter bensin premium mengemisi 2,33 kgCO₂ dan solar 2,67 kgCO₂.

Aktifitas penduduk Kabupaten Barito Utara terkait konsumsi listrik, secara tidak langsung juga turut menyumbang emisi (*in direct/off-site emission*). Tabel berikut menunjukkan jumlah pelanggan PLN di Kabupaten Barito Utara.

Tabel 4.4. Banyaknya Pelanggan PLN menurut Kelompok Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Terjual Kabupaten Barito Utara Tahun 2012

Tahun	Jumlah Pelanggan (PLN)	Jumlah Pelanggan (Non PLN)
2012	30.495	1.503

Sumber : Distamben Kab. Barito Utara, 2012

Aktifitas penduduk Kabupaten Barito Utara terkait konsumsi air PDAM, juga menyumbang *off-site emission*. Produksi setiap m³ air PDAM, membutuhkan energi listrik sekitar 0,71 kwh/m³, padahal setiap kwh listrik mengemisi 0,781 kgCO₂. Maka, berdasarkan data PDAM Kabupaten Barito Utara diketahui total produksi air tahun dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini berarti bahwa, jumlah *of-site emission* yang dihasilkan dari produksi air PDAM Kabupaten Barito Utara juga semakin besar.

Tabel 4.5. Produksi Air Minum dan Air Yang Dijual
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2010-2012

Tahun	Produksi (m ³)	Air Yang Dijual (m ³)
2010	3.001.964	2.479.495
2011	3.502.310	2.881.278
2012	4.142.787	3.179.817

* Sumber: PDAM Kabupaten Barito Utara, 2012

Hasil pengukuran kualitas udara di beberapa titik di Kabupaten Barito Utara, menunjukkan bahwa kualitas udara ambien tahun 2012, baik CO, CO₂, NO₂, partikel debu, Pb, berada di bawah ambang batas.

Tabel 4.6 Pengukuran Hasil Kualitas Udara Tahun 2012

NO.	LOKASI PENGUJIAN	SUHU UDARA (OC)	KELEMBABAN % RH	ARAH ANGIN XO	KECEPATAN ANGIN Km/jam	KEBISINGAN DB(A)	KARBON DIOKSIDA (CO ₂) µg/m ³	KARBON MONOKSIDA (CO) µg/m ³	NITROGEN DIOKSIDA (NO ₂) (µg/m ³)	OZON (O ₃) (g/m ³)
1.	Kandui, Kecamatan Gunung Timang	33,80	61,70	Utara	2,30	66,90	145.704,65	2.289,71	114.714,71	NA
2.	Sikui, Kec. Teweh Tengah	36,50	54,20	Selatan	2,50	69,00	206.864,63	3.434,56	47.014,22	NA
3.	Kelurahan Melayu, Kec. Teweh Tengah	37,90	47,70	Timur	3,20	70,80	174.485,82	5.724,27	80.864,46	NA
4.	Kelurahan Lahei II, Kec. Lahei	35,50	55,60	Utara	5,0	60,70	188.876,40	1.144,85	39.491,95	NA
	Baku Mutu Daerah (Waktu Pengukuran 1							30	400	NA

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2012

Kondisi terparah dijumpai untuk hasil pengukuran gas CO, karena di semua titik pengukuran menunjukkan bahwa kandungan gas CO ambien telah jauh melampaui baku mutu lingkungan. Kandungan gas CO ambien tertinggi dijumpai di lokasi Kelurahan Melayu, jumlah gas CO ambien telah mencapai 5.724,27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Ini menunjukkan, bahwa kondisi pencemaran udara Kab. Barito Utara sudah cukup tinggi, dan butuh penanganan serius.

2) Sampah

Sebagaimana kota pada umumnya, sampah menjadi permasalahan lingkungan penting Kabupaten Barito Utara yang tidak bisa diabaikan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Program penanganan sampah berupa pengelolaan sampah mandiri dengan 4R (Replace, Reuse, Reduce, Recycle) baru dimulai pada tahun 2013 sehingga mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Desa Mukut, Kecamatan Lahei. Secara bertahap jumlah TPS yang berada ditepi jalan protokol akan diganti model pengambilan sampah sistemik pada waktu-waktu tertentu (sebelum jam 06.00 WIB pengangkutan sampah sudah selesai). Peningkatan volume pengangkutan sampah di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2011 berkisar 32.765 kg/hari menjadi 34.384 kg/hari pada tahun 2012 sehingga mendesak program 4R segera dilaksanakan.

Tabel 4.7 Sarana Kebersihan Kabupaten Barito Utara Tahun 2011-2012

No	Kecamatan	Transfer Depo		Container		Gerobak	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	Teweh Tengah	2	2	14	14	9	13
	Jumlah	2	2	14	14	9	13

Sumber Data : Dinas PU Kabupaten Barito Utara

Tabel 4.8 Data Landasan Container dan Bak Sampah (TPS) se-Kabupaten Barito Utara Tahun 2011-2012

No	Kecamatan	Landasan Container		Bak Sampah (TPS)		Bak Sampah (TPSS) M3	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	Teweh Tengah	2	2	140	205	14	17
	Jumlah	2	2	140	205	14	17

Sumber Data : Basis Data 2009-2010, BLH Kabupaten Barito Utara

Adapun pola pengumpulan sampah yang sesuai untuk ditindaklanjuti dan diterapkan pada daerah pelayanan dengan kondisi topografi yang relatif datar hingga bergelombang (0-25 %), dan dengan kondisi fisik wilayah sesuai dengan persyaratan pola pengumpulan, yang didukung dengan pewadahan dan peralatan yang tersedia, maka dapat dipilih pola individual langsung untuk daerah pelayanan dengan kondisi topografi bergelombang (kemiringan > 5 %), dan pola individual tak langsung untuk daerah pelayanan dengan kondisi topografi relatif datar (kemiringan < 5 %).

Sedangkan rencana penyebaran lokasi pewadahan komunal (TPS) berupa kontainer, akan ditempatkan pada daerah permukiman padat penduduk dan daerah perdagangan (pasar dan pertokoan/komersil) yang selama ini memiliki timbulan sampah yang cukup besar, diharapkan pewadahan tersebut dapat difungsikan secara optimal.

Berdasarkan pola pengumpulan diatas, maka pola pengangkutan yang sesuai untuk ditindaklanjuti dan diterapkan adalah pola pengangkutan langsung dari tempat sumber sampah dan pola pengangkutan dengan sistem kontainer yang diangkat. Pola pengumpulan dan pengangkutan tersebut diatas merupakan bagian dari aspek teknis operasional yang tentunya didukung oleh ketersediaan pewadahan dan peralat serta aspek lainnya dalam pengelolaan persampahan seperti aspek manajemen/kelembagaan, aspek pengaturan, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat yang sangat menentukan dalam operasional pengelolaan persampahan.

3) Drainase

Kondisi drainase Kabupaten Barito Utara beberapa tahun belakangan ini, tidak mampu menampung jumlah air limpasan, terutama pada saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi. Akibatnya, muncul genangan air di beberapa titik, seperti Jalan A. Yani, Pramuka, dan Taman Remaja. Munculnya titik-titik genangan antara lain disebabkan tersumbatnya saluran drainase oleh sampah dan tingginya laju perubahan penggunaan lahan di Kota Muara Teweh. Perubahan kondisi lahan dari terbuka menjadi terbangun, mengurangi kemampuan infiltrasi tanah dan menjadikan air hujan yang turun menjadi air limpasan (*run off*). Air limpasan dalam volume besar akan mengalir menuju tempat dengan ketinggian lebih rendah, termasuk ke dalam saluran-saluran air. Jika

kapasitas saluran drainase yang ada tidak mampu menampung jumlah air limpasan yang dihasilkan pada saat kondisi hujan, maka muncullah titik-titik genangan di beberapa tempat di Kabupaten Barito Utara.

Tabel 4.9. Jumlah Titik Genangan Tahun 2010-2012

Tahun	2010	2011	2012
Jumlah Titik Genangan	11	11	11

Sumber Data : Dinas PU Kabupaten Barito Utara

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 mulai tahun 2010-2012 jumlah titik genangan di Kabupaten Barito Utara cenderung tetap. Stabilitasnya jumlah titik genangan disebabkan oleh stabilitasnya curah hujan.

Tabel 4.10. Daftar Saluran Air Hujan Menurut Fungsi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012

Kecamatan	Primer		Sekunder		Tertier		Jumlah	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (m ¹)	%
Teweh Selatan	1,404	4,06	13,650	39,4	19,544	56,49	34,598	100
Montallat	1,600	2,60	27,475	44,7	32,35	52,67	61,425	100
Gunung Timang	0,335	1,12	16,45	55,1	13,061	43,76	29,846	100

Sumber: Dinas PU Kab Barito Utara tahun 2013

4) Sanitasi

Rendahnya pengetahuan masyarakat Barito Utara tentang pengelolaan lingkungan yang baik menyebabkan permasalahan sanitasi yang dihadapi cukup kompleks. Ditambah lagi kondisi geografis Kabupaten Barito Utara memungkinkan terjadinya aliran pencemaran air tanah dari daerah hulu menuju hilir Barito, sehingga wilayah Kabupaten Barito Utara menanggung beban pencemaran yang mengalir dari atas, yakni wilayah Kabupaten Murung Raya.

Pencemaran sumur oleh *e-coli* terjadi akibat sistem pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Padatnya permukiman penduduk menyebabkan jarak antara sumur dengan *septictank* sering kurang dari 11 meter. Padahal menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2916-1992 tentang Spesifikasi Sumur Gali untuk Sumber Air Bersih, bahwa jarak horizontal sumur ke arah hulu dari aliran air tanah atau sumber pengotoran (bidang resapan/tangki *septictank*) harus lebih dari 11 meter.

Oleh karena itu, pada daerah berpenduduk padat dan di pinggiran sungai disiasati dengan pembuatan pengelolaan limbah komunal yang paling tidak harus berjarak lebih dari 50 meter dari perumahan/permukiman.

Kabupaten Barito Utara terdapat satu sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal domestik, yang terdapat di PDAM Muara Teweh dan rencananya akan dibangun di semua kecamatan yang terdapat di pinggir sungai Barito.

5) Bantaran Sungai Barito, Teweh dan Lahei

Permasalahan utama permukiman di bantaran sungai Kabupaten Barito Utara (Sungai Barito, Teweh, Montallat dan Lahei) berakar pada ketidaksesuaian penggunaan lahan badan sungai yang sebenarnya difungsikan sebagai jalur hijau, akan tetapi dipergunakan penduduk sebagai tempat bermukim. Selain itu, banyaknya permukiman di sebagian bantaran sungai menjadikan permukiman di daerah tersebut memiliki kesan kumuh. Ditambah lagi dengan kondisi sanitasi yang buruk, semakin menjadikan permukiman di bantaran sungai tidak ideal untuk bermukim.

Faktor penyebab terjadinya pencemaran bakteri E-coli dan nitrat pada sumber air bersih masyarakat umumnya terjadi akibat banjir dan longsor, padatnya permukiman dan buruknya sanitasi di kawasan permukiman bantaran sungai. Pembuatan sarana sanitasi sering tidak sesuai dengan struktur atau teknologi yang mendukung aspek kebersihan terjamin, misalnya dalam membuat saluran pembuangan, bak penampungan kotoran dan bak peresapan sering tidak dipisahkan dan diletakkan dekat dengan sumur, mengingat keterbatasan atau sempitnya lahan. Seharusnya, menurut SNI sumur dengan bak penampung saluran pembuangan, minimal harus berjarak 11 meter.

Jika kurang dari jarak tersebut, kemungkinan bakteri *E.coli* mencemari sumur penduduk akan sangat besar. Padahal sumur- sumur tersebut dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sebagai air minum, untuk memasak, maupun untuk mencuci. Ini berarti bahwa kondisi kesehatan penduduk setempat terancam, jika setiap hari mengkonsumsi air yang tercemar bakteri *E. coli* dan nitrat, terutama oleh penyakit diare dan gangguan ginjal.

Permasalahan lain permukiman bantaran sungai, terkait kebiasaan

warga membuang sampah baik padat maupun cair langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sampah yang dibuang di sungai terus menerus, menyebabkan kualitas sungai menurun dari waktu ke waktu. Padahal beberapa warga masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BLH Kabupaten Barito Utara tahun 2009, diketahui bahwa kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD), COD (*Chemical Oxygen Demand*), DO (*Disolved Oxygen*), kadar residu terlarut / *Total Disolved Solid* (TDS), dan kandungan bahan kimia lain, yang terkandung di air sungai Barito, Teweh, dan Lahei sebagaimana tercantum pada di atas. Jika dibandingkan dengan standart baku mutu dalam PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, diketahui bahwa nilai BOD di ketiga sungai tersebut (Barito, Teweh, dan Lahei), hampir seluruhnya telah jauh melebihi ambang batas, baik di daerah hulu, tengah, maupun hilir, kecuali Sungai Teweh bagian hilir (4 mg/l) yang masuk dalam Kelas III. yang Peruntukan air kelas III hanya sesuai digunakan untuk budidaya perikanan, peternakan, dan mengairi tanaman, sedang pemanfaatan air untuk air minum, bahan baku air minum, atau untuk sarana rekreasi, harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Nilai BOD tertinggi ada di bagian tengah Sungai Barito. Ini berarti bahwa pada bagian tengah Sungai Barito, mengandung bahan organik tinggi berasal dari limbah buangan warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Barito bagian tengah, termasuk penduduk wilayah Kabupaten Barito Utara. Nilai BOD yang tinggi, mencerminkan tingginya aktifitas mikroorganisme di dalam air dalam memanfaatkan oksigen untuk menguraikan bahan organik yang terlarut di dalam air. Semakin tinggi kandungan organik terlarut dalam air, maka semakin banyak oksigen dibutuhkan oleh mikroorganisme, sehingga kandungan oksigen dalam air menjadi rendah (turun).

Nilai COD, sebagian besar masih berada dibawah ambang batas dan termasuk dalam Kelas II, kecuali Sungai Teweh bagian hulu dan Sungai Barito bagian tengah, yang termasuk Kelas IV, dan Sungai Teweh bagian hilir, yang termasuk Kelas I. Nilai COD menunjukkan jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis (biodegradable) maupun yang sukar didegradasi

secara biologis (non- biodegradable).

Tabel 4.11. Hasil Pemantauan Kualitas dan Kuantitas Air Badan Air (Sungai) Sungai Barito yang ditetapkan di Kab. Barut Tahun 2012

Lokasi	Kadar BOD (mg/l)	TSS (mg/l)	Kadar DO (mg/l)	TDS (mg/l)
Sungai Barito Hulu				
Hulu	2,55	78	7,0	162
Tengah	1,7	51	6,9	23
Hilir	1,8	41	7,1	33
Sungai Lahei				
Hulu	1,7	68	6,8	21
Tengah	-	-	-	-
Hilir	2,0	611	6,46	207
Sungai Teweh				
Hulu	1,7	199	6,2	23
Tengah	1,4	114	5,8	73
Hilir	2,8	104	5,7	67
Sungai Montallat				
Hulu	2,4	90	5,9	77
Tengah	-	-	-	-
Hilir	1,8	151	5,1	40

Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara

Nilai DO, di semua bagian di keempat sungai (Barito, Lahei, Teweh dan Montallat) masih memenuhi standart baku mutu yang ditentukan untuk Kelas I. Begitu pula untuk parameter TDS, semuanya masih berada dibawah baku mutu maksimum yang ditentukan, yaitu 1000 mg/l untuk air Kelas I. Untuk parameter kandungan kimia, masing-masing parameter zat kimia masih berada di bawah standart baku mutu yang ditetapkan.

6) Pencemaran Air Tanah

Kualitas air tanah di Kabupaten Barito Utara telah dilakukan pemantauan secara rutin untuk mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Pengukuran kualitas air dilakukan tiap bulan dengan total sampel per tahun hingga 1.000 sampai dengan 1.700 sampel sumur penduduk di Kabupaten Barito Utara. Dari hasil pengukuran tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.12 Hasil Pemantauan Kualitas Air Bersih dari Sumur Penduduk

Tahun	Jumlah sampel	Memenuhi Syarat (MS)		Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2008	1086	476	43,83	610	56,17
2009	1532	582	37,92	951	62,08
2010	1669	552	33,08	1117	66,92

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2010

Pencemaran tersebut terjadi karena letak sumur warga berdekatan dengan saluran pembuangan limbah rumah tangga atau *septic tank*, dan sering kali antara bak penampungan kotoran dan bak peresapan tidak dipisahkan. Hal ini disebabkan keterbatasan atau sempitnya lahan yang tersedia, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara semakin padat dari tahun ke tahun. Selain itu, Pencemaran *E-coli* juga karena banyak bangunan *septic tank* yang tidak kedap air sehingga kotoran bisa merembes masuk ke tanah dan akhirnya ke air sumur. Masyarakat umumnya terjebak pada pola hidup yang pragmatis, artinya masyarakat menginginkan segala sesuatunya serba praktis, cepat dan hemat dari segi biaya. Pembuatan *septic tank* yang sesuai standart SNI, sering dianggap membutuhkan biaya mahal dan membutuhkan lahan luas, sehingga dianggap kurang praktis, dan sering diabaikan.

Standart minimum jarak antara sumur dengan *septic tank* ditetapkan >10 m, dengan alasan jarak tersebut merupakan jarak aman yang tidak mungkin dapat ditempuh oleh bakteri *E. coli*, jika bakteri tersebut bermigrasi dari *septic tank* ke sumur. Bakteri *E. coli* merupakan bakteri patogen (bersifat anaerob) yang biasanya mempunyai usia harapan hidup selama tiga hari. Sedangkan kecepatan aliran air dalam tanah berkisar 3 meter per hari (rata-rata kecepatan aliran air dalam tanah di pulau jawa 3 meter/hari), sehingga jarak ideal antara tangki *septic* dengan sumur sejauh 3 meter per hari x 3 hari = 9 meter (Soeparman, 2002). Adapun angka 1 meter atau lebih sisanya dianggap sebagai jarak pengaman. Sayangnya, jarak minimum ini sering kali diabaikan.

Penyebab lain tingginya pencemaran air tanah oleh bakteri *E.coli* karena kondisi geografis Kabupaten Barito Utara yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%),

memungkinkan terjadinya aliran pencemaran air tanah dari daerah utara yang lebih tinggi menuju selatan, sehingga wilayah Kabupaten Barito Utara menanggung beban pencemaran yang mengalir dari wilayah yang berada di atasnya, yaitu Kabupaten Murung Raya.

Tingginya pencemaran air sumur oleh bakteri *E. coli* dapat dilihat dari angka kesakitan akibat penyakit diare dan juga jumlah penderita penyakit diare di Kabupaten Barito Utara. Besar angka kesakitan diare tahun 2008 sebesar 18,06 dengan persentase tertangani sebesar 30,29%. Pada 2009, angka kesakitan diare menurun menjadi 16,80, dengan persentase tertangani sebesar 100%. Jika dilihat dari jumlah penderita penyakit diare, mulai tahun 2006 s.d. 2009 jumlahnya fluktuatif. Tahun 2006, penderita berjumlah 5876 orang, meningkat pada 2007 menjadi 6816 orang, kemudian turun secara drastis menjadi 2714 orang, namun pada 2009 naik kembali secara signifikan menjadi 7658 orang.

Tabel 4.13 Jumlah Penderita Penyakit Diare Tahun 2008 – 2012

Jenis Penyakit	Jumlah Penderita				
	2008	2009	2010	2011	2012
Diare	2.714	7.658	9.561	1.950	2.885

Sumber : Basis Data 2008-2012, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara

7) Strategi Penanggulangan Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 2003 – 2013 adalah kebakaran, banjir, angin topan/puting beliung, tanah longsor (abrasi), dan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan/lahan. Kejadian kebakaran terjadi hampir di seluruh wilayah dengan frekuensi yang berbeda-beda. Daerah rawan banjir adalah wilayah-wilayah di DAS Barito, DAS Lahei, DAS Teweh dan DAS Montallat yang berada di dataran rendah. Bencana angin topan/puting beliung terjadi terutama saat musim hujan. Kabut Asap terjadi tiap tahun setiap musim kemarau/kering dengan kepekatan yang berbeda-beda. Sedangkan Tanah longsor sebagian besar di dominasi oleh abrasi air sungai di DAS Barito, DAS Lahei, DAS Teweh dan DAS Montallat.

Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana:

- 1) Pada daerah-daerah wilayah rawan tinggi bencana longsor tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum;

- 2) Penguatan terhadap sistem kearifan lokal yang mendukung upaya pelestarian lingkungan seperti kawasan Gunung Lumut, Pararawen, Gotong Royong (Bahandep) dan sejenisnya sebagai upaya *EWS* berbasis kearifan lokal daerah;
- 3) Pemasangan sistem peringatan dini (*EWS= Early Warning Sistem*) di sepanjang DAS Barito, Teweh, Lahei dan Montallat mulai dari hulu;
- 4) Penguatan kelembagaan baik dari Aspek Organisasi, SDM dan Peralatan maupun regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24/2007 pasal 31 bahwa Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi : a). Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; b). Kelestarian lingkungan hidup; c) kemanfaatan dan efektifitas; dan d) lingkup luas wilayah. Sedangkan kewajiban masyarakat terkait dalam aspek penanggulangan bencana, ini tercantum dalam pasal 27 - UU No. 24/2007, yang mengatakan bahwa setiap orang berkewajiban: a) Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup b) Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan c) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Aspek Pemanasan global atau *global warming* yang diartikan dengan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan Bumi perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Suhu rata-rata global pada permukaan Bumi telah meningkat 0.74 ± 0.18 °C (1.33 ± 0.32 °F) selama seratus tahun terakhir. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyimpulkan bahwa, "sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia", melalui efek rumah kaca. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi (pola musim yang cepat dan deras seperti curah hujan yang tinggi dalam waktu cepat).

Adanya fenomena *global warming* berpengaruh pada bencana kekeringan dan kekurangan air di musim kemarau serta peningkatan suhu harian yang sangat ekstrim sehingga bisa mengganggu kenyamanan dan

kesehatan masyarakat. Akibat *global warming* di wilayah Kabupaten Barito Utara, adalah meningkatnya volume hujan yang besar dalam waktu cepat sehingga menyebabkan banjir bandang dan banjir besar.

4.1.6 Permasalahan Ekonomi Kerakyatan

Permasalahan ekonomi terkait dengan ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, pariwisata, perikanan kelautan, perkebunan, kehutanan, perdagangan dan industri, pemberdayaan masyarakat desa, bidang energi dan sumberdaya mineral.

1) Ketenagakerjaan

Permasalahan pengangguran terbuka terkait dengan masih terjadinya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2011 yang mencapai 3,4 % (1.216 orang) dari total angkatan kerja, angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan target pengangguran terbuka di RPJP Kabupaten Barito Utara yang tidak lebih dari 4%. Angkatan kerja baru, yaitu penduduk yang lulus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan memunculkan penganggur baru. Terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya keterampilan serta rendahnya jiwa kewirausahaan merupakan beberapa penyebab munculnya pengangguran di Kabupaten Barito Utara.

Pencari kerja di wilayah kota sebagian besar merupakan lulusan universitas atau sekolah tinggi. Minimnya lapangan pekerjaan formal yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi S1 menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terserap di Kabupaten Barito Utara. Mereka kemudian justru diberdayakan di wilayah lain di luar Kabupaten Barito Utara yang memiliki banyak lapangan kerja formal. Selain masalah ketersediaan lapangan kerja, insentif bagi para lulusan S1 masih rendah sehingga tidak dapat mencegah perpindahan tenaga kerja berpendidikan tinggi ke luar Kota. Jika hal ini dibiarkan maka Kabupaten Barito Utara kemungkinan akan kehilangan aset SDM yang berkualitas untuk membangun daerah.

Penyelenggaraan pelatihan selama ini masih bersifat temporer dan belum ada sistem yang baku sehingga belum fokus dan belum tepat sasaran, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi maupun tidak lanjut dari kegiatan tersebut. Selain itu pihak yang disasar maupun materi yang akan diberikan pada pelatihan belum terfokus.

Minimnya lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap

keahlian para pencari kerja menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terserap di Kabupaten Barito Utara. Menciptakan lapangan kerja formal membutuhkan investasi yang cukup besar serta dibutuhkan cara yang tepat untuk menarik investor besar agar dapat berinvestasi di Kabupaten Barito Utara serta mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan corak dan warna perekonomian di Kabupaten Barito Utara. Kegiatan ekonomi yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam dianggap cocok untuk dijalankan meskipun masih menemui kendala untuk menemukan bentuk yang tepat. Demikian juga dengan pengembangan industri kreatif dapat dianggap sebagai alternatif pilihan yang sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten Barito Utara dan diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja profesional di bidangnya.

2) UMKM dan Koperasi

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) selama ini menghadapi beberapa permasalahan, yaitu terbatasnya kualitas SDM pelaku koperasi dan UMKM termasuk aparatur pembina koperasi dan UMKM, permodalan baik dana maupun sarana dan prasarana usaha serta pemasaran.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah, diantaranya adalah melakukan konsultasi dan koordinasi, pembinaan, pengawasan, peningkatan kualitas kelembagaan dan audit serta sosialisasi/ penyuluhan, pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan para pelaku KUMKM serta penciptaan motivasi kewirausahaan dan kegiatan promosi produk KUMKM melalui pameran dan kegiatan lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah telah membuahkan hasil seperti terlihat pada indikator peningkatan jumlah koperasi yang berdiri di Kabupaten Barito Utara yaitu sekitar 208 unit pada tahun 2010 dengan anggota 16.658 orang, 212 unit pada tahun 2011 dengan anggota 16.863 orang dan volume usaha Rp.16.075.627.532,- menjadi 228 unit pada tahun 2012 dengan jumlah anggota 17.124 orang dan volume usaha Rp.48.696.332.445.

Jumlah UMKM sampai dengan tahun 2012 berjumlah 869 unit dengan tenaga kerja 1.235 orang dan omzet Rp.36.171.736.186,-. Hasil tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan karena faktor keterbatasan

anggaran sehingga diperlukan usaha komprehensif dan solusi serta metode yang kreatif untuk mengatasi pemecahan masalah dimaksud secara permanen.

Program ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi dan UMKM diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pelaku koperasi dan UMKM serta masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMAKOPDAS) yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku koperasi dan UMKM lebih meningkat serta memiliki kecerdasan dalam mengelola organisasi, manajemen usaha dan menghasilkan keuntungan sehingga koperasi dapat maju dan berkembang.

3) Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyediakan fasilitas Pelayanan Perizinan Terpadu tetapi belum ada pihak yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya investasi yang sudah masuk dan disetujui. Hal ini juga terkait dengan belum ada pihak/badan yang khusus menangani kegiatan investasi.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara sangat terbuka dan mendorong masuknya kegiatan investasi. Namun kegiatan investasi yang masuk ke Kabupaten Barito Utara sebagian diantaranya kurang bersinergi dengan usaha rakyat yang telah berjalan. Belum ada peraturan atau regulasi lainnya yang mungkin dapat diterapkan, sehingga penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Barito Utara adalah yang mendukung kegiatan atau usaha masyarakat yang telah berkembang.

Selain itu diperlukan adanya pemetaan investasi berbagai sektor usaha/ perekonomian dalam rangka road-map dan selektifitas kebutuhan investasi berbagai sektor usaha yang berkeunggulan kompetitif sehingga mampu memacu laju pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten Barito Utara.

4) Ketahanan Pangan

Tingginya ketergantungan pangan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Terkait dengan kemampuan Kabupaten Barito Utara dalam memproduksi hasil pertanian dan bahan makanan lainnya, maka kebutuhan pangan di wilayah ini dipenuhi oleh daerah sekitar maupun berasal dari luar daerah.

Kualitas pangan yang beredar di masyarakat relatif masih rendah. Di

Kabupaten Barito Utara masih banyak ditemukan makanan tidak sehat dan berbahaya kimia berbahaya seperti zat pewarna sintetis, pengawet dan perasa yang tinggi yang beredar di masyarakat. Makanan tersebut justru banyak dikonsumsi oleh anak sekolah yang dapat mengancam kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi atau menekan peredaran makanan mengandung zat berbahaya agar tidak semakin merugikan masyarakat.

Pengawasan kualitas pangan dan monitoring terhadap kualitas dan kesehatan pangan masih perlu ditingkatkan. Tata niaga pangan yang masih tidak efisien sehingga membuat volatilitas harga pangan tinggi.

5) Pertanian, peternakan dan perikanan

Pada dasarnya proses pembangunan pertanian tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan produk semata, akan tetapi secara bersamaan kegiatan pertanian adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sekaligus dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat diperdesaan.

Mengingat bahwa komoditi padi memegang peranan yang sangat strategis sebagai sumber bahan pangan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya, maka arah utama kebijakan pembangunan pertanian adalah meraih swasembada beras secara berkelanjutan. Namun demikian persoalan pokok adalah masih rendahnya produksi padi yang dicapai karena belum optimalnya pemberdayaan lahan potensial dan rendahnya produktivitas yaitu rata-rata 25,52 Ku/Ha atau lebih rendah dari produktivitas padi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 30,01 Ku/Ha.

Rendahnya produktivitas padi ini, disamping masih belum optimalnya penerapan rekomendasi pola tanam Intensifikasi dan dukungan sarana prasarana penunjang seperti jaringan pengairan, juga secara matematis tidak terlepas dari konsekuensi penetapan angka produktivitas padi berdasarkan hasil konversi atau kompilasi hasil bagi rata-rata dari angka produktivitas padi sawah yang luas tanamnya lebih kecil yaitu rata-rata 1.562 Ha/tahun dan angka produktivitas padi ladang yang luasnya lebih besar yaitu rata-rata 9.895 Ha/tahun tetapi produktivitasnya memang sangat rendah karena hampir tanpa sentuhan teknologi.

Selain padi, komoditas pertanian tanaman pangan yang mempunyai peran penting dan nilai tambah yang cukup tinggi adalah jagung dan kedelai sebagai bahan baku pakan ternak atau ikan. Namun demikian, kuantitas dan kualitas produksi serta produktivitasnya pun masih rendah. Untuk komoditi Jagung, produktivitas yang dapat dicapai baru 33,54 Ku/Ha atau di atas angka produktivitas Provinsi 28,28 Ku/Ha, sedangkan produktivitas Kedelai adalah 11,76 Ku/Ha atau lebih tinggi dari produktivitas Provinsi 11,74 Ku/Ha atau produktivitas nasional 13,55 Ku/Ha.

Oleh sebab itu dalam rangka mencapai hasil yang optimal, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi, jagung dan kedelai serta hortikultura, akan diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana / prasarana pertanian, optimalisasi lahan potensial dan pemberdayaan masyarakat tani melalui penerapan system dan usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai representasi dari Ekonomi Kerakyatan.

Pada bidang usaha peternakan dan budidaya perikanan, skala usaha dan produksi yang dihasilkan masih rendah dan kurang kompetitif sehingga belum dapat menjadi andalan atau salah satu sumber utama pendapatan petani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kemampuan pertahun untuk ketersediaan produksi daging yang berasal dari ternak besar/kecil baru mencapai 163 ton atau 35 % dari kebutuhan semestinya 464 ton. Dengan demikian, peningkatan skala usaha dan produksi akan dilakukan dengan penguatan kelembagaan tani, inovasi teknologi, pengamanan produksi, dan peningkatan kualitas sarana produksi (bibit) serta membangun pola kemitraan.

Pemerintah kabupaten Barito Utara juga mendukung program “Kalteng Besuh”, cetak sawah, intensifikasi, ekstensifikasi, pengembangan komoditi unggulan seperti komoditi bawang merah dan cabai sesuai arahan bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Alokasi anggaran rentang waktu 2013 – 2018 untuk mendukung program ini terus ditingkatkan mengingat strategisnya program ini untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Barito Utara khususnya dan Kalimantan tengah pada Umumnya. Program yang mendukung Kalteng “Besuh” di Kabupaten Barito Utara antara lain : Program peningkatan ketahanan Pangan/swasembada dan swasembada

berkelanjutan dan peningkatan produksi hasil peternakan

6) Perdagangan

Daya saing produk lokal Kabupaten Barito Utara belum optimal di pasar regional dan nasional. Kabupaten Barito Utara bukan daerah pengekspor langsung, tetapi merupakan penyuplai daerah eksportir lainnya seperti Kalimantan Selatan, sehingga perkembangan ekspor Kabupaten Barito Utara sulit untuk didata secara kuantitatif.

Penataan pasar/ritel modern perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan sehat antar pemain maupun dengan pasar tradisional masih kurang optimal. Terkait dengan penataan pasar modern, pemerintah bersama dengan DPRD tengah menyusun Peraturan Daerah berkaitan dengan penataan pasar modern di Kabupaten Barito Utara. Tetapi terkait hubungan antara pasar modern dan pasar tradisional dalam hal kerjasama belum diatur. Selama ini pemerintah tidak dapat mengevaluasi apakah pasar tradisional yang telah memiliki perjanjian dengan pemerintah untuk mengakomodasi produk lokal dari pengusaha lokal telah ditepati atau tidak. Kegiatan evaluasi tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada dasar hukum yang melatarbelakanginya.

Kegiatan promosi perdagangan yang ada selama ini belum memiliki target pasar yang jelas sehingga evaluasi juga sulit untuk dilakukan. Pemerintah lemah dalam kebijakan pengendalian pasar modern. Selain itu belum ada payung hukum untuk mengatur persaingan pasar modern dan tradisional atau persaingan antar mereka sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar lembaga untuk mempromosikan produk perdagangan.

7) Industri

Hasil industri kecil maupun menengah di Kabupaten Barito Utara selama ini belum berkembang dengan baik disebabkan masih rendahnya penguasaan teknologi industri, belum tertatanya struktur industri serta tidak tersedianya sentra industri potensial. Beberapa jenis komoditas produk unggulan daerah yang dihasilkan industri kecil dan menengah meliputi mebel kayu, kerajinan rotan, obat-obatan herbal tradisional dan kerajinan kayu berupa pembuatan bak truk dan body kapal berukuran kecil sampai sedang.

Industri kreatif sebagai jenis industri yang berfokus pada

penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreatifitas sebagai wujud kekayaan intelektual masih merupakan embrio di Kabupaten Barito Utara. Menurut tipenya industri kreatif dibedakan menjadi tiga tipe yaitu *generative creativity* yang merupakan bentuk asli dari kreatifitas yang diasosiasikan kepada ciptaan yang baru, unik atau berbeda dengan ciptaan sebelumnya. Kedua, *adoptive creativity* merupakan penemuan kreatif atas cara-cara baru hasil pengadopsian ide baru yang tercipta sebelumnya, untuk pengembangan proses yang baru dan untuk mendorong proses pengembangan itu sendiri. Ketiga, *retentive creativity* adalah penerapan ide baru pada gaya hidup konsumen dan penerapan ide baru pada operasi rutin suatu perusahaan. Atau dapat dikatakan jenis kreatifitas ini merupakan upaya untuk menerapkan secara berulang suatu temuan pada produk.

Di tingkat nasional pengembangan industri kreatif menemui beberapa masalah, antara lain: (a) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku industri kreatif yang masih kurang memadai. (b) menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif. (c) penghargaan/apresiasi terhadap insan kreatif dan karya kreatif yang dihasilkan masih rendah. (d) pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung industri kreatif. (e) kebutuhan akan lembaga pembiayaan yang mendukung pelaku industri kreatif yang belum terpenuhi secara optimal.

Di Kabupaten Barito Utara ada beberapa masalah sama yang dihadapi dalam langkah pengembangannya yaitu pada poin a dan e. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah belum dipahaminya industri kreatif oleh *stakeholder*, belum adanya studi yang intensif yang diarahkan untuk memahami pola pengelolaan pengembangan industri kreatif serta dampaknya terhadap perekonomian Kabupaten Barito Utara, dan terbatasnya sumber pendanaan bagi pengembangan industri kreatif.

Untuk itu dibutuhkan perhatian pemerintah untuk meningkatkan kegiatan industri kreatif. Agar pengembangan industri kreatif berjalan optimal maka pemerintah perlu menentukan tipe industri kreatif apa yang memungkinkan untuk dikembangkan terkait karakteristiknya. Sehingga diharapkan pengembangan dapat memiliki ukuran keberhasilan yang jelas

dan tepat.

Pelatihan untuk industri kreatif masih terkendala dana. Pengembangan industri kreatif yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum optimal karena terkendala dana. Pemerintah juga belum mampu mengandalkan kerjasama dengan para pihak lain untuk mengembangkan industri kreatif. Pembinaan terhadap jenis industri kreatif masih sedikit.

8) Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Barito Utara umumnya dikelola oleh masyarakat dan investor. Umumnya komoditi perkebunan masyarakat adalah jenis karet, kelapa sawit dan kakao. Sedangkan yang dikelola oleh investor adalah kelapa sawit.

Masalah yang terjadi pada perkebunan masyarakat adalah harga hasil produksi perkebunan tidak stabil; kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk perkebunan masih rendah; kapasitas kelembagaan perkebunan belum optimal; akses permodalan bagi petani belum tercapai dan beredarnya bibit tanaman perkebunan tidak bersertifikasi.

9) Energi dan sumber daya mineral

Permasalahan yang cukup menonjol pada bidang energi adalah kurangnya pasokan listrik yang memadai untuk kebutuhan energi kota dan penunjang investasi umum. Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan fasilitasi kontrak antara PT. Salamander Energy dengan PT.PLN (persero) guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Blok Karendan, Lahei dengan estimasi daya yang dihasilkan sebesar 2x65MW dan rencana beroperasi mulai tahun 2015.

Pada sektor pertambangan di Kabupaten Barito Utara Permasalahan yang mengemuka adalah pengawasan dan pembinaan yang belum terlaksana secara optimal, masih banyak perusahaan pemilik ijin usaha pertambangan yang sudah berproduksi tidak secara penuh melaksanakan reklamasi sesuai dengan dokumen Amdal, pelaksanaan program pengembangan masyarakat (*community development*) sekitar wilayah tambang masih minim serta tidak optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan dengan jumlah Kuasa Pertambangan sebanyak 200 lebih.

Dengan belum optimalnya pengawasan dan penertiban kegiatan tambang yang dilakukan oleh masyarakat, berpotensi pada peningkatan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan hidup. Pasokan energi listrik terutama untuk wilayah perdesaan masih belum optimal yang ditunjukkan dengan rasio elektrifikasi hanya 61,03 % (data sampai bulan Agustus 2012).

Sehubungan dengan permasalahan kurangnya ketersediaan pasokan listrik hampir diseluruh wilayah Kalimantan Tengah, pemerintah Kabupaten Barito Utara sangat mendukung kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terkait Kebijakan “Kalteng Tarang” yang telah dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Dengan program Pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan dialokasikan anggaran yang tiap tahunnya meningkat untuk mendukung program Kalteng Tarang dengan mengembangkan potensi sumberdaya alam yang tersedia di Kabupaten Barito Utara seperti pengembangan listrik mikro hidro, solar sell dan lain-lain yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan rumah tangga yang dialiri arus listrik khususnya di desa yang jauh dari jaringan listrik PLN.

10) Kehutanan

Luasnya wilayah hutan dan tingginya potensi kehutanan belum sebanding dengan kemampuan pemanfaatannya serta masih rendahnya nilai tambah yang dapat diperoleh masyarakat Kabupaten Barito Utara. Dalam hal ini beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sbb :

- 1) Rendahnya kinerja pemegang IUPHHK-HA dan lambatnya pembangunan hutan tanaman oleh pemegang IUPHHK-HTI.
- 2) Pemanfaatan hutan masih didominasi oleh usaha skala besar dengan masih terbatasnya keterlibatan usaha skala kecil dan masyarakat pada usaha pemanfaatan hutan.
- 3) Belum berkembangnya industri pengolahan HHBK dan pemasarannya.
- 4) Tumpang tindih pemanfaatan kawasan antar sektor
- 5) Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap illegal logging.
- 6) Reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan masih belum sebanding dengan percepatan degradasinya.
- 7) Informasi potensi keanekaragam hayati.

11) Permasalahan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang sulit dihindarkan dan terjadi secara merata di seluruh wilayah. Kabupaten Barito Utara juga tidak terlepas dari permasalahan ini. Hal-hal yang menjadi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara antara lain kemiskinan relatif, mentalitas, pendataan warga miskin, penyandang cacat, pengangguran, kader pengentasan kemiskinan serta program-program kemiskinan.

a. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif adalah karakteristik kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan suatu kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan kelompok masyarakat lainnya. Jenis kemiskinan ini ditemukan hampir secara merata di setiap kecamatan dan desa/kelurahan.

b. Mentalitas

Mentalitas masyarakat masih rendah dalam mengurangi permasalahan kemiskinan. Kesadaran masyarakat miskin untuk keluar dari kriteria miskin masih rendah. Mereka merasa sudah terbiasa mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga enggan jika bantuan tersebut dihentikan. Kebiasaan ini harus dirubah dan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memasukkan aspek keagamaan, sehingga mereka dapat belajar untuk menjadi mandiri dengan mengandalkan kemampuan yang mereka miliki.

c. Pendataan warga miskin

Pendataan warga miskin sangat membantu dalam penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran. Selama ini pendataan warga miskin sudah dilakukan, namun untuk mendapatkan data yang valid tidak mudah. Hal ini karena warga miskin tersebut relatif sering berpindah tempat dan cenderung tertutup karena alasan dan motivasi mendapatkan bantuan pemerintah.

d. Penyandang cacat

Pendampingan bagi penyandang cacat maupun sakit jiwa baik dari keluarga maupun dari pemerintah masih belum maksimal. Kaum

marginal ini belum mendapatkan perhatian yang lebih baik. Perhatian kepada mereka dapat ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas/sarana dan prasarana yang dapat membatu penyandang cacat untuk bergerak/berekspresi. Fasilitas semacam itu belum terbangun hingga saat ini.

e. Pengangguran

Masih terdapat pengangguran di Kabupaten Barito Utara. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Barito Utara harus dibekali dengan ketrampilan tambahan agar mereka siap diterima di dunia kerja. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan juga sangat perlu dilakukan agar mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan dapat memberdayakan diri sendiri dan masyarakat disekitar mereka. Pengangguran intelektual cenderung menunggu formasi pada pemerintahan yang jumlah formasi pada sektor dimaksud relatif terbatas.

f. Kader pengentasan kemiskinan

Kurangnya kader-kader pengentasan kemiskinan yang menjangkau hingga tingkat Desa. Diperlukan partisipasi masyarakat yang tidak miskin untuk mengentaskan warga yang miskin sehingga dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. Kader-kader kemiskinan ini adalah seseorang yang aktif dan gencar memberikan sosialisasi terkait kemiskinan dan turut serta dalam memberdayakan masyarakat miskin.

g. Program kemiskinan

Terjadinya tumpang tindih program-program kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD, sehingga menimbulkan ketidakmerataan. Sebaiknya ada pembagian tugas yang jelas antar SKPD untuk pengentasan kemiskinan. Definisi untuk kemiskinan juga perlu dibuat agar pendataan keluarga dan penduduk miskin tidak berbeda-beda antar SKPD. Program-program pelatihan yang diberikan pemerintah kepada warga miskin sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga jika dibutuhkan pasar mereka siap untuk diterjunkan. Untuk bantuan alat-alat pada saat pelatihan sebaiknya terus dipantau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penjualan alat-alat atau terjadinya kerusakan. Sementara ini terdapat progral lokal yaitu PM2L dan PNPM-MPd yang berjalan berkelanjutan dari tahun 2007 sampai saat ini.

12) Permasalahan Kesetaraan Gender

Permasalahan kesetaraan gender adalah kendala-kendala klasik yang ditemui Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara dalam upaya melakukan pembinaan gender di masyarakat baik dari kendala internal pemerintah maupun eksternal di masyarakat. Identifikasi masalah-masalah dimaksud diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum semua SKPD mencantumkan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana Permendagri No. 67 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1 “Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- b. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) serta penetapan Kelurahan Layak Anak (KELARA) Menuju KOTA LAYAK ANAK (KLA) sehingga dalam pelaksanaan nantinya perlu mendapatkan fasilitas dan dukungan dari seluruh instansi terkait maupun swasta.
- c. Belum maksimalnya kinerja kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) sehingga perlu penetapan kembali sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan dalam pemerintah daerah maupun swasta berupa dana, sarana dan prasarana serta tenaga administrasi.
- d. Belum semua SKPD mempunyai satu pemahaman dan persepsi terhadap responsifitas gender sebagaimana Permendagri No. 67 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 1 mengatakan pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

13) Permasalahan Kependudukan

- a. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas;
- b. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan;

- c. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil;
- d. Belum adanya UPTD pelayanan di setiap kecamatan;
- e. Belum adanya petugas registrasi pada setiap desa/ kelurahan

4.1.7 Permasalahan Pariwisata dan Budaya

Sektor pariwisata dapat membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perumusan kebijakan, aspirasi warga memegang peranan yang cukup penting sebagai salah satu dasar perumusan masalah dan isu-isu strategis yang terkait dengan pariwisata. Salah satu data yang dapat digunakan sebagai parameter/tolak ukur keberhasilan sektor pariwisata dalam pembangunan adalah data wisatawan dan pelaku usaha wisata. Data wisatawan dan pelaku usaha wisata yang akurat, sangat tergantung dari ketepatan metode yang dilaksanakan termasuk data jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan di suatu daerah. Sebagai salah satu daerah yang berkeinginan menjadi tujuan wisata, pariwisata di Kabupaten Barito Utara diharapkan menjadi potensi unggulan daerah. Sampai dengan tahun 2012 jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke kabupaten Barito Utara mencapai ratusan orang.

Masalah utama yang perlu segera ditindaklanjuti dan ditangani secara langsung maupun bertahap. Secara umum, beberapa hal yang menjadi permasalahan utama dalam pengembangan wisata di Kab. Barito Utara adalah:

- 1) Kebersihan di kawasan wisata dan sekitarnya.

Untuk mendapat predikat sebagai daerah wisata masih perlu memperhatikan kenyamanan wisatawan terutama dalam hal kebersihan di kawasan yang menjadi daya tarik wisatawan. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam permasalahan kebersihan wisata adalah kebersihan toilet, perilaku membuang sampah, coretan di area sekitar tempat wisata, kebersihan sarana umum, kebersihan sarana akomodasi dan lain-lain. Adanya biaya kebersihan di sarana umum seperti di toilet semakin memperburuk citra kebersihan. Dalam hal ini bukan dilihat dari nilai uang yang menjadi permasalahan, tapi karakter sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memperhatikan profesionalisme.

Kebersihan kawasan wisata menjadi tanggung jawab bersama, tidak

hanya pemerintah, masyarakat baik pengunjung maupun pedagang yang berjualan di objek wisata perlu selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sekecil apapun sampah, hendaklah dibuang pada tempatnya agar memudahkan para petugas kebersihan yang bekerja. Upaya pemerintah dalam penyediaan tong-tong sampah dan plang-plang himbauan agar masyarakat, wisatawan, pelaku usaha wisata untuk menjaga kebersihan dan keindahan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi.

2) Keamanan dan ketertiban yang menjamin kenyamanan wisatawan.

Rasa nyaman dan aman untuk berwisata di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan tiap tahun baik domestik maupun internasional serta lama tinggal wisatawan. Meskipun prestasi yang ditunjukkan pada sektor wisata terus membaik, maka perlu dijaga dan bahkan inovasi baru yang menjadi daya tarik bagi kenyamanan wisatawan.

Kenyamanan di jalan, ruang publik di lokasi wisata dan sekitarnya perlu ada sehingga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Barito Utara. Adanya peminta-minta di ruang publik maupun di kawasan wisata membuat wisatawan terganggu dan gerah akan keberadaannya. Meskipun tidak berdampak langsung bagi sektor pariwisata secara langsung akan tetapi kondisi seperti ini lambat laun jelas dapat menjadi bumerang bagi pariwisata.

3) Kekuatan sarana prasarana pariwisata, baik akomodasi, transportasi untuk wisatawan maupun jasa pelayanan pariwisata.

Salah satu keperluan yang penting bagi para wisatawan adalah kebutuhan akan sarana penginapan/hotel yang nyaman dan memadai. Hal ini terkait dengan rasa nyaman wisatawan saat melepas lelah dan mempersiapkan kembali untuk beraktifitas di hari berikutnya.

Selain itu jaringan dan sarana transportasi juga perlu menjadi perhatian dalam memberikan kemudahan bagi wisatawan menuju obyek dan daya tarik wisata.

- Perlu diperhatikan sarana prasarana dan kesehatan lingkungan, peningkatan kualitas SDM, kenyamanan dan keamanan.
- Dukungan *public transportation*, kemudahan menjangkau obyek wisata.

- Sarana tempat parkir yang memadai, tertib dan nyaman.

4) Kampanye sadar budaya pada para pelaku usaha wisata.

Keberadaan Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu cagar budaya di Kalimantan Tengah memang membutuhkan dukungan dari semua pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah. Kekhasan budaya yang ada akan menjadi sebuah ikon Kabupaten Barito Utara yang akan membedakannya dengan daerah lainnya. Kebudayaan Barito Utara yang berpangkal pada kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan budaya huma betang yang sampai saat ini masih terlestarikan dengan baik. Kesadaran masyarakat dalam menghidupkan nilai-nilai budaya daerah belum optimal karena masih berorientasi pada event/pementasan, belum menjadi aktifitas kegiatan pembinaan yang rutin dilaksanakan. Tidak hanya masyarakat yang memerlukan sadar wisata dan sadar budaya, akan tetapi peran pelaku usaha pariwisata dalam menggiatkan sadar wisata dan sadar budaya dapat menambah kekuatan daya tarik wisata berbasis budaya.

5) Kecintaan generasi muda terhadap budaya tradisional

Kebudayaan Dayak yang menjadi ruh nilai-nilai budaya di Barito Utara saat ini sudah cukup memperoleh apresiasi yang baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat utamanya generasi muda dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Meskipun dari sisi kuantitas masih perlu ditingkatkan karena sangat dipengaruhi oleh dampak masuknya arus budaya global, namun bukan berarti tidak ada regenerasi dalam transformasi seni dan tradisi Barito Utara.

Potensi kesenian dan juga adat istiadat serta sistem nilai yang ada di masyarakat merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Oleh karena itu pelestarian mutlak harus dilakukan untuk menjamin kesinambungan, namun bukan berarti seni dan tradisi menjadi sesuatu yang tidak dapat dijadikan sebuah potensi pariwisata khusus bagi Kabupaten Barito Utara. Kekayaan inilah yang menjadikan Barito Utara kaya akan potensi budaya sehingga layak untuk dikembangkan.

6) Diversifikasi atraksi pariwisata, melalui pengembangan dan inovasi di sektor wisata.

Diversifikasi atraksi pariwisata perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kabupaten Barito Utara sehingga

atraksi wisata yang ditawarkan tidak monoton dan menjadi kejenuhan bagi wisatawan. Atraksi wisata yang ditawarkan harus memiliki karakter yang mantap dan unik sehingga memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan dan dapat menimbulkan efek untuk mengunjungi atraksi wisata tersebut.

- 7) Kegiatan pariwisata berbasis budaya, khususnya atraksi budaya, desa wisata sebagai obyek utama untuk dikunjungi.

Permasalahan muncul ketika pembangunan sektor pariwisata sedikit demi sedikit mengancam eksistensi dan kelestarian budaya lokal. Secara perlahan-lahan tetapi pasti masyarakat akan mengadopsi budaya yang lebih modern yang berasal dari luar budayanya sendiri. Pengembangan pariwisata Barito Utara perlu diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian budaya. Untuk menciptakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian budaya, ada sejumlah hal yang dapat ditempuh. Pertama, penggalakan kembali festival- festival kebudayaan lokal. Kedua, perlu adanya pemetaan tata ruang pariwisata. Ketiga, memberikan muatan lokal kebudayaan dalam kurikulum pendidikan di Barito Utara. Keempat, revitalisasi rumah betang sebagai pusat kebudayaan. Kelima, pembentukan tim pemantau pengembangan pariwisata.

Jika berhasil diciptakan pengembangan pariwisata yang memperhatikan kelestarian budaya, dapat diyakini bahwa dari waktu ke waktu Barito Utara akan tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata. Terkait dengan desa wisata, sebutan Huma Betang (rumah bagi semua) membuktikan kedekatan atmosfir Kabupaten Barito Utara dengan “selera eksotisme” wisatawan domestik dan mancanegara. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Barito Utara yang memiliki obyek wisata, oleh karena itu upaya pengembangan dan promosi untuk menggugah daya tarik wisatawan perlu ditingkatkan.

Tabel 4.14. Jumlah Obyek, Jenis Obyek dan Nama Obyek Wisata Kab. Barito Utara 2012

Lokasi Kecamatan	Jumlah Obyek	Jenis Obyek	Nama Obyek
Montallat	1	Alam	1. Janah Gemuntur
Gunung Timang	1	Ziarah	1. Makam Singa Ngenuh
Gunung Purei	5	Alam	1. Gunung Lumut

			2. Gunung Tangur
			3. Batu Surat Uok
			4. Lemong Pantak
		Museum	5. Liang Tandir
Teweh Timur	3	Alam	1. Gua Liang Angah
		Museum	2. Air terjun Inih
			3. Mansaro
Teweh Tengah	7	Taman Rekreasi	1. Taman Rekreasi Remaja
		Alam	2. Air terjun Jantur Doyan
			3. Cagar Alam Pararawen
			4. Liang Pandan
			5. Liang Longo
			6. Liang Idai
			7. Jeram Pemantu
Lahei	1	Alam	1. Riam Rahaden
Teweh Baru	1	Alam	1. Balai Warik
Teweh Selatan	4	Taman Rekreasi	1. Dam Trinsing
			2. Dam Trahean
		Alam	1. Danau Butong
		Taman Rekreasi	1. Buper Panglima Batur
		Minat khusus	1. Kolam pemancingan
			2. Outbound Pangliam Batur
Lahei Barat	2	Budaya	1. Betang Tambau
			2. Betang Karamuan

Sumber Data : Dinas Budparpora Kebudayaan Kabupaten Barito Utara, 2011

8) Lama tinggal (*length of stay*)

Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Barito Utara relatif masih rendah. Rata-rata lama tinggal wisatawan itu pada kisaran 2 hari dua malam saja. Atraksi budaya dan kesenian-kesenian budaya Dayak sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Barito Utara hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan lama tinggal.

Tabel 4.15. Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Barito Utara

No.	Tahun	Lama Tinggal
1.	2007	2,01 hari
2.	2008	2,39 hari
3.	2009	2,41 hari
4.	2010	2,47 hari

Sumber: Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2011

9) Penyediaan paket wisata dan cinderamata yang memiliki kekhasan

produk lokal yang berkualitas internasional.

Dalam pengembangan paket wisata/*tour* pariwisata diharapkan dapat lebih melibatkan pasar. Hal penting dalam mengembangkan paket wisata nusantara perlu memenuhi tiga hal, yaitu sesuai dengan preferensi target pasar, penyebaran ke destinasi pariwisata yang lebih luas, serta mampu bersaing dengan paket-paket wisata luar negeri. Sasaran pasar potensial paket wisata nusantara adalah (1) segmen keluarga, (2) segmen rombongan pelajar/mahasiswa, (3) segmen perusahaan swasta/instansi, (4) segmen dewasa (27-46 tahun), dan (5) segmen kelompok ekonomi menengah keatas.

4.2 Isu-Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Bidang Pemerintahan

a) Meraih dan Mempertahankan Opini WDP / WTP

Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah Disclaimer (tidak memberikan pendapat). Opini disclaimer atas LKPD tersebut sangat perlu ditindaklanjuti secara akuntabel dan transparan dalam waktu yang secepatnya. Untuk itu perlu dibentuk Tim Terpadu antar Instansi lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang mengkoordinasi penyelesaian semua tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK dan merumuskan rencana Aksi Pencapaian Opini WDP dan WTP. Komitmen Pimpinan Daerah dan peran aktif didukung penuh semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mampu meraih opini WDP / WTP itu mutlak sangat dibutuhkan.

b) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat

Reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen- elemen birokrasi seperti kelembagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten guna peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang terukur melalui peningkatan angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

c) Pemberdayaan SDM, Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur PNS.

Pemberdayaan SDM aparatur PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan integritas diri PNS baik melalui tugas belajar, ijin belajar, diklat dalam jabatan/luar jabatan, diklat/bimbingan teknis fungsional dan structural dan lain-lain secara berjenjang sesuai peraturan / ketentuan yang berlaku. Peningkatan disiplin PNS terutama pada peningkatan disiplin jam kerja, perilaku, dedikasi dan kinerja PNS. Harus ada jaminan peningkatan disiplin PNS yang terukur melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja SKPD.

d) Pemberdayaan SDM, Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur PNS

Pemberdayaan SDM aparatur PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan integritas diri PNS baik melalui tugas belajar, ijin belajar, diklat dalam jabatan/luar jabatan, diklat/bimbingan teknis fungsional dan struktural dan lain-lain secara berjenjang sesuai peraturan / ketentuan yang berlaku. Peningkatan disiplin PNS terutama pada peningkatan disiplin jam kerja, perilaku, dedikasi dan kinerja PNS. Harus ada jaminan peningkatan disiplin PNS yang terukur melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja SKPD.

e) Peningkatan tata kelola aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka pengelolaan aset daerah yang baik diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset dan pengelola barang untuk penyusunan neraca pada laporan keuangan. Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah masih diperlukan tata cara penentuan potensi pendapatan daerah dan pemanfaatan aset daerah menjadi sumber penerimaan Retribusi Daerah.

4.2.2 Isu Strategis Bidang Infrastruktur

Beberapa isu strategis pembangunan infrastruktur daerah yang dihadapi daerah dalam rangka memajukan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

- a) Jaringan 6 (enam) ruas jalan strategis kabupaten masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah sehingga diperlukan upaya khusus percepatan peningkatan kualitasnya melalui program/kegiatan multiyears.

- b) Belum memadainya kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, antar kecamatan, antar desa dan wilayah terisolir.
- c) Masih banyaknya ruas jalan yang perlu mendapatkan perbaikan untuk dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan untuk mengurangi waktu tempuh.
- d) Meningkatkan/ mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- e) Menyeleraskan pembangunan prasarana jalan dengan amanat RTRW.
- f) Perlu adanya perbaikan tata kelola dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan dan perbaikan mekanisme pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan.

4.2.3 Isu Strategis Bidang Pendidikan

- a) Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan di daerah terpencil.
- b) Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara desa dan kota karena adanya kekurangan guru di daerah terpencil.
- c) Masih terdapat kekurangan Alat peraga guru, buku-buku referensi guru dan siswa, karena alat dan buku-buku tersebut tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang berlaku.
- d) Masih kurangnya kesejahteraan guru yang bertugas di daerah terpencil.
- e) Masih tingginya angka anak putus sekolah terutama pada jenjang pendidikan SLTA.
- f) Masih adanya yang tuna aksara pada usia lanjut.
- g) Keterbatasan akses juga disebabkan karena kondisi geografis yang sulit dan masih terbatasnya transportasi dan insfrastruktur.

4.2.4 Isu Strategis Bidang Kesehatan

- a) Masih tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita kurang gizi.
- b) Tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan.
- c) Masih rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat.

- d) Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu terutama di daerah terpencil.

4.2.5 Isu Strategis Ekonomi Kerakyatan

- a) Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal (Pertanian, Perikanan dan Peternakan)

Peranan sektor pertanian semakin strategis karena sektor ini mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara dan satu-satunya sektor ekonomi yang mampu bertahan ditengah krisis ekonomi. Dalam kaitannya untuk penanggulangan isu kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar, dimana secara spesifik sektor pertanian mempunyai peranan penting terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan baku industri, bio-energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan rakyat dan pelestarian lingkungan.

Di era otonomi saat ini, dimana daerah dituntut harus mandiri dalam memanfaatkan potensi daerah, untuk itu sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang sangat bermakna terhadap kemampuan daerah dalam memperbesar kemampuan pembiayaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk kontribusinya dalam menyumbangkan angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang secara nasional pada tahun 2012 adalah 15,14 %, dan berdasarkan data BAPPEDA Kabupaten Barito Utara bekerjasama dengan BPS Kabupaten Barito Utara dalam buku PDRB Kabupaten Barito Utara 2007 - 20011, walaupun bersifat fluktuatif dan cenderung menurun, namun sektor pertanian tetap memberikan kontribusi terbesar dibandingkan sektor lain terhadap PDRB Kabupaten Barito Utara yaitu rata-rata ± 27 %, yang berarti bahwa sektor pertanian tetap menjadi harapan utama dan harus ditingkatkan peranannya.

Secara substansial, pembangunan pertanian pada hakekatnya diarahkan untuk memperkuat Ketahanan Pangan Nasional dimana Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam rangka menjabarkan

kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional tersebut telah menetapkan skala prioritas pembangunan pertanian yang meliputi 4 (empat) TARGET SUKSES yaitu:

- 1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- 2) Peningkatan diversifikasi pangan;
- 3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
- 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Dari 4 (empat) target sukses pembangunan pertanian Kementerian Pertanian R.I, yang diselaraskan dengan Kebijakan/ Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka isu strategis pembangunan pertanian di Kabupaten Barito Utara di titik beratkan pada upaya pencapaian Swasembada dan swasembada berkelanjutan terutama untuk beras dan daging, Peningkatan nilai tambah dan daya saing serta Peningkatan kesejahteraan petani, yang diimplementasikan melalui pengelolaan sumber daya alam (lahan pertanian), meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana / prasarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia petani selaku subyek pembangunan perdesaan dan penerapan satu kesatuan system agribisnis berbasis potensi sumberdaya lokal (komoditi pertanian unggulan daerah), terutama mengangkat komoditas pertanian yang memiliki keunggulan komparatif, mempunyai nilai tambah dan daya saing tinggi menjadi komoditi dan produk unggulan daerah.

Beberapa sektor dan komoditas unggulan daerah yang akan menjadi program prioritas pembangunan pertanian Kabupaten Barito Utara yaitu:

1) Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditi tanaman pangan yang memegang peranan penting adalah padi, jagung dan kedelai. Untuk itu jenis padi yang akan dikembangkan terdiri dari padi ladang dan mempunyai keunggulan komparatif yaitu jenis “Talun” yang meliputi sebanyak 8 (Delapan) jenis dengan keunggulan seperti nasi pulen, warna putih bening, biji relatif kecil, dan aroma wangi. Sedangkan untuk padi sawah, disamping tetap mengembangkan varietas unggul nasional adaptif produktivitas tinggi mencapai luas tanam 4.000 Ha/Tahun, akan dikembangkan secara luas varietas unggul lokal dibeberapa wilayah dan waktu tertentu yang terdiri dari 8 (Delapan) jenis dengan keunggulan komparatif tahan rebah/banjir,

nasi pulen, anakan banyak lebih tahan terhadap serangan hama / penyakit.

Dari luas tanam 9.895 Ha rata-rata/ tahun, padi ladang jenis talun akan dipertahankan luas tanamnya menjadi 2000 Ha/ tahun sebagai Usaha Tani Menetap hingga mencapai luasan ekonomis, sedangkan untuk padi sawah varietas unggul lokal dari luas tanam 1.562 rata-rata/tahun menjadi 500 Ha/tahun.

Untuk tanaman palawija jenis Jagung yang akan dikembangkan adalah varietas unggul nasional adaptif baik untuk keperluan dipanen muda atau bentuk pipilan kering seluas 300 Ha/ tahun, sedangkan kacang Kedelai seluas 400 Ha/tahun guna memenuhi kebutuhan daerah untuk bahan baku tahu dan tempe, ataupun untuk bahan baku pakan ternak/ikan dalam dan luar daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam lokal dan peluang pasar, pengembangan komoditas hortikultura jenis sayuran yang akan dikembangkan adalah jenis sayuran tahan lama dan berorientasi agribisnis seperti kubis, bawang merah dan bawang putih. Sedangkan jenis buah-buahan adalah pisang kapok, tangkuhis dan sejenisnya, lengkung dataran rendah dan durian varietas unggul lokal yang telah dirilis menjadi unggul nasional seperti durian gantar bumi, si otong dan untek undang dengan target pembibitan 5.000 batang / tahun.

2) Komoditi Perikanan

Pembangunan perikanan di Kabupaten Barito Utara dilakukan melalui peningkatan system budidaya (kolam dan keramba) dan pengelolaan ikan diperairan umum. Untuk peningkatan produksi dan produktivitas ikan melalui system budidaya, jenis ikan yang akan dikembangkan dan menjadi andalan daerah adalah patin, nila dan lele. Sedangkan pengelolaan ikan yang bersumber dari perairan umum akan dilakukan dengan meningkatkan populasi ikan dan menjaga keseimbangan populasi ikan melalui penebaran benih ikan (Restocking) serta pengawasan terhadap cara penangkapan menggunakan bahan/alat berbahaya.

Oleh sebab itu, untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas ikan antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas

sarana prasarana perikanan, peningkatan kualitas dan produktifitas benih ikan, yang diproduksi oleh BBI dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas ikan adalah sebagai berikut:

- ❖ Produksi ikan dari hasil budidaya per tahun 5.500 Ton dan dari hasil perikanan tangkap (perairan umum) per tahun 1.492 ton;
- ❖ Produksi benih ikan per tahun 1.500.000 ekor;
- ❖ Peningkatan jumlah kolam per tahun 50 buah;
- ❖ Peningkatan jumlah keramba per tahun 50 buah.

3) Komoditi Peternakan

Menjabarkan kebijakan pencapaian swasembada daging nasional, pengembangan bidang peternakan akan lebih difokuskan pada pengembangan ternak besar terutama sapi, dan untuk ternak kecil adalah kambing dan babi serta unggas jenis itik dan ayam buras. Untuk ternak sapi, sesuai dengan hasil analisa baik kesesuaian tipologi lahan dan analisis usahatani, maka jenis ternak sapi yang akan dikembangkan melalui pola pembibitan dan penggemukan system koloni dan parsial dengan target peningkatan populasi pertahun 10%, sedangkan untuk ternak kecil 15% dan unggas 15%.

Guna mengoptimalkan upaya peningkatan produksi dan produktivitas ternak, maka upaya-upaya yang akan dilakukan adalah perbaikan kualitas bibit baik dengan seleksi indukan dan inseminasi buatan (IB), seleksi ternak betina yang ingin potong, system penggemukan dan pengamanan produksi melalui pengawasan dan pengendalian hama / penyakit serta peningkatan sarana prasarana peternakan.

- b) Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas industri perdagangan berbasis sumber daya alam lokal.

Peranan sektor perindustrian yang selama ini belum berkembang menjadi semakin strategis karena seiring dengan perkembangan pembangunan daerah, maka kebutuhan akan produk industri rumah tangga akan semakin meningkat. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IMK) dalam mengembangkan perindustrian seperti industri furniture rotan dan jenis souvenir lainnya.

Industri kreatif di Kabupaten Barito Utara selama ini masih menjadi embrio yang harus terus dibina kembangkan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas yang dapat bersaing dengan produk unggulan daerah lain. Diperlukan regulasi dari Pemerintah Daerah dalam mendukung tumbuh kembang sektor ini.

c) Optimalisasi pengembangan sektor perizinan

Optimalisasi layanan perizinan usaha, peningkatan PAD serta menghindari biaya tidak resmi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

d) Perkebunan

Isu-isu strategis pada urusan pertanian adalah masih cukup rendahnya kualitas dan nilai jual hasil perkebunan, minimnya ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan).

e) Kehutanan

1. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan
2. Belum berkembangnya industri pengolahan HHBK dan pemasarannya.
3. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan kegiatan RHL masih kurang.
4. Perlunya pembangunan KPH.
5. Data base peta dasar, peta tematik, data potensi kayu dan non kayu belum lengkap dan akurat

4.2.6 Isu Strategis Bidang Pertambangan dan Energi serta Lingkungan Hidup

1. Dalam rangka menuju pengelolaan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*), Pemerintah Kabupaten Barito Utara selalu terus mengembangkan kegiatan pertambangan yang taat dan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan nantinya diharapkan berdampak pada tidak terjadinya pemborosan sumber daya mineral dan batubara khususnya di Kabupaten Barito Utara, tercapainya optimalisasi sumberdaya, terlindunginya fungsi-fungsi lingkungan, terlindunginya keselamatan dan kesehatan para pekerja serta terlindunginya hak dan peningkatan taraf hidup serta ekonomi masyarakat di sekitar tambang.

Secara umum permasalahan yang lebih dominan berdasarkan identifikasi pada kegiatan pertambangan di Kabupaten Barito Utara dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) permasalahan yaitu a) Kuantitas dan kualitas Aparatur Pemerintah, b) Kepedulian sosial perusahaan dan c) Konflik sosial masyarakat.

a) Kuantitas dan kualitas Aparatur Pemerintah

Permasalahan aparatur pemerintah sangat mempengaruhi dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara. Kurangnya kualitas dan kuantitas serta rendahnya aparatur berdampak pada tidak optimalnya pemantauan kewajiban-kewajiban administrasi dan laporan kegiatan lapangan perusahaan.

Kedepan diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur melalui penerimaan CPNS yang sesuai dengan keahlian dan latar belakang ilmu pendidikan serta peningkatan kualitas aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan pertambangan sehingga terciptanya sumberdaya manusia yang mampu menjalankan pembinaan dan pengawasan pertambangan menuju terwujudnya penerapan good mining practice.

b) Kepedulian Sosial Perusahaan

Berjalannya kegiatan perusahaan tidak lepas dari dukungan sosial masyarakat di sekitar tambang, permasalahan ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan pertambangan agar efektif dan efisien. Kepedulian perusahaan melalui pelaksanaan CD/CSR merupakan salah satu yang wajib dilaksanakan setiap perusahaan yang diprogramkan setiap tahun melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Pelaksanaan sudah berjalan namun masih belum optimal dilaksanakan karena masih banyak keluhan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung ke Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitar tambang perlu ditingkatkan karena tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang baik kepedulian sosial perusahaan tidak akan mencapai sasaran yang tepat sesuai dengan program.

c) Konflik Sosial Masyarakat

Permasalahan konflik sosial masyarakat dapat berupa konflik horizontal antar masyarakat, konflik masyarakat dengan perusahaan dan konflik masyarakat dengan pemerintah. Berdasarkan prosentase yang terdata di Kabupaten Barito Utara konflik sosial yang paling dominan adalah konflik masyarakat dengan perusahaan dan konflik horizontal antar masyarakat. Penyebab utama konflik tersebut umumnya bersumber dari adanya klaim ganda kepemilikan lahan terutama lahan yang termasuk dalam koordinat milik perusahaan. Selain itu, konflik masyarakat dengan perusahaan juga disebabkan belum adanya kesesuaian tali asih atau harga ganti rugi lahan.

2. Permasalahan pinjam pakai kawasan hutan yang proses penerbitan ijin dari Menteri Kehutanan memerlukan waktu yang lama.
3. Luas wilayah Kabupaten Barito Utara atas dasar Digitasi Planimetris atas peta RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 adalah 1,019.143 ha, sedangkan menurut BPS adalah 830.000 ha dan jika menggunakan data bersumber dari BPS maka Kabupaten Barito Utara kehilangan APL seluas 219.143 ha.

4. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi :

Sumber energi adalah sebagian sumber daya alam antara lain minyak dan gas bumi, batu bara, air, panas bumi, gambut, biomassa dan sebagainya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat dimanfaatkan sebagai energi. Dalam rangka ketahanan energi nasional, pemerintah menggalakkan pencarian jenis sumber energi alternatif tertentu untuk menggantikan jenis sumber energi bahan bakar minyak yang persediannya semakin menipis. Jenis sumber energi alternatif yang ada di Kabupaten Barito Utara ialah :

- a. Energi yang dapat diperbaharui (Panas Surya dan air);
 - b. Energi yang tidak dapat diperbaharui (Batu bara dan Gas Bumi)
5. Distribusi BBM subsidi jenis premium dan minyak solar di Kabupaten Barito Utara disediakan oleh Pertamina di 3 SPBU dan 3 APMS, dari 6 penyuplai BBM bersubsidi tersebut seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM di Kabupaten tetapi praktik di lapangan tidak demikian karena adanya spekulasi yang bermain dalam bisnis BBM. Dalam menjaga BBM bersubsidi

agar tidak diselewengkan ke perusahaan maka Pemerintah daerah melarang perusahaan menggunakan BBM bersubsidi tetapi pada kenyataannya hanya sebagian perusahaan pertambangan dan perkebunan yang melaporkan jumlah penggunaan BBM non subsidi serta menyampaikan kontrak agen BBM industri.

6. Pemrakarsa belum melaksanakan pengelolaan lingkungan di lapangan dengan baik yang menyebabkan terhambatnya pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
7. Terganggunya kawasan konservasi dan fungsi hutan lindung karena adanya alih fungsi lahan di area HCVF.
8. Kegiatan reklamasi tambang yang kurang maksimal sehingga mengganggu ekosistem pada kawasan reklamasi.

4.2.7 Isu Strategis Bidang Kesetaraan Gender

Sesuai dengan PERMENDAGRI No 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah, pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen untuk melaksanakan dan mengkomodir kebijakan, program kegiatan terkait isu ini. Ada beberapa isu yang mengemuka terkait pengarusutamaan gender ini yakni :

- a. Belum maksimalnya pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) dalam Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Barito Utara
- b. Belum Lengkapnya syarat –syarat yang harus dipenuhi untuk menuju Kabupaten Barito Utara sebagai “KOTA LAYAK ANAK” (KLA).
- c. Belum Optimalnya Peranan “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak” (P2TP2A) Dalam rangka menciptakan dan menuju Keluarga Damai, Bahagia dan Sejahtera di Kab. Barito Utara.
- d. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.



B.A.B V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Pembangunan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip Reformasi birokrasi dan *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan Negara dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati Barito Utara terpilih Tahun 2013-2018 merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025, diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Barito Utara menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna. Maka visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2013 – 2018 adalah :

“Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkeadilan Menuju Kabupaten Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera”

Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018 ini menjadi arah dan cita-cita pembangunan daerah bagi penyelenggara pemerintahan dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan mengandung makna upaya sadar untuk lebih mempercepat pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha yang menjadi pendorong kemajuan daerah dimaksud seperti :

- a. Peningkatan investasi untuk menambah barang modal (perumahan, jalan jembatan, pembangunan pabrik-pabrik dan atau barang-barang modal lain;
 - b. Pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin sasaran potensial;
 - c. Peningkatan pengeluaran Pemerintah Daerah, khususnya untuk membeli barang-barang buatan asli daerah dan atau dalam negeri.
2. Pembangunan di Berbagai Bidang mengandung makna bahwa pembangunan seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan yang pada implementasinya diprioritaskan kepada sektor tata kelola pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar dan ekonomi kerakyatan serta lingkungan hidup sebagaimana uraian berikut :
- a. Pembangunan dan perbaikan ketatakelolaan pemerintahan yang baik;
 - 1) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih dari tindak KKN, peningkatan kinerja aparatur yang profesional yang mengedepankan disiplin kerja tinggi dalam menjalankan administrasi pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan secara nyata dalam rangka pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2) Mendekatkan dan meningkatkan efektifitas serta transparansi pelayanan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak berkenaan dengan layanan pendidikan, kesehatan dan hak-hak masyarakat lainnya dalam berinvestasi dan usaha.
 - 3) Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan oleh lembaga pengawas dalam rangka perbaikan kinerja dan laporan pemerintah daerah ke arah yang lebih baik.
 - b. Pembangunan kesehatan yang berkualitas;
 - 1) Pembangunan infrastruktur kesehatan yang berkualitas berupa Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu.
 - 2) Mampu memberikan layanan kesehatan yang bermutu dan ber standar nasional.
 - 3) Mencerminkan daerah yang sadar akan kesehatan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

c. Pendidikan berkualitas;

- 1) Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan menghargai keragaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat Barito Utara dan tanpa diskriminasi.
- 2) Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), melalui pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu perlu disediakan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang bermutu.
- 3) Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan Iptek untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas penduduk Kabupaten Barito Utara, terutama bagi penduduk usia produktif.
- 4) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Barito Utara harus memiliki kualitas yang berstandar Nasional sesuai amanat undang undang dengan menyediakan dana pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBD.
- 5) Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan peserta didik sekaligus mampu berkompetensi di ajang kompetisi ataupun perlombaan.
- 6) Mampu menciptakan manusia seutuhnya yaitu keseimbangan antara kecerdasan intelegensi, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kesehatan fisik (Kinestetik).
- 7) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan bantuan siswa berprestasi.
- 8) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan membangun serta merehabilitasi ruang kelas, gedung sekolah dan fasilitas sekolah lainnya termasuk rumah dinas (Kepala Sekolah, guru dan penjaga sekolah).

d. Pembangunan infrastruktur dasar daerah;

Upaya pembangunan infrastruktur dasar daerah terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

e. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

1) Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara.

2) Mendorong perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi potensi SDA dan SDM daerah dengan kinerja ekonomi berdasar kearifan lokal.

3) Pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat luas di Kabupaten Barito Utara.

f. Pengelolaan lingkungan hidup terutama difokuskan kepada pelestarian hutan dari degradasi lahan, eksploitasi hutan dan tambang serta pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara.

3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat;

Peningkatan ekonomi masyarakat dalam hal ini berkonotasi pengembangan ekonomi lokal yang merupakan proses penyesuaian diri yaitu proses menyusun lembaga-lembaga baru, pengembangan dan pemilihan berbagai industri, perbaikan kualitas kerja dalam kapasitas produksi barang-barang, identifikasi pasar-pasar baru, transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

4. Secara Berkeadilan mengandung makna suatu rangkaian usaha terintegrasi di berbagai bidang, guna membentuk suatu yang mengarah pada kebaikan dengan memperhatikan setiap bobot yang ada agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

5. Kabupaten Barito Utara yang Lestari dan Sejahtera;

Lestari merupakan sesuatu yang berkelanjutan, sementara pengertian sejahtera bermakna kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi secara lahir dan batin adil dan merata.

5.2 Misi Pembangunan

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2013 – 2018 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang.
2. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.
3. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional.
4. Meningkatkan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada tempat yang benar.
5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

5.3 Prinsip-prinsip dan Nilai-nilai

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang perlu dikembangkan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

A. Prinsip-prinsip

- a. Akuntabilitas : Pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

- b. **Transparansi** : Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses- proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan serta informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- c. **Partisipasi** : Setiap warga memiliki hak yang sama dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
- d. **Konsistensi** : Perencanaan pembangunan jangka menengah harus memiliki prinsip konsistensi dengan perencanaan pembangunan jangka panjang.
- e. **Sinergisitas** : Perencanaan pembangunan daerah harus bersinergisitas dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan provinsi.

B. Nilai-nilai

- a. **Profesionalisme** : Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. **Efisiensi** : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- c. **Berkualitas** : Upaya untuk menghasilkan kegiatan pembangunan yang benar benar bermanfaat untuk masyarakat.
- d. **Revitalisasi** : Memperkuat kembali (revitalisasi) mekanisme perencanaan pembangunan dan fungsi lembaga perencanaan.
- e. **Inovasi** : Upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna menciptakan produk unggulan daerah yang mempunyai daya saing guna kesejahteraan masyarakat.

- f. Holistik : Upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektoral dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- g. Iman dan Taqwa: Memperkuat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap penyelenggara pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 5.1
Matrik Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	<p>Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berdaya saing. 2. Mewujudkan pengembangan BUMD yang berbasis keunggulan lokal. 3. Mewujudkan percepatan pembangunan/ peningkatan infrastruktur terutama jalan dan jembatan strategis kabupaten melalui program multiyear yang lebih berkualitas serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan laju investasi dengan memperhatikan keserasian tata ruang. 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur antar wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. 2. Terwujudnya BUMD yang maju, mandiri, berbasis keunggulan lokal dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah 3. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastuktur daerah (jalan dan jembatan) strategis kabupaten yang menghubungkan kabupaten ke kecamatan dan desa secara merata dan mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan laju investasi dalam koridor keserasian tataruang. 4. Terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah secara terpadu.
2	<p>Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan, kependudukan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan masyarakat Barito Utara yang cerdas, berkualitas, berkepribadian, sehat jasmani dan rohani, memiliki SDM yang berkompetensi sehingga mampu mandiri, sejahtera dan bebas dari belenggu kemiskinan 2. Mewujudkan pelayanan kependudukan dengan perizinan yang mudah, murah, tertib administrasi dan terciptanya lapangan kerja yang luas untuk mengentaskan kemiskinan. 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor layanan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pencapaian indikator pendidikan yang mendukung peningkatan pembangunan manusia yang berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan. 2. Terwujudnya pencapaian indikator kesehatan yang mendukung peningkatan pembangunan manusia serta masyarakat yang mandiri 3. Terwujudnya kemudahan akses perizinan serta terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan 4. Terwujudnya pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor layanan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan

3	<p>Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional. 2. Mewujudkan pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor usaha -usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan dan kemakmuran rakyat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah untuk kemakmuran rakyat Barito Utara. 2. Terwujudnya pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor usaha -usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.
4	<p>Meningkatkan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada tempat yang benar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan didukung oleh SDM aparatur yang handal pada bidang tugasnya. 2. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan bebas KKN dengan sistem birokrasi yang efektif dan efisien yang didukung oleh SDM aparatur yang handal di bidang tugasnya. 2. Terwujudnya pembangunan di segala bidang dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi
5	<p>Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p>	<p>Mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah yang memiliki kualitas kehidupan berbudaya, kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pembangunan dengan masyarakat yang agamis, berahlak mulia, memiliki toleransi antar umat beragama. 2. Terwujudnya pembangunan dengan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai luhur budaya, kearifan lokal, tidak membedakan, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM

Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi pedoman perencanaan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan Kebijakan Pembangunan selama lima tahun.

Arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta mencermati gambaran umum situasi daerah guna mencapai tujuan strategis pembangunan daerah, maka Pemerintahan Kabupaten Barito Utara kedepan memprioritaskan lima bidang pengembangan, yaitu:

1. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai berikut :
 - Evaluasi dan Reformasi Kelembagaan;
 - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (Kependudukan, investasi dan UMKM);
 - Peningkatan disiplin, Profesionalisme dan layanan Aparatur;
 - Peningkatan dan pemantapan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan;
 - Peningkatan litbang, inovasi dan kreativitas kerja;
 - Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan (WTP);
 - Menjamin penegakan hukum, keamanan dan ketertiban serta demokratisasi;

2. Terpenuhinya sarana dan prasarana umum secara *integrative* dan *komprehensif*, layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pengentasan kemiskinan:
 - Peningkatan Kuantitas dan Kualitas jalan (Jalan Yang menghubungkan Ibu Kota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten dan Provinsi);
 - Peningkatan Ketersediaan air bersih (Perkotaan dan Perdesaan).
 - Peningkatan Infrastruktur Perhubungan (Dermaga, Pelabuhan sungai, Komunikasi, Bandara).
 - Peningkatan/Pengembangan Listrik (PLTD, PLTG, PLTS).
 - Peningkatan Infrastruktur dan areal Kepariwisata.
 - Pemantapan RTRWK (Makro dan detail/rinci).
 - Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh.
 - Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.
3. Peningkatan *SDM* dan ekonomi masyarakatnya secara berkeadilan:
 - Peningkatan Indeks Pendidikan (tuntas Buta Huruf, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Sampai dengan SLTA, Pembinaan Dan Pengembangan Perguruan tinggi).
 - Peningkatan Indeks Kesehatan (Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Sarana Prasarana Kesehatan Sampai ke Perdesaan, Pemberantasan Penyakit Menular, Penanggulangan Kekurangan Gizi).
 - Peningkatan Pendapatan, Daya Beli dan Ketersediaan Kebutuhan Masyarakat.
 - Pengembangan BUMD.
4. Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui peningkatan kuantitas dan kualitas investasi dengan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi.
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
 - Peningkatan Upaya Pendanaan APBD Provinsi, APBN Serta CD/CSR.
 - Pengembangan BUMD dalam Penanganan Usaha produktif (Perusda Batara Membangun, *Participating Interest*, dll).
 - Pengembangan Investasi Skala Menengah-Besar Untuk

- Penyerapan Tenaga Kerja (Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Peternakan serta Migas, Dll).
- o Peningkatan Kualitas Promosi serta Kerjasama Investasi dan Pembangunan.
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan budaya kearifan lokal, toleransi kultural antar umat beragama:
- o Peningkatan Partisipasi (Swadaya) dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung keberagaman suku, ras dan agama dalam menciptakan ketertiban umum.
 - o Peningkatan Ketahanan masyarakat Melalui Revitalisasi Linmas yang membuka wawasan kebangsaan.
 - o Pengembangan Ekonomi Lokal Pariwisata.

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, diarahkan untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya aparatur maupun kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya aparatur pemerintah yang handal dan pemerintahan yang baik, bersih dan sehat. *Terpenuhinya sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pembangunan Infrastruktur Daerah* serta terpenuhinya ketersediaan air bersih, sarana komunikasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, penerangan jalan (aliran listrik ke pelosok desa) akses jalan ke pedesaan diarahkan untuk menghindari kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan, antar wilayah, antar kecamatan dan antar perdesaan, serta membuka isolasi wilayah.

Infrastruktur jalan akan menjadi stimulan bagi pengembangan wilayah di bidang lain, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan bidang lainnya. Pembangunan *Bandar Udara Trinsing, Jalan Kereta Api dan Sarana Telekomunikasi/Informasi* perlu terus dipacu penyelesaiannya guna mendukung distribusi dan pemasaran hasil-hasil pertanian khususnya karet dan perkebunan kelapa sawit. Sasaran yang ingin dicapai adalah integrasi wilayah secara terpadu, peningkatan perekonomian daerah dan menarik investor dari berbagai sektor potensial.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan ekonominya, diarahkan untuk mencapai SDM yang berkualitas yang mampu mengelola

sekaligus mempertahankan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Utara dengan baik. Sejalan dengan itu sumberdaya yang bisa diperbaharui seperti pertanian dalam arti luas dan budidaya perikanan serta pariwisata juga bisa berkembang pesat karena dikelola oleh SDM yang cerdas.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui *peningkatan kuantitas dan kualitas investasi dengan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, menciptakan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi*, diarahkan untuk memberikan pelayanan yang bermutu, mudah, murah, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat, khususnya para pelaku ekonomi dan investor. Penekanan pelayanan ini disamping pada sisi pemerintahan yang baik, juga diharapkan partisipasi masyarakat dalam mendukung iklim usaha yang kondusif, bersinergi dan kebersamaan dalam sistem usaha yang saling menguntungkan. Sasaran yang ingin dicapai adalah terbukanya lapangan kerja baru dengan pelibatan masyarakat setempat.

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Lokal, diarahkan untuk mengembangkan ekonomi masing-masing wilayah dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi ketertinggalannya dibanding dengan kelompok masyarakat lain, di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan wilayah. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat, peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, kemampuan kewirausahaan dan berkembangnya industri kecil dan menengah.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan di atas ditempuh melalui strategi pokok yang terkait, yaitu :

1. Menginventarisir semua Potensi Pembangunan baik itu Potensi Ekonomi, Sosial, Budaya, Alamiah dan Skill Pemerintahan dan Masyarakat, sebagai modal pembangunan.

Sasaran strategi ini adalah Terwujudnya Lembaga Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang Efisien, Efektif, Kompetitif, Responsif, Adaptif dengan memperhatikan aspek Kewibawaan, Akuntabel dan Responsibel.

2. Memberikan ruang lingkup yang luas guna terciptanya iklim

pembangunan yang kondusif dengan menyediakan perangkat hukum dan keberpihakan aparatur pemerintah dalam kemajuan yang dikehendaki.

Sasaran strategi ini adalah Terwujudnya pembangunan dan pelayanan yang demokratis dengan kebijakan yang berpijak pada kepentingan dan hajat rakyat serta hubungan baik dari setiap elemen pembangunan.

3. Membuat sketsa Potensi daerah berdasarkan geografis agar pembangunan dan pergerakan ekonomi, sosial dan budaya tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya serta memenuhi hajat hidup masyarakat.

Sasaran strategi ini adalah Terwujudnya peranserta aktif masyarakat dan sektor swasta dengan meningkatnya kapasitas dan meningkatnya pendapatan serta kesejahteraan sektor swasta dan masyarakat.

4. Melaksanakan pembangunan yang benar-benar menyangkut kepentingan umum seperti ketersediaan air bersih, jalan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, pendidikan, penerangan, sarana ibadah, kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata.

Sasaran strategi ini adalah: (a) Terwujudnya peningkatan PADS, PAD serta potensi keuangan daerah lainnya guna pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan peningkatan sistem pelayanan publik dengan memperhatikan tingkat kepuasan dan menurunnya tingkat keluhan dan komplain terhadap pemerintah, (b) Terwujudnya kelancaran arus transportasi, telekomunikasi, informasi dan perdagangan barang dan jasa dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, tertib dan asri.

5. Membuka pintu investasi yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak guna percepatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, selain pembukaan lapangan kerja yang berimplikasi pada penurunannya angka pengangguran dan angka kriminalitas serta terbukanya akses pertumbuhan masyarakat.

Sasaran strategi ini adalah: Mewujudkan Barito Utara sebagai pusat ekonomi, perdagangan, wisata dan layanan jasa bagi daerah sekitar dengan melihat letak geografisnya di tengah DAS Barito wilayah Kalimantan Tengah.

Strategi pokok menginventarisir semua potensi Pembangunan baik itu Potensi Ekonomi, Sosial, Budaya, Alamiah dan Skill

Pemerintahan dan Masyarakat, sebagai modal pembangunan diimplementasikan melalui kebijakan:

- 1) Evaluasi kinerja lembaga pemerintah kabupaten Barito Utara yang telah ada.
- 2) Analisis lembaga pemerintah kabupaten Barito Utara untuk mengetahui lembaga yang perlu ada dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten Barito Utara.
- 3) Penetapan struktur dan proses kewenangan dan tanggungjawab organisasi secara jelas dan tegas.
- 4) Penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab organisasi secara jelas, tegas dan fleksibel.
- 5) Rekrutmen, penempatan, promosi dan mutasi sesuai dengan kualifikasi teknis atau hasil analisa jabatan.
- 6) Penataan aparatur sesuai dengan prinsip "*The right man on the right job*".
- 7) Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah.
- 8) Penetapan kualifikasi aparatur.
- 9) Penegakan disiplin kerja, etika dan profesi aparatur pemerintah.
- 10) Sistem kontrol dan evaluasi kinerja.

Strategi pokok memberikan ruang lingkup yang luas guna terciptanya iklim pembangunan yang kondusif dengan menyediakan perangkat hukum dan keberpihakan aparatur pemerintah dalam kemajuan yang dikehendaki diimplementasikan melalui kebijakan:

- a. Membuka dan dibuka saluran komunikasi dengan pihak sektor swasta dan komponen masyarakat.
- b. Sistem perencanaan *bottom up planning*.
- c. Sistem dan mekanisme keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan layanan masyarakat.
- d. Mendorong partisipasi tiga sektor dalam proses pembuatan kebijakan.
- e. Transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan strategis, teknis dan operasional.
- f. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkonsultasi dengan aparatur pemerintah.
- g. Membuka dan dibuka forum konsultasi dan dialogis antara pemerintah, DPRD dan komponen masyarakat.

h. Intensitas komunikasi dengan DPRD, swasta dan masyarakat.

Strategi pokok membuat sketsa potensi daerah berdasarkan geografis agar pembangunan dan pergerakan ekonomi, sosial dan budaya tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya serta memenuhi hajat hidup masyarakat, diimplementasikan melalui kebijakan:

- (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam.
- (3) Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD.
- (4) Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD.
- (5) Menekan biaya pemungutan PAD.
- (6) Mempromosikan Kabupaten Barito Utara untuk menarik investor masuk ke Kabupaten Barito Utara baik level lokal, regional maupun internasional.
- (7) Mendorong dan memberi kemudahan fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya ke Kabupaten Barito Utara.

Strategi pokok melaksanakan pembangunan yang benar-benar menyangkut kepentingan umum seperti ketersediaan air bersih, jalan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, pendidikan, penerangan, sarana ibadah, kepemudaan, kebudayaan dan pariwisata diimplementasikan melalui kebijakan:

- 1) Meningkatkan kualitas jalan raya.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih.
- 3) Penyediaan fasilitas umum (taman kota, lapangan olah raga, jalur hijau).
- 4) Rekayasa lingkungan kabupaten Barito Utara sesuai aturan yang berlaku.
- 5) Pengendalian lingkungan.
- 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.
- 7) Meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan daerah sekitarnya.
- 8) Menyediakan sarana transportasi udara.
- 9) Memfasilitas penyediaan pasar, pusat pertokoan dan pusat perdagangan.

- 10) Memfasilitas kegiatan ekonomi dan perdagangan.
- 11) Mendorong sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.
- 12) Memfasilitasi, memberi kemudahan bagi sektor swasta dan masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha.
- 13) Memberi bantuan modal usaha, teknologi dan manajemen usaha.
- 14) Memfasilitasi usaha kemitraan antara pengusaha kecil, menengah
- 15) Menata kembali tata ruang kabupaten Barito Utara sesuai dengan kondisi geografis.
- 16) Penegakan hukum di bidang properti dan ijin mendirikan bangunan.
- 17) Pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan dengan bertumpu pada pembangunan ramah lingkungan.
- 18) Menjalin usaha kemitraan dengan daerah lain.
- 19) Membudidayakan potensi wisata.
- 20) Membudidayakan seni budaya dan produk unggulan lokal.

Strategi pokok membuka pintu investasi yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak guna percepatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, selain pembukaan lapangan kerja yang berimplikasi pada penurunannya angka pengangguran dan angka kriminalitas serta terbukanya akses pertumbuhan masyarakat diimplementasikan melalui kebijakan :

- (1) Mempromosikan kabupaten Barito Utara untuk menarik investor masuk ke kabupaten Barito Utara baik level lokal, regional maupun nasional.
- (2) Mendorong dan memberi kemudahan fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya di kabupaten Barito Utara.

Seluruh kebijakan tersebut, selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Barito Utara. Setiap SKPD akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya. Selain itu SKPD juga melaksanakan kegiatan lintas SKPD dan kewilayahan. Pengembangan program dan kegiatan di kelima sektor unggulan diatas, memiliki lingkup yang luas.

Secara umum program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara, termasuk pemerintah beserta seluruh unit SKPD yang ada. Program dan kegiatan pada peningkatan infrastruktur dalam arti luas, hendaknya dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani bidang infrastruktur, didukung oleh SKPD-SKPD lainnya yang terkait dalam kerangka pembangunan wilayah secara terpadu sesuai dengan kondisi dan potensi daerah. Begitu pula halnya dengan pengembangan sektor yang lain, dan akan melibatkan program dan kegiatan utama dan pendukung dalam koordinasi SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab terhadap bidangnya.

Tabel 6.1
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Barito Utara

VISI : “Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkeadilan Menuju Kabupaten Barito Utara Yang Lestari dan Sejahtera”

MISI 1 :Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju isvestasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
5. Mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berdaya saing. 6. Mewujudkan pengembangan BUMD yang berbasis keunggulan lokal. 7. Mewujudkan percepatan pembangunan/ meningkatkan infrastruktur terutama jalan dan jembatan strategis kabupaten melalui program multiyear yang lebih berkualitas serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan laju investasi dengan memperhatikan keserasian tata ruang. 8. Mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur antar wilayah	5. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. 6. Terwujudnya BUMD yang maju, mandiri, berbasis keunggulan lokal dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah 7. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastuktur daerah (jalan dan jembatan) strategis kabupaten yang menghubungkan kabupaten ke kecamatan dan desa secara merata dan mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi dan laju investasi dalam koridor keserasian tata ruang. 8. Terwujudnya pemerataan pembangunan antar wilayah secara terpadu.	1. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. 2. Menggalakkan BUMD dan kegiatan promosi serta membuka peluang investasi. 3. Melaksanakan peningkatan aksesibilitas jaringan jalan dan jembatan untuk pengembangan wilayah dan kelancaran transportasi 4. Memberikan ruang lingkup yang luas guna terciptanya iklim pembangunan yang kondusif dengan menyediakan perangkat hukum investasi dalam koridor pembangunan wilayah terpadu.	1. Mendorong pihak swasta dan komponen masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan iklim investasi yang kompetitif. 2. Pembinaan dan pengembangan BUMD. 3. Meningkatkan kualitas jalan raya dan jalan lingkungan. 4. Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih. 5. Penyediaan fasilitas umum (taman kota, lapangan olah raga, jalur hijau dll). 6. Rekayasa lingkungan Kabupaten Barito Utara sesuai aturan yang berlaku. 7. <i>Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan.</i> 8. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. 9. Meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan daerah sekitarnya. 10. Menyediakan sarana transportasi murah bagi anak sekolah dan masyarakat umum 11. Memfasilitasi penyediaan pasar, pertokoan 12. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur secara terpadu, serasi, seimbang laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan wilayah.

MISI 2 : Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan, kependudukan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<p>4. Mewujudkan masyarakat Barito Utara yang cerdas, berkualitas, berkepribadian, sehat jasmani dan rohani, memiliki SDM yang berkompetensi sehingga mampu mandiri, sejahtera dan bebas dari belenggu kemiskinan</p> <p>5. Mewujudkan pelayanan kependudukan dengan perizinan yang mudah, murah, tertib administrasi dan terciptanya lapangan kerja yang luas untuk mengentaskan kemiskinan.</p> <p>6. Mewujudkan pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor layanan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan</p>	<p>5. Terwujudnya pencapaian indikator pendidikan yang mendukung peningkatan pembangunan manusia yang berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan.</p> <p>6. Terwujudnya pencapaian indikator kesehatan yang mendukung peningkatan pembangunan manusia serta masyarakat yang mandiri</p> <p>7. Terwujudnya kemudahan akses perizinan serta terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan</p> <p>8. Terwujudnya pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor layanan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.</p>	<p>1. Menginventarisir semua potensi dan pemerataan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>2. Pemerataan penempatan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara dan Pengembangan SDM tenaga kesehatan serta penambahan infrastruktur kesehatan.</p> <p>3. Meningkatkan layanan ,kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun Fasilitator investasi yang professional dengan perbaikan manajemen organisasi.</p> <p>4. Meningkatkan Pembinaan hubungan Industrial dan Pengawasan serta peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan penghasilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan.</p>	<p>1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sampai tahap berstandar nasional.</p>
			<p>2. Sistem perencanaan dan pengawasan mutu pendidikan yang baik</p>
			<p>3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan sampai tahap berstandar nasional yang berbadan hukum BLUD guna layanan yang bermutu tinggi.</p>
			<p>4. Mendorong partisipasi tiga sektor (state private sektor dan society) dalam proses pembuatan kebijakan layanan kesehatan.</p>
			<p>5. Transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan dan operasional kebijakan peijinan usaha.</p>
			<p>6. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk berkompetisi dalam dunia kerja baik formal/non formal.</p>
			<p>7. Membuka dan dibuka forum konsultasi pengentasan kemiskinan antara pemerintah, DPRD dan komponen masyarakat.</p>
			<p>8. Intensitas komunikasi dengan DPRD, sektor swasta dan masyarakat guna peningkatan peluang investasi dan peluang kerja.</p>
			<p>9. Memfasilitasi kawasan pendidikan secara terpadu</p>

MISI 3 :Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
3. Mewujudkan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional.	1. Terwujudnya pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah untuk kemakmuran rakyat Barito Utara.	1. Membuat Sketsa potensi daerah berdasarkan geografis agar pembangunan dan pergerakan ekonomi dan sosial terpadu, serasi tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya serta memenuhi hajat hidup orang banyak.	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber PAD melalui optimalisasi SDA pertambangan, perkebunan dan Kehutanan dan pertanian dalam arti luas.
			2. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan ekosistem dan kelestarian alam.
			3. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD pertambangan, perkebunan dan Kehutanan dan pertanian dalam arti luas.
			4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD sektor pertambangan
			5. Menekan biaya <i>operasional</i> pemungutan Sumber PAD.
			6. Mempromosikan Kabupaten Barito Utara untuk menarik investor masuk ke Kab. Barito Utara baik level lokal, regional maupun internasional.
			7. Mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Barito Utara.
			8. Meningkatkan SDM aparatur di bidang pertambangan, kehutanan dan perkebunan dan pertanian yang berkompeten.
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor usaha -usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.	3. Terwujudnya pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor usaha -usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.	4. Peningkatkan sistem kualitas pengelolaan SDA dan kualitas lingkungan hidup dengan berpedoman pada RTRW dan pengembangan regulasi lingkungan hidup.	1. Perencanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten
			2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup.
			3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pencegahan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
			4. Peningkatan kesadaran baik masyarakat dan pihak perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
			5. Meningkatkan metode pengolahan sampah
			6. Memanfaatkan SDA termasuk jasa-jasa lingkungan secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian daerah.
			7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
			8. Melindungi fungsi lingkungan hidup agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga.
			9. Peningkatan sarana dan prasarana kota yang ramah lingkungan.
			11. Memfasilitasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Barito Utara yang ramah lingkungan.

MISI 4 : Meningkatkan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada tempat yang benar.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan didukung oleh SDM aparatur yang handal pada bidang tugasnya.	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan bebas KKN dengan sistem birokrasi yang efektif dan efisien yang didukung oleh SDM aparatur yang handal di bidang tugasnya.	1. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah dalam pelayanan publik.	1. Penetapan kualifikasi Aparatur (bertaqwa, berakhlak, bersih dan kompeten).
			2. Analisis Lembaga Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mengetahui lembaga yang perlu ada dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara.
			3. Penegekan disiplin kerja, etika dan profesi aparatur pemerintah Kab. Barito Utara.
			4. Penetapan struktur dan proses kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas dan tegas.
			5. Penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas, tegas fleksibel.
			6. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi mencapai tujuan dan sasaran harus jelas dan tegas.
			7. Aparatur pemerintah kab. Barito Utara harus mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab.
			8. Menyediakan aparatur pemerintah kab. Barito Utara yang mempunyai kemampuan dan kejelian dalam mengenali, menginventarisir masalah, kebutuhan dan kepentingan yang dihadapi oleh masyarakat dimana organaisasi itu berada.
			9. Menyediakan aparatur pemerintah Kab.Barito Utara dimana para birokratnya harus mempunyai kemampuan dalam memobilisir dan mendayagunakan sumber daya lokal untuk memecahkan masalah dan memenuhi apa yang terjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.
			10. Rekrutment, penempatan, promosi dan mutasi sesuai dengan kualifikasi teknis atau hasil analisis jabatan.
			11. Penataan Aparatur Pemerintah Kab. Barito Utara sesuai dengan prinsip " <i>The right man of right job</i> ".
			12. Peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah Kab. Barito Utara.

MISI 5 : Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah yang memiliki kualitas kehidupan berbudaya, kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).	3. Terwujudnya pembangunan dengan masyarakat yang agamis, berahlak mulia, memiliki toleransi antar umat beragama.	1. Membangun semangat kebhinekaan, rasa persaudaraan dan toleransi beragama yang berwawasan kebangsaan kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan	1. Peningkatan Hubungan harmonisasi antar Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			2. Peningkatan Pemahaman wawasan Kebangsaan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku, dan budaya.
	4. Terwujudnya pembangunan dengan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai luhur budaya, kearifan lokal yang tidak membedakan, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).	2. Meningkatkan Peran Pemuda, Kesenian dan Fungsi Kominda serta FKDM di Kabupaten Barito Utara dalam menjaga keberagaman serta memberikan informasi aktual, berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi ditengah tengah masyarakat	3. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat dengan menjalin kerjasama antar instansi dan peran aktif Tokoh masyarakat dalam pemberantasan bahaya Narkoba.
			4. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres serta meningkatkan kualitas SDM dan data ormas.
			1. Peningkatan kualitas seni budaya daerah
			2. Pelestarian dan pengembangan situs dan cagar budaya di Kabupaten Barito Utara
			3. Meningkatkan peran kesenian dan kepemudaan Kabupaten Barito Utara
			4. Memfasilitasi pembangunan nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam koridor pembangunan secara terpadu, serasi dan seimbang.



BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi dalam pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 perlu diterjemahkan dalam rumusan kebijakan umum dan program program secara konsisten dan spesifik. Kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam RPJMD

Sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program –program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya. Program program tersebut adalah :

1. Program SKPD adalah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
2. Program lintas SKPD adalah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.
3. Program kewilayahan adalah merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antarwilayah/ antarkawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Utara

Adapun arah kebijakan dan program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan adalah sebagai mana ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
MISL1:							
Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju isvestasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang.							
Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang unggul, berkualitas dan berdaya saing.	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1. Mendorong pihak swasta dan komponen masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan iklim investasi yang kompetitif.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		7900 surat, 20 rek, 100 org, 15 org, 230 macam, 25macam, 60 bln, 25 jenis koran, 10 keg, 60 kali rapat, 200 kali perjn, 40 orang, 206 kali perjln.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPMD
		2. Pembinaan dan pengembangan BUMD.	Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana		1 unit ruang rapat, 37 Jenis, 10 jenis, 18 NB, 1 kompt , 9 PC 18 printer, 10 UPS, 5 th, 5 th	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPMD
		3. Meningkatkan kualitas jalan raya dan lingkungan.	Peningkatan Kualitas disiplin aparat dalam berpakaian	40 orang	138 stel PDH, 3 set Baju Satpam, 44 stel Korpri, 47 Batik, 47 set baju olahraga	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BPMD
		4. Meningkatkan sarana dan prasarana air bersih.	Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam meningkatkan pelayanan	pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	50 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	BPMD
		5. Penyediaan fasilitas umum (taman kota, lapangan olah raga, jalur hijau dll).	Peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan	5 laporan, 1 buku dan 4 dokumen	25 laporan, 5 buku dan 22 dokumen	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	BPMD
Terwujudnya BUMD yang maju, mandiri, berbasis keunggulan lokal dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah	Menggalakkan BUMD dan kegiatan promosi serta membuka peluang investasi.	6. Rekayasa lingkungan Kabupaten Barito Utara sesuai aturan yang berlaku.	Jumlah pembinaan, koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat		26 kali pembinaan, 13kali pembinaan 5 kali ikut event TTTG, 10 kali ke kec. 10 kali ke Prov. 20 kali koord, 15 desa, 20 kali pembinaan, 5 kali gelar CSR	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	BPMD
		7. Pengendalian pengawasan pencemaran lingkungan.	Tertindakannya pembinaan dalam pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		PNPM-MP di 9 Kec, 10 Pengaduan, 16 Desa, 20kali pembinaan, 5 kali kegiatan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	BPMD
		8. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam mem bangun desa		25 Desa dan 9 kec, 15 kegiatan BBRGM, 10 kegiatan lomba desa/kelurahan, Update profil 103 desa, 9 kali pembinaan	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	BPMD
		9. Meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan daerah sekitarnya.	Tertindakannya pengembangan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan		5 Kali pelatihan keu, 5 kali pelatihan manajemen pemerintah desa, fasilitasi thd 93 desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	BPMD
		10. Menyediakan sarana transportasi murah bagi anak sekolah dan masyarakat umum	Tertindakannya Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monev pelaksanaan peningkatan peran perempuan di pedesaan		20 Kali pembinaan	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	BPMD
		1. Memfasilitasi penyediaan pasar, pertokoan					
		2. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur secara terpadu, serasi, seimbang laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan wilayah.					
			Tertindakannya pengembangan dan peningkatan kualitas pemerintah desa dan kelurahan		93 Kades dan 93 BPD	Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa	BPMD

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya rapat koordinasi penguatan kelembagaan HIV/AIDS		10 Kegiatan	Program Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular	BPMD
						Urusan Pekerjaan Umum	
			Tingkat kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas PU
			Prosentase produktifitas aparat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas PU
			Prosentase disiplin aparatur terhadap pelayanan	100%	100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas PU
			Prosentase kualitas aparat dalam menunjang pelayanan	75%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas PU
			Tingkat kualitas laporan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dinas PU
			Tingkat kualitas pelayanan masyarakat dan mitra kerja	100%	100%	Program Pelayanan Masyarakat	Dinas PU
			Jumlah pengembangan SDM dan lembaga jasa konstruksi Prosentase penerbitan IUUK	1 peraturan 60%	5 peraturan 80%	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Dinas PU
			Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang Jembatan dalam kondisi baik	253,30 Km 1.600 m	425 Km 2.500 m	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan & Jembatan	Dinas PU
			Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang Jembatan dalam kondisi baik	253,30 Km 1.600 m	425 Km 2.500 m	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Dinas PU
			Prosentase fasilitasi dalam pembangunan infrastruktur perdesaan	50%	75%	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP)	Dinas PU
			Panjang jalan dalam kondisi baik	253,30	425 Km	Program Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	Dinas PU
			Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan	59 buah atau 4.000 m	150 buah Atau 6.000 m	Program Pengembangan dan Pengelolaan	Dinas PU

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya	
			Prosentase pemeliharaan sungai	25%	75%	Program Pengendalian Banjir	Dinas PU
			Jumlah lokasi strategis yang ditata	1 lokasi	2 lokasi	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dinas PU
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/direhab Jumlah drainase yang dibangun/direhabilitasi 	53 buah 2.500 meter	98 buah 25.000 meter	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Dinas PU
			Jumlah Sarana air bersih yang dibangun/ditingkatkan	2 unit	12 unit	Program Penyediaan dan pengelolaan air bersih pedesaan	Dinas PU
			Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	7.500 meter	12.000 meter	Program Peningkatan/ Rehabilitasi Sarana dan Pra-sarana Pemukiman	Dinas PU
			Jumlah fasilitas publik yang dibangun/direhabilitasi	15 unit	31 unit	Program Pembangunan Bangunan Gedung, Fasilitas Umum dan Sosial	Dinas PU
			<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penanganan sampah Jumlah petugas kebersihan kota 	81,25 % 156 org	94,77 % 164 org	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas PU
			Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	16 unit	20 unit	Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Workshop dan Alat Berat	Dinas PU
						Urusan Perumahan	
			Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/ direhab	3 buah	15 buah	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Dinas PU
			Jumlah laporan dari kelompok kerja	-	8 laporan	Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Dinas PU
						Urusan Lingkungan Hidup	

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah peralatan pengelolaan persampahan yang dalam kondisi baik	12 unit	20 unit	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas PU
			Jumlah petugas pemeliharaan RTH	35 org	43 org	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas PU
						Urusan Penataan Ruang	
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah produk tata ruang Jumlah RTR yang diperdakan 	3 buah 1 buah	12 buah 4 buah	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas PU
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah produk tata ruang Jumlah RTR yang diperdakan 	-	12 buah 4 buah	Program Pemanfaatan Ruang	Dinas PU
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah produk tata ruang Jumlah RTR yang diperdakan 	-	12 buah 4 buah	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PU
			Meningkatnya Frasarana dan Fasilitas Perhubungan.	90%	100%	Program Prasarana dan fasilitas Perhubungan.	Dishubkom info
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan.	90%	100%	Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Dishubkom info
			Terwujudnya kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.	90%	100%	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas.	Dishubkom info
			Jumlah sarana penyuluhan komunikasi, Informasi	90%	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Dishubkom info
			Meningkatnya sarana pelayanan Angkutan	90%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Dishubkom info
			Persentase sarana dan prasarana alat uji.	90%	100%	Program Peningkatan Kelaiakan Pengoperasian Kendaraan bermotor.	Dishubkom info
						Perencanaan Pembangunan	
			Tersedianyadokumen Profil Daerah, PDRB, Laporan Triwulanan, dan Barito Utara dalam Angka	Ada	210 Buku	Program pengembangan data/informasi	Bappeda
			Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah yang selaras dan berkesinambungan	1 Keg	1 Keg	Program Kerjasama Pembangunan	Bappeda

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERBUP. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Ada	850 Buku	Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda
			Terciptanya sinkronisasi program bidang ekonomi	100%	100%	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Bappeda
			Terciptanya sinkronisasi program bidang sosial dan budaya, penunjang PNPB, dan implementasi hasil koordinasi lintas sector penanggulangan kemiskinan	100%	100%	Program perencanaan Pembangunan sosial dan budaya	Bappeda
			Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA, Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP),	Ada	50 Buku	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Bappeda
						Urusan Wajib Penanaman Modal	
			Terbentuknya kesepakatan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal perencanaan penanaman modal, Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional (KP3MR), promosi investasi daerah	Ada	100%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Bappeda
			Tersampainya LKPM oleh perusahaan penanam modal, pembinaan dan monitoring perusahaan PMA/PMDN	Ada	100%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Bappeda
			Persentase koordinasi kebijakan dan program pembangunan koperasi	80%	90%	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Diskop dan UMKM
			Persentase pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah.	60%	80%	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Diskop dan UMKM
			Persentase perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	60%	80%	Program Penciptaan iklan usaha kecil dan menengah yang kondusif.	Diskop dan UMKM
			Persentase Move dan	70%	80%	Program	Diskop

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelaporan perkembangan UMKM			pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	dan UMKM
						IKM	Diskop dan UMKM
			Terwujudnya iklim usaha IKM yang kondusif	341 IKM	486 IKM	Program Pengembangan Industri kecil Menengah (IKM)	Diskop dan UMKM
			Berkembangnya aneka kerajinan & Industri Rumah tangga	123 Unit	170 Unit	Program Pengembangan Kerajinan & Industri Rumah Tangga	Diskop dan UMKM
						Perdagangan	
				90%	80%	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Disperind agsar
			Harga Terjangkau dan stabil, Stock dan Distribusi ada dan lancar	85%	85%	Penguatan Insitusi Pasar	Disperind agsar
				100%	100%	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Disperind agsar
			Persentase Peningkatan Kinerja aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	10%	50%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat	BPBD
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	50%	90%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial /Tanggap Darurat	BPBD
			Persentase kesiapsiagaan dini dan pencegahan menghadapi bencana serta penanggulangan bencana	50%	75%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	BPBD
			Jumlah Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	20%	100%	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD
			Persentase Penanganan Pasca Bencana	20%	100%	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD
Misi 2 :							
Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan, kependudukan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.							
9. Terwujudnya pencapaian indikator pendidikan yang mendukung peningkatan	5. Menginven tarisir semua potensi dan pemerataan sarana	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sampai tahap berstandar nasional.	Tertelaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISDIK
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	80 %	100%	Program Peningkatan Sarana dan	

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab	
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<p>pembangunan manusia yang berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan.</p> <p>10. Terwujudnya pencapaian indikator kesehatan yang mendukung peningkatan pembangunan manusia serta masyarakat yang mandiri</p> <p>11. Terwujudnya kemudahan akses perizinan serta terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan</p>	<p>dan prasana sekolah yang memadai, pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>6. Pemerataan penempatan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara dan Pengerbangan SDM kesehatan serta penambahan</p> <p>7. Meningkatkan layanan ,kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun Fasilitator investasi yang profesional dengan perbaikan manajemen organisasi.</p> <p>8. Meningkatkan Pembinaan hubungan Industrial dan Pengawasan serta peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan penghasilan yang bermuara pada pengentasan kemiskinan</p>	<p>2. Sistem perencanaan dan pengawasan mutu pendidikan yang baik</p> <p>3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan sampai tahap berstandar nasional yang berbadan hukum BLUD guna layanan yang bermutu tinggi.</p> <p>4. Mendorong partisipasi tiga sektor (state private sector dan society) dalam proses pembuatan kebijakan layanan tenaga kesehatan.</p> <p>5. Transparansi dan keterbukaan dalam proses pembuatan kebijakan dan operasional kebijakan peijinan usaha.</p> <p>6. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk berkompetisi dalam dunia kerja baik formal/non formal.</p>	Tersedianya pakaian Dinas dan Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket	2630 stel	Prasarana Aparatur		
			Tersedianya dana untuk bintek	1 kegiatan	100%	100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
			Tersedianya dana untuk bintek	1 kegiatan	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
			Terlaksananya penyusunan lap.	100%	100%	100%	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
			<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Ruang kelas yang cukup - Jumlah laboratorium IPA, Bahasa - Jumlah Perputakaan yang memadai - Jumlah Rumah Dinas Kepala sekolah, Guru, dan penjaga sekolah yang memadai - Pendidik dan tenaga kependidikan didaerah terpencil - Penduduk yang tuna aksara - Angka melanjutkan sekolah putus 	95%	100%	Program Pendidikan Menengah	DISDIK	
			<ul style="list-style-type: none"> - Pendidik dan tenaga kependidikan didaerah terpencil - Penduduk yang tuna aksara - Angka melanjutkan sekolah putus 	70%	100%	Program Peningkatan Pendidikan Non Formal	DISDIK	
<p>4. Terwujudnya pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor</p>		<p>7. Membuka dan dibuka forum konsultasi pengentasan kemiskinan antara pemerintah, DPRD dan komponen masyarakat.</p> <p>8. Intensitas komunikasi dengan sektor swasta dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidik dan tenaga kependidikan didaerah terpencil - Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 - Rasio Guru/Siswa - Rasio Guru/Sekolah 	1.278 org	2.800 orang	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DISDIK	
			<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Sekolah/penduduk Usia sekolah - Angka Partisipasi Kasar (APK) 	90 sekolah	276 sekolah	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan	DISDIK	

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
layanan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan.		masyarakat guna peningkatan peluang investasi dan peluang kerja.	- Angka Partisipasi Mumi (APM)			Pendidikan	
		9. Memfasilitasi kawasan pendidikan secara terpadu	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar	40 Sekolah	49 Sekolah	Operasional Sekolah	DISDIK
			Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar	10 Unit	10 Unit	Operasional UPTD/ UPK/ SKB	DISDIK
			Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar	22 paket	45 Paket	Program Kalimantan Tengah Harati	DISDIK
			Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar	-	100 %	Program Perencanaan Pembangunan Pendidikan	DISDIK
			Tersedianya UKT bagi peserta didik	2 Org	-	Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik	DISDIK
			Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	80%	90%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
			Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Kependudukan	80%	90%	Program Peningkatan Ketersediaan Data Kependudukan	Disdukcapil
			Persentase Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	80%	90%	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	90 %	90%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kansiptaka
			Meningkatnya produktivitas pegawai dengan tersedianya sarana dan prasarana	90 %	90%	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kansiptaka
			Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian		80 stel	Program Peningkatan disiplin aparatur	Kansiptaka
			Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan	100 %	30 org	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kansiptaka
			Peningkatan kualitas dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan	100 %	25 laporan, 24dok, 19 buku.,	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kansiptaka
			Tertersedianya perbaikan sistem	100 %	5 tahun	Program perbaikan	Kansiptaka

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			administrasi kearsipan			sistem administrasi kearsipan	
						KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya budaya baca dan pelayanan terhadap masyarakat	100 %	5 tahun	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Kansiptaka
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	90 %	90%	Program pelayanan administrasi perkantoran	Kansiptaka
			<i>Meningkatnya Pelayanan Adm. Perkantoran</i>		12.500 Surat, 60 Bln, 60 bln, 100 bh, 60 bln, 60 bln, 60 bln, 5pkt, 60 bln, 60 bln, 60 bln, 60 bln, 60 bln	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Dissosnakertrans
			<i>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk menunjang pelayanan publik</i>		45 bh, 120 bh, 100 bh, 60 unit, 10 Pkt	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	sda
			<i>Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam menggunakan pakaian Dinas</i>		342 Stel	Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	sda
			Meningkatnya Sumber Daya aparatur dalam pelayanan publik		60 Org	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	sda
			Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Dok	10 Dok, 10 Dok, 10 Dok, 5 Dok, 15 Dok	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	sda
			Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		200 Org, 150 org, 96 org, 250 org, 8 Pkt, 280 org	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	sda
			Meningkatnya kemampuan dan rasa percaya diri para PENCA dan Trauma.	3 Org	15 Org	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.	sda
			Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kessos.	12 Ordes 39 Tagana 39 Tagana 20 Desa 30 Org 30 Org 20 Org 4 Org	60 Orsos, 195 Angg. Tagana, 195 Tagana, 103 Desa, 150 Org, 150 Org, 100 Org 20 Org	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	sda
			Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan bagi anak terlantar.	12 Org	60 Org	Program Pembinaan Anak Terlantar	sda
			Meningkatnya Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	15 Org	75 Org, 140 Org	Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.	sda
			Meningkatnya kapasitas dan kualitas Fakir	36 Org, 30 Org, 112 Org, 9 Desa, 23 Desa	388 Org, 150 Org, 352 Org, 45 Desa, 103 Desa	Program Pemberdayaan Fakir Miskin,	sda

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Miskin, KAT dan PMKS lainnya.			Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
			Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	100 Org, 5 Prsh, 200 Org, 200 Org, 25 Prsh, 4 Prs	1000 Org, 25 Prs, 1.150 Org, 1.150, 125 Prsh, 1000 Org, 120 Prsh, 24 Prs	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	
			Tersedianya tenagakerja baru dan terserapnya tenaga kerja lokal	20 Org	100 Org, 100 Org, 100 Org, 100 Org, 2.500 Org	Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dan Pelatihan Tenaga Kerja.	
			Tersedianya Rentek dan Terbangunnya Kawasan Transmigrasi	1 Pkt	3 Pkt	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT)	
			Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	80 Org, 80 Org	480 Org, 480 Org	Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi (PMKT)	
				3.574.542.200		Energi dan Sumberdaya Mineral	
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	983.542.200		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima	640.000.000		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	
			Persentase pelanggaran disiplin pegawai	-		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
			Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	175.000.000		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
				19.000.00		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
				235.000000		Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	
				50.000.000		Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
				1.447.000.000		Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	
				25.000.000		Program Pengelolaan Air Tanah	
				-		Program Survey Potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral	
			Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	50%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKBPP
			Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	50%	100%	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	BKBPP
			Meningkatnya Disiplin Aparatur	50%	100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BKBPP
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKBPP
			Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	BKBPP
			Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan	59%	100%	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak & Perempuan.	BKBPP
			Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28%	62%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	BKBPP
			Terwujudnya Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	20%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan.	BKBPP
			Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	20%	73%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	BKBPP
				0%	00%	Program Pemberdayaan Perempuan	BKBPP
				60%	4%	Program Keluarga Berencana	BKBPP
				0%	00%	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina	BKBPP

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Keluarga	
			Terwujudnya tenaga terampil dalam pembinaan PKLK	65%	90%	Program Penyiapan Tenaga PKLK	BKBPP
				58%	89%	Program Keluarga Berencana	BKBPP
				30%	70%	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	BKBPP
				45%	88%	Program Pelayanan Kontrasepsi	BKBPP
				100%	70%	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	BKBPP
			Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	33%	65%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	BKBPP
			Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan yang lebih baik	38%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	BKBPP
			Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	60%	100%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	BKBPP
Terwujudnya kualitas administrasi kependudukan dan Pencatatan	Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan	Peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Persentase kualitas administrasi kependudukan	80%	90%	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dsidukcapil
			Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	1 kec	9 kec/5 thn		
			Pelatihan tenaga pengelola SIAK	2 kali/thn	10 kali/5 thn		
			Sosialisasi kebijakan kependudukan	2 kali/thn	10 kali/5 thn		
			Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	12 kali/thn	60 kali/5 thn		
			Penyusunan kebijakan kependudukan	2 kali/thn	10 kali/5 thn		
			Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	12 kali/thn	60 kali/5 thn		
			Melaksanakan pemutahiran data	12 kali/thn	60 kali/5 thn		
			Peningkatan pelayanan publik dalam bidang	12 kali/thn	60 kali/5 thn		
			Pengendalian dan Pengawasan Dokumen Kependudukan dan	12 kali/thn	60 kali/5 thn		
Terwujudnya ketersediaan data	Melaksanakan Pengembangan base	Peningkatan kualitas ketersediaan data	Persentase ketersediaan data kependudukan	80%	90%	Program Peningkatan Ketersediaan	Dsidukcapil

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
kependudukan	kependudukan	kependudukan	Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	1 kec	9 kec		
			Pengembangan data base kependudukan	4 kali./thn	20kali./5 thn		
			Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	1 kec	9 kec		
			Peningkatan kapasitas kelembagaan	1 kec	9 kec		
Terwujudnya cakupan jumlah kecamatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Melaksanakan Pembentukan dan Penataan Sistem koneksi (Inter - Phase Tahap Awal) NIK	Peningkatan kualitas pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Persentase kualitas pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	80%	100%	Program Peningkatan Pembangunan Sistem	Dsidukcapil
			Pembentukan dan Penataan Sistem koneksi (Inter - Phase Tahap Awal) NIK	1 kec	9 kec		
			Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating	1 kec	9 kec		
				80%		Program Pelayanan Administrasi	KPPT
			Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	80%		Program Peningkatan Sarana dan	KPPT
			Tersedianya PDH aparat	80%		Program Peningkatan	KPPT
			Meningkatnya kapasitas SDM aparat			Program Peningkatan Kapasitas	KPPT
			Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	80%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem	KPPT
			Meningkatnya koordinasi pelayanan dan pengawasan	80%		Program Pengembangan Administrasi	KPPT
				80%		Program Peningkatan Pengembangan Sistem	KPPT
			Cakupan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat keluarga miskin dan	15.000 Jiwa 9 Kec	28.000 Jiwa 9 Kec	Program Penunjangan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan sarana air bersih dan WC	125 sekolah	294 sekolah	Program Peningkatan PSM di Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan penyuluhan kesehatan gigi				
			Cakupan jumlah dan jenis obat	230 item 16 Pusk., 84 Pustu	282 item 16 Pusk., 84 Pustu	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan Distribusi obat secara merata sesuai				
			Cakupan Jumlah Tanaman yang Khasiat Obat	30 jenis tanaman	50 jenis tanaman	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Dinas Kesehatan
Cakupan Usaha Obat							
Cakupan desa/kel Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	20 org 5000 rnh	20 org 6000 rnh	Program Pencegahan dan Penanggulangan	Dinas Kesehatan			
Cakupan KK memiliki jamban keluarga	5000 Rm	5000 Rm	Program Pengembangan Lingkungan	Dinas Kesehatan			
Cakupan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) yang memenuhi syarat	16 Pusk	16 Pusk	Program Pengawasan dan Pengendalian	Dinas Kesehatan			

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan pengembangan media promosi kes.ttg sadar hidup sehat	2.100 Jiwa, 34 kali, 20 org, 3520 RT	2.100 Jiwa, 34 kali,	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	Dinas Kesehatan
			Cakupan model operasional desa siaga meningkat	60 desa	90 desa	Program Pengembangan SDM, Regulasi dan Kebutuhan	Dinas Kesehatan
			Tersedianya data kematian ibu dan analisis faktor penyebabnya	2 kali	3 kali	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan	Dinas Kesehatan
			Tersedianya data Status Gizi dan Keluarga sadar Gizi tingkat kecamatan dan Kabupaten	16 Pusk	16 Pusk	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Cakupan pemberian Vitamin A 2 kali setahun	90%	90%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Cakupan pemberian makanan tambahan balita				
			Tersedianya alur pelayanan (SOP)	125 sekolah	294 sekolah	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan gawat darurat di				
			Jumlah penderita katarak yang dioperasi	2 Desa	3 Desa	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk	Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan sunatan				
			Peningkatan pengetahuan petugas lansia	80%	80%	Program Pelayanan Peningkatan Pelayanan	Dinas Kesehatan
			Tertindaknya cakupan Pelayanan Lansia				
			Tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan	12 bulan	12 bulan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan
			Jumlah pembangunan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	Program Peningkatan Sarana dan	Dinas Kesehatan
			Jumlah pakaian dinas dan atributnya	690	870	Program Peningkatan Disiplin	Dinas Kesehatan
			Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	2 kl/thn	16 kl/thn	Program Peningkatan Kapasitas	Dinas Kesehatan
			Jumlah laporan yang tersusun	1 tahun	1 tahun	Program Peningkatan Pengembangan sistem	Dinas Kesehatan
			Jumlah pembangunan Pustu	2 Pusk/thn	16 Pusk/5 thn	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan	Dinas Kesehatan
			Jumlah Puskesmas yang dibangun				
			Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 pkt	5 pkt/5 thn	Program Kalimantan	Dinas Kesehatan

MISI 3 :

Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional.

1. Terwujudnya pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya yang mampu menggerakkan roda	1. Membuat Sketsa potensi daerah berdasarkan geografis agar pemanfaatan dan pergerakan ekonomi dan sosial terpadu, serasi tidak tumpang	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber PAD melalui optimalisasi SDA pertambangan, perkebunan dan kehutanan dan pertanian dalam arti luas. 2. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan ekosistem	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran	86.14	86.14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kan. hangan
			Terpenuhiya penyediaan sarana prasarana aparatur	93.52	93.52	Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kan. hangan
			Meningkatnya disiplin aparatur	94.74	94.74	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kan. hangan

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah untuk kemakmuran rakyat Barito Utara.</p> <p>2. Terwujudnya pemerataan pembangunan secara terpadu antar wilayah di sektor usaha -usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan dan kemakmuran rakyat.</p>	<p>tindih dan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya serta memenuhi hajat hidup orang banyak.</p> <p>2. Peningkatkan sistem kualitas pengelolaan SDA dan kualitas lingkungan hidup dengan berpedoman pada RTRW dan pengembangan regulasi lingkungan hidup.</p>	<p>dan kelestarian alam.</p> <p>3. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD pertambangan, perkebunan dan Kehutanan dan pertanian dalam arti luas.</p> <p>4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD sektor pertambangan</p> <p>5. Menekan biaya operasional/pemungutan Sumber PAD.</p> <p>6. Mempromosikan Kabupaten Barito Utara untuk menarik investor masuk ke Kab. Barito Utara baik level lokal, regional maupun internasional.</p> <p>7. Mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Barito Utara.</p> <p>8. Meningkatkan SDM aparatur di bidang pertambangan, kehutanan dan pertanian yang berkompeten.</p> <p>9. Perencanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten.</p> <p>10. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup.</p>	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	48.7	48.7	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kan. hangan
			Tersedianya laporan yang berkualitas	100	100	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kan. hangan
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	98.5	98.5	Program peningkatan ketahanan pangan	Kan. hangan
			Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya keamanan pangan utk kesehatan	97.64	97.64	Program peningkatan keamanan pangan	Kan. hangan
			Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	0	0	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan	Kan. hangan
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	99.81	99.81	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Kan. hangan
			Meningkatnya SDM masyarakat.	96.53	96.53	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Kan. hangan
			Jumlah tempat tidur kelas III di RS	38 Tempat tidur	140 TT	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.	RSUD
			Jumlah obat-obatan dan perbekalan kesehatan	114 jenis	114 jenis		RSUD
			Jenis peralatan kesehatan	Peralatan kesehatan dasar dan sedang	Peralatan kesehatan dasar, sedang dan canggih		RSUD
			Jumlah ruang-ruang perawatan dan sarana penunjang RS	9 ruang rawat inap, 1 ruang rawat jalan dan 7 sarana penunjang	12 ruang rawat inap, 1 ruang rawat jalan dan 8 sarana penunjang		RSUD
			Redesign rumah sakit	1 unit	1 unit		RSUD
			Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS, SOP, Protap dan Dokumen pendukung lainnya	2 dokumen	3 Dokumen		RSUD

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
		lingkungan hidup yang berkelanjutan	Tim Satuan Pengendalian Internal (SPI)	belum ada	1 tim		RSUD
		3. Meningkatkan metode pengolahan sampah	Jumlah dokter umum dan dokter Spesialis di RS	12 Dokter Umum/Gigi 6 Dokter Spesialis	12 Dokter Umum/Gigi 6 Dokter Spesialis		RSUD
		4. Memanfaatkan SDA termasuk jasa-jasa lingkungan secara efisien dan optimal dalam mendukung perekonomian daerah.	Jumlah tenaga Medis dan Non medis di RS yang memiliki sertifikasi keahlian (ATLS, BCLS dll)	10 Orang	18 Orang		RSUD
		5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.	Peningkatan Akreditasi RS	Type C	Type A		RSUD
		6. Melindungi fungsi lingkungan hidup agar kualitas dan daya dukungnya tetap terjaga.	Jumlah Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit daerah	21 jenis pelayanan	21 jenis pelayanan		RSUD
		7. Peningkatan sarana dan prasarana kota yang ramah lingkungan.					
		8. Memfasilitasi kegiatan ekonomi dan perdagangan di Kabupaten Barito Utara yang ramah lingkungan.					
			Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	60 Bulan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BLH
			Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	5 Tahun	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	BLH
			Meningkatnya disiplin aparatur	1 Keg/	5 Keg	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BLH
			Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Keg	5 Keg	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	BLH
			Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Keg	5 Keg	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BLH
			Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	1 tahun	5Tahun	Program pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan	BLH
			Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1 Keg	5 Keg	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	BLH

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Hidup	
			Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	1 Keg	5 Keg	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	BLH
			Meningkatnya akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1 Keg/Thn	5 Keg	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup	BLH
			Terkendalinya polusi	1 Tahun	5 Tahun	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	BLH
			Terkendalinya kebakaran hutan	1 Keg/Thn	5 Keg	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	BLH
			Terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau	1 Keg/Thn	5 Keg	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	BLH
			Terwujudnya ketaatan terhadap lingkungan serta peran serta komunitas lingkungan dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Keg/Thn	5 Keg	Program Peningkatan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan	BLH
						Pertanian, Perikanan dan Peternakan	
			Tersedianya fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	475 lbr, 4 rek, 16 jenis ATK, 12 bln, 34200 lbr, 16 bh, 56 Orang	2750 lbr, 4 rek, 18 Jenis, 244 orang, 18 Jenis ATK, 12 bln, 265799 lbr, 8 jenis/ set, 170 bh, 367 orang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISTAN KANNAK
			Jumlah bangunan gedung kantor Jumlah peralatan gedung Jumlah Kendaraan dinas/operasional	1 unit, 103 buah 5 buah 12 bulan 2 unit	5 unit, 623 buah, 23 unit, 10 buah 12 bulan 6 unit 12 bulan 15 unit, unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISTAN KANNAK
			Disiplin aparatur, Jumlah pakaian dinas pegawai		3 unit 244 stel	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DISTAN KANNAK
			SDM Aparatur melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		15 kali	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISTAN KANNAK
			Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	55 dok	Program Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DISTAN KANNAK
			Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan petani/ pelaku agribisnis	2 kegiatan	-	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	DISTAN KANNAK

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Produktivitas padi, penelitian dan pengembangan teknologi, data statistik, penyusunan program, sarana dan prasarana pertanian - Meningkatnya Fasilitas sarana produksi pertanian dan Perluasan areal tanam (cetak sawah dan Optimasi lahan) - Cetak Sawah-Optimasi lahan 	490 Ha, 250 Ha, 240 Ha, 40 unit, 27 Klp, 6 kegiatan, 584 ha, 810 ha, 419 ha	5.445 ton, 800 Ha, 2240 Ha, 146 unit, 33 klp, 100 orang, 28 kegiatan, 400 ha, 1925 ha, 38000 batang, 4045 ha	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan / Perkebunan	DISTAN KANNAK
	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya SDM Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan - Berkembangnya Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan SDM pelaku agribisnis yang trampil dan handal serta Terasilitasinya P2WKSS 	35 orang	205 orang, 4 kali (PEDA/PENAS) 12 Gapoktan, 12 desa, 120 orang, 4 kegiatan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DISTAN KANNAK
			Meningkatnya perkembangan informasi IPTEK dan daya saing produk olahan	2 Kegiatan	23 Kegiatan, 750 orang	Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	DISTAN KANNAK
	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Jumlah produksi perikanan budidaya dan meningkat Jumlah BBI dan UPR yang bersertifikat serta Jumlah Sarana dan prasarana perikanan yang memadai - Terciptanya Pengawasan masyarakat untuk sumberdaya perikanan 	3200 ton, 6 unit, 6 unit, 50 orang	20100 ton, 5 Unit, 33 unit, 33 unit, 300 orang	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	DISTAN KANNAK
			SDM nelayan Yang terlatih (POKYAN)	25 orang	250 orang	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	DISTAN KANNAK
			Peningkatan daya saing produk perikanan melalui Promosi produk perikanan unggulan daerah	5 kali	30 kali kegiatan	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	DISTAN KANNAK
	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM Penyuluh Perikanan dan Tersedianya data perikanan daerah - Terwujudnya Peningkatan Populasi Ternak sapi, Kambing dan unggas 	3 buku	5 kali kegiatan, 15 buku	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.	DISTAN KANNAK
			Peningkatan Populasi ternak daerah dan Menumbuhkan Peran UPTD Balai Penangkaran Ternak serta Pendapatan anggota kelompok dan		2.000, ekor, 3.000 ekor, 10 Kel, 2.000 ekor, 20 unit,, 176 buku, 60 orang	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DISTAN KANNAK

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			skala usaha kepemilikan ternak				
	-	-	- SDM peternakan Tepat Guna di tingkat petani dan Tersedianya Sarana dan Prasarana teknologi Peternakan tepat Guna - Peningkatan Pengembangan Kawasan Pembibitan Sapi dan Kambing. Terjaminnya pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	2 kelompok/ tahun	20 klpk, 16 unit, 10 unit 1.550Ton daging 30 Klpk	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.	DISTAN KANNAK
	-	-	- Pembinaan dan pengawalan poktan terhadap proses pengendalian hama penyakit Pertanian dan hortikultura dan poktan terhadap proses pengendalian penyakit ikan - Terjaminnya sistem pengendalian hama penyakit produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan	42 Kegiatan	450 Kegiatan	Program Pengamanan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	DISTAN KANNAK
						Kehutanan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran	1750 perangko, 1250 materai, 750 paket pengiriman, 3 rek, 15 unit STNK	8750 perangko, 6250 materai, 3.750 paket pengiriman, 15 rek, 175 unit STNK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISHUTBUN
			Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	4 Kegiatan, 18 Unit peralatan kantor, 21 unit meubeleur, 1 tahun	20 Kegiatan, 90 Unit peralatan kantor, 105 unit meubeleur, 5 tahun	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISHUTBUN
			Peningkatan Kualitas disiplin aparat dalam berpakaian	175 orang	875 orang/5 tahun	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DISHUTBUN
			Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam meningkatkan pelayanan	1 tahun, 25 orang	5 tahun, 125 orang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISHUTBUN
			Peningkatan Kualitas laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan	5 paket	25 Paket/5 tahun	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DISHUTBUN
			Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	3 kali, 2 kali, 12 kali, 2 kali, 2 kali, 12 kali, 12 kali, 1 kali, 1 paket, 1 unit	15 kali, 10 kali, 60 kali, 10 kali, 10 kali, 60 kali, 60 kali, 5 kali, 5 paket, unit / 5 tahun	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	DISHUTBUN
			Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara	1 dok, 1 dok, 11 ha, 5 poktan, 5 dok, 600.000 btg, 400 ha, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 2 dok, 2500 lbr.	5 dok, 5 dok, 11 ha, 25 poktan, 25 dok, 3.000.000 btg, 2000 ha, 5 pkt, 5 pkt, 5 pkt, 5 pkt, 10 dok, 12.500 lbr.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DISHUTBUN
			Meningkatkan Perlindungan Terhadap Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara	6 kali, 750 lembar, 3 kali	30 kali, 3750 lembar, 15 kali	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya	DISHUTBUN

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						hutan	
			Jumlah sarana penyuluhan kehutanan	1 paket	5 paket / 5 tahun	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan	DISHUTBUN
			Meningkatkan penanaman lahan kritis tertanam	10.000 batang, 55 ha, 0 ha	10.000 batang, 275 ha, 220 ha / 5 tahun	Program Peningkatan fungsi DAS berbasis pemberdayaan masyarakat	DISHUTBUN
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	1000 lembar, 1 paket	5000 lembar, 5 paket / tahun	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	DISHUTBUN
			Meningkatkan Kualitas Data Statistik Kehutanan	2 dokumen	10 dokumen / 5 tahun	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Kehutanan	DISHUTBUN
			Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Produksi Perkebunan	10.000 batang, 1 paket, 5 poktan, 10 ha, 1 paket, 3 kali, 4 kali	50.000 batang, 5 paket, 25 poktan, 50 ha, 5 paket, 15 kali, 20 kali / 5 tahun	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	DISHUTBUN
			Meningkatkan Pemasaran Produksi Perkebunan Daerah	500 lembar, 2 kali, 1 paket	2500 lembar, 10 kali, 5 paket / 5 tahun	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	
			Meningkatkan produksi perkebunan di Kabupaten Barito Utara	15.000 batang, 1 paket, 15.000 batang, 2 ha, 4 kali	75.000 batang, 5 paket, 75.000 batang, 10 ha, 20 kali, 1 unit / 5 tahun	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	DISHUTBUN
			Meningkatkan Kualitas Penyuluh dan Poktan Perkebunan	4 kali, 4 kali, 4 kali, 20 orang	20 kali, 20 kali, 20 kali, 100 orang / 5 tahun	Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	DISHUTBUN
			Meningkatkan Kualitas Data Statistik Perkebunan	2 dokumen	10 dokumen / 5 tahun	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Perkebunan	DISHUTBUN
Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan yang semakin baik	Peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan yang melaksanakan Mengoptimalkan pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan	Meningkatnya jumlah produksi Pertambangan • Meningkatnya perusahaan yang mentaati peraturan pertambangan • Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi
Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat yang	Peningkatkan akses dan mutu layanan di bidang pertambangan	Meningkatkan pengawasan kegiatan eksploitasi Pertambangan Rakyat	Meningkatnya jumlah perusahaan pertambangan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan	100%	100%	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang berpotensi	Dinas Pertambangan dan Energi

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
Pembinaan dan pengembangan bidang energi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembinaan dan pengembangan Bidang Energi Peningkatan pembinaan distribusi dan tata niaga BBM bersubsidi 	<ul style="list-style-type: none"> -Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi masyarakat -Kebutuhan BBM bersubsidi yang tepat sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatnya jumlah PLTS untuk kebutuhan penerangan di desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik -Terpenuhinya kebutuhan BBM bersubsidi bagi masyarakat 	20%	60%	Program pembinaan dan pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Pertambangan dan Energi
Terdatanya pengguna Air Tanah yang memiliki SIPA dan belum memiliki SIPA	Pendataan pengguna air tanah yang telah memiliki SIPA dan mendata pengguna yang belum memiliki SIPA	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya data pemegang SIPA Terkendalinya penggunaan air tanah dan menyarankan yang belum memiliki SIPA agar memproses SIPA 	Meningkatnya data IUP pengguna air tanah	50%	100%	Program Pengelolaan Air Tanah	Dinas Pertambangan dan Energi
Terpetakannya Data Potensi Minyak dan Gas di Kabupaten Barito Utara	Berkoordinasi dengan perusahaan Migas sebagai pendamping dalam kegiatan eksplorasi / survey Migas dan menginventarisasi hasil eksplorasi untuk penyusunan data potensi Migas di wilayah Kabupaten Barito Utara	Tersedianya data potensi Minyak dan Gas di Kabupaten Barito Utara	Terlengkapinya peta data potensi Migas di wilayah Kabupaten Barito Utara	10%	50%	Program Survey Potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi

MISI 4 :

Meningkatkan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada tempat yang benar.

						URUSAN PEMERINTAHAN	
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan bebas KKN dengan sistem birokrasi yang efektif dan efisien yang didukung oleh	2. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah dalam pelayanan publik.	1. Penetapan kualifikasi Aparatur (bertakwa, berakhlak, bersih dan kompeten).	Tingkat realisasi agenda kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	75%	90%	Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala	SETDA
			2. Analisis Lembaga Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mengetahui lembaga yang perlu ada dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Barito Utara.	Tingkat pencapaian penyusunan Laporan keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), serta laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	
		3. Penegekan disiplin kerja, etika dan profesi aparatur pemerintah Kab.	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Setda dalam mendukung	80%	90%	Program Peningkatan pelayanan administrasi	SETDA
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional Setda	75%	85%	Program Peningkatan sarana dan	SETDA
		5. Penetapan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab organisasi secara jelas, tegas fleksibel.	Jumlah gedung kantor yang terbangun/direhab	5 unit	21 unit		SETDA
		6. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi	Tingkat disiplin aparatur	70%	90%	Program Peningkatan disiplin aparatur	SETDA
			Tingkat ketrampilan aparatur	70%	80%	Program Peningkatan kapasitas sumber	SETDA

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
		mencapai tujuan dan sasaran harus jelas dan tegas.	Tingkat pencapaian penyusunan Laporan keuangan, dan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100%	100%	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SETDA
		7. Aparatur pemerintah kab. Barito Utara harus mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggung jawab.	Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang	50 %	75%	Program optimalisasi pemanfaatan	SETDA
		8. Menyiapkan	Tingkat fasilitasi pelayanan keprotokolan	80%	90%	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	SETDA
		aparaturnya kab. Barito Utara yang mempunyai kemampuan dan kejelian dalam mengenali,	Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Tingkat kesesuaian	80%	90%	Program pembinaan pengendalian pelaksanaan pembangunan	SETDA
		menginventarisir masalah, kebutuhan dan kepentingan yang dihadapi oleh masyarakat dimana organisasi itu berada.	Tingkat penggunaan LPSE oleh penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan	100%	100%	Program Pengembangan Data Informasi	SETDA
		9. Menyiapkan aparaturnya kab. Barito Utara dimana para birokratnya harus mempunyai kemampuan dalam memobilisir dan mendaya gunakan sumber daya lokal untuk memecahkan masalah dan memenuhi apa yang terjadi kebutuhan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renja,	2 dok	16 dok	Program Peningkatan Perencanaan	SETDA
			Tingkat realisasi pembinaan Pembangunan Sosial dan Perekonomian daerah	80%	85%	Program Pembinaan Pembangunan Sosial dan Perekonomian	SETDA
			Tingkat dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan yang	80%	90%	Program Peningkatan sarana dan	SETDA
			Tingkat dukungan terhadap UKS	60%	90%	Program Peningkatan Usaha kesehatan	SETDA
			Tingkat dukungan terhadap kesehatan	100%	100%	Program Peningkatan kesehatan	SETDA
			Jumlah Daerah otonomi Baru yang tertata	20%	100%	Program Penataan Daerah	SETDA
			Tingkat kesesuaian batas wilayah	25%	100%	Program Penataan Tata Batas Kabupaten,	SETDA
			Tingkat sarana dan prasarana olah raga yang terpelihara	0%	0%	Program Peningkatan Sarana Olah Raga	SETDA
			Jumlah kerjasama antar daerah, antara daerah dengan pihak lain,	0%	40%	Program Peningkatan kerjasama antar	SETDA
			Tingkat ketrampilan aparaturnya pengelola keuangan daerah	70%	90%	Program Peningkatan dan pengembangan	SETDA
			Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja	80%	90 %	Program Peningkatan Kapasitas	SETDA
			Tingkat penyelesaian produk hukum daerah	60 %	75%	Program penataan peraturan	SETDA
			Tingkat Ketercapaian sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah	80%	90%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan	SETDA
			jumlah SDM terlatih di bidang komunikasi dan informasi	50%	70%	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang	SETDA
			Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang	70%	80%	Program Kerjasama Informasi dengan	SETDA
			Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang	70%	80%	Program Pelayanan Informasi Publik	SETDA

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						URUSAN	
			Persentase Luas lahan bersertifikat	100 %	100%	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan	SETDA
			Jumlah Sistem informasi pendaftaran tanah	0	0	Program pembangunan sistem	SETDA
			Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan	50%	100%	Program penyelesaian konflik-konflik	SETDA
			Jumlah Sistem informasi pertanahan	1 sistem informasi	1 sistem informasi	Program Pengembangan sistem informasi pertanahan	SETDA
			Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi	80%	90%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	SETWAN
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional Sekretariat DPRD	80%	80%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SETWAN
			Meningkatnya disiplin aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat DPRD	80%	80%	Peningkatan Disiplin Aparatur	SETWAN
			Tingkat ketrampilan aparatur	80%	80%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SETWAN
			Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada website	60%	90%	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	SETWAN
			Tingkat pencapaian penyusunan Laporan Keuangan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	100%	100%	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	SETWAN
			Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada media massa	70%	70%	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	SETWAN
			Tertaksananya fungsi-fungsi DPRD Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD Kab. Barito Utara secara	75%	95%	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	SETWAN
			Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	80 % 1keg,70 % 1keg,70% 10kali	90% 5keg, 80% 5keg,80% 50kali,80% 10keg	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKD
			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	85%	90%	Program peningkatan pembinaan dan	BKD
			Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	80 %	100%	Program peningkatan sarana dan prasarana	BKD
			Meningkatnya disiplin aparatur	100% 1 keg	100% 4 keg/5 thn	Program peningkatan disiplin aparatur	BKD
			Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100% 1 dok 100% 2 dok/	100% 5 dok/5 100% 5 dok/5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	BKD
						DPPKA	
			Terselenggaranya Pelayanan Administrasi perkantoran.		100%	Program pelayanan Administrasi	DPPKA

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional, perlengkapan, perlengkapan		100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	DPPKA
			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DPPKA
			Pelaksanaan Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan		100%	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya	DPPKA
			tersedianya dokumen laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan akhir tahun		100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja	DPPKA
			Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Pengelolaan		100%	Program Peningkatan dan Peningkatan	DPPKA
			Persentase Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,15%	87,45%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SATPOL
			Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Aparatur	85,21%	88,63%	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	SATPOL
			Persentase Penyediaan Kelengkapan Pakaian Dinas	84,15%	87,45%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	SATPOL
			Persentase Kegiatan dibidang kepegawaian	81,15%	84,45%	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	SATPOL
			Persentase Kegiatan sistem pelaporan dan Keuangan	86,35%	88,65%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	SATPOL
			Persentase kegiatan peningkatan manajemen asetbarang daerah	85,25%	87,75%	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	SATPOL
			Persentase kkegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	86,15%	89,45%	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	SATPOL
			Tingkat realisasi agenda kedinasan Inspektur dan pegawai Inspektorat	100%	100%	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEK TORAT
			Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Inspektorat dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	100%		INSPEK TORAT
			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional Inspektorat	80%	90%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	INSPEK TORAT
			Jumlah gedung kantor yang terbangun/direhab	75%	85%		INSPEK TORAT
			Tingkat disiplin aparatur	100%	100%	Peningkatan disiplin aparatur	INSPEK TORAT

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tingkat ketrampilan aparatur	70%	90 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.	INSPEK TORAT
			Tingkat pencapaian penyusunan Laporan keuangan, dan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), serta evaluasi LAKIP	100%	100 %	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	INSPEK TORAT
			Tingkat pencapaian pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	100%	100%	Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	INSPEK TORAT
			Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BFKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Ijen.	70%	90 %		
			Tingkat pencapaian penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHPR), Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPKs), Laporan Hasil Reviu LKPD, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP dan Laporan Hasil Evaluasi Program Kegiatan SKPD	100%	100%		INSPEK TORAT
			Penurunan Tingkat Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler	70%	90 %		INSPEK TORAT
			Jumlah tenaga yang memiliki Sertifikasi Auditor	3 orang	20 orang	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	INSPEK TORAT
			Tingkat penyusunan peraturan perundang-undangan.	3 buah	7 buah	Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan.	INSPEK TORAT

Misi 5:

Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

5. Terwujudnya pembangunan dengan masyarakat yang berahlak mulia, memiliki toleransi antar umat beragama.	1. Membangun semangat kebhinekaan, rasa persaudaraan dan toleransi beragama yang berwawasan kebangsaan kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa	1. Peningkatan Hubungan harmonisasi antar Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	Persentase Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,15%	87,45%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bakesbangpol
			Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Aparatur	85,21%	88,57%	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Bakesbangpol
			Persentase Penyediaan Kelengkapan Pakaian Dinas	84,15%	87,51%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Bakesbangpol
			Persentase Kegiatan dibidang kepegawaian	81,15%	84,51%	Program Peningkatan kapasitas sumber daya	Bakesbangpol

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab		
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				
1	2	3	4	5	6	7	8		
yang mengedepankan nilai-nilai luhur budaya, kearifan lokal yang tidak membedakan, suku, ras maupun golongan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).	serta organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan. 2. Meningkatkan Peran Pemuda, Kesenian dan Fungsi Kominda serta FKDM di Kabupaten Barito Utara dalam menjaga keberagaman serta memberikan informasi aktual, berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi ditengah tengah masyarakat	Kebudayaan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku, dan budaya. 3. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres serta meningkatkan kualitas SDM dan data ormas. 4. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat dengan menjalin kerjasama antar instansi dan peran aktif Tokoh masyarakat dalam pemberantasan bahaya Narkoba. 5. Peningkatan kualitas seni budaya daerah 6. Pelestarian dan pengembangan situs dan cagar budaya di Kabupaten Barito Utara 7. Meningkatkan peran kesenian dan kepemudaan Kabupaten Barito Utara 8. Memfasilitasi pembangunan nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam koridor pembangunan secara terpadu, serasi dan seimbang.	Persentase Kegiatan sistem pelaporan dan Keuangan	86,35%	89,71%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Bakesbangpol		
			Persentase kegiatan Kominda dan FKDM	82,15%	85,51%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Bakesbangpol		
			Persentase kegiatan sosialisasi Wasbang	85,25%	88,61%	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Bakesbangpol		
			Persentase kegiatan Penyuluhan PEKAT	86,15%	89,51%	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Bakesbangpol		
			Persentase kegiatan Pembinaan Pendidikan politik dan Ormas	85,35%	88,71%	Program Pendidikan politik masyarakat	Bakesbangpol		
						URUSAN WAJIB			
						URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN			
					Terbina dan terseleksi paduan suara gita bahana nusantara dan Seni Budaya bagi generasi muda	75%		Program Pengembangan Nilai Budaya	Disbud parpora
					- Tersedianya wadah partisipasi dan ekspresi budaya masyarakat - Pelestarian Situs dan Objek Wisata - Tersedianya bahan dan kesenian	75%		Program Pengelolaan kekayaan Budaya	Disbud parpora
					Tersedianya forum kerjasama	75%		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Disbud parpora

Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
	Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
1	2	3	4	5	6	7	8
						BIDANG PARIWISATA	
			- Terselenggaranya promosi dan pemasaran produk-produk wisata keluar daerah	75%		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Disbud parpora
			Tersedian data kunjungan wisatawan di kabupaten Barito Utara				
			Tersedianya fasilitas – fasilitas umum yang layak sebagai penunjang kegiatan wisata daerah Tersedianya data objek – objek wisata daerah Tersusunnya rumusan hasil kesepakatan untuk mendorong kemajuan pembangunan kepariwisataan daerah	100 %	100 %	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Disbud parpora
			Terkirimnya PNS dan pelaku usaha jasa pariwisata mengikuti bimbingan teknis, pelatihan seminar dan sosialisasi tentang kepariwisataan Terpilihnya duta wisata daerah Terbentuknya kelompok Sadar Wisata di beberapa lokasi objek wisata Tersedianya mitra kerja usaha jasa pariwisata	85 %	100 %	Program Pengembangan Kemitraan	Disbud parpora
			Terselenggaranya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan	90 %	100 %	Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Disbud parpora
			Meningkatnya pengetahuan dan rasa peduli pemuda terhadap lingkungan dan masyarakat	85 %	100 %	Program peningkatan peran sera kepemudaan	Disbud parpora
			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemuda dibidang kewirausahaan	85 %	100 %	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan	Disbud parpora
			Pemuda dan pelajar bebas narkoba	85 %	100 %	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Disbud parpora
			Meningkatnya mutu dan satandarisasi keolahragaan tenaga	85 %	100 %	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Disbud parpora
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga	85 %	100 %	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Disbud parpora
			Meningkatnya sarana prasarana olahraga	100 %	100 %	Program peningkatan sarana prasarana olahraga	Disbud parpora



BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan kemudian disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang di susun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang berhubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya sampai akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (*outcomes*) sebagian merupakan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk urusan-urusan yang telah diatur dengan peraturan menteri sesuai dengan bidang urusannya. Indikator SPM yang belum menjadi indikator sasaran maupun indikator program, akan dicantumkan pada dokumen Perencanaan Strategik (Renstra) SKPD menjadi indikator kegiatan. Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilakukan SKPD.

Pencapaian target indikator kinerja program disusun secara rinci untuk setiap tahunnya dan disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan pagu indikatif untuk masing-masing program. Untuk program yang karena pencapaiannya dilaksanakan oleh beberapa SKPD/ lintas SKPD maka pencapaian target hasil dan kerangka pendanaan didistribusi kepada SKPD terkait.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas dan Rencana Pendanaan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		1500 surat, 4 rek, 20 org, 3 org, 46 macam, 5 macam, 12 bln, 5 jenis koran, 2 keg, 12 kali rapat, 38 kali perjln, 8 org, 40 kali perjln	789.910.014	1500 surat, 4 rek, 20 org, 3 org, 46 macam, 5 macam, 12 bln, 5 jenis koran, 2 keg, 12 kali rapat, 38 kali perjln, 8 org, 40 kali perjalan	808.335.358	1600 surat, 4 rek, 20 org, 3 org, 46 macam, 5 macam, 12 bulan, 5 jenis koran, 2 kegiatan, 12 kali rapat, 40 kali perjln, 8 orang, 42 kali perjln	816.221.117	1600 surat, 4 rek, 20 org, 3 org, 46 macam, 5 macam, 12 bulan, 5 jenis koran, 2 keg, 12 kali rapat, 40 kali perjln, 8 org, 42 kali perjln	821.396.150	1700 surat, 4 rek, 20 org, 3 org, 46 macam, 5 macam, 12 bln, 5 jenis koran, 2 keg, 12 kali rapat, 40 kali perjln, 8 org, 42 kali perjln.	827.988.144	7900 surat, 20 rek, 100 org, 15 org, 230 macam, 25 macam, 60 bln, 5 jenis koran, 10 keg, 60 kali rapat, 200 kali perjln, 40 orang, 206 kali perjln.	4.063.850.783		BPMD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan sarana dan prasarana		9 Jenis, 2 Jenis, 2 Note book, 1 komputer TS, 4 PC, 2 printer, 1 Paket, 1 thn, 1 thn.	574.085.000	5 Jenis, 2 Jenis, 2 Note book, 5 komputer PC, 10 UPS, 1 Unit kantor, Paket, 1 thn, 1 thn.	327.064.998	7 Jenis, 2 Jenis, 6 Note book, 8 printer, 1 tahun, 1 tahun,	293.670.000	1 Unit ruang rapat (tahap I), 7 Jenis, 2 Jenis, 2 Note book, 5 komputer PC, 1 tahun, 1 tahun,	672.333.300	1 Unit ruang rapat (tahap II), 9 Jenis, 2 Jenis, 6 Note book, 8 printer, 1 thn 1 thn.	996.331.502	1 unit ruang rapat, 37 Jenis, 10 jenis, 18 NB, 1 kompt, 9 PC 18 printer, 10 UPS, 5 th, 5 th	2.863.484.800		BPMD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kualitas aparat dalam berpakaian	40 orang	46 stel PDH dan 1 set baju satpam	19.400.000	47 pakaian Batik	14.100.000	46 stel PDH dan 1 set baju satpam	19.400.000	47 set pakaian olah raga	16.450.000	46 stel PDH dan 1 set baju satpam serta 46 baju Korpri	30.900.000	138 stel PDH, 3 set Baju Satpam, 46 stel Korpri, 47 Batik, 47 set baju olah raga	100.250.000		BPMD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya aparat dalam meningkatkan pelayanan	pegawai yang mengikuti bimtek dan pelatihan	10 orang	150.000.000	10 orang	150.000.000	10 orang	160.000.000	10 orang	160.000.000	10 orang	160.000.000	50 orang	780.000.000		BPMD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan	5 laporan, 1 buku dan 4 dokumen	5 laporan, 1 buku dan 5 dokumen	28.750.000	5 laporan, 1 buku dan 4 dokumen	23.500.000	5 laporan, 1 buku dan 4 dokumen	23.500.000	5 laporan, 1 buku dan 4 dokumen	23.500.000	5 laporan, 1 buku dan 5 dokumen	28.750.000	25 laporan, 5 buku dan 22 dokumen	128.000.000		BPMD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah pembinaan, koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat	80%	4 kali pem binaan, 2 kali pembinaan, 1 kali ikut event TTTG, 2 kali ke kec. 2 kali ke Prov 4 kali koord, 3 desa, 4 kali pembinaan, 1	453.800.000	4 kali pem binaan, 2 pembinaan 1 kali event TTTG, 2 kali ke kec. 2 kali ke Prov. 4 koord, 3 desa, 4 kali pembinaan,	453.800.000	6 kali pembinaan, 3 pembinaan 1 kali event TTTG, 2 kali ke kec. 2 kali ke Prov. 4 kali koord, 3 desa, 4 kali pembinaan, 1	513.800.000	6 kali pembinaan, 3 pembinaan 1 kali event TTTG, 2 kali ke kec. 2 kali ke Prov. 4 kali koord, 3 desa, 4 kali pembinaan, 1	513.800.000	6 kali pembinaan, 3 pembinaan 1 kali event TTTG, 2 kali ke kec. 2 kali ke Prov. 4 kali koord, 3 desa, 4 kali pembinaan, 1	513.800.000	26 kali pembinaan, 13 pembinaan 5 kali ikut event TTTG, 10 kali ke kec. 10 ke Prov. 20 kali koord, 15 desa, 20 kali pem binaan, 5	2.449.000.000		BPMD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Tertaksananya pembinaan dalam pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	80%	kali gelar CSR	460.438.406	PNPM-MP di 9 Kec., 2 Pengaduan, 4 Desa, 4 kali pembinaan, 1 kali keg.	573.438.406	5 Desa dan 9 Kec., 2 Pengaduan, 3 Desa, 4 kali pembinaan, 1 kali kegiatan	640.628.406	PNPM-MP di 9 Kec, 2 Pengaduan, 3 Desa, 4 kali pembinaan, 1 kali kegiatan	640.628.406	PNPM-MP di 9 Kec, 2 Pengaduan, 3 Desa, 4 kali pembinaan, 1 kali kegiatan	727.628.406	PNPM-MP di 9 Kec, 10 Pengaduan, 16 Desa, 20kali pembinaan, 5 kali kegiatan	3.042.762.030	BPMD
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	80%	5 Desa dan 9 kec, 3 kegiatan BBRGM, 2 kegiatan lomba desa/kelurahan, Update profil 103 desa, 9 kali pembinaan	509.745.500	5 Desa dan 9 kec, 3 kegiatan BBRGM, 2 kegiatan lomba desa/kelurahan, Update profil 103 desa, 9 kali pembinaan	509.745.500	5 Desa dan 9 kec, 3 kegiatan BBRGM, 2 kegiatan lomba desa/kelurahan, Update profil 103 desa, 9 kali pembinaan	544.745.500	5 Desa dan 9 kec, 3 kegiatan BBRGM, 2 kegiatan lomba desa/kelurahan, Update profil 103 desa, 9 kali pembinaan	738.770.645	5 Desa dan 9 kec, 3 kegiatan BBRGM, 2 kegiatan lomba desa/kelurahan, Update profil 103 desa, 9 kali pembinaan	654.870.500	25 Desa dan 9 kec, 15 kegiatan BBRGM, 10 kegiatan lomba desa/kelurahan, Update profil 103 desa, 9 kali pembinaan	2.957.877.645	BPMD
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tertaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan	80%	1 Kali pelatihan keu, 1 kali pelatihan manajemen, fasilitasi terhadap 93 desa	200.308.750	1 Kali pelatihan keu, 1 kali pelatihan manajemen, fasilitasi terhadap 93 desa	325.308.750	1 Kali pelatihan keu, 1 kali pelatihan manajemen, fasilitasi terhadap 93 desa	325.308.750	1 Kali pelatihan keu, 1 kali pelatihan manajemen, fasilitasi terhadap 93 desa	325.308.750	1 Kali pelatihan keu, 1 kali pelatihan manajemen, fasilitasi terhadap 93 desa	325.308.750	5 Kali pelatihan keu, 5 kali pelatihan manajemen pemerintah desa, fasilitasi thd 93 desa	1.501.543.750	BPMD
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Tertaksananya Koordinasi, pembinaan, fasilitasi, supervisi, money pelaksanaan peningkatan peran perempuan di perdesaan	80%	4 Kali pembinaan	75.000.000	4 Kali pembinaan	75.000.000	4 Kali pembinaan	75.000.000	4 Kali pembinaan	75.000.000	4 Kali pembinaan	75.000.000	20 Kali pembinaan	375.000.000	BPMD
Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa	Tertaksananya pengembangan dan peningkatan kualitas pemerintah desa dan kelurahan	80%	23 Kades dan 21 BPD	295.155.750	18 Kades dan 18 BPD	295.155.750	17 Kades dan 17 BPD	476.219.865	18 Kades dan 18 BPD	295.155.750	17 Kades dan 17 BPD	375.000.000	93 Kades dan 93 BPD	1.736.687.115	BPMD
Program Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular	Tertaksananya rapat koordinasi penguatan kelembagaan HIV/ AIDS	80%	2 Kegiatan	25.000.000	2 Kegiatan	25.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	10 Kegiatan	200.000.000	BPMD
Jumlah		80%		.951.417.277		5.950.272.619		6.545.299.881		6.939.149.244		7.633.064.169		33.019.203.189	

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Urusan Pekerjaan Umum																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kualitas pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.610.673.750	100%	1.771.741.125	100%	1.948.915.238	100%	2.143.806.761	100%	2.358.187.437	100%	9.833.324.311	Dinas PU	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase produktivitas aparat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana	100%	100%	1.266.534.264	100%	1.393.187.690	100%	1.532.506.459	100%	1.685.757.105	100%	1.854.332.816	100%	7.732.318.335	Dinas PU	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase disiplin aparat terhadap pelayanan	100%	100%	97.500.000	100%	107.250.000	100%	117.975.000	100%	129.772.500	100%	142.749.750	100%	595.247.250	Dinas PU	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase kualitas aparat dalam menunjang pelayanan	75%	80%	421.000.000	85%	463.100.000	90%	509.410.000	95%	560.351.000	100%	616.386.100	100%	2.570.247.100	Dinas PU	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kualitas laporan kinerja yang dihasilkan	100%	100%	79.862.500	100%	87.848.750	100%	96.633.625	100%	106.296.988	100%	116.926.686	100%	487.568.549	Dinas PU	
Program Pelayanan Masyarakat	Tingkat kualitas pelayanan masyarakat dan mitra kerja	100%	100%	40.125.000	100%	44.137.500	100%	48.551.250	100%	53.406.375	100%	58.747.013	100%	244.967.138	Dinas PU	
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengembangan SDM dan lembaga jasa konstruksi Prosentase penerbitan IUJK 	1 peraturan 60%	1 peraturan 65%	65.000.000	1 peraturan/ tahun 70%	71.500.000	1 peraturan 70%	78.650.000	1 peraturan 75%	86.515.000	1 peraturan 80%	95.166.500	5 peraturan 80%	396.831.500	Dinas PU	
Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan & Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang Jembatan dalam kondisi baik 	253,30 Km 1.600 m	350 Km 1.700 m	76.659.900.143	360 Km 1.800 m	84.325.890.157	380 Km 2.000 m	92.758.479.173	400 Km 2.200 m	102.034.327.090	425 Km 2.500 m	112.237.759.799	425 Km 2.500 m	468.016.356.363	Dinas PU	
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Panjang jalan dalam kondisi baik Panjang Jembatan dalam kondisi baik 	253,30 Km 1.600 m	350 Km 1.700 m	18.846.529.137	360 Km 1.800 m	20.731.182.051	380 Km 2.000 m	22.804.300.256	400 Km 2.200 m	25.084.730.281	425 Km 2.500 m	27.593.203.309	425 Km 2.500 m	115.059.945.034	Dinas PU	
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)	Prosentase fasilitasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan	50%	55%	65.000.000	60%	71.500.000	66%	78.650.000	70%	86.515.000	75%	95.166.500	75%	398.831.500	Dinas PU	
Program Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	Panjang jalan dalam kondisi baik	253,30	350 Km	745.261.000	360 Km	819.787.100	380 Km	901.765.810	400 Km	991.942.391	425 Km	1.091.136.630	425 Km	4.549.892.931	Dinas PU	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Jumlah irigasi yang dibangun/ditingkatkan	59 buah atau 4.000 m	18 buah atau 400 m	3.683.155.122	18 buah atau 400 m	4.051.470.634	18 buah atau 400 m	4.456.617.698	19 buah atau 400 m	4.902.279.467	18 buah atau 400 m	5.392.507.414	150 buah atau 6.000 m	22.486.030.335	Dinas PU
Program Pengendalian Banjir	Prosentase pemeliharaan sungai	25%	35%	3.520.000.000	45%	3.872.000.000	55%	4.259.200.000	65%	4.685.120.000	75%	5.153.632.000	75%	21.489.952.000	Dinas PU
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Lokasi Strategis Pembangunan baru Komplek Perkantoran Pemda Barut Pembangunan Islamic Centre di Kelurahan Jingah Jembatan penyeberangan ke Islamic Centre 	1 lokasi	2 lokasi	2.009.325.000	2 lokasi	2.210.257.500	2 lokasi	2.431.283.250	2 lokasi	2.674.411.575	2 lokasi	2.941.852.733	2 lokasi	12.267.130.058	Dinas PU
					1 lokasi	20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000			1 lokasi	60.000.000.000	Setda
					1 Lokasi	7.500.000.000		7.500.000.000					1 Lokasi	15.000.000.000	Swasta
					1 Lokasi	20.000.000.000							1 Unit	20.000.000.000	Dinas PU
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah prasarana air bersih yang dibangun/direhab Jumlah drainase yang dibangun/direhabilitasi 	53 buah 2.500 meter	7 buah 4.500 meter	3.183.900.000	8 buah 4.500 meter	3.502.290.000	9 buah 4.500 meter	3.852.519.000	10 buah 4.500 meter	4.237.770.900	11 buah 4.500 meter	4.661.547.990	98 buah 25.000 meter	19.438.027.890	Dinas PU
Program Penyediaan dan pengelolaan air bersih pedesaan	Jumlah Sarana air bersih yang dibangun/ditingkatkan	2 unit	2 unit	1.347.437.940	2 unit	1.482.181.734	2 unit	1.630.399.907	2 unit	1.793.439.898	2 unit	1.972.783.888	12 unit	8.226.243.367	Dinas PU
Program Peningkat an/ Rehabilitasi Sarana dan Pra- sarana Pemukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	7.500 meter	900 meter	7.277.000.000	900 meter	8.004.700.000	900 meter	8.805.170.000	900 meter	9.685.687.000	900 meter	10.654.255.700	12.000 meter	44.426.812.700	Dinas PU
Program Pembangunan Bangunan Gedung, Fasilitas Umum dan Sosial	Jumlah fasilitas publik yang dibangun/direhabilitasi	15 unit	4 unit	1.457.000.000	3 unit	1.602.700.000	3 unit	1.762.970.000	3 unit	1.939.267.000	3 unit	2.133.193.700	31 unit	8.895.130.700	Dinas PU
Program Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Prosentase penanganan sampah Jumlah petugas kebersihan kota 	81,25 % 156 org	81,50 % 156 org	3.146.036.675	81,70 % 158 org	3.460.640.343	84,97 % 160 org	3.806.704.377	89,87 % 162 org	4.187.374.814	94,77 % 164 org	4.606.112.296	94,77 % 164 org	19.206.868.505	Dinas PU
Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Workshop dan Alat Berat	Jumlah sarana prasarana dan peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik	16 unit	16 unit	1.030.000.000	17 unit	1.133.000.000	18 unit	1.246.300.000	19 unit	1.370.930.000	20 unit	1.508.023.000	20 unit	6.288.253.000	Dinas PU
Urusan Perumahan															
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah sarana air limbah dan sanitasi dasar yang dibangun/ direhab	3 buah	2 buah	1.208.875.650	2 buah	1.329.763.215	2 buah	1.462.739.537	3 buah	1.609.013.490	3 buah	1.769.914.839	15 buah	7.380.306.731	Dinas PU

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan	Jumlah laporan dari kelompok kerja	-	2 laporan	150.000.000	2 laporan	165.000.000	2 laporan	181.500.000	2 laporan	199.650.000	2 laporan	219.615.000	8 laporan	915.765.000	Dinas PU	
Program Pengembangan Kawasan Pemukiman	Jumlah kawasan yang pemukiman yang terpadu, serasi, tumbuh dan berkembang	0%	50%	500.000.000	80%	750.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.250.000.000	80%	1.500.000.000	80%	5.000.000.000	Dinas PU	
Program Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah kawasan kumuh yang tertata	0%	50%	500.000.000	80%	750.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.250.000.000	80%	1.500.000.000	80%	5.000.000.000	Dinas PU	
Urusan Lingkungan Hidup																
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah peralatan pengelolaan persampahan yang dalam kondisi baik	12 unit	12 unit	2.690.330.325	14 unit	2.959.363.358	16 unit	3.255.299.693	18 unit	3.580.829.663	20 unit	3.938.912.629	20 unit	16.424.735.667	Dinas PU	
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah petugas pemeliharaan RTH	35 org	35 org	4.279.308.000	37 org	4.707.238.800	39 org	5.177.962.680	41 org	5.695.758.948	43 org	6.265.334.843	43 org	26.125.603.271	Dinas PU	
Urusan Penataan Ruang																
Program Perencanaan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah produk tata ruang Jumlah RTR yang diperdakan 	3 buah 1 buah	4 buah 1 buah	1.132.500.000	6 buah 2 buah	1.245.750.000	8 buah 2 buah	1.370.325.000	10 buah 3 buah	1.507.357.500	12 buah 4 buah	1.658.093.250	12 buah 4 buah	6.914.025.750	Dinas PU	
Program Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah produk tata ruang Jumlah RTR yang diperdakan 	-	-	-	6 buah 2 buah	160.000.000	8 buah 2 buah	176.000.000	10 buah 3 buah	193.600.000	10 buah 3 buah	212.960.000	12 buah 4 buah	742.560.000	Dinas PU	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah produk tata ruang Jumlah RTR yang diperdakan 	-	-	-	6 buah 2 buah	275.000.000	8 buah 2 buah	302.500.000	10 buah 3 buah	332.750.000	10 buah 3 buah	366.025.000	12 buah 4 buah	1.276.275.000	Dinas PU	
BAPPEDA																
Perencanaan Pembangunan																
Program pengembangan data/informasi	Tersedianyadokumen Profil Daerah, PDRB, Laporan Triwulanan, dan Barito Utara dalam Angka	Ada	210 Buku	260.625.000	210 Buku	286.688.000	210 Buku	315.356.000	210 Buku	346.892.000	210 Buku	381.581.000	210 Buku	381.581.000	Bappeda	
Program Kerjasama Pembangunan	Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah yang selaras dan berkesinambungan	1 Keg	1 Keg	50.000.000	1 Keg	55.000.000	1 Keg	60.500.000	1 Keg	66.550.000	1 Keg	73.205.000	1 Keg	73.205.000	Bappeda	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS, yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERBUP. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Ada	850 Buku	1.309.565.000	850 Buku	1.440.522.000	850 Buku	1.584.574.000	850 Buku	1.743.031.000	850 Buku	1.917.334.000	850 Buku	1.917.334.000	Bappeda	
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Terciptanya sinkronisasi program bidang ekonomi	100%	100%	141.826.000	100%	156.009.000	100%	171.610.000	100%	188.771.000	100%	207.648.000	100%	207.648.000	Bappeda	
Program perencanaan Pembangunan sosial dan budaya	Terciptanya sinkronisasi program bidang sosial dan budaya, penunjang PNPB, dan implementasi hasil koordinasi lintas sektor penanggulangan kemiskinan	100%	100%	260.673.000	100%	286.740.000	100%	315.414.000	100%	346.956.000	100%	381.651.000	100%	381.651.000	Bappeda	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA, Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP),	Ada	50 Buku	190.075.000	50 Buku	209.083.000	50 Buku	229.991.000	50 Buku	252.990.000	50 Buku	278.289.000	50 Buku	278.289.000	Bappeda	
Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu	Terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan kewilayahan secara terpadu sesuai kondisi dan potensi daerah	0	50%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Bappeda	
Urusan Wajib Penanaman Modal																
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terbentuknya kesepakatan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam hal perencanaan penanaman modal, Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional (KP3MR), promosi investasi daerah	Ada	100%	475.312.000	100%	522.843.000	100%	575.128.000	100%	632.640.000	100%	695.904.000	100%	695.904.000	Bappeda	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersampainya LKPM oleh perusahaan penanam modal, pembinaan dan monitoring perusahaan PMA/PMDN	Ada	100%	152.423.000	100%	167.665.000	100%	184.432.000	100%	202.875.000	100%	223.163.000	100%	223.163.000	Bappeda	
DINAS KOPERASI DAN UMKM																
Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi	Persentase koordinasi kebijakan dan program pembangunan koperasi	80%	80%	502.000.000	80%	650.000.000	80%	775.000.000	80%	925.000.000	80%	1.050.000.000 0	90%	1.050.000.000	Diskop dan UMKM	
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi	Persentase pemantauan pengelolaan penggunaan	60%	70%	158.000.000	80%	225.000.000	80%	285.000.000	80%	325.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000	Diskop dan UMKM	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
UMKM	dana pemerintah.															
Program Penciptaan iklan usaha kecil dan menengah yang kondusif.	Persentase perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	60%	70%	79.000.000	80%	125.000.000	80%	175.000.000	80%	200.000.000	80%	275.000.000	80%	275.000.000	Diskop dan UMKM	
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Persentase Money dan Pelaporan perkembangan UMKM	70%	80%	79.000.000	80%	125.000.000	80%	175.000.000	80%	225.000.000	80%	250.000.000	80%	250.000.000	Diskop dan UMKM	
DISHUTBUN																
Kehutanan																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi Perkantoran	1750 perangka, 1250 materai, 750 paket pengiriman, 3 rek, 15 unit STNK	1750 perangka, 1250 materai, 750 paket pengiriman, 3 rek, 15 unit STNK.	1.415.420.630	1750 perangka, 1250 materai, 750 paket pengiriman, 3 rek, 15 unit STNK,	1.556.962.693	1750 perangka, 1250 materai, 750 paket pengiriman, 3 rek, 15 unit STNK	1.712.658.962	1750 perangka, 1250 materai, 750 paket pengiriman, 3 rek, 15 unit STNK,	1.883.924.859	1750 perangka, 1250 materai, 750 paket pengiriman, 3 rek, 15 unit STNK.	2.072.317.344	8750 perangka, 6250 materai, 3.750 paket pengiriman, 15 rek, 175 unit STNK	8.641.284.488	DISHUTBUN	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	4 Kegiatan, 18 Unit peralatan kantor, 21 unit meubeleur, 1 tahun	4 Kegiatan, 18 Unit peralatan kantor, 21 unit meubeleur, 1 tahun	1.223.500.000	4 Kegiatan, 18 Unit peralatan kantor, 21 unit meubeleur, 1 tahun	1.345.850.000	4 Kegiatan, 18 Unit peralatan kantor, 21 unit meubeleur, 1 tahun	1.480.435.000	4 Kegiatan, 18 Unit peralatan kantor, 21 unit meubeleur, 1 tahun	1.628.478.500	4 Kegiatan, 18 Unit peralatan kantor, 21 unit meubeleur, 1 tahun	1.791.326.350	20 Kegiatan, 90 Unit peralatan kantor, 105 unit meubeleur, 5 tahun	7.469.589.850	DISHUTBUN	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kualitas disiplin aparat dalam berpakaian	175 orang	175 orang	70.000.000	175 orang	77.000.000	175 orang	84.700.000	175 orang	93.170.000	175 orang	102.487.000	875 orang/5 tahun	427.357.000	DISHUTBUN	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya aparat dalam meningkatkan pelayanan	1 tahun, 25 orang	1 tahun, 25 orang	200.000.000	1 tahun, 25 orang	220.000.000	1 tahun, 25 orang	242.000.000	1 tahun, 25 orang	266.200.000	1 tahun, 25 orang	292.820.000	5 tahun, 125 orang	1.221.020.000	DISHUTBUN	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kualitas laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan	5 paket	5 paket/tahun	65.000.000	5 paket /tahun	71.500.000	5 paket /tahun	78.650.000	5 paket /tahun	86.515.000	5 paket /tahun	95.166.500	25 Paket/5 tahun	396.831.500	DISHUTBUN	
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	3 kali, 2 kali, 12 kali, 2 kali, 2 kali, 12 kali, 12 kali, 1 kali, 1 paket, 1 unit	3 kali, 2 kali, 12 kali, 2 kali, 2 kali, 12 kali, 12 kali, 1 kali, 1 paket / tahun, 1 unit	765.200.000	3 kali, 2 kali, 12 kali, 2 kali, 2 kali, 12 kali, 12 kali, 1 kali, 1 paket / tahun, 1 unit	841.720.000	3 kali, 2 kali, 12 kali, 2 kali, 2 kali, 12 kali, 12 kali, 1 kali, 1 paket / tahun, unit	925.892.000	3 kali, 2 kali, 12 kali, 2 kali, 2 kali, 12 kali, 12 kali, 1 kali, 1 paket / tahun, 1 unit	1.018.481.200	3 kali, 2 kali, 12 kali, 2 kali, 2 kali, 12 kali, 12 kali, 1 kali, 1 paket / tahun, 1 unit	1.120.329.320	15 kali, 10 kali, 60 kali, 10 kali, 10 kali, 60 kali, 60 kali, 5 kali, 5 paket, 1 unit / 5 tahun	4.671.622.520	DISHUTBUN	
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatkan Kualitas Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara	1 dok, 1 dok, 11 ha, 5 poktan, 5 dok, 600.000	1 dok, 1 dok, 11 ha, 5 poktan, 5 dok,	9.765.387.870	1 dok, 1 dok, 11 ha, 5 poktan, 5	10.741.926.657	1 dok, 1 dok, 11 ha, 5 poktan, 5	11.816.119.323	1 dok, 1 dok, 11 ha, 5 poktan, 5	12.997.731.255	1 dok, 1 dok, 11 ha, 5 poktan, 5	14.297.504.380	5 dok, 5 dok, 11 ha, 25 poktan,	59.618.669.485	DISHUTBUN	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		btg, 400 ha, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 2 dok, 2500 lbr.	600.000 btg, 400 ha, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 2 dok, 2500 lbr.		dok, 600.000 btg, 400 ha, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 2 dok, 2500 lbr.		dok, 600.000 btg, 400 ha, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 2 dok, 2500 lbr.		600.000 btg, 400 ha, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 2 dok, 2500 lbr.		dok, 600.000 btg, 400 ha, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 1 pkt, 2 dok, 2500 lbr.		25 dok, 3.000.000 btg, 2000 ha, 5 pkt, 5 pkt, 5 pkt, 5 pkt, 10 dok, 12.500 lbr.			
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Hutan dan Lahan Kabupaten Barito Utara	6 kali, 750 lembar, 3 kali	6 kali, 750 lembar, 3 kali	114.300.000	6 kali, 750 lembar, 3 kali / tahun	125.730.000	6 kali, 750 lembar, 3 kali / tahun	138.303.000	6 kali, 750 lembar, 3 kali / tahun	152.133.300	6 kali, 750 lembar, 3 kali / tahun	167.346.630	30 kali, 3750 lembar, 15 kali	697.812.930		DISHUTBUN
Program Pengembangan Kawasan Konservasi	Meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan kawasan konservasi	0%	50%	200.000.000	60%	250.000.000	70%	300.000.000	80%	350.000.000	90%	400.000.000	90%	1.500.000.000		DISHUTBUN
Program pengembangan kawasan hutan kota	Meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan hutan kota	0%	50%	200.000.000	60%	250.000.000	70%	300.000.000	80%	350.000.000	90%	400.000.000	90%	1.500.000.000		DISHUTBUN
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan	Jumlah sarana penyuluhan kehutanan	1 paket	1 paket / tahun	419.601.000	1 paket / tahun	461.561.100	1 paket / tahun	507.717.210	1 paket / tahun	558.488.931	1 paket / tahun	614.337.824	5 paket / 5 tahun	2.561.706.065		DISHUTBUN
Program Peningkatan fungsi DAS berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan penanaman lahan kritis tertanam	10.000 batang, 55 ha, 0 ha	10.000 batang, 55 ha, 0 ha / tahun	208.471.235	10.000 batang, 55 ha, 55 ha / tahun	229.318.359	10.000 batang, 55 ha, 55 ha / tahun	252.250.194	10.000 batang, 55 ha, 55 ha / tahun	277.475.214	10.000 batang, 55 ha, 55 ha / tahun	305.222.735	10.000 batang, 275 ha, 220 ha / 5 tahun	1.272.737.737		DISHUTBUN
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	1000 lembar, 1 paket	1000 lembar, 1 paket / tahun	750.616.765	1000 lembar, 1 paket / tahun	825.678.442	1000 lembar, 1 paket / tahun	908.246.286	1000 lembar, 1 paket / tahun	999.070.914	1000 lembar, 1 paket / tahun	1.098.978.006	5000 lembar, 5 paket / tahun	4.582.590.413		DISHUTBUN
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Kehutanan	Meningkatkan Kualitas Data Statistik Kehutanan	2 dokumen	2 dokumen / tahun	115.000.000	2 dokumen / tahun	126.500.000	2 dokumen / tahun	139.150.000	2 dokumen / tahun	153.065.000	2 dokumen / tahun	168.371.500	10 dokumen / 5 tahun	702.086.500		DISHUTBUN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Produksi Perkebunan	10.000 batang, 1 paket, 5 poktan, 10 ha, 1 paket, 3 kali, 4 kali	10.000 batang, 1 paket, 5 poktan, 10 ha, 1 paket, 3 kali, 4 kali / tahun	1.006.568.000	10.000 batang, 1 paket, 5 poktan, 10 ha, 1 paket, 3 kali, 4 kali / tahun	1.107.224.800	10.000 batang, 1 paket, 5 poktan, 10 ha, 1 paket, 3 kali, 4 kali / tahun	1.217.947.280	10.000 batang, 1 paket, 5 poktan, 10 ha, 1 paket, 3 kali, 4 kali / tahun	1.339.742.008	10.000 batang, 1 paket, 5 poktan, 10 ha, 1 paket, 3 kali, 4 kali / tahun	1.473.716.209	50.000 batang, 5 paket, 25 poktan, 50 ha, 5 paket, 15 kali, 20 kali / 5 tahun	6.145.198.297		DISHUTBUN
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatkan Pemasaran Produksi Perkebunan Daerah	500 lembar, 2 kali, 1 paket	500 lembar, 2 kali, 1 paket / tahun	950.000.000	500 lembar, 2 kali, 1 paket / tahun	1.045.000.000	500 lembar, 2 kali, 1 paket / tahun	1.149.500.000	500 lembar, 2 kali, 1 paket / tahun	1.264.450.000	500 lembar, 2 kali, 1 paket / tahun	1.390.895.000	2500 lembar, 10 kali, 5 paket / 5 tahun	5.799.845.000		DISHUTBUN
Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Meningkatkan produksi perkebunan di Kabupaten Barito Utara	15.000 batang, 1 paket, 15.000 batang, 2 ha,	15.000 batang, 1 paket, 15.000	3.175.771.000	15.000 batang, 1 paket, 15.000	3.493.348.100	15.000 batang, 1 paket, 15.000	3.842.682.910	15.000 batang, 1 paket, 15.000	4.226.951.201	15.000 batang, 1 paket, 15.000	4.649.646.321	75.000 batang, 5 paket, 75.000	19.388.399.532		DISHUTBUN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4 kali	batang, 2 ha, 4 kali / tahun		batang, 2 ha, 4 kali / tahun		batang, 2 ha, 4 kali / tahun, 1 unit		batang, 2 ha, 4 kali / tahun, 1 unit		batang, 2 ha, 4 kali / tahun, 1 unit			batang, 10 ha, 20 kali, 1 unit / 5 tahun		
Program pembangunan kawasan perkebunan	Meningkat dan terpadunya pembangunan kawasan perkebunan	0%	75%	100.000.000	85%	300.000.000	90%	350.000.000	95%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	1.695.000.000	DISHUTBUN	
Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Meningkatkan Kualitas Penyuluh dan Poktan Perkebunan	4 kali, 4 kali, 4 kali, 20 orang	4 kali, 4 kali, 4 kali, 20 orang / tahun	240.000.000	4 kali, 4 kali, 4 kali, 20 orang / tahun	264.000.000	4 kali, 4 kali, 4 kali, 20 orang / tahun	290.400.000	4 kali, 4 kali, 4 kali, 20 orang / tahun	319.440.000	4 kali, 4 kali, 4 kali, 20 orang / tahun	351.384.000	20 kali, 20 kali, 20 kali, 100 orang / 5 tahun	1.465.224.000	DISHUTBUN	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Perkebunan	Meningkatkan Kualitas Data Statistik Perkebunan	2 dokumen	2 dokumen / tahun	115.000.000	2 dokumen / tahun	126.500.000	2 dokumen / tahun	139.150.000	2 dokumen / tahun	153.065.000	2 dokumen / tahun	168.371.500	10 dokumen / 5 tahun	702.086.500	DISHUTBUN	
Jumlah				20.599.836.500		22.659.820.151		24.925.802.165		27.418.382.382		30.160.220.619		125.764.061.817	DISHUTBUN	
DISPERINDAGSAR																
Program Pengembangan Industri kecil Menengah (IKM)	Terwujudnya iklim usaha IKM yang kondusif	341 IKM	361 IKM	278.250.000	386 IKM	620.000.000	406 IKM	514.000.000	426 IKM	566.800.000	486 IKM	722.800.000	486 IKM	2.701.850.000	Disperindagsar	
Program Pengembangan Kerajinan & Industri Rumah Tangga	Berkembangnya aneka kerajinan & Industri Rumah tangga	123 Unit	123 Unit	487.000.000	135 Unit	700.000.000	141 Unit	770.000.000	150 Unit	879.000.000	170 Unit	1.000.000.000	170 Unit	3.836.000.000	Disperindagsar	
Perdagangan															Disperindagsar	
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		90%	80%	119.000.000	80%	130.900.000	80%	142.800.000	80%	154.700.000	80%	166.600.000	80%	714.000.000	Disperindagsar	
Penguatan Insitusi Pasar	Harga Terjangkau dan stabil, Stock dan Distribusi ada dan lancar	85%	85%	920.000.000	85%	1.639.788.750	85%	1.921.846.500	85%	2.183.545.800	85%	2.538.923.960	85%	9.204.105.010	Disperindagsar	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		100%	100%	1.736.745.727	100%	2.084.094.872	100%	2.527.913.846	100%	3.033.496.615	100%	3.640.195.938	100%	13.022.446.998	Disperindagsar	
Program Pembangunan Kawasan industri kecil dan menengah	Terciptanya dan tertatanya Kawasan industri kecil dan menengah	0%	50%	200.000.000	60%	250.000.000	70%	300.000.000	80%	350.000.000	90%	400.000.000	90%	1.500.000.000	Disperindagsar	
Program Penataan Kawasan Jasa Perdagangan	Berkembang dan tertatanya Kawasan Jasa Perdagangan	0%	50%	200.000.000	60%	250.000.000	70%	300.000.000	80%	350.000.000	90%	400.000.000	90%	1.500.000.000		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	50%	80%	677.350.700	80%	781.452.500	85%	858.832.750	85%	944.716.025	90%	1.039.187.628	100%	1.039.187.628	BKBPP	
Program Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi-nya Sarana dan Prasarana Aparatur	50%	80%	307.925.000	80%	709.450.000	85%	780.395.000	85%	858.434.500	90%	944.277.950	100%	944.277.950	BKBPP	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkat-nya Disiplin Aparatur	50%	80%	21.000.000	80%	42.000.000	85%	27.300.000	85%	256.830.000	90%	282.324.000	100%	282.305.100	BKBPP	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkat-nya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50%	80%	80.000.000	80%	80.000.000	85%	88.000.000	85%	97.600.000	90%	107.440.000	100%	107.448.000	BKBPP	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	80%	34.550.000	80%	39.555.000	85%	42.965.500	85%	47.277.550	90%	52.006.855	100%	52.006.855	BKBPP	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Anak & Perempuan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan	59%	80%	160.000.000	80%	269.000.000	85%	295.900.000	85%	325.490.000	90%	358.039.000	100%	358.039.000	BKBPP	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28%	80%	141.000.000	80%	169.000.000	85%	189.900.000	85%	208.890.000	90%	229.779.000	90%	229.779.000	BKBPP	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan	Terwujudnya Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	20%	80%	25.000.000	80%	35.000.000	85%	38.500.000	85%	42.350.000	90%	46.585.000	100%	46.585.000	BKBPP	
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Terwujudnya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	20%	80%	87.500.000	80%	228.250.000	85%	251.075.000	85%	276.182.500	90%	303.800.750	90%	303.800.750	BKBPP	
Program Pemberdayaan Perempuan		0%	100%	0	100%	260.000.000	100%	286.000.000	100%	314.600.000	100%	346.060.000	100%	346.060.000	BKBPP	
Program Keluarga Berencana		60%	80%	640.000.000	80%	625.000.000	80%	687.500.000	80%	756.250.000	80%	831.875.000	94%	831.875.000	BKBPP	
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		0%	0%	0	80%	186.000.000	80%	204.600.000	80%	225.060.000	80%	247.566.000	100%	247.566.000	BKBPP	
Program Penyiapan Tenaga PKLK	Terwujudnya tenaga terampil dalam pembinaan PKLK	65%	80%	10.000.000	80%	30.000.000	80%	33.000.000	80%	36.300.000	80%	39.930.000	90%	39.930.000	BKBPP	
Program Keluarga Berencana		58%	80%	1.243.402.000	80%	2.969.560.000	80%	3.266.516.000	80%	3.593.167.600	80%	3.952.484.360	89%	3.952.484.360	BKBPP	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja		30%	80%	79.500.000	80%	100.000.000	80%	110.000.000	80%	121.000.000	80%	133.100.000	80%	133.100.000	BKBPP	
Program Pelayanan Kontrasepsi		45%	80%	93.500.000	80%	102.850.000	80%	113.135.000	80%	124.448.500	80%	136.893.350	80%	136.893.350	BKBPP	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		100%	100%	79.402.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	115.500.000	100%	127.050.000	100%	127.050.000	BKBPP	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	33%	80%	235.000.000	80%	385.000.000	80%	379.400.000	80%	511.240.000	80%	562.349.000	85%	469.177.500	BKBPP	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan yang lebih baik	38%	80%	87.500.000	80%	216.250.000	80%	227.875.000	80%	249.662.500	80%	274.528.750	100%	274.518.750	BKBPP	
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	60%	80%	30.000.000	80%	33.000.000	80%	36.300.000	80%	39.930.000	80%	43.923.000	100%	43.923.000	BKBPP	
Jumlah				4.032.629.700		7.361.367.500		8.022.14.250		9.144.929.175		10.059.199.643		9.966.007.243		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kinerja aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	10%	15%	35.000.000	20%	38.500.000	25%	41.800.000	30%	46.600.000	35%	51.000.000	50%	51.000.000	BPBD	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial /Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	50%	60%	355.000.000	60%	400.000.000	70%	440.000.000	70%	484.000.000	80%	532.000.000	90%	532.000.000	BPBD	
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase kesiapsiagaan dini dan pencegahan menghadapi bencana serta penanggulangan bencana	50%	65%	330.000.000	65%	363.000.000	65%	399.000.000	65%	438.200.000	65%	482.020.000	75%	482.020.000	BPBD	
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	80%	80%	475.000.000	80%	522.500.000	80%	574.750.000	80%	632.225.000	80%	692.447.000	100%	692.447.000	BPBD	
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Penanganan Pasca Bencana	80%	80%	85.000.000	80%	93.500.000	80%	150.000.000	90%	165.000.000	90%	181.500.000	100%	181.500.000	BPBD	
Program penataan kawasan rawan banjir	Tertatanya infrastruktur di kawasan rawan banjir	0%	50%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	BPBD	
Program penataan Daerah Aliran Sungai	Tertata dan meningkatnya infrastruktur kawasan DAS	0%	75%	100.000.000	85%	300.000.000	90%	350.000.000	95%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	1.695.000.000	BPBD	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
(DAS)																
INSPEKTORAT																
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat realisasi agenda kekinisan Inspektur dan pegawai Inspektorat	100%	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	INSPEKTORAT	
	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Inspektorat dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	100%	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	INSPEKTORAT	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional Inspektorat	80%	85%	100.000.000	85%	125.000.000	85%	150.000.000	87%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	INSPEKTORAT	
	Jumlah gedung kantor yang terbangun/direhab	75%	75%	200.000.000	80%	200.000.000	80%	200.000.000	85%	250.000.000	85%	250.000.000	85%	250.000.000		
Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100%	100%	15.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	INSPEKTORAT	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.	Tingkat ketrampilan aparatur	70%	80%	110.000.000	80%	130.000.000	85%	165.000.000	85%	170.000.000	90%	170.000.000	90%	170.000.000	INSPEKTORAT	
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Tingkat pencapaian penyusunan Laporan keuangan, dan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), serta evaluasi LAKIP	100%	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	INSPEKTORAT	
Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHL.	Tingkat pencapaian pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	100%	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.100.000.000	INSPEKTORAT	
	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Ijen.	70%	80%	65.000.000	80%	65.000.000	85%	70.000.000	85%	70.000.000	90%	70.000.000	90%	70.000.000	INSPEKTORAT	
	Tingkat pencapaian penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHPR), Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPKs), Laporan Hasil Reviu LKPD, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP dan Laporan Hasil Evaluasi	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	INSPEKTORAT	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program Kegiatan SKPD															
	Penurunan Tingkat Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler	70%	80 %	65.000.000	80 %	65.000.000	85 %	70.000.000	85 %	70.000.000	90 %	70.000.000	90 %	70.000.000		
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga yang memiliki Sertifikasi Auditor	3 orang	6 orang	200.000.000	9 orang	385.000.000	12 orang	385.000.000	15 orang	460.000.000	20 orang	460.000.000	20 orang	470.000.000	INSPEK TORAT	
Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan.	Tingkat penyusunan peraturan perundang-undangan.	3 buah	3 buah	37.000.000	4 buah	37.000.000	4 buah	40.000.000	7 buah	40.000.000	7 buah	40.000.000	7 buah	40.000.000	INSPEK TORAT	
DINAS PENDIDIKAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.928.137.500	100 %	3.114.862.505	100 %	3.519.794.631	100 %	4.077.367.932	100 %	4.645.425.763	100%	17.285.588.332	DISDIK	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	80 %	80 %	305.000.000	85 %	3.205.001.865	90%	3.621.652.107	95%	4.092.466.881	100%	4.674.487.576	100%	15.898.608.429		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian Dinas dan Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket	70 stel	15.000.000	80 stel	40.000.000	2400 Stel	1.200.000.000	-	0	80 stel	80.000.000	2630 stel	1.335.000.000	DISDIK	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya dana untuk bimtek	1 kegiatan	75%	100.000.000	85%	300.000.000	90%	350.000.000	95%	450.000.000	100%	495.000.000	100%	1.695.000.000	DISDIK	
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya penyusunan lap.	100%	100%	52.700.000	100%	160.200.000	100%	180.000.000	100%	203.400.000	100%	229.842.000	100%	826.142.000	DISDIK	
Program Pendidikan Menengah	- Jumlah Ruang kelas yang cukup - Jumlah laboratorium IPA, Bahasa - Jumlah Perpustakaan yang memadai - Jumlah Rumah Dinas Kepala sekolah, Guru, dan penjaga sekolah yang memadai	95%	95%	12.211.333.000	100%	13.798.806.290	100%	15.593.810.433	100%	18.582.277.779	100%	20.997.973.890	100%	81.184.201.393	DISDIK	
Program Peningkatan Pendidikan Non Formal	- Pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terpencil - Penduduk yang tuna aksara - Angka melanjutkan sekolah - Angka putus sekolah	70%	70 %	135.000.000	80%	325.000.000	85%	750.000.000	90%	826.409.380	95%	933.792.599	100%	2.970.201.979	DISDIK	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Pendidik dan tenaga kependidikan di daerah terpencil - Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 - Rasio Guru/Siswa - Rasio Guru/Sekolah	1.278 org	250 orang	455.000.000	300 orang	5.044.966.234	400 orang	6.700.811.844	300 orang	9.451.917.384	272 orang	10.680.666.644	2.800 orang	32.333.362.106	DISDIK
Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan	- Rasio Sekolah/penduduk Usia sekolah - Angka Partisipasi Kasar (APK) - Angka Partisipasi Murni (APM)	90 sekolah	26 sekolah	392.877.519	40 sekolah	740.000.000	40 sekolah	814.000.000	40 sekolah	895.400.000	40 sekolah	1.011.802.000	276 sekolah	3.854.079.519	DISDIK
Operasional Sekolah	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar	40 Sekolah	40 Sekolah	6.376.846.000	41 Sekolah	7.014.530.600	43 Sekolah	7.926.419.578	45 Sekolah	8.956.854.123	47 Sekolah	10.121.245.159	49 Sekolah	40.395.895.460	DISDIK
Operasional UPTD/UPK/ SKB	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar	10 Unit	10 Unit	1.380.800.000	10 Unit	1.560.304.000	10 Unit	1.763.143.520	10 Unit	1.992.352.177	10 Unit	2.251.357.960	10 Unit	8.947.957.658	DISDIK
Program Kalimantan Tengah Harati	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar	22 paket	34 Paket	5.000.000.000	38 Paket	5.000.000.000	40 Paket	5.750.000.000	43 Paket	6.500.000.000	45 Paket	7.200.000.000	45 Paket	29.450.000.000	DISDIK
Program Perencanaan Pembangunan Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar	-	-	0	100 %	200.000.000	100 %	235.000.000	100 %	265.000.000	100 %	290.000.000	100 %	990.000.000	DISDIK
Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik	Tersedianya UKT bagi peserta didik	2 Org	2 Org	110.680.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	110.680.000	DISDIK
Program pengembangan kawasan pendidikan	Meningkatnya sarana prasarana dan berkembangnya infrastruktur kawasan pendidikan	0	80%	500.000.000	80%	750.000.000	80%	1.000.000.000	80%	1.250.000.000	80%	1.500.000.000	80%	5.000.000.000	DISDIK
JUMLAH				58.327.085.981		68.271.073.994		77.146.313.613		87.175.334.383		98.508.127.853		389.427.935.825	DISDIK
DISDUKCAPIL															
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	80%	80%	1.159.329.000	90 %	1.881.114.000	90 %	1.975.170.000	90 %	2.073.928.000	90 %	2.177.625.000	90%	9.267.165	Disdukcapil
Program Peningkatan Ketersediaan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Kependudukan	80%	80%	201.416.000	90%	592.166.000	90%	621.774.000	90%	652.863.000	90%	685.506.000	90%	2.753.725	Disdukcapil
Program Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	80%	80%	275.548.000	90%	275.546.000	90%	275.546.000	90%	275.546.000	90%	275.546.000	90%	1.463.184	Disdukcapil
KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN															
Program pelayanan administrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	90 %	100%	352.326.500	100%	460.495.500	85%	431.281.532	88%	487.333.000	90%	501.800.000	90%	2.233.236.532	Kansiptaka

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
perkantoran	perkantoran															
rogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya produktivitas pegawai dengan tersedianya sarana dan prasarana	90 %	100%	464.301.500	100%	324.612.500	85%	166.594.000	87%	264.000.000	90%	272.000.000	90%	1.491.508.000	Kansiptaka	
Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian		-	-	20 stel	9.000.000	20 stel	10.000.000	20 stel	10.000.000	20 stel	10.000.000	80 stel	39.000.000	Kansiptaka	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelayanan	100 %	5 org	10.000.000	5 org	20.000.000	4 org	15.000.000	8 org	30.000.000	8 org	30.000.000	30 org	105.000.000	Kansiptaka	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas dalam menyusun laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan	100 %	5 laporan, 4 dok, 3 buku	17.500.000	5 laporan, 5 dok, 4 buku	22.500.000	5 laporan, 5 dok, 4 buku.	22.500.000	5 laporan, 5 dok, 4 buku.	24.500.000	5 laporan, 5 dok, 4 buku	24.500.000	25 laporan, 24dok, 19 buku.,	111.500.000	Kansiptaka	
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Terlaksananya perbaikan sistem administrasi kearsipan	100 %	1 tahun	10.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	5 tahun	160.000.000	Kansiptaka	
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN																
KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan pelayanan terhadap masyarakat	100 %	1 tahun	276.000.000	1 tahun	263.520.000	1 tahun	261.960.000	1 tahun	290.000.000	1 tahun	303.000.000	5 tahun	1.394.480.000	Kansiptaka	
Program pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	90 %	100%	352.326.500	100%	460.495.500	85%	431.281.532	88%	487.333.000	90%	501.800.000	90%	2.233.236.532	Kansiptaka	
	Jumlah			1.130.128.000		1.140.128.000		1.084.758.500		1.155.833.000		1.191.300.000		5.534.724.532		
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Meningkatnya Pelayanan Adm. Perkantoran		2500 surat, 12 bln, 12 bln, 20 bh, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 1 pkt, 12bln, 12 bln,12bln, 12bln 12 bln, 12 bln	1.063.576.000	2500 surat, 12 bln, 12 bln, 20 bh, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 1 pkt, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 12 bln	1.063.576.000	2500 surat, 12 bln, 12 bln, 20 bh, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 1 pkt, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 12 bln	1.063.576.000	2500 surat, 12 bln, 12 bln, 20 bh, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 1 pkt, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 12 bln	1.063.576.000	2500 surat, 12 bln, 12 bln, 20 bh, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 1 pkt, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 12 bln, 12 bln	1.063.576.000	12.500 Surat, 6 bln, 60 bln, 100 bh, 60 bln, 60 bln, 60 bln, 5pkt 60 bln, 60 bln, 60 bln, 60 bln, 60 bln, 60 bln	5.317.880.000	Dissosnake rtrans	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk menunjang pelayanan publik		9 buah, 24 Unit, 20 Bh, 12 Unit, 2 Paket	588.500.000	9 buah, 24 Unit, 20 Bh, 12 Unit, 2 Paket	588.500.000	9 buah, 24 Unit, 20 Bh, 12 Unit, 2 Paket	588.500.000	9 buah, 24 Unit, 20 Bh, 12 Unit, 2 Paket	588.500.000	9 buah, 24 Unit, 20 Bh, 12 Unit, 2 Paket	588.500.000	45 bh,120 bh,100 bh,60 unit,10 Pkt	2.942.500.000	Dissosnake rtrans	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam menggunakan pakaian Dinas		64 Stel	22.750.000	68 Stel	24.480.000	70 Stel	25.200.000	70 Stel	25.200.000	70 Stel	25.200.000	342 Stel	122.830.000	Dissosnake rtrans	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya aparatur dalam pelayanan publik		12 Org	100.000.000	12 Org	100.000.000	60 Org	500.000.000	Dissosnake rtrans						
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	2 Dok	2 Dok, 2 Dok, 1 Dok, 3 Dok	13.200.000	2 Dok, 2 Dok, 1 Dok, 3 Dok	13.200.000	2 Dok, 2 Dok, 1 Dok, 3 Dok	13.200.000	2 Dok, 2 Dok, 1 Dok, 3 Dok	13.200.000	2 Dok, 2 Dok, 1 Dok, 3 Dok	13.200.000	10 Dok, 10 Dok, 5 Dok, 15 Dok	66.000.000	Dissosnake rtrans
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		40 org, 30 Org, 36 Org, 50 org, 2 Pkt, 40 org	883.875.000	40 org, 30 org, 15 org, 50 org, 2 Pkt, 60 org	901.000.000	40 org, 30 org, 15 org, 50 org, 2 Pkt, 60 org	901.000.000	40 Org, 30 org, 15 org, 50 org, 1 Pkt, 60 org	186.000.000	40 org, 30 org, 15 org, 50 org, 1 Pkt, 60 org	186.000.000	200 Org, 150 org, 96 org, 250 org, 8 Pkt, 280 org	3.057.875.000	Dissosnake rtrans
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.	Meningkatnya kemampuan dan rasa percaya diri para PENCA dan Trauma.	3 Org	3 Org	20.875.000	3 Org	25.000.000	3 Org	25.000.000	3 Org	25.000.000	3 Org	25.000.000	15 Org	120.875.000	Dissosnake rtrans
Program Pemberdayaan Kelengkapan Kesejahteraan Sosial.	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kessos.	12 Ordes 39 Tagana 39 Tagana 20 Desa 30 Org 30 Org 20 Org 4 Org	12 Ordes, 39 Tagana, 39 Tagana, 20 Desa, 30 Org, 30 Org, 20 Org, 4 Org	238.685.000	12 Ordes, 39 Tagana, 39 Tagana, 20 Desa, 30 Org, 30 Org, 20 Org, 4 Org	238.685.000	12 Ordes, 39 Tagana, 39 Tagana, 20 Desa, 30 Org, 30 Org, 20 Org, 4 Org	238.685.000	12 Ordes, 39 Tagana, 39 Tagana, 20 Desa, 30 Org, 30 Org, 20 Org, 4 Org	238.685.000	12 Ordes	238.685.000	60 Orsos, 195 Angg. Tagana, 195 Tagana, 103 Desa, 150 Org, 150 Org, 100 Org 20 Org	1.193.425.000	Dissosnake rtrans
Program Pembinaan Anak Terlantar	Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan bagi anak terlantar.	12 Org	12 Org	17.500.000	12 Org	17.500.000	60 Org	87.500.000	Dissosnake rtrans						
Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.	Meningkatnya Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial	15 Org	15 Org, 40 Org	18.600.000	15 Org, 25 Org	18.600.000	75 Org, 140 Org	93.000.000	Dissosnake rtrans						
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya kapasitas dan kualitas Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.	36 Org, 30 Org, 112 Org, 9 Desa, 23 Desa	36 Org, 30 Org, 112 Org, 9 Desa, 23 Desa	160.165.000	88 Org, 30 Org, 60 Org, 9 Desa, 20 Desa	195.400.000	88 Org, 30 Org, 60 Org, 9 Desa, 20 Desa	195.400.000	88 Org, 30 Org, 60 Org, 9 Desa, 20 Desa	195.400.000	88 Org, 30 Org, 60 Org, 9 Desa, 20 Desa	195.400.000	388 Org, 150 Org, 352 Org, 45 Desa, 103 Desa	941.756.000	Dissosnake rtrans
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	100 Org, 5 Prsh, 200 Org, 200 Org, 25 Prsh, 200 Org, 25 Prsh, 4 Psr	100 Org, 5 Prsh, 200 Org, 200 Org, 25 Prsh, 200 Org, 20 Prsh, 4 Psr	39.845.000	150 Org, 5 Prsh, 200 Org, 200 Org, 25 Prsh, 200 Org, 25 Prsh, 4 Psr	284.705.000	200 Org, 5 Prsh, 200 Org, 200 Org, 25 Prsh, 200 Org, 25 Prsh, 4 Psr	331.300.000	250 Org, 5 Prsh, 250 Org, 250 Org, 25 Prsh, 200 Org, 25 Prsh, 5 Psr	353.300.000	300 Org, 5 Prsh, 300 Org, 300 Org, 25 Prsh, 200 Org, 25 Prsh, 5 Psr	344.145.000	1000 Org, 25 Prs, 1.150 Org, 1.150, 125 Prsh, 1000 Org, 120 Prsh, 24 Psr	1.353.295.000	Dissosnake rtrans

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dan Pelatihan Tenaga Kerja.	Tersedianya tenaga kerja baru dan terserapnya tenaga kerja lokal	20 Org	20 Org, 20 Org, 20 Org, 5000 Org	993.911.000	20 Org, 20 Org, 20 Org, 5000 Org	1.043.000.000	20 Org, 20 Org, 20 Org, 5000 Org	1.075.000.000	20 Org, 20 Org, 20 Org, 5000 Org	1.075.000.000	20 Org, 20 Org, 20 Org, 5000 Org	1.075.000.000	100 Org, 100 Org, 100 Org, 2.500 Org	5.261.911.000	Dissosnake rtrans	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT)	Tersedianya Rentek dan Terbangunnya Kawasan Transmigrasi	1 Pkt	1 Pkt	73.000.000	1 Pkt	275.000.000	1 Pkt	275.000.000	0	0	0	0	3 Pkt	1.173.000.000	Dissosnake rtrans	
Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi (PMKT)	Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	80 Org, 80 Org	80 Org, 80 Org	78.986.000	100 Org, 100 Org	100.000.000	480 Org, 480 Org	953.986.000	Dissosnake rtrans							
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI																
Energi dan Sumberdaya Mineral																Distamben
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.180.250.000	100%	1.416.300.000	100%	1.699.560.000	100%	2.039.473.000	100%	2.447.367.000	100%	2.447.367.000	Distamben	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	100%	100%	700.000.000	100%	725.000.000	100%	750.000.000	100%	775.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	Distamben	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	100%	100%	24.000.000	100%	27.500.000	100%	30.000.000	100%	32.500.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	Distamben	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Distamben	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Distamben	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan		100%	100%	315.000.000	100%	330.000.000	100%	350.000.000	100%	375.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Distamben	
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Meningkatnya Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	Distamben	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	100%	100%	1.578.650.000	100%	1.894.370.000	100%	2.273.250.000	100%	2.728.000.000	100%	3.273.475.000	100%	3.273.475.000	Distamben	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pengelolaan Air Tanah	Meningkatnya Pengelolaan Air Tanah	100%	100%	25.000.000	100%	325.000.000	100%	230.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	Distamben	
Program Survey Potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Survey Potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral	-	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Distamben	
Program Pengembangan kawasan pertambangan galian C	Meningkat dan tertatanya wilayah Pengembangan kawasan pertambangan galian C	0%	50%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	490.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	Distamben	
KANTOR KETAHANAN PANGAN																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran	86.14%	100%	502,853,000	100%	553,138,300	100%	608,452,130	100%	669,297,343	100%	736,227,077	86.14	736,227,077	Kanhangen	
Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya penyediaan sarana prasarana aparatur	93.52%	100%	79,492,000	100%	87,441,200	100%	96,185,320	100%	105,803,852	100%	116,384,237	100%	116,384,237	Kanhangen	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	94.74%	100%	16,200,000	100%	17,820,000	100%	19,602,000	100%	21,562,200	100%	23,718,420	100%	23,718,420	Kanhangen	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	48.7%	100%	23,000,000	100%	25,300,000	100%	27,830,000	100%	30,613,000	100%	33,674,300	100%	33,674,300	Kanhangen	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya laporan yang berkualitas	100%	100%	30,000,000	100%	33,000,000	100%	36,300,000	100%	39,930,000	100%	43,923,000	100%	43,923,000	Kanhangen	
Program peningkatan ketahanan pangan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	98.5%	100%	160,000,000	100%	176,000,000	100%	193,600,000	100%	212,960,000	100%	234,256,000	100%	234,256,000	Kanhangen	
Program peningkatan keamanan pangan	Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya keamanan pangan utk kesehatan	97.64%	100%	190,000,000	100%	209,000,000	100%	229,900,000	100%	252,890,000	100%	278,179,000	100%	278,179,000	Kanhangen	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	0	100%	10,000,000	100%	11,000,000	100%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	14,641,000	100%	14,641,000	Kanhangen	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	99.81%	100%	85,000,000	100%	93,500,000	100%	102,850,000	100%	113,135,000	100%	124,448,500	100%	124,448,500	Kanhangen	
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Meningkatnya SDM masyarakat.	96.53%	100%	120,000,000	100%	132,000,000	100%	145,200,000	100%	159,720,000	100%	175,692,000	100%	175,692,000	Kanhangen	
SEKRETARIAT DAERAH																
URUSAN WAJIB																
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tingkat realisasi agenda kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	75%	80%	950.000.000	83%	1.045.000.000	85%	1.150.000.000	85%	1.270.000.000	90%	1.400.000.000	90%	1.400.000.000	SETDA
	Tingkat pencapaian penyusunan Laporan keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), serta laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Informasi LPPD	100%	100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	490.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	SETDA
Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Setda dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	80%	85%	9.632.400.000	85%	10.595.000.000	85%	11.655.000.000	87%	13.000.000.000	90%	13.000.000.000	90%	13.000.000.000	SETDA
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional Setda	75%	75%	7.945.000.000	80%	32.000.000.000	80%	32.000.000.000	85%	10.000.000.000	85%	10.000.000.000	85%	10.000.000.000	SETDA
	Jumlah gedung kantor yang terbangun/direhab	5 unit	12 unit	12.775.000.000	12 unit	14.000.000.000	4 unit	7.000.000.000	4 unit	9.000.000.000	5 unit	10.000.000.000	21 unit	10.000.000.000	SETDA
Program Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	70%	80 %	300.000.000	80 %	330.000.000	85 %	365.000.000	85 %	400.000.000	90 %	400.000.000	90 %	400.000.000	SETDA
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat ketrampilan aparatur	70%	70 %	600.000.000	75 %	660.000.000	75 %	730.000.000	80 %	800.000.000	80 %	800.000.000	80 %	800.000.000	SETDA
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat pencapaian penyusunan Laporan keuangan, dan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), serta evaluasi LAKIP	100%	100%	237.200.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	320.000.000	100%	320.000.000	100%	320.000.000	SETDA
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada website	50 %	60%	349.600.000	65%	385.000.000	65%	385.000.000	70%	460.000.000	75%	460.000.000	75%	460.000.000	SETDA
Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Tingkat fasilitasi pelayanan keprotokolan	80%	85%	73.800.000	85%	90.000.000	90%	90.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	SETDA
Program pembinaan pengendalian pelaksanaan pembangunan	Tingkat tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Tingkat kesesuaian antara perencanaan & pelaksanaan	80%	80%	675.900.000	85%	750.000.000	90%	750.000.000	90%	900.000.000	90%	900.000.000	90%	900.000.000	SETDA
Program Pengembangan Data Informasi	Tingkat penggunaan LPSE oleh penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan	100%	100%	789.800.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	SETDA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (Renja, Renstra dan RKA)	2 dok	4 dok	70.000.000	3 dok	80.000.000	3 dok	80.000.000	3 dok	100.000.000	3 dok	100.000.000	16 dok	100.000.000	SETDA
Program Pembinaan Pembangunan Sosial dan Perekonomian Daerah	Tingkat realisasi pembinaan Pembangunan Sosial dan Perekonomian daerah	80%	80%	280.000.000	85 %	300.000.000	85%	300.000.000	85%	375.000.000	85%	375.000.000	85%	375.000.000	SETDA
Program Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat	Tingkat dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan yang diprogramkan	80%	80%	742.000.000	85 %	800.000.000	85%	800.000.000	90%	800.000.000	90%	800.000.000	90%	800.000.000	SETDA
Program Pembangunan kawasan keagamaan	Terbangun dan tertatanya kawasan keagamaan	75%	80%	950.000.000	83%	1.045.000.000	85%	1.150.000.000	85%	1.270.000.000	90%	1.400.000.000	90%	1.400.000.000	SETDA
Program Peningkatan Usaha kesehatan sekolah	Tingkat dukungan terhadap UKS	60%	80%	255.400.000	80%	300.000.000	85%	300.000.000	85%	350.000.000	90%	350.000.000	90%	350.000.000	SETDA
Program Peningkatan kesehatan lansia	Tingkat dukungan terhadap kesehatan Lansia	100%	100%	112.200.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	SETDA
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Daerah otonomi Baru yang tertata	20%	60%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	SETDA
Program Penataan Tata Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Tingkat kesesuaian batas wilayah	25%	50%	800.000.000	75%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	SETDA
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Olah Raga	Tingkat sarana dan prasarana olah raga yang terpelihara	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	SETDA
Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Jumlah kerjasama antar daerah, antara daerah dengan pihak lain,	0 %	10 %	100.000.000	20 %	150.000.000	20 %	150.000.000	40 %	200.000.000	40 %	200.000.000	40%	200.000.000	SETDA
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketrampilan aparatur pengelola keuangan daerah	70%	75%	100.000.000	75 %	150.000.000	80%	150.000.000	85%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	SETDA
Program Peningkatan Kapasitas Kelenbagaan Pemerintah Daerah	Tingkat kesesuaian besaran organisasi dengan beban kerja	80%	80%	568.700.000	82%	650.000.000	84 %	650.000.000	87%	700.000.000	90 %	700.000.000	90 %	700.000.000	SETDA
Program penataan peraturan perundang-undangan	Tingkat penyelesaian produk hukum daerah	60 %	65%	620.000.000	65%	750.000.000	70 %	750.000.000	70 %	800.000.000	75%	800.000.000	75%	800.000.000	SETDA
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat Ketercapaian sarana penyebarluasan informasi pembangunan daerah	80%	85%	129.600.000	85%	150.000.000	90.%	150.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	SETDA
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	jumlah SDM terlatih di bidang komunikasi dan informasi	50%	60%	35.000.000	60%	75.000.000	65%	75.000.000	65%	100.000.000	70%	100.000.000	70%	100.000.000	SETDA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada media massa	70%	70%	1.101.000.000	70%	1.250.000.000	75%	1.250.000.000	75%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	SETDA	
Program Pelayanan Informasi Publik	Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang	70%	70%	282.500.000	70%	350.000.000	75%	350.000.000	75%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000	SETDA	
URUSAN PERTANAHAN																
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Luas lahan bersertifikat	100 %	100 %	2.703.000.000	100 %	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	SETDA	
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Jumlah Sistem informasi pendaftaran tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SETDA	
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase sengketa pertanahan yang terselesaikan	50%	60%	0	70%	100.000.000	80%	100.000.000	90%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	SETDA	
Program Pengembangan sistem informasi pertanahan	Jumlah Sistem informasi pertanahan	1 sistem informasi	1 sistem informasi	200.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	1 sistem informasi	100.000.000	SETDA	
SEKRETARIAT DPRD																
Manajemen Administrasi Perkantoran	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi DPRD	80%	85%	3.767.000.000	85%	4.910.000.000	85%	9.301.000.000	87%	5.841.000.000	90%	6.435.000.000	90%	6.435.000.000	SETWAN	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional Sekretariat DPRD	80%	80%	707.000.000	80%	778.000.000	80%	856.000.000	80%	941.000.000	80%	1.035.000.000	80%	1.035.000.000	SETWAN	
Pengkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD	80%	80%	638.000.000	80%	701.000.000	80%	772.000.000	80%	849.000.000	80%	934.000.000	80%	934.000.000	SETWAN	
Pengkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	Tingkat ketrampilan aparatur	80%	80%	336.000.000	80%	369.000.000	80%	406.000.000	80%	447.000.000	80%	491.000.000	80%	491.000.000	SETWAN	
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada website	60%	70%	0	80%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	SETWAN	
Pengkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat pencapaian penyusunan Laporan Keuangan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta evaluasi LAKIP	100%	100%	64.000.000	100%	70.000.000	100%	77.000.000	100%	85.000.000	100%	93.000.000	100%	93.000.000	SETWAN	
Manajemen Informasi dengan Media Massa	Tingkat pencapaian informasi pembangunan yang terpublikasi pada media massa	70%	70%	696.000.000	70%	717.000.000	70%	738.000.000	70%	761.000.000	70%	783.000.000	70%	783.000.000	SETWAN	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
gkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terlaksananya fungsi-fungsi DPRD Legislatif, Anggaran, dan Pengawasan DPRD Kab. Barito Utara secara optimal	75%	75%	6.874.000.000	85%	7.080.000.000	85%	7.293.000.000	85%	7.512.000.000	90%	7.737.000.000	95%	7.737.000.000	SETWAN	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur	80 % 1keg,70 % 1keg,70% 10kali	80% 1keg,70 % 1keg,70 % 10 kali, 70%, 2keg	1.764.920.000	80% 1keg,70 % 1keg,70 % 10 kali, 70%, 2keg	1.941.412.000	80% 1keg,70 % 1keg,70 % 10 kali, 70%, 2keg	2.135.553.200	80% 1keg,70 % 1keg,70 % 10 kali, 70%, 2keg	2.349.108.520	80% 1keg,70 % 1keg,70 % 10 kali, 70%, 2keg	2.584.019.372	90% 5keg, 80% 5keg,80% 50kali,80% 10keg	2.584.019.372	BKD	
Program peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur	85%	85% 1	1.681.700.200	85%	1.849.870.220	85%	2.034.857.242	85%	2.238.342.966	85%	2.462.177.263	90%	2.462.177.263	BKD	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	80 %	50%	996.400.000	65%	1.096.040.000	80%	1.205.644.000	80%	1.326.208.400	90%	1.458.829.240	100%	1.458.829.240	BKD	
Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100% 1 keg	0% 1 keg	0	100% 1 keg	55.000.000	100% 1 keg	60.500.000	100% 1 keg	66.550.000	100% 1 keg	73.205.000	100% 4 keg/5 thn	73.205.000	BKD	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100% 1 dok 100% 500 d ok	100% 1 dok/ 100% 500 d o	27.500.000	100% 1 dok/ 100% 500 d o	30.250.000	100% 1 dok/ 100% 2 dok/th	33.275.000	100% 1 dok/ 100% 500 d o	36.602.500	100% 1 dok/ 100% 1 dok/ th	40.262.750	100% 5 dok/5 100% 5 dok/5	40.262.750	BKD	
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET																
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset																
Program pelayanan Administrasi kantor	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi perkantoran.		80%	2.721.507.200	80%	2.993.657.920	80%	3.293.023.712	80%	3.622.326.083	80%	3.984.558.692	100%	16.615.073.607	DPPKA	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional, perlengkapan gedung kantor.		80%	773.992.985	80%	851.392.284	80%	936.531.512	80%	1.030.184.663	80%	1.133.203.129	100%	4.725.304.573	DPPKA	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		80%	45.000.000	80%	49.500.000	80%	54.450.000	80%	59.895.000	80%	65.884.500	100%	274.729.500	DPPKA	
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan		80%	300.000.000	80%	330.000.000	80%	363.000.000	80%	399.300.000	80%	439.230.000	100%	1.831.530.000	DPPKA	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersedianya dokumen laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan akhir tahun, RKA-SKPD/DPA-SKPD.		80%	70.073.500	80%	77.080.850	80%	84.788.935	80%	93.267.829	80%	102.594.611	100%	427.805.725	DPPKA	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan Aset Daerah.		80%	3.719.178.595	80%	4.091.096.455	80%	4.500.206.100	80%	4.950.226.710	80%	5.445.249.381	100%	22.705.957.240	DPPKA	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,15%	85,25%	820.835.000,-	86,35%	985.000.000,-	87,45%	1.182.000.000,-	88,55%	1.148.400.000,-	89,65%	1.432.000.000,-	87,45%	5.568.235.000,-	SATPOL	
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Aparatur	85,21%	86,43%	32.575.000,-	87,55%	35.900.000,-	88,67%	43.000.000,-	89,79%	51.600.000,-	90,91%	59.340.000,-	88,63%	222.415.000,-	SATPOL	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penyediaan Kelengkapan Pakaian Dinas	84,15%	85,25%	41.900.000,-	86,35%	50.000.000,-	87,45%	57.500.000,-	88,55%	69.000.000,-	89,65%	79.350.000,-	87,45%	297.750.000,-	SATPOL	
Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase Kegiatan dibidang kepegawaian	81,15%	82,25%	10.000.000,-	83,35%	12.000.000,-	84,45%	15.000.000,-	85,55%	17.000.000,-	86,65%	20.000.000,-	84,45%	74.000.000,-	SATPOL	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kegiatan sistem pelaporan dan Keuangan	86,35%	86,45%	20.000.000,-	87,55%	24.000.000,-	88,65%	28.000.000,-	89,75%	30.000.000,-	90,85%	33.000.000,-	88,65%	135.000.000,-	SATPOL	
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kegiatan peningkatan manajemen asetbarang daerah	85,25%	86,35%	10.000.000,-	87,45%	12.000.000,-	88,55%	15.000.000,-	87,65%	17.000.000,-	88,75%	20.000.000,-	87,75%	74.000.000,-	SATPOL	
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase kkegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	86,15%	87,25%	400.000.000,-	88,35%	450.000.000,-	89,45%	480.000.000	90,55%	500.000.000	91,65%	520.000.000,-	89,45%	2.350.000.000,-	SATPOL	
BADAN KESBANGPOL																
URUSAN WAJIB																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,15%	85,27%	800.199.585,-	86,39%	809.161.820,-	87,51%	818.224.432	88,63%	827.388.545	89,75%	836.655.296,	87,45%	4.091.629.678,-	Bakesbangpol	
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan sarana dan prasarana Aparatur	85,21%	86,33%	200.645.000,-	87,45%	202.892.224,-	88,57%	430.131.514	89,69%	434.948.986	90,81%	439.820.414,-	88,57%	1.708.438.138,-	Bakesbangpol	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkat an Disiplin Aparatur	Persentase Penyediaan Kelengkapan Pakaian Dinas	84,15%	85,27%	28.125.000,-	86,39%	28.440.000,-	87,51%	28.758.528,-	88,63%	29.080.623,-	89,75%	32.570.297,-	87,51%	146.974.448,-	Bakesbangpol
Program Peningkat an kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase Kegiatan dibidang kepegawaian	81,15%	82,27%	41.700.000,-	83,39%	42.167.000,-	84,51%	42.639.270,-	85,63%	43.116.829,-	86,75%	43.599.737,-	84,51%	213.222.836,-	Bakesbangpol
Program Peningkat an Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kegiatan sistem pelaporan dan Keuangan	86,35%	87,47%	17.500.000,-	88,59%	17.696.000,-	89,71%	17.894.195,-	90,83%	18.094.609,-	91,95%	18.297.268,-	89,71%	89.482.072,-	Bakesbangpol
Program Peningkat an Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kegiatan Kominda dan FKDM	82,15%	83,27%	320.000.000,-	84,39%	323.584.000,-	85,51%	327.208.140	86,63%	330.872.871	87,75%	334.578.647,-	85,51%	1.636.243.658,-	Bakesbangpol
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Persentase kegiatan sosialisasi Wasbang	85,25%	86,37%	176.503.500,-	87,49%	178.480.339,-	88,61%	180.479.318	89,73%	182.500.686	90,85%	184.544.693,-	88,61%	902.508.536,-	Bakesbangpol
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase kegiatan Penyuluhan PEKAT	86,15%	87,27%	150.000.000,-	88,39%	151.680.000,-	89,51%	153.378.816	90,63%	155.096.658	91,75%	156.833.740,-	89,51%	766.989.214,-	Bakesbangpol
Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase kegiatan Pembinaan Pendidikan politik dan Ormas	85,35%	86,47%	506.571.915,-	87,59%	512.245.520,-	88,71%	517.982.669	89,83%	523.849.050	90,95%	529.716.159,-	88,71%	2.590.365.313,-	Bakesbangpol

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

URUSAN WAJIB															
URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN															
Program Pengembangan Nilai Budaya	Terbina dan terseleksi paduan suara gita bahana nusantara dan Seni Budaya bagi generasi muda	75%	100 %	49.060.00.0	100 %	93.500.000.	100 %	102.850.000	100 %	113.135.000	100 %	124.448.000	100 %	482.993.000	Disbud parpora
Program Pengelolaan kekayaan Budaya	- Tersedianya wadah partisipasi dan ekspresi budaya masyarakat - Pelestarian Situs dan Objek Wisata - Tersedianya bahan dan kesenian	75%	85 %	1.500.000.000	85 %	2.288.000.000	85 %	2.516.800.000	85 %	2.768.480.000	85 %	3.045.328.000	100 %	10.633.608.000	Disbud parpora
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan	Tersedianya forum kerjasama	75%	-	-	100 %	27.500.000	100 %	30.250.000	100 %	33.275.000	100 %	36.602.000	100 %	127.627.000	Disbud parpora

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Kekayaan Budaya																
Program Pengembangan Kawasan wisata Budaya	Meningkat dan berkembangnya Kawasan wisata Budaya	70%	75%	100.000.000	75 %	150.000.000	80%	150.000.000	85%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	Disbud parpora	
URUSAN PILIHAN																
BIDANG PARIWISATA																
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Terselenggaranya promosi dan pemasaran produk-produk wisata keluar daerah	75%	100 %	320.830.000	100 %	2.002.000.000	100 %	2.202.200.000	100 %	2.422.420.000	100 %	2.644.622.000	100%	9.592.072.000	Disbud parpora	
	- Tersedianya data kunjungan wisatawan di kabupaten Barito Utara															
Program Pengembangan Kawasan Agrowisata	- Tertata dan berkembangnya Kawasan Agrowisata	80%	80%	638.000.000	80%	701.000.000	80%	772.000.000	80%	849.000.000	80%	934.000.000	80%	934.000.000	Disbud parpora	
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	- Tersedianya fasilitas – fasilitas umum yang layak sebagai penunjang kegiatan wisata daerah - Tersedianya data objek – objek wisata daerah - Tersusunnya rumusan hasil kesepakatan untuk mendorong kemajuan pembangunan kepariwisataan daerah	100 %	100 %	822.800.000	100 %	2.002.000.000	100 %	3.025.000.000	100 %	3.327.500.000	100 %	3.660.250.000	100 %	12.837.550.000	Disbud parpora	
Program Pengembangan Kemitraan	- Terkirimnya PNS dan pelaku usaha jasa pariwisata mengikuti bimbingan teknis, pelatihan seminar dan sosialisasi tentang kepariwisataan - Terpilihnya duta wisata daerah - Terbentuknya kelompok Sadar Wisata di beberapa lokasi objek wisata - Tersedianya mitra kerja usaha jasa pariwisata	85 %	85 %	144.000.000	85 %	291.500.000	85 %	320.650.000	85 %	352.715.000	85 %	387.986.000	100 %	1.496.314.000	Disbud parpora	
URUSAN WAJIB																
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA																
Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Terselenggaranya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan	90 %	-	-	90 %	484.000.000	90 %	532.400.000	90 %	585.640.000	90 %	644.204.000	100 %	2.246.244.000	Disbud parpora	
Program peningkatan peran sera kepemudaan	Meningkatnya pengetahuan dan rasa peduli pemuda terhadap lingkungan dan	85 %	85 %	703.080.000	85 %	2.469.500.000	85 %	2.716.450.000	85 %	2.988.095.000	85 %	2.920.879.000	100 %	11.798.004.000	Disbud parpora	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	masyarakat															
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pemuda dibidang kewirausahaan	85 %	-	-	85 %	88.000.000	85 %	96.800.000	85 %	106.480.000	85 %	117.128.000	100 %	408.408.000	Disbud parpora	
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Pemuda dan pelajar bebas narkoba	85 %	-	-	85 %	33.000.000	85 %	33.000.000	85 %	33.000.000	85 %	33.000.000	100 %	132.000.000	Disbud parpora	
Program pengembangan kebijakan dan manajemen dlah raga	Meningkatnya mutu dan satandarisasi tenaga keolahragaan	85 %	-	-	85 %	455.500.000	85 %	490.050.000	85 %	539.055.000	85 %	592.960.000	100 %	2.077.565.000	Disbud parpora	
Program pembinaan dan pemasyarakatan dlah raga	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga	85 %	85 %	305.000.000	90 %	3.806.000.000	90 %	4.186.600.000	90 %	4.605.260.000	90 %	5.065.786.000	100 %	17.968.646.000	Disbud parpora	
Program peningkatan sarana prasarana dahraga	Meningkatnya sarana prasarana olahrag	100 %	100 %	72.775.000	100 %	3.588.750.000	100 %	3.947.625.000	100 %	4.342.387.000	100 %	4.776.626.000	100 %	16.728.163.000	Disbud parpora	
Program Pembangunan kawasan dahraga	Meningkatnya infrastruktur dan terbangunnya kawasan dahraga	60 %	65%	620.000.000	65%	750.000.000	70 %	750.000.000	70 %	800.000.000	75%	800.000.000	75%	800.000.000	Disbud parpora	
RSUD																
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.	Jumlah tempat tidur kelas III di RS	38 Tempat tidur	50 TT	.200.000.00	70 TT	1.500.000.000	100 TT	2.025.000.000	120 TT	2.733.750.000	140 TT	3.690.563.000	140 TT	3.690.563.000	RSUD	
	Jumlah obat-obatan dan perbekalan kesehatan	114 jenis	114 jenis	4.392.345.506	114 jenis	5.490.431.883	114 jenis	7.412.083.041	114 jenis	10.006.312.106	140 TT	13.508.521.343	114 jenis	13.508.521.343	RSUD	
	Jenis peralatan kesehatan	Peralatan kesehatan dasar dan sedang	Peralatan kesehatan dasar dan sedang	2.200.000.000	Peralatan kesehatan dasar, sedang dan canggih	2.750.000.000	Peralatan kesehatan dasar, sedang dan canggih	3.712.500.000	Peralatan kesehatan dasar, sedang dan canggih	5.011.875.000	Peralatan kesehatan dasar, sedang dan canggih	6.766.031.000	Peralatan kesehatan dasar, sedang dan canggih	6.766.031.000	RSUD	
	Jumlah ruang-ruang perawatan dan sarana penunjang RS	9 ruang rawat inap, 1 ruang rawat jalan dan 7 sarana penunjang	9 ruang rawat inap, 1 ruang rawat jalan dan 7 sarana penunjang	1.200.000.000	9 ruang rawat inap, 1 ruang rawat jalan dan 7 sarana penunjang	1.500.000.000	12 ruang rawat inap, 1 ruang rawat jalan dan 8 sarana penunjang	2.025.000.000	12 ruang rawat inap, 1 ruang rawat jalan dan 8 sarana penunjang	2.733.750.000	12 ruang rawat inap, 1 ruang rawat jalan dan 8 sarana penunjang	3.690.563.000	12 ruang rawat inap, 1 ruang rawat jalan dan 8 sarana penunjang	3.690.563.000	RSUD	
	Redesign rumah sakit		1	500.000.000									1	500.000.000	RSUD	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS, SOP, Protap dan Dokumen pendukung lainnya	2 dokumen	2 dokmen	7.500.000	3 Dokumen	9.375.000	3 Dokumen	12.656.000	3 Dokumen	17.086.000	3 Dokumen	23.066.000	3 Dokumen	23.066.000	RSUD	
	Tim Satuan Pengendalian Internal (SPI)	belum ada	1 tim	7.500.000	1 tim	9.375.000	1 tim	12.656.000	1 tim	17.086.000	1 tim	23.066.000	1 tim	23.066.000	RSUD	
	Jumlah dokter umum dan dokter Spesialis di RS	12 Dokter Umum/Gigi 6 Dokter Spesialis	12 Dokter Umum/Gigi 6 dokter Spesialis	791.550.000	12 Dokter Umum/Gigi 6 Dokter Spesialis	989.437.500	12 Dokter Umum/Gigi 6 Dokter Spesialis	1.335.740.625	12 Dokter Umum/Gigi 6 Dokter Spesialis	1.803.249.844	12 Dokter Umum/Gigi 6 Dokter Spesialis	2.434.387.289	12 Dokter Umum/Gigi 6 Dokter Spesialis	2.434.387.289	RSUD	
	Jumlah tenaga Medis dan Non medis di RS yang memiliki sertifikasi keahlian (ATLS, BCLS dll)	10 Orang	10 Orang	420.000.000	15 Orang	525.000.000	15 Orang	656.250.000	18 Orang	820.313.000	18 Orang	1.025.391.000	18 Orang	1.025.391.000	RSUD	
	Peningkatan Akreditasi RS	Type C	Type C	250.000.000	Type C	312.500.000	Type B	390.625.000	Type B	488.281.000	Type A	610.352.000	Type A	610.352.000	RSUD	
	Jumlah Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit daerah	21 jenis pelayanan	21 jenis pelayanan	6.621.887.62	21 jenis pelayanan	8.277.359.53	21 jenis pelayanan	10.346.699.413	21 jenis pelayanan	12.933.374.266	21 jenis pelayanan	16.166.717.832	21 jenis pelayanan	16.166.717.83	RSUD	
KPPT																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		80%	80%	470.000.000	90%	521.500.000	90%	581.500.000	90%	592.500.000	90%	632.500.000	90%	2.798.000.000	KPPT	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	80%	80%	237.440.000	90%	710.000.000	90%	500.000.000	90%	600.000.000	90%	600.000.000	90%	2.647.440.000	KPPT	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya PDH aparat	80%	80%	7.000.000	90%	7.000.000	90%	8.000.000	90%	9.000.000	90%	9.000.000	90%	40.000.000	KPPT	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparat	80%	80%	40.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	240.000.000	KPPT	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	80%	80%	12.500.000	90%	12.500.000	90%	25.000.000	90%	25.000.000	90%	25.000.000	90%	100.000.000	KPPT	
Program Pengembangan Administrasi Pelayanan Perizinan	Meningkatnya koordinasi pelayanan dan pengawasan perizinan	80%	80%	125.870.000	90%	125.870.000	90%	160.000.000	90%	160.000.000	90%	160.000.000	90%	731.740.000	KPPT	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		80%	80%	12.500.000	90%	12.500.000	90%	25.000.000	90%	25.000.000	90%	25.000.000	90%	100.000.000	KPPT	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
Program Prasarana dan fasilitas Perhubungan.	Meningkatnya Frasarana dan Fasilitas Perhubungan.	90%	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	Dishubkom info	
Program Pembangunan sarana dan Pra sarana Perhubungan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan.	90%	100%	2.500.000.000	100%	3.250.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.750.000.000	100%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	Dishubkom info	
Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas.	Terwujudnya kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.	90%	90%	900.000.000	90%	950.000.000	90%	1.000.000.000	90%	1.250.000.000	90%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	Dishubkom info	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah sarana penyuluhan komunikasi, Informasi	90%	90%	50.000.000	90%	60.000.000	90%	70.000.000	90%	80.000.000	90%	90.000.000	100%	90.000.000	Dishubkom info	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Meningkatnya sarana pelayanan Angkutan	90%	90%	200.000.000	90%	225.000.000	90%	250.000.000	90%	300.000.000	90%	350.000.000	100%	350.000.000	Dishubkom info	
Program Peningkatan Kelaihan Pengoperasian Kendaraan bermotor.	Persentase sarana dan prasarana alat uji.	90%	90%	300.000.000	90%	350.000.000	90%	400.000.000	90%	450.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000	Dishubkom info	
Program pembangunan kawasan bandara	Meningkatnya infrastruktur yang mendukung operasional pada kawasan bandara	0%	90%	900.000.000	90%	950.000.000	90%	1.000.000.000	90%	250.000.000	90%	1.300.000.000	100%	1.300.000.000	Dishubkom info	
BADAN LINGKUNGAN HIDUP																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	747.431.025	12 Bulan	1.265.871.380	12 Bulan	1.480.062.691	12 Bulan	1.662.067.984	12 Bulan	1.854.814.783	60 Bulan	2.024.496.259	BLH	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun	198.682.500	1 Tahun	890.000.000	1 Tahun	430.000.000	1 Tahun	430.000.000	1 Tahun	290.891.048	5 Tahun	505.000.000	BLH	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	1 Keg/	1 Keg	42.000.000	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	30.000.000	1 Keg	55.000.000	5 Keg	55.000.000	BLH	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Keg	1 Keg	79.000.000	1 Keg	490.000.000	1 Keg	539.000.000	1 Keg	604.900.000	1 Keg	665.390.000	5 Keg	725.000.000	BLH	
Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Keg	1 Keg/	17.500.000	1 Keg	20.000.000	1 Keg	22.000.000	1 Keg	23.000.000	1 Keg	25.500.000	5 Keg	28.050.000	BLH	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	1 tahun	1 Tahun	880.000.000	1 Tahun	505.000.000	1 Tahun	607.500.000	1 Tahun	670.000.000	1 Tahun	710.000.000	5 Tahun	513.000.000	BLH
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1 Keg	1 Keg	1.768.160.000	1 Keg	1.225.000.000	1 Keg	1.442.500.000	1 Keg	1.550.000.000	1 Keg	1.730.000.000	5 Keg	1.835.000.000	BLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Terwujudnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	1 Keg	1 Keg	1.242.558.000	1 Keg	805.000.000	1 Keg	1.220.000.000	1 Keg	1.230.000.000	1 Keg	1.285.000.000	5 Keg	1.290.000.000	BLH
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1 Keg/Thn	1 Keg	304.097.000	1 Keg	500.000.000	1 Keg	744.800.000	1 Keg	770.000.000	1 Keg	850.000.000	5 Keg	930.000.000	BLH
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terkendalinya polusi	1 Tahun	1 Tahun	672.704.000	1 Tahun	744.974.400	1 Tahun	819.471.840	1 Tahun	863.100.000	1 Tahun	905.000.000	5 Tahun	910.000.000	BLH
Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Terkendalinya kebakaran hutan	1 Keg/Thn	1 Keg	75.000.000	1 Keg	82.000.000	1 Keg	117.000.000	1 Keg	120.000.000	1 Keg	154.500.000	5 Keg	160.000.000	BLH
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terwujudnya pengelolaan ruang terbuka hijau	1 Keg/Thn	1 Keg	50.000.000	1 Keg	60.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	100.000.000	5 Keg	100.000.000	BLH
Program Penaatan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan	Terwujudnya ketaatan terhadap lingkungan serta peran serta komunitas lingkungan dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Keg/Thn	1 Keg	50.000.000	1 Keg	100.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	1 Keg	150.000.000	5 Keg	160.000.000	BLH

DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Pertanian, Perikanan dan Peternakan															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya fasilitas pelayanan administrasi perkantoran	475 lbr, 4 rek, 16 jenis ATK, 12 bln, 34200 lbr, 16 bh, 56 Orang	500 lbr, 4 rek, 18 Jenis ATK, 12bln, 38399 lbr, 14 bh, 68 org	1.464.451.000	525 lbr, 4 rek, 18 Jenis, 214 orang, 18 Jenis ATK, 12 bln, 42000 lbr, 8 jenis/ set, 20 bh, 70 orang	1.671.396.100	550 lbr, 4 rek, 18 Jenis, 224 orang, 18 Jenis ATK, 12 bln, 46200 lbr., 8 jenis/ set, 30 buah, 73 orang	1.838.535.710	575 lbr, 4 rek, 18 Jenis, 234 orang, 18 ATK, 12bulan, 50400 lbr, 8 jenis/ set, 40 buah, 76 orang	2.022.389.281	600 lbr, 4 rek, 18 Jenis, 244 orang, 18 Jenis ATK, 12 bln, 54600 lbr, 8 jenis/ set, 50 bh, 80 orang	2.224.628.209	2750 lbr, 4 rek, 18 Jenis, 244 orang, 18 Jenis ATK, 12 bln, 265799 lbr, 8 jenis/ set, 170 bh, 367 orang	9.221.400.300	DISTAN KANNAK
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bangunan gedung kantor Jumlah peralatan gedung Jumlah Kendaraan dinas /operasional	1 unit, 103 buah 5 buah 12 bulan 2 unit	1 unit 103 buah 08 buah 12 bulan 5 unit 12 bulan 2 unit	835.000.000	1 unit, 113 buah, 5 unit, 1 buah, 12 bulan 5 unit, 12 bulan 1 unit	1.066.000.000	1 unit 125 buah 5 unit 20 buah 12 bulan 5 unit 12 bulan 3 unit 6	1.222.100.000	1 unit 136 buah 6 unit 25 buah 1 bulan 6 unit 12 bulan 3 unit 6 unit	1.344.490.000	1 unit 146 buah 7 unit 30 buah 12 bulan 6 unit 12 bulan 3 unit 6 unit	1.479.059.000	5 unit, 623 buah 23 unit, 105 buah, 12 bulan 6 unit 12 bulan 15 unit, 6 unit	5.946.649.000	DISTAN KANNAK

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin aparatur, Jumlah pakaian dinas pegawai		3 unit 175 stel	70.000.00	3214 stel	122.000.00	-224 stel	84.700.00	234 stel	93.170.00	244 stel	102.487.00	3 unit 244 stel	472.357.00	DISTAN KANNAK
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SDM Aparatur melalui Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 kali	70.000.00	13 kali	132.000.00	14 kali	145.200.00	14 kali	159.720.00	15 kali	175.692.00	15 kali	682.612.00	DISTAN KANNAK
Program Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 dokumen	11 dok	38.000.00	11 dok	30.800.00	11 dok	33.880.00	11 dok	37.268.00	11 dok	40.994.80	55 dok	180.942.80	DISTAN KANNAK
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Peningkatan Pengetahuan dan keterampilan petani/ pelaku agribisnis	2 kegiatan	2 kegiatan	152.100.00	-	11.282.115.25	-	12.410.326.78	-	13.651.359.45	-	15.016.495.40	-	Pergantian Perubahan Progra	DISTAN KANNAK
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan/ Perkebunan	- Produktivitas padi, penelitian dan pengembangan teknologi, data statistik, penyusunan program, sarana dan prasarana pertanian - Meningkatkan Fasilitasi sarana produksi pertanian dan Perluasan areal tanam (cetak sawah dan Optimasi lahan) – Cetak Sawah-Optimasi lahan	490 Ha, 250 Ha, 240 Ha, 40 unit, 27 Klp, 6 kegiatan, 584 ha, 810 ha, 419 ha	1.280 ton, 300 Ha, 25 unit, 6 kegiatan, 399 ha, 375 ha, 5000 batang, 796 ha	11.255.636.435	1.393 ton, 150 Ha, 350 Ha, 20 unit, 25 org, 6 kegiatan, 350 ha, 380 ha, 7500 batang, 806 ha	367.950.000	1.395 ton, 100 Ha, 400 Ha, 20 unit, 2 klp, 25 org, 6 kegiatan, 365 ha, 385 ha, 8000 batang, 811 ha	404.745.000	1.392 ton, 150 Ha, 450 Ha, 20 unit, 2 klp, 25 orang, 7 kegiatan, 370 ha, 390 ha, 8500 batang, 814 ha	635.552.500	1.380 ton, 150 Ha, 500 Ha, 20 unit, 2 klp, 25 orang, 7 kegiatan, 400 ha, 395 ha, 9000 batang, 818 ha	928.971.450	5.445 ton, 800 Ha, 2240 Ha, 146 unit, 33 klp, 100 orang, 28 kegiatan, 400 ha, 1925 ha, 38000 batang, 4045 ha	59.918.811.160	DISTAN KANNAK
Program pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan	- Meningkatnya pembangunan infrastruktur kawasan pertanian tanaman pangan	90%	90%	300.000.000	90%	350.000.000	90%	400.000.000	90%	450.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000	DISTAN KANNAK
Program Pengembangan kawasan Tanaman Hortikultura	- Meningkatnya pembangunan dan tertatanya Pengembangan kawasan Tanaman Hortikultura	70%	75%	100.000.000	75%	150.000.000	80%	150.000.000	85%	200.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000	DISTAN KANNAK
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Meningkatnya SDM Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan - Berkenbangnya Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan SDM pelaku agribisnis yang trampil dan handal serta Terfasilitasinya P2MKSS	35 orang	35 orang, 1 kali (PENAS)	534.500.000	35 orang, 1 kali (PEDA) 3 Gapoktan, 3 desa, 30 orang, 1 kegiatan	207.500.000	35 orang, 1 kali (PEDA) 3 Gapoktan, 3 desa, 30 orang, 1 kegiatan	228.250.000	35 orang, 1 kali (PEDA) 3 Gapoktan, 3 desa, 30 orang, 1 kegiatan	251.075.000	35 orang, 1 kali (PEDA) 3 Gapoktan, 3 desa, 30 orang, 1 kegiatan	276.182.500	205 orang, 4 kali (PEDA/ PENAS) 12 Gapoktan, 12 desa, 120 orang, 4 kegiatan	4.158.714.660	DISTAN KANNAK
Program Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya perkembangan informasi IPTEK dan daya saing produk olahan	2 Kegiatan	3 Kegiatan, 150 orang	45.600.000	5 Kegiatan, 150 orang	50.160.000	5 Kegiatan, 150 orang	55.176.000	5 Kegiatan, 150 orang	60.693.600	5 Kegiatan, 150 orang	66.762.960	23 Kegiatan, 750 orang	1.860.667.254	DISTAN KANNAK
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	- Meningkatnya Jumlah produksi perikanan budidaya dan meningkat Jumlah BBI dan UPR yang	3200 ton, 6 unit, 6 unit, 50 orang	3500 ton, 1 Unit, 5 unit, 5 unit, 50 orang	4.609.082.566	3800 ton, 1 Unit, 5 unit, 5 unit, 50 orang	4.755.262.823	4000 ton, 1 Unit, 5 unit, 5 unit, 50 orang	5.230.789.105	4300 ton, 1 Unit, 6 unit, 5 unit, 50 orang	5.753.868.015	4500 ton, 1 Unit, 6 unit, 5 unit, 50 orang	6.329.254.817	20100 ton, 5 Unit, 33 unit, 33 unit, 300 orang	27.121.463.544	DISTAN KANNAK

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	bersertifikat serta Jumlah Sarana dan prasarana perikanan yang memadai - Terciptanya Pengawasan masyarakat untuk sumberdaya perikanan				orang											
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	SDM nelayan (POKYAN) Yang terlatih	25 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	305.000.000	50 orang	335.500.000	50 orang	369.050.000	50 orang	405.955.000	250 orang	305.255.000	DISTAN KANNAK	
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Peningkatan daya saing produk perikanan melalui Promosi produk perikanan unggulan daerah	5 kali	6 kali kegiatan	100.000.000	6 kali kegiatan	275.000.000	6 kali kegiatan	302.500.000	6 kali kegiatan	332.750.000	6 kali kegiatan	366.025.000	30 kali kegiatan	1.376.275.000	DISTAN KANNAK	
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.	- Peningkatan SDM Penyuluh Perikanan dan Tersedianya data perikanan daerah - Terwujudnya Peningkatan Populasi Temak sapi, Kambing dan unggas	3 buku	1 kali kegiatan, 3 buku	104.427.644	1 kali kegiatan, 3 buku	114.870.408	1 kali kegiatan, 3 buku	126.357.449	1 kali kegiatan, 3 buku	138.993.194	1 kali kegiatan, 3 buku	152.892.514	5 kali kegiatan, 15 buku	1.148.051.209	DISTAN KANNAK	
Program Pembangunan kawasan budaya perikanan	- Meningkatkan dan tertatanya sarana dan prasarana kawasan perikanan darat	90%	90 %	300.000.000	90%	350.000.000	90%	400.000.000	90%	450.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000	DISTAN KANNAK	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan Populasi temak daerah dan Menumbuhkan Peran UPTD Balai Penangkaran Temak serta Pendapatan anggota kelompok dan skala usaha kepemilikan temak		340 ekor, 210 ekor, 1 Kelompok/Tahun, 60 ekor, 5 unit	2.405.230.000	400 ekor, 420 ekor, 3 Kel, 260 ekor, 6 unit, 44 buku 15 org t	2.805.753.000	420 ekor, 840 ekor, 2 Kel, 380 ekor, 4 unit, 44 Buku, 15 org.	3.086.328.300	440 ekor, 900 ekor, 2 kel, 600 ekor, 3 unit, 44 buku 15 orang	3.204.628.130	400 ekor, 900 ekor, 2 Kel, 700 ekor, 3 unit, 44 Buku, 15 org	3.295.227.243	2.000, ekor, 3.000 ekor, 10 Kel, 2.000 ekor, 20 unit,, 176 buku, 60 orang	14.565.116.673	DISTAN KANNAK	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.	- Peningkatan SDM peternakan Tepat Guna di tingkat petani dan Tersedianya Sarana dan Prasarana teknologi Peternakan tepat Guna - Peningkatan Pengembangan Kawasan Pembibitan Sapi dan Kambing. Terjaminnya pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	2 kelompok/ tahun	2 kelompok/ tahun	270.450.000	5 klpk 2 unit 2 unit 387 Ton daging/ 7 klpk	504.495.000	4 klpk 5 unit 3 unit 387 Ton daging/ 8 Klpk	554.944.500	5 klpk 5 unit 3 unit 388 Ton daging/ 7 klpk	610.438.950	4 klpk, 4 unit 2 unit 388 Ton daging/ 8 Klpk	671.482.845	20 klpk, 16 unit, 10 unit 1.550Ton daging 30 Klpk	2.611.811.295	DISTAN KANNAK	
Program Pengembangan Kawasan Peternakan	- Meningkatnya dan tertatanya kawasan peternakan	90%	90 %	300.000.000	90%	350.000.000	90%	400.000.000	90%	500.000.000	90%	500.000.000	100%	500.000.000	DISTAN KANNAK	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab	
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Program Pengamanan Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan	- Pembinaan dan pengawalan poktan terhadap proses pengendalian hama penyakit Pertanian dan hortikultura dan poktan terhadap proses pengendalian penyakit ikan - Terjaminnya sistem pengendalian hama penyakit produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan	42 Kegiatan	50 Kegiatan	843.280.44	50 Kegiatan	1.151.000.000	50 Kegiatan	1.266.100.000	50 Kegiatan	1.392.710.000	50 Kegiatan	1.531.981.000	450 Kegiatan	6.185.071.440	138.107.695.709	DISTAN KANNAK
DINAS KESEHATAN																
Program Penunangan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Cakupan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat keluarga miskin dan masyarakat miskin - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	15.000 Jiwa 9 Kec	5.000 Jiwa 9 Kec	1.663.680.000	15.000 Jiwa 9 Kec	1.830.048.000	20.000 Jiwa 9 Kec	2.012.791.800	25.000 Jiwa 9 Kec	2.213.548.980	28.000 Jiwa 9 Kec	2.434.120.878	28.000 Jiwa 9 Kec	10.154.189.658		Dinas Kesehatan
Program Peningkatan PSM di Bidang Kesehatan	- Cakupan sarana air bersih dan WC - Cakupan penyuluhan kesehatan gigi - Cakupan pembuatan dan pembinaan TOGA sekolah - Cakupan penyuluhan dan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekolah - Cakupan pelayanan kesehatan balita yang ditimbang 8 kali di posyandu	125 sekolah		300.200.000	125 sekolah	330.220.000	200 sekolah	363.242.000	250 sekolah	399.566.200	294 sekolah	439.522.820	294 sekolah	1.832.751.020		Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	- Cakupan jumlah dan jenis obat - Cakupan Distribusi obat secara merata sesuai kebutuhan ke Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes - Cakupan Perencanaan Kebutuhan Obat untuk Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes	230 item 16 Pusk., 84 Pustu	200 item	1.773.048.500	230 item 16 Pusk., 84 Pustu	1.950.353.350	250 item 16 Pusk., 84 Pustu	2.145.388.685	260 item 16 Pusk., 84 Pustu	2.359.927.554	282 item 16 Pusk., 84 Pustu	2.595.920.309	282 item 16 Pusk., 84 Pustu	10.824.638.398		Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	- Cakupan Jumlah Tanaman yang Khasiat Obat - Cakupan Usaha Obat Tradisional yang dibina	30 jenis tanaman	35 jenis	21.000.000	30 jenis tanaman	42.020.000	40 jenis tanaman	57.222.000	45 jenis tanaman	64.044.200	50 jenis tanaman	70.558.620	50 jenis tanaman	254.844.820		Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan	- Cakupan desa/kel. Mengalami KLB yang	20 org 5000 rnh	15 KLB	639.650.000	20 org 5000 rnh	703.615.000	20 org 5500 rnh	773.976.500	20 org 6000 rnh	851.374.150	20 org 6000 rnh	936.511.565	20 org 6000 rnh	3.905.127.215		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab				
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD						
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Penyakit Menular	dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam - Cakupan desa/kelurahan Universal	5 kl		56.100.000	5 kl		5 kl		67.881.000	5 kl		74.669.100	5 kl		82.136.010	5 kl		280.786.110	
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	- Cakupan KK memiliki jamban keluarga	5000 Rm	5000 Rm	558.662.500	5000 Rm	614.528.750	5000 Rm	675.981.625	5000 Rm	743.579.788	5000 Rm	817.937.767	5000 Rm	3.410.690.429					Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) yang memenuhi syarat hygiene piagam Bintang 1 Keamanan Pangan	16 Pusk	16 Pusk	31.200.000	16 Pusk	34.320.000	16 Pusk	37.752.000	16 Pusk	41.527.200	16 Pusk	45.679.920	16 Pusk	190.479.120					Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Cakupan pengembangan media promosi kes.ttg sadar hidup sehat - Cakupan penyuluhan PHBS	2.100 Jiwa, 34 kali, 20 org, 3520 RT	2.000 Jiwa	291.400.000	2.100 Jiwa, 34 kali, 20 org, 3520 RT	320.540.000	2.100 Jiwa, 34 kali, 20 org, 3520 RT	352.594.000	2.100 Jiwa, 34 kali, 20 org, 3520 RT	387.853.400	2.100 Jiwa, 34 kali, 20 org, 3520 RT	426.638.740	2.100 Jiwa, 34 kali, 20 org, 3520 RT	1.779.026.140					Dinas Kesehatan
Program Pengembangan SDM, Regulasi dan Kebutuhan Nakes	Cakupan model operasional desa siaga meningkat	60 desa	60 desa	426.016.500	60 desa	468.618.150	70 desa	515.479.965	80 desa	567.027.962	90 desa	623.730.758	90 desa	2.600.873.335					Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Tersedianya data kematian ibu dan analisis faktor penyebabnya Terselenggaranya Audit Materna Perinatal	2 kali	2 kali	205.000.000	2 kali	225.500.000	2 kali	248.050.000	2 kali	272.855.000	3 kali	300.140.500	3 kali	1.251.545.500					Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Tersedianya data Status Gizi dan Keluarga sadar Gizi tingkat kecamatan dan Kabupaten - Regulasi standar pelayanan kesehatan yang terjangkau - Pengujian/Pencapaian SPM masing-masing Puskesmas	16 Pusk	16 Pusk	1.683.900.000	16 Pusk	1.852.290.000	16 Pusk	2.037.519.000	16 Pusk	2.241.270.900	16 Pusk	2.465.397.990	16 Pusk	10.280.377.890					Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	- Cakupan pemberian Vitamin A 2 kali setahun - Cakupan pemberian makanan tambahan balita Gizi Kurang - Cakupan penderita gizi buruk yang dapat perawatan	90%	90%	183.662.500	90%	202.028.750	90%	222.231.625	90%	244.454.788	90%	268.900.267	90%	1.121.277.929					Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	- Tersedianya alur pelayanan (SOP) - Cakupan pelayanan gawat darurat di Puskesmas	125 sekolah	60 desa	100.575.000	125 sekolah	110.632.500	200 sekolah	121.695.750	250 sekolah	133.865.325	294 sekolah	147.251.858	294 sekolah	614.020.433					Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	- Jumlah penderita katarak yang dioperasi - Cakupan pelayanan sunatan - Cakupan pelayanan kesehatan gratis	2 Desa	2 Desa	151.300.000	2 Desa	166.430.000	3 Desa	183.073.000	3 Desa	201.380.300	3 Desa	221.518.330	3 Desa	923.701.630					Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	- Peningkatan pengetahuan petugas lansia - Terlaksananya cakupan Pelayanan Lansia	80%	80%	66.000.000	80%	72.600.000	80%	79.860.000	80%	87.846.000	80%	96.630.600	80%	402.936.600	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya prosentase rata-rata surat yang disampaikan	12 bulan	12 bulan	2.398.389.839	12 bulan	2.638.228.823	12 bulan	2.902.051.705	12 bulan	3.192.256.876	12 bulan	3.511.482.564	12 bulan	14.642.409.806	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pembangunan gedung kantor	1 Paket	1 Paket	2.270.356.064	1 Paket	2.512.391.670	1 Paket	6.748.630.837	1 Paket	3.421.993.921	1 Paket	3.364.043.313	1 Paket	18.317.415.805	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas dan atributnya	690	690	285.845.000	690	314.429.500	750	345.872.450	810	380.459.695	870	418.505.665	870	1.745.112.310	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan	2 kl/thn	2 kl/thn	186.050.000	2 kl/thn	204.655.000	4 kl/thn	225.120.500	4 kl/thn	247.632.550	6 kl/thn	247.632.550	16 kl/thn	1.111.090.600	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan yang tersusun	1 tahun	1 tahun	38.250.000	1 tahun	42.075.000	1 tahun	46.282.500	1 tahun	50.910.750	1 tahun	56.001.825	1 tahun	233.520.075	Dinas Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	- Jumlah pembangunan Pustu - Jumlah Puskesmas yang dibangun - Jumlah pengadaan puskesmas keliling perairan - Terpenuhi mobil operasional Dinas Kesehatan	2 Pusk/thn 17 Pustu 3 Pusk/thn 4 Rumdin	2 Pusk/thn 17 Pustu 3 Pusk/thn 4 Rumdin	4.321.058.312 17 Pustu	2 Pusk/thn 14 pustu 4 Rumdin	8.148.164.143	4 Pusk/thn 21 Pustu 4 Pusk 19 pustu 4 Rumdin	8.065.780.557	4 Pusk/thn 22 Pustu 4 Pusk 22 pustu 4 Rumdin	11.682.638.613	4 Pusk/thn 23 Pustu 2 Pusk 23 pustu 4 Rumdin	7.716.930.474	16 Pusk/5 thn 84 Pustu 16 Pusk 84 pustu 4 Rumdin	39.934.572.100	Dinas Kesehatan
Program Kalimantan Tengah Barigas	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 pkt	1 pkt	2.750.000.000	1 pkt	3.025.000.000	1 pkt	3.327.500.000	1 pkt	3.660.250.000	1 pkt	4.026.275.000	5 pkt/5 thn	16.789.025.000	Dinas Kesehatan

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Peningkatan kesehatan lansia	Arah prioritas program adalah pemberdayaan Lansia
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Arah prioritas program adalah penataan tata batas, pemasangan pilar utama Kabupaten, dan pilar batas kecamatan dan desa
Program Penataan Tata Batas Kabupaten, Kecamatan dan Desa	Arah prioritas program adalah fasilitasi penyiapan data proses pemekaran daerah, percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran, percepatan penyelesaian tapal batas antar daerah, pemantapan SOTK pemerintah daerah baru, pembakuan nama rapabumi kabupaten, penataan administrasi kecamatan pemekaran dan persiapan pemekaran desa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Olah Raga	Arah prioritas program adalah peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana olah raga
Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Arah prioritas program adalah fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam menyediakan layanan publik, perkuatan kerjasama bidang ekonomi, bidang hukum, penyediaan sarana dan prasarana publik dan fasilitasi hubungan kerjasama antar pemerintah daerah
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Arah prioritas program adalah penyusunan sistem informasi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, sosialisasi/Bintek regulasi pengelolaan keuangan daerah, peningkatan manajemen aset/barang daerah dan appraisal aset/barang daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Arah prioritas program adalah penataan kelembagaan, fasilitasi penyusunan SOP dan standar pelayanan minimal, penataan tata naskah dinas dan standar kompetensi, penyusunan analisa jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, penetapan kinerja, IPM, Indikator kinerja utama dan uraian tugas serta tata
Program penataan peraturan perundang-undangan	Arah prioritas program adalah koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, penyusunan renca rancangan peraturan perundang-undangan, legislasi rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, peblikasi peraturan perundang-undangan, kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan daerah, jatingan dokumentasi dan informasi hukum dan penyelesaian
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Arah prioritas program adalah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, sumberdaya komunikasi dan informasi, pengkajian dan pengembangan sistem informasi, perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi dan pengelolaan komunikasi radio siaran daerah
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan	Arah prioritas program adalah pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Arah prioritas program adalah penyebarluasan informasi pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah dan yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Program Pelayanan Informasi Publik	Arah prioritas program adalah sosialisasi kebijakan melalui media luar ruangan dan pelayanan informasi melalui penerbitan media tercetak
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Arah prioritas program adalah Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan penyuluhan hukum pertanahan
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	Arah prioritas program adalah penyusunan dan sosialisasi sistem pendaftaran tanah
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Arah prioritas program adalah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program Pengembangan sistem informasi pertanahan	Arah prioritas program adalah Menyusun sistem informasi pertanahan yang handal
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pelaksanaan program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian diarahkan pada prioritas fasilitasi kenaikan pangkat dan mutasi kepegawaian
Program Pengembangan	Pelaksanaan program pengembangan manajemen kepegawaian diarahkan pada prioritas penilaian kinerja pegawai, identifikasi sumber daya pegawai sesuai

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Manajemen Kepegawaian	kebutuhan lembaga
Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional	Pelaksanaan program pengembangan karier pejabat struktural dan fungsional diarahkan pada prioritas penilaian angka kredit, fasilitasi kegiatan baperjakat dan penataan, pengelolaan data simpeg dan file pegawai
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas SDM diarahkan pada prioritas penyelenggaraan Diklat, pengiriman tugas belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
DPPKA	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga diarahkan pada prioritas tersusunnya Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Kabupaten Barito Utara secara terukur disesuaikan dengan harga pasar.
Kegiatan Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD diarahkan pada prioritas tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Barito Utara sebagai dasar Hukum tentang APBD
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD diarahkan pada prioritas tersusunnya Peraturan Bupati Kepala Daerah sebagai dasar pelaksanaan dari PERDA Penjabaran APBD Kabupaten Barito Utara
Kegiatan Penyusunan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan PERDA tentang Perubahan APBD diarahkan pada prioritas tersusunnya Peraturan Daerah sebagai dasar Hukum pelaksanaan dalam Perubahan APBD.
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD diarahkan pada prioritas Peraturan Bupati Kepala Daerah berdasarkan PERDA Penjabaran Perubahan APBD
Kegiatan Penyusunan Rancangan PERDA tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan PERDA tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD diarahkan pada prioritas tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD
Kegiatan Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD diarahkan pada prioritas tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Perda yang sudah ditetapkan.
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan pada prioritas terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah diarahkan pada prioritas terlaksananya peningkatan Manajemen aset/barang daerah disetiap SKPD
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah diarahkan pada prioritas memaksimalkan dan memperluas sumber-sumber pendapatan daerah dari berbagai sektor yang sah.
Kegiatan Inventarisasi Aset/barang daerah di 9	Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Aset/barang daerah di 9 Kecamatan diarahkan pada prioritas terlaksananya inventarisasi secara proaktif terhadap aset dan barang daerah di 9 Kecamatan sehingga data dan dokumen aset/barang dapat tersaji dengan baik dan benar.

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Kegiatan Penyukuhun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Kegiatan Penyukuhun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PBB diarahkan pada prioritas terlaksananya Sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB sehingga obyek pajak/retribusi dapat memahami dan sadar akan kewajibannya.
Kegiatan Insentip penyampaian dan penagihan SPPT PBB untuk Camat, Kades dan RT	Pelaksanaan kegiatan Insentip penyampaian dan penagihan SPPT PBB untuk Camat, Kades dan RT, diarahkan pada prioritas memacu semangat para aparat dan petugas untuk meningkatkan penerimaan dari sektor PBB.
Kegiatan Pekan Panutan Pembayaran PBB	Pelaksanaan kegiatan Pekan Panutan Pembayaran PBB diarahkan pada prioritas gerakan masal dari aparat dan pemuka masyarakat sebagai contoh untuk meningkatkan kesadaran melaksakan kewajiban membayar PBB.
Kegiatan Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah serta Pemutahiran data WP/WR	Pelaksanaan kegiatan Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Daerah serta Pemutahiran data WP/WR daerah diarahkan pada prioritas pendataan secara aktif dan pemutahiran data yang lebih selektif dan terpadu
Kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah diarahkan pada prioritas tercapainya peningkatan dan pendapatan daerah serta meminimalisasi tunggakan pajak dan retribusi daerah.
Kegiatan Penyampaian SPPT PBB	Pelaksanaan kegiatan Penyampaian SPPT PBB diarahkan pada prioritas terlaksananya penyampaian SPPT PBB secara cepat dan tepat pada obyeknya, sehingga penerimaan PBB dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.
Kegiatan Pengecekan, Pemilihan, Pengisian SPPT PBB per Kecamatan dan Desa	Pelaksanaan kegiatan Pengecekan, Pemilihan, Pengisian SPPT PBB per Kecamatan dan Desa diarahkan pada prioritas tersedianya data SPPT PBB yang akurat
Kegiatan Pengamanan Aset Daerah	Pelaksanaan kegiatan Pengamanan Aset Daerah diarahkan pada prioritas pengamanan aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara
Kegiatan Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah	Pelaksanaan kegiatan Implementasi SIMDA Barang Milik Daerah diarahkan pada prioritas aplikasi pengelolaan barang milik daerah tertata dengan baik
Kegiatan Rapat Intensifikasi data PAD dalam Daerah	Pelaksanaan kegiatan Rapat Intensifikasi data PAD dalam Daerah diarahkan pada prioritas untuk meningkatkan sumber-sumber PAD di Kabupaten Barito Utara
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diarahkan pada prioritas terlaksananya penyusunan laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara tepat waktu yang ditetapkan.
Kegiatan Penyusunan Potensi Pajak daerah dan Retribusi	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Potensi Pajak daerah dan Retribusi Daerah diarahkan pada prioritas data potensi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak/retribusi daerah.
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD diarahkan pada prioritas peningkatan SDM penyusunan laporan keuangan semua SKPD
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diarahkan pada prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana diarahkan pada prioritas Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana diarahkan pada prioritas Peningkatan Kualitas disiplin aparat dalam berpakaian
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana diarahkan pada prioritas Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam meningkatkan pelayanan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana diarahkan pada prioritas Peningkatan Kualitas laporan kinerja dan keuangan yang dihasilkan.

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana diarahkan pada prioritas Jumlah pembinaan, koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terlaksananya pembinaan dalam pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya pembinaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana diarahkan pada prioritas Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana diarahkan pada prioritas Terlaksananya Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, supervisi, monev pelaksanaan peningkatan peran perempuan di pedesaan
Program Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana diarahkan pada prioritas Terlaksananya pengembangan dan peningkatan kualitas pemerintah desa dan kelurahan
Program Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular	Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana diarahkan pada prioritas Terlaksananya rapat koordinasi penguatan kelembagaan HIV/ AIDS
DINAS PEKERJAAN UMUM	
Program Pelayanan Masyarakat	Program Pelayanan Masyarakat diarahkan pada prioritas fasilitasi pelayanan mengenai standar harga bahan, hasil laboratorium dan penelitian terhadap kontrak
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Program Pengaturan Jasa Konstruksi diarahkan pada prioritas sosialisasi/pengenalan pada produk Undang-undang konstruksi serta peraturan lainnya yang terkait dan juga pelayanan dalam penyelenggaraan IUJK
Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi diarahkan pada prioritas sumber daya penyedia jasa konstruksi
Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan diarahkan pada prioritas tersedianya sarana infrastruktur jalan dan jembatan dalam usaha membuka keterisolan wilayah dan peningkatan kondisi jalan yang sudah ada
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan diarahkan pada prioritas tersedianya sarana infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan terpelihara.
Program Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	Program Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah diarahkan pada prioritas penanganan peningkatan jalan-jalan strategis
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya diarahkan pada prioritas pelayanan pembangunan, pemeliharaan serta pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya dan pemberdayaan pengguna (pemanfaat) dari jaringan irigasi yang ada

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah diarahkan pada prioritas terbangunnya dan terkelolanya dengan baik sarana air bersih, air minum dan saluran limbah
Program Pengendalian Banjir	Program Pengendalian Banjir diarahkan pada prioritas terpeliharanya sungai, bantaran serta tanggulnya agar dapat berfungsi sesuai kegunaannya sebagai salah satu aspek dalam pengendalian debit air
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan pada prioritas penataan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mewujudkan keindahan kota khususnya daerah pinggiran sungai Barito dan drainase perkotaan dalam kota Muara Teweh
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan diarahkan pada prioritas pelayanan pendampingan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan sarana penunjang lainnya
Program penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan	Program penyediaan dan pengelolaan air bersih perdesaan diarahkan pada prioritas tersedianya prasarana dan sarana air bersih untuk masyarakat perdesaan
Program Peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman	Program Peningkatan/rehabilitasi sarana dan prasarana permukiman diarahkan pada prioritas tersedianya sarana infrastruktur jalan dan jembatan dalam lingkungan permukiman
Program Pembangunan bangunan gedung, fasilitas umum dan sosial	Program Pembangunan bangunan gedung, fasilitas umum dan sosial diarahkan pada prioritas tersedianya sarana berupa bangunan yang peruntukannya untuk fasilitas umum ataupun yang sifatnya sosial
Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan diarahkan pada prioritas melakukan pengelolaan persampahan dalam kota Muara Teweh dan pelayanan pengangkutan dan pengumpulan sampah dalam kota Muara Teweh, kuantitas petugas kebersihan kota
Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Workshop dan Alat Berat	Program Pemeliharaan dan Pengelolaan Workshop dan Alat Berat diarahkan pada prioritas pelayanan pemeliharaan peralatan penunjang pekerjaan berupa alat angkutan darat dan alat berat serta, tersedianya tempat penyimpanan peralatan konstruksi, suku cadang, serta pengelolaan penggunaan alat berat dan alat angkutan untuk memperoleh PAD
Perumahan	
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan diarahkan pada prioritas tersedianya sarana air limbah dan sanitasi dasar di masyarakat
Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) diarahkan pada prioritas pelayanan pendampingan kegiatan pembangunan sanitasi perkotaan
Program Pengembangan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Kawasan Pemukiman diarahkan pada prioritas terciptanya kawasan pemukiman yang memenuhi standar layak huni
Program Penataan Kawasan Kumuh	Program Penataan Kawasan Kumuh diarahkan pada prioritas tertatanya kawasan kumuh menjadi kawasan yang baik

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Lingkungan Hidup	
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan diarahkan pada prioritas peningkatan kualitas SDM serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan pada prioritas tersedianya pertamanan, arena rekreasi, penerangan jalan dan penataan ruang perkotaan yang baik dan petugas pemeliharaan RTH
Penataan Ruang	
Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang diarahkan pada prioritas tersedianya dokumen perencanaan RTRW Kabupaten, Perda tentang RTRW Kabupaten, Data Spasial Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, dan Pengembangan SDM
Program Pemanfaatan Ruang	Program Pemanfaatan Ruang diarahkan pada prioritas tersedianya data geo spasial pemanfaatan ruang dan peningkatan keahlian dan jumlah aparatur dalam pengelolaan SIG dan penerapan pemanfaatan RTR
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang diarahkan pada prioritas tindakan yang dilakukan untuk pengendalian pemanfaatan ruang, kompetensi aparatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
BAPPEDA	
Perencanaan Pembangunan	
Program pengembangan data/informasi	Pelaksanaan program pengembangan data/informasi diarahkan pada prioritas pengembangan pusat data perencanaan pembangunan, pengelolaan dan informasi data statistik, analisa data
Program Kerjasama Pembangunan	Pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan 12 Kabupaten dan 3 Provinsi
Program perencanaan pembangunan daerah	Pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada prioritas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan/KUA-PPAS, Koordinasi Pembangunan Daerah, Penyusunan Rancangan RPJMD, RKPD
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi daerah
Program perencanaan sosial dan budaya	Pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Sosial Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Pelaksanaan program dan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Prasarana dan Sumber daya alam
Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu	Terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan kewilayahan secara terpadu sesuai kondisi dan potensi daerah
Penanaman Modal	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pelaksanaan program peningkatan kualitas kebijakan pengembangan perekonomian dan investasi daerah diarahkan pada prioritas Pembinaan Pendapatan Asli Daerah, Optimalisasi Barang/Aset Daerah BLUD dan BUMD
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pelaksanaan program pengembangan perekonomian dan investasi daerah diarahkan pada prioritas Pembinaan Pendapatan Asli Daerah, Optimalisasi Barang/Aset Daerah BLUD dan BUMD

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
DINAS PENDIDIKAN	
Pendidikan	
Program Wajar 12 Tahun	Pelaksanaan Program Wajar 12 Tahun diarahkan pada prioritas pengelolaan JPD, BOS pusat dan daerah, bantuan siswa miskin (BSM) dan memberikan akses kepada warga masyarakat yang berkebutuhan khusus.
Program Pengembangan Pendidikan	Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan diarahkan pada prioritas peningkatan layanan data pokok pendidikan (DAPODIK), pengembangan kesiswaan, penerimaan peserta didik baru (PPDB) online, pengembangan tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas Guru melalui Diklat-diklat dan studi banding.
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	Pelaksanaan ProgramPeningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar diarahkan pada prioritas Penataan dan pemerataan guru , pengembangan pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru yang meliputi pedagogik, profesional, sosial, moral pada pendidikan dasar, pembinaan manajemen pendidikan dasar
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	Pelaksanaan ProgramPeningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah diarahkan pada prioritas pengembangan penambahan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan , pengembangan ICT siswa, pengembangan model pembelajaran pendidikan menengah, peningkatan kompetensi guru yang meliputi pedagogik, profesional, sosial, moral pendidikan menengah, pembinaan manajemen pendidikan menengah
ProgramPeningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Pelaksanaan ProgramPeningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal diarahkan pada prioritas fasilitasi dan penguatan kelembagaan pendidikan anak usia dini, fasilitasi dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat melalui program paket A,B dan C, peningkatan penyelenggaraan kegiatan keterampilan di SKB, dan pendidikan dalam keluarga
Program pengembangan kawasan pendidikan	Arah prioritas program ini adalah Meningkatkan sarana prasarana dan berkembangnya infrastruktur kawasan pendidikan
INSPEKTORAT	
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan realisasi agenda kedinasan Inspektur dan pegawai Inspektorat
	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar operasional Inspektorat dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana operasional Inspektorat Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan
	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan Jumlah gedung kantor yang terbangun/direhab
Peningkatan disiplin aparatur	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan ketrampilan aparatur
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan pencapaian penyusunan Laporan keuangan, dan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), serta evaluasi LAKIP
Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	T Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan pencapaian pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Irtjen.

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan Tingkat pencapaian penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler (LHPR), Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPKs), Laporan Hasil Reviu LKPD, Laporan Hasil Evaluasi LAKIP dan Laporan Hasil Evaluasi Program Kegiatan SKPD
	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk menurunkan Tingkat Temuan Hasil Pemeriksaan Reguler
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan Jumlah tenaga yang memiliki Sertifikasi Auditor
BADAN KBPP	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak diarahkan pada prioritas peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan diarahkan pada prioritas pengembangan partisipasi perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG), penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada prioritas peningkatan Keluarga Berencana dan peningkatan Keluarga Sejahtera
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan di arahkan pada prioritas Pelaksanaan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, Pelatihan tenaga pengelola SIAK, Sosialisasi kebijakan kependudukan, Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, Penyusunan kebijakan kependudukan, Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan, Melaksanakan pemutakhiran data penduduk secara rutin akhir tahun, Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan Melaksanakan penetapan KK, KTP Nasional dan Akta Capil gratis
Program Peningkatan Ketersediaan Data Kependudukan	Program Peningkatan Ketersediaan Data Kependudukan di arahkan pada prioritas pelaksanaan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat, Pengembangan data base kependudukan, Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil, Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan dan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat.
Program Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan diarahkan pada prioritas pelaksanaan Pembentukan dan Penataan Sistem koneksi (Inter - Phase Tahap Awal) NIK dan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Sosial	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial diarahkan pada Pelaksanaan Bimbingan Sosial dan Pecegahan NAPZA Berbasis Masyarakat, Bimbingan Sosial Keterampilan anak Nakal/ Terlantar dan Putus Sekolah, Bimsos Keterampilan Penyandang cacat, Pelestarian Nilai-nilai keperintisan Kejuangan dan kesetiakawanan sosial, Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Pembinaan dan Penyuluhan terhadap WTS.
Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma	Pelaksanaan Program Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma diarahkan pada prioritas Pelaksanaan Pengiriman Penca kepusat-pusat Rehabilitasi Sosial.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diarahkan pada prioritas Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, Pertemuan dan Orientasi bagi Pengurus KUBE dan Pendamping, Peningkatan Kemampuan KUBE/UEP keluarga Miskin dan Fakir Miskin, Pembinaan dan Monitoring KUBE/UEP keluarga miskin dan Fakir Miskin, Pendataan PSKS dan PMKS.
Program Pembinaan Anak Terlantar	Pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar diarahkan pada prioritas Pengembangan Bakat Anak terlantar.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial diarahkan pada prioritas Pembinaan Organisasi Desa dan Perkumpulan Sosial Lainnya, Peningkatan Kemampuan Taruna Siaga Bencana, Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pengambilan, Pengiriman dan Penyaluran Logistik untuk korban Bencana, Pembinaan dan Orientasi Karang taruna, Bimsos Dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Operasional Komisi daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Kab. Barito Utara, Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kab. Barito Utara.
Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial.	Pelaksanaan Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial diarahkan pada pelaksanaan Operasional Forum Koordinasi Tagana, Operasional Forum Keserasian Sosial Saerah.
Tenaga Kerja	
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.	Pelaksanaan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja diarahkan pada Pelaksanaan Pembahasan UMK/UMSK, Pengawasan Tenaga Kerja Asing, Bimbingan/ Penyuluhan Pembuatan Perjanjian Kerja (PK, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Penyuluhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Pemeriksaan Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit, Penyelesaian Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Survey Kebutuhan hidup layak.
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja.	Pelaksanaan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pelatihan Tenaga Kerja diarahkan pada Pelaksanaan Pelatihan Bengkel Mobil dan Sepeda motor, Pelatihan tata Rias dan Salon, Pelatihan Menjahit, Pelatihan las Listrik dan Las Karbit, Monitoring Penempatan TK, AKL, TK AKAD, TKA dan BKOL, Pelatihan TTG, Operasional ULK.

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Transmigrasi	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT)	Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT) diarahkan pada Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi.
Program Pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT).	Pelaksanaan Program Pengembangan masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT) diarahkan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat Transmigrasi, Bimbingan Teknis pemberdayaan sosial budaya di kawasan transmigrasi.
DINAS KOPERASI UMKM	
Koperasi dan UMKM	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.	Pelaksanaan Prioritas Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menciptakan koperasi-koperasi aktif, berkualitas dan memberikan manfaat secara ekonomi maupun sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia gerakan koperasi, menciptakan dan mempromosikan produk-produk unggulan koperasi/daerah, meningkatkan pemahaman dan kesadaran berkoperasi dikalangan gerakan koperasi dan masyarakat, penyusunan database koperasi.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pelaksanaan Prioritas Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diarahkan pada Pengembangan dan pengawasan dana pemerintah yang digunakan untuk pengembangan usaha, Melakukan penilaian kesehatan Koperasi dan LKM, Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan LKM, penyusunan data/informasi koperasi dan LKM.
Program Penciptaan iklim usaha bagi Usaha Kecil Menengah yang kondusif.	Pelaksanaan Prioritas Program Penciptaan Iklim Usaha bagi Usaha kecil, Menengah yang kondusif diarahkan pada optimalisasi pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan kualitas SDM UMKM, Penciptaan dan mempromosikan produk-produk UMKM dan penyusunan database UMKM.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah.	Pelaksanaan Prioritas Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan wirausaha-wirausaha baru, Penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kualitas SDM Wirausaha-wirausaha baru.
DISHUTBUN	
Kehutanan dan Perkebunan	
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pelaksanaan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutandiarahkan pada prioritas data penggunaan dokumen SKSKB, data/ informasi PNBP, data penyelenggaraan PHH dan PIHH, data penyaluran DBH-SDA Kehutanan, data Pembangunan HTR , data Produksi Hasil Hutan Kayu dan HHBK, data IPK dan Izin Pinjam Pakai kawasan, data spasial dan numerik kehutanan, penyediaan peralatan survey dan pemetaan dan pengeolaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan diarahkan pada prioritas pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan, pembuatan bangunan konservasi teknis sipil, penyiapan dokumen perencanaan RHL, monitoring dan evaluasi kegiatan RHL, pengelolaan arboretum, pembinaan kelembagaan kelompok tani, serta penyediaan informasi dan promosi sektor kehutanan
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Pelaksanaan ProgramPerlindungan dan konservasi sumber daya hutan diarahkan pada prioritas pelaksanaan penyuluhan kehutanan baik mengenai rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan penguasaan teknologi dibidang kehutanan
Program Pengembangan Kawasan Konservasi	Meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan kawasan konservasi
Program pengembangan kawasan hutan kota	Meningkatkan infrastruktur dan mengembangkan hutan kota

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Program Peningkatan fungsi DAS berbasis pemberdayaan masyarakat	Pelaksanaan Program Peningkatan fungsi DAS berbasis pemberdayaan masyarakat diarahkan pada prioritas penyediaan bibit tanaman kehutanan dan MPTS, pembinaan kelompok tani dalam kegiatan RHL
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan	Pelaksanaan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan diarahkan pada prioritas penyediaan leaflet sebagai sarana penyampaian informasi, penyediaan sarana pengamanan hutan guna mendukung kegiatan pengamanan hutan dan meminimalisir <i>illegal logging</i> .
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Kehutanan	Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Kehutanan diarahkan pada prioritas penyediaan dokumentasi data dan informasi statistik kehutanan guna menunjang pengambilan keputusan dan kebijakan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan diarahkan pada prioritas penanganan gangguan usaha perkebunan, penilaian usaha perkebunan, pelaksanaan revitalisasi perkebunan, penyediaan bibit unggul perkebunan untuk masyarakat.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pelaksanaan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan diarahkan pada prioritas penyediaan dokumen pengembangan jenis komoditi unggulan, brosur, leaflet dan buku petunjuk perizinan penanaman modal perkebunan, fasilitasi pengelolaan hasil perkebunan (bokar bersih), penyediaan bibit unggul perkebunan untuk masyarakat, pameran dan expo untuk media promosi produk unggulan daerah
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan diarahkan pada prioritas pembinaan peningkatan hasil produksi perkebunan, pengembangan laboratorium mini organisme pengganggu tanaman (OPT), pengembangan usaha koperasi, sinkronisasi kegiatan penanaman modal, pembinaan industri kecil dan menengah untuk meningkatkan produksi produk unggulan daerah
Program pembangunan kawasan perkebunan	Pelaksanaan program ini diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur dan terpadunya pembangunan kawasan perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan diarahkan pada prioritas pelaksanaan penyuluhan, penyuluhan pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman perkebunan, penerapan teknologi perkebunan, mampu melakukan okulasi,;
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Perkebunan	Pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Data dan Statistik Perkebunan diarahkan pada prioritas penyediaan dokumentasi data dan informasi statistik perkebunan guna menunjang pengambilan keputusan dan kebijakan
DISPERINDAGSAR	
Perindustrian	
Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pelaksanaan Program pengembangan industri kecil dan menengah diarahkan pada pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan, pengolahan anyaman rotan, pembinaan kelompok kerajinan industri, data perkembangan industri kecil dan menengah, data kelompok industri.
Program pengembangan industri kerajinan dan industri rumah tangga	Pelaksanaan Program pengembangan industri kerajinan dan industri rumah tangga diarahkan pada pelaksanaan pameran produk industri kecil kerajinan dan industri rumah tangga, pelatihan pengolahan pangan bagi industri rumah tangga, kemasan makanan industri rumah tangga, promosi hasil-hasil kerajinan dan makanan khas Barito Utara.
Program Pembangunan	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan infrastruktur, terciptanya dan tertatanya Kawasan industri kecil dan menengah

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Kawasan industri kecil dan menengah	
Perdagangan	
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pelaksanaan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan diarahkan pada pelaksanaan sidang tera dan tera ulang peralatan ukur takar timbang dan perlengkapannya, pembuatan brosur/pamphlet tentang perlindungan konsumen dan metrologi legal, data ukur takar timbang dan perlengkapannya, data peredaran barang beredar
Penguatan Insitusi Pasar	Pelaksanaan Insitusi Pasar diarahkan pada pelaksanaan pemantauan harga, stock dan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan bahan strategis, pelaksanaan operasi pasar, pembentuka TIM pengawas untuk penerbitan rekomendasi Izin SIUP bahan berbahaya, pengawasan distribusi miras, pelaksanaan expo produk indag kalteng di Palangka Raya/kalteng Expo, Pelaksanaan pameran hari-hari besar keagamaan/ pameran MTQ Tk Kabupaten, pameran pembangunan/hari kemerdekaan , ppameran hari-hari besar keagamaan/ pameran MTQ Tk provinsi
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri diarahkan pada Pengembangan Pasar dan distribusi barang/produk, pelaksanaan Pembangunan Pasar.
Program Penataan Kawasan Jasa Perdagangan	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan infrastruktur, Berkembang dan tertatanya Kawasan Jasa Perdagangan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Penanggulangan Bencana	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat.	Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat diarahkan pada prioritas fasilitasi bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; data kearifan lokal yang berorientasi pada pelestarian lingkungan; pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana; dan Penguatan kapasitas dan pembentukan Pusdalops Penanggulangan Bencana.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial /Tanggap Darurat	Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial diarahkan pada prioritas pelaksanaan kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat; penyediaan logistik korban bencana; penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar; pengerahan peralatan, distribusi bantuan dan logistik untuk korban bencana.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	Pelaksanaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana diarahkan pada prioritas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam; penyediaan leaflet sosialisasi sadar bencana; penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana; peringatan dini, mitigasi dan gladi simulasi penanggulangan bencana; penyediaan sarana dan prasarana evakuasi korban bencana; penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; pemetaan daerah rawan bencana; pembuatan peta daerah rawan bencana; dan monev dan pelaporan.
Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pelaksanaan Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran diarahkan pada prioritas penguatan kapasitas /diklat pertolongan dan pencegahan kebakaran; penyediaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan penguasaan teknologi pencegahan bahaya kebakaran.
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi diarahkan pada prioritas kegiatan sosialisasi pasca bencana; Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan banjir dan tanah longsor; pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (<i>Damage and Loses Assesment : DaLA</i>); penilaian, pengumpulan, pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana; dan perbaikan darurat bencana.
Program penataan kawasan rawan banjir	Pelaksanaan program ini di arahkan untuk menata dan meningkatkan infrastruktur di kawasan rawan banjir
Program penataan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan program ini diarahkan untuk menata dan dan meningkatkan infrastruktur kawasan DAS

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP	
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.	Menjadikan kota Muara Teweh yang bersih dan sehat serta memenuhi criteria sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penilaian Kota sehat/ADIPURA.
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	Mewujudkan kota Muara Teweh terlepas dari kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.	Terpantaunya kerusakan hutan dan lahan, terciptanya pelestarian lingkungan hidup, terciptanya pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan budidaya serta meningkatkan konservasi sumber daya alam.
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup.	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat dibidang lingkungan, terlaksana pembaharuan data dan informasi lingkungan daerah melalui status lingkungan hidup daerah dan tersedianya data dan informasi lingkungan Hidup melalui Jejaring Sistem Informasi Lingkungan (SIL) di Kabupaten Barito Utara.
Peningkatan Pengendalian Polusi	Terlaksananya uji emisi pada kawasan Industri, pengujian terhadap kadar polusi limbah padat dan limbah cair dan terlaksananya pengujian parameter kualitas lingkungan.
Pengendalian Kebakaran Hutan	Terlaksananya koordinasi pengendalian kebakaran hutan mulai ditingkat kecamatan hingga ditingkat Provinsi, melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengendalian kebakaran hutan.
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Barito Utara.
Penaatan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan.	Terlaksananya Penegakan hokum lingkungan sesuai dengan amanat Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan diarahkan pada prioritas penanganan gangguan usaha perkebunan, penilaian usaha perkebunan, pelaksanaan revitalisasi perkebunan, penyediaan bibit unggul perkebunan untuk masyarakat.
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi merupakan program percepatan Peningkatan Swasembada beras yang didukung fasilitas sarana dan prasana pertanian, dengan penyediaan luas lahan dan penyediaan bibit/benih berkualitas, sumberdaya manusia yang handal dalam pengelolaan Alat alat mesin pertanian
Program Peningkatan Produksi Palawija dan	Program Peningkatan Produksi Palawija dan Hortikultura mengarahkan ke peningkatan pengembangan produksi buah- buahan dan sayuran , seperti pengembangan jagung, kedelai, serta sayuran tahan lama (kubis, cabe, tomat, bawang merah dll)

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Hortikultura	
Program pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan	- Meningkatnya pembangunan infrastruktur kawasan pertanian tanaman pangan
Program Pengembangan kawasan Tanaman Hortikultura	- Meningkatnya pembangunan dan tertatanya Pengembangan kawasan Tanaman Hortikultura
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pengembangan Agribisnis	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pengembangan Agribisnis merupakan program peningkatan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dengan pengembangan buah-buah unggulan daerah, dengan dilaksanakannya pembinaan PM2L , serta pelatihan pelatihan pelatihan Gapoktan dalam rangka peningkatan SDM petani dalam peningkata Agribisnis Pertanian.
Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan	Pelaksanaan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan diarahkan pada prioritas penyediaan dokumen pengembangan jenis komoditi unggulan, brosur, leaflet dan buku petunjuk perizinan penanaman kebijakan.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan populasi ternak melalui pengembangan Inseminasi Buatan (IB) dan kesediaan sarana dan prasarana pembibitan. - Meningkatkan fungsi UPTD Balai Penagkaran Ternak dalam meningkatkan populasi ternak. - Meningkatkan pendapatan anggota kelompok dan skala usaha kepemilikan ternak. - Meningkatkan Motivasi peternak dalam mengembangbiakan Sapi potong, kambing dan unggas. - Tersedianya data validasi peternakan yang akurat. - Meningkatkan sumberdaya petugas dan masyarakat/petani peternak
Program Peningkatan Produksi budidaya peternakan	Meningkatkan kapasitas usaha dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan budidaya peternakan.
Program Pengembangan Kawasan Peternakan	- Pelaksanaan program ini di prioritaskan untuk Meningkatkan sarana dan prasarana dan tertatanya kawasan peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersosialisasikan penerapan teknologi peternakan tepat guna melalui peningkatan pengelolaan limbah ternak (Pupuk dan Bio gas) - Meningkatkan Sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna. - Terpeliharanya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Program Percepatan Swasembada daging sapi	Tercapainya target swasembada daging dan peningkatan populasi ternak sapi melalui pengembangan kawasan pembibitan sapi potong secara kloni.
Program Peningkatan penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.	Penyediaan pangan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal melalui Penyediaan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU).
Program Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Perairan Umum	Pelaksanaan Program Pengawasan Sumberdaya Perairan Di arahkan Pada Prioritas Kelestarian Sumberdaya Perairan Umum untuk tindakan Preventif dari kerusakan lingkungan dari tindakan tindakan yang dilarang (Illegal Fishing) sehingga terciptanya kelestarian sumberdaya alam
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Program Perikanan Tangkap diarahkan pada Prioritas Penggunaan alat tangkap yang selektif sehingga tetap terjaga kelestarian ekosistem dan biota di perairan umum.
Program Pengembangan	Pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang diarahkan pada Skala Prioritas system Produksi Pembudidayaan ikan, Sistem pembenihan ikan,

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Budidaya Perikanan	Sarana dan Prasarana budidaya dan peningkatan SDM sehingga dapat meningkatkan Produksi budidaya dan produksi mutu benih yang berkualitas dgn bersertifikasi.
Program Pembangunan kawasan budidaya perikanan	- Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan dan tertatanya sarana dan prasarana kawasan budidaya perikanan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan yang di arahkan pada skala Prioritas Peningkatan Mutu dan pemasaran hasil perikanan serta peningkatan teknologi pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah serta Pelestarian hasil olah komoditi unggulan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengolah
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Pelaksanaan Program Pengembangan system Penyuluhan Perikanan yang diarahkan pada skala Prioritas untuk penyediaan data statistik perikanan sehingga tersedianya data yang akurat, serta Meningkatkan SDM Kelompok pembudidaya dan tenaga Teknis Perikanan.
Program Pengamanan produksi Tanaman Pangan	Pelaksanaan Program Pengamanan Produksi Pangan diarahkan pada prioritas mewujudkan petani sebagai Ahli Pengendalian Hama Terpadu (PHT) mandiri mengadopsi sistem ramah lingkungan , pembinaan, identifikasi dan pengawalan usaha tani serta pengawasan penggunaan dan peredaran Pestisida.
Program Pengamanan Produksi Perikanan	Pelaksanaan Program Pengamanan Produksi Perikanan diarahkan pada pembinaan kepada petani ikan untuk meningkatkan pengetahuan dalam usaha pencegahan serangan hama dan penyakit ikan, pemantauan/monitoring tentang adanya serangan hama dan penyakit ikan serta penggunaan obat-obatan perikanan guna mendukung usaha meningkatkan produksi perikanan yang aman bagi ikan itu sendiri, manusia dan terhadap lingkungan.
Program Pengamanan Produksi Peternakan	Pelaksanaan Program Pengamanan Produksi Peternakan diarahkan pada prioritas pelayanan kesehatan hewan baik yang bersifat preventif melalui kegiatan Vaksinasi Rabies dan ND maupun yang bersifat kuratif melalui kegiatan pengobatan ternak dalam usaha menurunkan intensitas serangan penyakit ternak, pemantauan penyakit yang bersifat zoonosis seperti penyakit Flu Burung dan Rabies, serta Sosialisasi / Bimtek pengendalian penyakit ternak untuk meningkatkan pengetahuan peternak mengenai cara pemeliharaan serta cara pencegahan penyakit ternak.
Program Pengawasan Sumberdaya Perairan Umum	Pelaksanaan Program Pengawasan Sumberdaya Perairan Di arahkan Pada Prioritas Kelestarian Sumberdaya Perairan Umum untuk tindakan Preventif dari kerusakan lingkungan dari tindakan tindakan yang dilarang (Illegal Fishing) sehingga terciptanya kelestarian sumberdaya alam
Program Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Program Perikanan Tangkap diarahkan pada Prioritas Penggunaan alat tangkap yang selektif dan tetap terjaga kelestarian ekosistem perairan umum.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang diarahkan pada Skala Prioritas system Produksi Pembudidaya ikan, Sistem pembenihan ikan, Sarana dan Prasarana budidaya dan peningkatan SDM sehingga dapat meningkatkan Produksi budidaya dan produksi mutu benih yang berkualitas dgn bersertifikasi.
Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Pelaksanaan Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan yang di arahkan pada skala Prioritas Peningkatan Mutu dan pemasaran hasil perikanan serta peningkatan teknologi pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah serta Pelestarian hasil olah komoditi unggulan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengolah
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Pelaksanaan Program Pengembangan system Penyuluhan Perikanan yang diarahkan pada skala Prioritas untuk penyediaan data statistic perikanan sehingga tersedianya data yang akurat.
Program Pengamanan produksi Tanaman Pangan	Pelaksanaan Program Pengamanan Produksi Pangan diarahkan pada prioritas mewujudkan petani sebagai Ahli Pengendalian Hama Terpadu (PHT) mandiri mengadopsi sistem ramah lingkungan,pembinaan, identifikasi dan pengawalan usaha tani serta pengawasan penggunaan dan peredaran Pestisida.
Program Pengamanan Produksi	Pelaksanaan Program Pengamanan Produksi Perikanan diarahkan pada pembinaan kepada petani ikan untuk meningkatkan pengetahuan dalam usaha

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Perikanan	pengecahan serangan hama dan penyakit ikan, pemantauan/monitoring tentang adanya serangan hama dan penyakit ikan serta penggunaan obat-obatan perikanan guna mendukung usaha meningkatkan produksi perikanan yang aman bagi ikan itu sendiri, manusia dan terhadap lingkungan.
Program Pengamanan Produksi Peternakan	Pelaksanaan Program Pengamanan Produksi Peternakan diarahkan pada prioritas pelayanan kesehatan hewan baik yang bersifat preventif melalui kegiatan Vaksinasi Rabies dan ND maupun yang bersifat kuratif melalui kegiatan pengobatan ternak dalam usaha menurunkan intensitas serangan penyakit ternak, pemantauan penyakit yang bersifat zoonosis seperti penyakit Flu Burung dan Rabies, serta Sosialisasi / Bimtek pengendalian penyakit ternak untuk meningkatkan pengetahuan peternak mengenai cara pemeliharaan serta cara pencegahan penyakit ternak.
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
Program Pembinaan pertambangan	Pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan ketertiban pertambangan Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan pelayanan publik yang prima
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk mengurangi Persentase pelanggaran disiplin pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk memenuhi Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program Pengelolaan Air Tanah	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan Pengelolaan Air Tanah
Program Survey Potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk melaksanakan Survey Potensi Geologi dan Sumber Daya Mineral
Program Pengembangan kawasan pertambangan galian C	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Pengembangan dan Meningkatkan infrastruktur serta tertatanya kawasan pertambangan galian C
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pelaksanaan Program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan pelayanan publik yang prima
BADAN KESBANGPOL	
Kesatuan Bangsa dan Politik	
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pelaksanaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan diarahkan pada prioritas kegiatan Operasional Kegiatan Kominda dan Kegiatan Pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)
Program Pengembangan	Pelaksanaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan diarahkan pada prioritas kegiatan Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
wawasan Kebangsaan	kehidupan beragama, sosialisasi Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan Sosialisasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Barito Utara
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT) diarahkan pada prioritas kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
Program Pendidikan politik masyarakat	Pelaksanaan Program Pendidikan politik masyarakat di arahkan pada prioritas kegiatan Pembinaan Ormas, Pembinaan Parpol dan Pembinaan seni, budaya dan Agama
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
Pengembangan Nilai Budaya	Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya diarahkan pada Peningkatan kualitas seni budaya daerah melalui Seleskai Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten dan Provinsi, Pembinaan sanggar seni dan budaya bagi generasi muda
Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya diarahkan pada Pelestarian dan pengembangan situs dan cagar budaya Barito Utara melalui kegiatan Pendataan Situs dan benda cagar budaya, pemugaran dan rehab situs dan cagar budaya, pemeliharaan dan penempatan situs dan cagar budaya (Museum)
Pengelolaan Keragaman Budaya	Pelaksanaan Program Pengembangan Keragaman Budaya diarahkan pada pemanfaatan Kebudayaan lokal sebagai daya tarik wisata dan wadah festival budaya melalui festival dan gelar adat budaya daerah
Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya meningkat	Pelaksanaan Program Pengembangan kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya diarahkan pada Kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dengan pihak museum, pemilik benda pusaka (benda cagar budaya)
Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan Program Pemasaran Pariwisata diarahkan pada Peningkatan PAD Bidang Pariwisata bersama pelaku usaha jasa pariwisata dan promosi wisata melalui pameran, penyebaran pamflet, leaflet, media elektronik, internet, cd dll.
Pengembangan destinasi pariwisata	Pelaksanaan Program Pengembangan destinasi pariwisata diarahkan untuk Meningkatkan destinasi wisata unggulan melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum objek wisata dan Pengembangan strategi tujuan wisata baru.
Program Pengembangan Kawasan wisata Budaya	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan infrastruktur dan berkembangnya Kawasan wisata Budaya
Program Pengembangan Kawasan Agrowisata	- Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan infrastruktur Tertata dan berkembangnya Kawasan Agrowisata
Pengembangan kemitraan	Pelaksanaan Program Pengembangan Kemitraan diarahkan pada Pengumpulan data dan penyajian statistik wisata dan Meningkatkan Kemitraan Pembangunan Pariwisata bekerjasama dengan PHRI, Adwindo, Pok Darwis, Saka Pariwisata dan pelaku usaha jasa pariwisata.
Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Pelaksanaan Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda diarahkan untuk Mewujudkan Pemuda pelopor di segala bidang pembangunan
Peningkatan peran serta kepemudaan	Pelaksanaan Program Peningkatan peran serta kepemudaan diarahkan untuk Mempersiapkan kepemimpinan pemuda yang bertaqwa, patriotis dan visioner
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pelaksanaan Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda diarahkan untuk Pemberdayaan Pemuda dalam membangun kemandirian ekonomi
Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba	Pelaksanaan Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkobadiarahkan untuk mewujudkan Generasi Muda bebas Narkoba
Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga	Pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan dan manajemen olahraga diarahkan untuk Meningkatkan prestasi olahraga dan prestasi olahraga dan Meningkatkan manajemen olahraga

Program Pembangunan	Arah Prioritas Program
Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Pelaksanaan Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga diarahkan untuk Menggiatkan olahraga massal di masyarakat
Peningkatan sarana prasarana Olahraga	Pelaksanaan Program Peningkatan sarana prasarana Olahraga diarahkan untuk Meningkatnya sarana prasarana olahraga
Program Pembangunan kawasan olahraga	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk Meningkatkan infrastruktur dan terbangunnya kawasan olahraga
PERHUBUNGAN	
Program Prasarana dan fasilitas Perhubungan.	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan Frasarana dan Fasilitas Perhubungan.
Program Pembangunan sarana dan Pra sarana Perhubungan	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas.	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan dan Terwujudnya kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan Jumlah sarana penyuluhan komunikasi, Informasi
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan sarana pelayanan Angkutan
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan bermotor.	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan Persentase sarana dan prasarana alat uji.
Program pembangunan kawasan bandara	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung operasional pada kawasan bandara
Program Prasarana dan fasilitas Perhubungan.	Pelaksanaan program ini diprioritaskan untuk meningkatkan Frasarana dan Fasilitas Perhubungan.



BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan Indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah atau Rencana Strategis. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi dimasa yang akan datang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 sebagaimana Tabel 9.1. berikut ini :

Tabel 9.1.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
a.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan PDRB Sektorl (ADHK)	(%)	6,52	7,3	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0
1.2	Inflasi	%	6,50	6,40	6,30	6,2	6,10	6,00	6,00
1.3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp (Jt)	9,80	10,50	10,56	10,99	11,42	11,85	11,85
1.4	Indeks Gini		0,35	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
1.5	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	%	6,52	6,70	6,90	7,1	7,20	7,40	7,40
1.6	Indeks Pembangunan Manusia		75,97	76,27	76,58	76,88	77,21	77,52	77,52
1.7	Usia Harapan Hidup (Angka Harapan Hidup)	Tahun	72,36	72,40	72,45	72,50	72,55	73,68	73,68
1.8	Pertumbuhan Penduduk	%	0,97	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
1.9	Jumlah Penduduk	Jiwa	123.781	124.870	125.968	127.948	129.073	130.208	130.208
2.0	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Ada	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	menurun	Menurun	Menurun
b.	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1.	Pendidikan								
1.1	Angka Melek Huruf	%	98,71	98,72	98,73	98,74	98,75	98,76	98,76
1.2	Rata Lama Sekolah	Tahun	8,40	8,41	8,42	8,43	8,44	8,45	8,46
1.3	Angka Partisipasi sekolah								
	Pendidikan dasar								
	APK (SD/MI/Paket A)	%	105,68	120,00	135,00	150	155,00	160,00	160,00
	APM (SD/MI/Paket A)	%	89,68	90,60	91,66	92,	93,85	95,00	95,00
	Angka Partisipasi sekolah								
	APK (SLTP/MTS/Paket B)	%	85,70	86,95	86,99	87,01	88,01	89,20	89,20
	APM (SLTP/MTS/Paket B)	%	68,24	73,00	73,20	73,35	73,50	73,65	73,65
	APK (SMU/Paket C)	%	68,24	75,00	78,00	81,00	84,00	87,00	87,00
	APM (SMU/Paket C)	%	47,41	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00
1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan								
	SD/MI	%	29,57	28,57	27,50	26,49	25,47	24,50	24,50
	SMP/MTS	%	19,01	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	24,00
	SMA/Aliyah	%	18,46	18,47	18,48	18,49	18,50	18,51	18,51
1.5	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SD/MI)	%	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,11
1.6	Rasio guru murid (SD/MI)	%	24,54	25,50	26,40	27,60	28,51	29,61	29,61
1.7	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTS	%	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,011	0,011
1.8	Rasio guru murid (SMP/MTS)	%	13,93	13,90	14,95	15,96	16,80	17,95	17,95
1.9	Rasio guru murid SMU	%	8,37	9,37	10,37	11,37	12,37	13,37	13,37
2.	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi	Jiwa/1000 pdk	16	15	14	13	12	11	11

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.2	Angka kelangsungan Hidup Bayi	Jiwa/ 100.000 Pddk	994	975	978	983	987	990	990
2.3	Angka kematian Ibu	Jiwa/ 100.000 Pddk	3	3	2	2	1	1	0
2.4	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,36	72,40	72,45	72,50	72,55	73,68	73,68
2.5	Balita Gizi Buruk (%)	%	5	5	4,5	4	3,5	3	3
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	%	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,15
	Pertanahan								
	Persentase penduduk yang memiliki lahan	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	3. Kemiskinan								
3.1	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,89	94,02	94,15	94,28	94,41	94,54	94,54
3.2	Persentase Penduduk Miskin	%	6,11	5,98	5,85	5,72	5,59	5,46	5,46
3.3	Rasio penduduk yang bekerja		97,00	97,06	97,54	98,00	98,51	99,00	99,00
3.4	Angka kriminalitas yang tertangani	%	1	3	4	5	6	7	7
3.5	Tingkat Pengangguran	%	3,00	2,64	2,46	2,00	1,49	1,00	1,00
3.6	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	(Rp/Kapita/bulan)	317.497	324.658	353.158	381.458	410.458	440.940	440.940
3.7	Jumlah Penduduk miskin	Jiwa	7.600	7.400	7.200	7.000	6.800	6.600	6.600
	4. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga								
	Kebudayaan								
4.1	Jumlah grup kesenian	Buah	4	10	16	21	26	31	31
4.2	Jumlah gedung kesenian	Buah	0	0	1	0	0	0	1
	Pemuda dan olah raga								
4.3	Jumlah klub olahraga	klub	0	2	2	2	2	2	2
4.4	Jumlah gedung olahraga	Buah	1	0	0	1	0	0	2
	2. Aspek Pelayanan Publik								
	Pelayanan Dasar								
	Pendidikan Dasar								
1	Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)								
	APK (SD/MI)	%	105,68	105,70	106,45	106,99	107,45	107,68	107,68
	APM (SD/MI)	%	89,69	90,60	91,66	93,00	93,00	93,85	95,00
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia sekolah	%	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,11
3	Rasio Guru Terhadap murid	%	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,21
	Pendidikan menengah								
5	Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Menengah)								
6	APK (SLTP/MTS)	%	87,92	89,20	89,80	90,50	91,80	93,60	93,60
	APM (SLTP/MTS)	%	68,95	70,50	72,92	75,90	78,99	85,33	85,33
	APK (SMU)	%	79,03	80,00	85,02	88,05	95,01	99,99	99,99
	APM (SMU)	%	66,01	74,04	83,08	87,01	94,00	100,00	100,00
7	Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah SMP/MTS	%	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,11
8	Rasio guru terhadap murid	%	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,19
9	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	97	97	98	98	99	99	99

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Rasio posyandu per satuan balita	%	11,02	11,02	11,09	11,16	11,22	11,29	11,29
11	Rasio puskesmas , poliklinik, pustu per satuan penduduk	Buah/10000 pddk	0,80						
12.a	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk	Buah/10000 pddk	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
12.b	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	Buah/10000 pddk	0,16	0,16	0,18	0,19	0,21	0,24	0,24
12.c	Rasio Dokter Spesialis per sataun penduduk	Buah/10000 pddk	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
13	Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk	Buah/10000 pddk	3,25	3,25	3,25	3,26	3,59	3,60	3,60
14	Persentase penanganan sampah	%	81,25	81,50	81,70	84,97	89,87	94,77	94,77
15	Persentase penduduk berakses air minum	%	32	34	36	38	40	42	42
16	Persentase luas pemukiman yang tertata	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
17	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	40,99	56,64	58,26	61,49	64,73	68,78	68,78
18	Rasio Jaringan Irigasi	m/ha	44,48	64,65	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
19	Rasio Tempat ibadah persatuan Penduduk	buah/10000 pddk	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,60
20	Persentase Rumah Tinggal bersanitasi		65	65	70	75	80		90
21	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	buah/10000 pddk	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,74
22	Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	buah	2,16	2,50	2,50	2,60	2,70	2,70	2,70
23	Rasio Rumah Layak huni	buah/10000 pddk	16,28	25,00	39,00	50,00	60,00	70,00	70,0
24	Rasio pemukiman layak huni	buah/10000 pddk	1	1	1	2	2	2	2
25	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah	%	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
26	Rasio Bangunan Ber IMB per satuan bangunan	%	80	85	90	95	96	97	97
27	Jumlah Arus penumpang angkutan umum	buah	151.020	160.112	185.000	195.000	200.000	230.000	230.000
28	Rasio ijin trayek	buah/10000 pddk	24	25	27	28	29	35	35
29	Jumlah uji kir Angkutan umum	buah	795	863	900	950	1000	1200	1200
30	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal	buah	0/1/3	0/1/3	0/2/3	0/2/3	0/2/3	0/2/3	0/2/3
b. Pelayanan Penunjang									
1	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	buah	247	259	268	276	283	290	290
2	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)(juta)	Rp	756.000	981.000	1.204.000	1.427.000	1.650.000	1.874.000	1.874.000
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
4	Persentase Koperasi Aktif	%	67	70	75	80	80	85	85
5	Jumlah UKM Non BPR / LKM	unit	4093	5000	5200	5500	5700	5800	5800
6	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	0,57	0,67	0,77	087	0,97	1,00	1,00
7	Rasio Bayi berAkte Kelahiran	%	0,52	0,62	0,72	0,86	0,96	1,00	1,00
8	Rasio Pasangan berakte nikah	%	0,12	0,32	0,52	0,72	0,92	1,00	1,00
9	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,28	74,7	76,30	77,81	79,30	80,80	
10	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun	%	28	20	17	15	10	10	10
11	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	%	53,52	59,90	66,28	72,66	79,04	85,42	85,42
12	Partisipasi Perempuan di lembaga swasta	%	100	125	150	175	200	225	225
13	Rasio KDRT	%	1	0	0	0	0	0	0
14	Persentase tenaga kerja di bawah umur	%	ada	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun
15	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang/KK	3	3	3	3	3	3	3
16	Rasio Akseptor KB	%	65	70	70	75	75	76	76
17	Jumlah Jaringan Komunikasi	Buah	3	3	3	4	5	7	7
18	Rasio warnet/wartel terhadap penduduk	buah/orang	5	6	7	7	8	8	8

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Jumlah surat kabar Nasional/lokal	buah	0	0	0	0	1	2	3
20	Jumlah Penyiaran radio/TV Lokal	buah	1	1	1	2	2	3	3
21	Persentase Luas lahan bersertifikat	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
22	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Lembaga Pemberdayaan masyarakat	buah	3	5	8	13	15	19	19
23	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	buah	21	24	28	31	35	40	40
24	Jumlah LSM Aktif	Buah	45	45	45	45	45	45	45
25	Jumlah Perpustakaan	buah	39	42	45	48	51	54	57
26	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	3.03	3.182	3.33	3.48	3632	37	39
27	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Orang/10000 pddk	30	33	36	40	50	60	60
28	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Orang/10000 pddk	700	700	710	715	720	750	750
29	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan	buah/desa	80	90	95	100	115	120	120
30	Jumlah Organisasi Pemuda	Buah	15	15	15	15	15	15	15
31	Jumlah Organisasi Olah Raga	Buah	22	22	22	22	22	22	22
32	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kali	5	5	5	5	5	5	5
33	Jumlah Kegiatan Olah Raga	Kali	5	5	5	5	5	5	5
3.	ASPEK DAYA SAING								
a.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
1.3	Produktivitas total daerah		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
1.4	Angka Konsumsi Rumah Tangga		1,22	1,24	1,26	1,28	1,30	1,32	1,32
2	Pertanian								
2.1	Nilai Tukar Petani	Rp	99,85	99,87	99,8	99,91	99,93	99,9	99,9
2.2	Persentase Konsumsi RT Non Pangan	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
2.3	Produktivitas daerah per sektor	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
b	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan								
1.1	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan	Km/bh	0,04	0,10	0,16	0,22	0,28	0,34	0,34
1.2	Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	Orang/Th	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
1.3	Jumlah Orang /Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun	Orang/Th	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
2.	Penataan Ruang								
2.1	Ketaatan terhadap RTRW		20	27	30	37	47	55	65
2.2	Luas Wilayah Produktif	Ha	910.045	910.045	910.150	910.500	910.650	910.800	910.975
2.3	Luas Wilayah Industri	Ha	824.043	824.043	824.043	824.043	824.043	824.043	824.043
2.4	Luas Wilayah kebanjiran	Ha	22.930	21.325	19.720	18.115	16.510	15.024	14.905
2.5	Luas Wilayah kekeringan	Ha	73.707	66.337					
2.6	Luas Wilayah Perkotaan	Ha	8.628	9.232	9.836	10.439	11.049	11648	12.252

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1	Jenis dan jumlah Bank dan Cabang-cabangnya	Buah	8	9	9	10	10	11	11
3.2	Jenis dan Jumlah perusahaan Asuransi & cabang-cabangnya	Buah	3	3	3	4	4	5	5
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	unit	12	12	13	14	15	16	16
3.4	Jenis, kelas dan jumlah penginapan hotel	unit	39	39	42	44	46	48	48
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	%	21	23	25	27	29	31	31
5	Komunikas dan Informatika								
5.1	Rasio Ketersediaan Daya listrik	%	61,03	61,33	61,83	62,33	62,83	63,33	63,3
5.2	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	%	46,60	47,50	48,10	49,00	50,20	51,00	51,00
5.3	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan HP/telepon	%	80	82	85	87	90	92	95
c	Fokus Iklim Investasi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Angka Kriminalitas	kali/10000 pddk	ada	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun
1.2	Jumlah demo	kali	1	0	0	0	0	0	0
1.3	Lama proses perizinan	hari	6	5	4	3	2	2	2
1.4	Jumlah dan Macam Pajak Retribusi Daerah	pajak	28	29	30	31	32	33	33
1.5	Jumlah Perda pendukung iklim usaha	perda	ada	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat
d	Fokus Sumberdaya Manusia								
	Rasio Lulusan S1/S2/S3	buah/10000 pddk	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
	Rasio ketergantungan	%	46	44	42	40	38	36	36
	Capaian Kinerja Urusan Wajib								
1	Pendidikan								
	Fasilitas Pendidikan:								
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	61.60	64.30	67.00	69.70	72.40	75.10	77.80
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dalam kondisi baik	%	73.00	78.97	82.94	86.91	90.88	94.85	94.85
	Sekolah SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	96.00	96.80	97.00	97.45	98.10	98.50	98.50
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):								
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	75.61	80.49	85.37	90.24	95.12	100.00	100
	Angka Putus Sekolah:								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	1.20	1.19	1.1	1.07	1.04	1.02	1.02
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.92	0.9	0.87	0.84	0.81	0.77	0.77
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	1.07	1.07	0.93	0.78	0.66	0.52	0.52
	Angka Kelulusan:								
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99.9	99.9	99.94	99.98	100	100	100

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	97.00	97.00	97.50	98.00	98.50	99.00	99.00
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	93.50	93.50	94.60	95.70	97.00	98.50	98.50
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	71.69	71.69	79.65	80.25	81.4	82.05	82.05
2.	Kesehatan								
	Jumlah Rumah Sakit	Buah	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah Puskesmas	Buah	16	0	1	0	0	0	28
	Jumlah Poliklinik	Buah	2	0	0	0	0	0	2
	Jumlah Pustu	Buah	84	1	1	1	1	1	89
	Jumlah Dokter	Orang	24	1	1	1	1	1	29
	Jumlah Tenaga Medis	Orang	152	1	1	1	1	1	156
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	37,66	47,66	57,66	67,66	77,66	87,66	87,66
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	89	90	91	92	93	94	95
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	80	90	100	100	100	100	100
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	0	0	0	0	0	0	0
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (CNR)	%	74	75	76	77	78	79	80
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	80	84	88	92	96	100	100
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Cakupan kunjungan bayi	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Cakupan puskesmas	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Cakupan pembantu puskesmas	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2.a	Akses Air Minum								
	Proporsi Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum dari PDAM Barito Utara	%	12	15	17	25	30	35	35
	Jumlah pelanggan yang mendapatkan akses air PDAM	Buah	10.688	11.757	12.932	14.226	15.648	17.213	17.213
	Jumlah Rumah Tangga		31.285	31.568	31.883	32.202	32.524	32.884	32.884
	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	%	34,16	37,24	40,56	44,18	48,11	52,41	52,41
3.	PekerjaanUmum								
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	40,99	56,64	58,26	61,49	64,73	68,78	68,78
3.2	Rasio Jaringan Irigasi		44,48	64,65	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	buah/1000 pdd	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,60
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi		41,11	41,64	42,17	42,71	44,08	46,39	46,3
3.5	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	buah/1000 pdd	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,74

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	buah/1000 pdd	0,70	0,91	1,18	1,54	2,00	2,60	3,00
3.7	Rasio rumah layak huni	Buah	10.668	10.988	11.318	11.657	12.240	13.097	13.097
3.8	Rasio permukiman layak huni	%	1	1	1	2	2	2	2
3.9	Panjang jalan yang dapat dilalui Roda 4	Km	617,94	625,74	625,74	625,74	625,74	625,74	625,74
3.10	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	Km	181	200	215	235	240	245	245
3.11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km	253,30	350,00	360,00	380,00	400,00	425,00	425,00
3.12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	M	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3.13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	M	Ada	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
3.14	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	m	12	10	8	6	4	2	2
3.15	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	20,49	22,45	24,41	26,37	28,33	30,29	30,29
3.16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	m	ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3.17	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	496	500	525	550	575	600	600
3.18	Lingkungan Pemukiman Baru		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3.19	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi								
	Kondisi Baik (Km)	Km	253,30	350,00	360,00	380,00	400,00	425,00	425,00
	Kondisi Sedang Rusak (Km)	Km	79,62	85,00	90,00	95,00	100,00	105,00	105,00
	Kondisi Rusak (Km)	Km	61,34	60	57	50	47	45	45
	Kondisi Rusak Berat (Km)	Km	223,68	122,94	110,94	92,94	70,94	42,94	42,94
3.20	Panjang jalan								
	- Panjang Jalan Negara	Km	408,17	408,17	408,17	408,17	408,17	408,17	408,17
	- Panjang Jalan Propinsi	Km	34,10	3,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10
	- Panjang Jalan Kabupaten	Km	617,9	625,74	625,74	625,74	625,74	625,74	625,74
	- Panjang Jalan (jumlah)	Km	1060,	1.068,01	1.068,01	1.068,01	1.068,01	1.068,01	1.068,01
3.21	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0,04	0,10	0,16	0,22	0,28	0,34	0,34
4	Perumahan								
4.1	Rumah tangga pengguna air bersih	buah	8.337	10.668	11.700	12.600	13.500	14.600	14.600
4.2	Rumah tangga pengguna listrik	buah	14.195	15.600	17.000	18.500	20.000	21.500	21.500
4.3	Rumah tangga ber-Sanitasi	buah	10.848	10.848	11.300	11.700	12.200	12.500	12.500
4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	buah	89	88,83	86,00	84,00	80,00	77,00	77,00
4.5	Rumah layak huni	%	16,28	25,00	39,00	50,00	60,00	70,00	70,0
5.	Penataan Ruang								
5.1	Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah ber HPL/HGB	%	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
5.2	Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah bangunan	Unit	489	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5.3	Ruang publik yang berubah peruntukannya			Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.4	Jumlah rumah tangga pengguna listrik / Jumlah seluruh rumah tanqqa x100%	%	43,25	48,27	55%	65%	68%	70%	70%
6.	Perencanaan Pembangunan Daerah								
6.1	Dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 yg telah ditetapkan dgn PERDA (Ada/ tidak)		Tidak Ada,	0	0	0	0	0	0
6.2	Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Ada/ tidak)		Ada / 1 buah dok	1	0	0	0	0	2
6.3	Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Ada/ tidak)		Ada/ 5 buah dok	1	1	1	1	1	5
6.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd		Ada/ 5 buah dok	1	1	1	1	1	5
6.5	Dokumen Evaluasi RKPd		Belum dilaksanakan	1	1	1	1	1	5
6.6	Dokumen Evaluasi RPJMD		Ada/ 1buah Dok	0	0	0	0	0	1
6.7	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan APBD		Ada/ 5 buah dok	1	1	1	1	1	5
6.8	Dokumen LKPJ		Ada/ 5 buah Dok	1	1	1	1	1	5
6.9	Dokumen Laporan Keterangan Akhir Masa Jabatan		Ada/ 1buah Dok	0	0	0	0	1	1
6.10	Dokumen PDRB Kabupaten		Ada/ 5 buah Dok	1	1	1	1	1	5
	Dokumen PDRB Kecamatan		0	0	1	0	1	0	2
6.11	Dokumen Kabupaten Dalam Angka		Ada/ 5 buah Dok	1	1	1	1	1	5
	Dokumen Kecamatan Dalam angka		Ada/ 2 buah Dok	0	1	0	1	0	2
6.12	Dokumen Inflasi Kabupaten		Ada/ 5 buah Dok	1	1	1	1	1	5
6.13.	Dokumen Analisa Situasi Ibu dan Anak		Ada/ 5 buah Dok	1	1	1	1	1	5
6.14	Dokumen HSPK/HSBU		Ada/ 5 buah Dok	1	1	1	1	1	5
6.15	Dokumen Up dating data Kemiskinan		Ada/ 2 buah Dok	1	1	1	1	1	5
6.16	Dokumen Profil Kab. Barito		Ada/ 1 buah Dok	0	0	0	0	1	1
6.17	Dokumen Inkesra		Ada/ 1 buah Dok	0	1	0	1	0	2
6.18	Dokumen Input-Output		Belum ada		1	0	1	0	2
6.19	Dokumen Indeks Pembangunan Manusia		Ada/ 4 buah Dok	1	1	1	1	1	5
6.20	Dokumen penggunaan Lahan		0	0	1	0	1	0	2
7.	Perhubungan								
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	buah	151.020	160.112	185.000	195.000	200.000	230.000	230.000
7.2	Rasio ijin trayek		24	25	27	28	29	35	35
7.3	Jumlah uji kir angkutan umum		795	863	900	950	1000	1200	1200
7.4	Jumlah Pelabuhan Laut		Tidak ada	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pelabuhan Udara		1	1	2	1	1	1	2
	Jumlah Terminal Bis		1	1	1	1	1	1	1
	Jumlah angkutan darat / Jumlah penumpang angkutan darat x 100%								
7.5	Jumlah angkutan darat	%	185	195	205	2115	225	235	235
7.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	197	202	207	212	217	222	222
7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)		30 menit	30 menit	30 menit	25 menit	25 menit	20 menit	20 menit
7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7.9	Pemasangan Rambu-rambu		150	100	100	100	100	100	100
8	Lingkungan Hidup								
8.1	Persentase penanganan sampah	%	81,25	81,50	81,70	84,97	89,87	94,77	94,77

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.2	Persentase Penduduk berakses airminum	%	32	34	36	38	40	42	42
8.3	Persentase Luas pemukiman yang tertata	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
8.4	Pencemaran status mutu air	%	10	10	10	10	10	10	10
8.5	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
8.6	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	10	10	12	15	17	20	20
8.7	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	2,16	2,50	2,50	2,60	2,70	2,70	2,70
8.8	Penegakan hukum lingkungan/Tindak lanjut pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100
8.9	Jumlah volume produksi sampah	M3	61,67	61,84	62,02	62,19	62,36	62,54	62,54
9	Pertanahan								
9.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	100	100	100	100	100	100
9.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	50	60	70	80	90	100	100
9.3	Penyelesaian izin lokasi	%	1	3	3	3	3	3	15
10	Kependudukan dan Catatan Sipil								
10.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		057	0,67	0,77	0,87	0,97	1,00	1,00
10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	0,52	0,62	0,72	0,86	0,96	1,00	1,00
10.3	Rasio pasangan berakte menikah		0,12	0,32	0,52	0,72	0,92	1,00	1,00
10.4	Kepemilikan KTP	Orang	67.798	71.799	75.994	80.194	84.494	88.994	88.994
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	orang	53.143	55.603	58.177	60.871	63.689	66.637	66.637
10.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/tidak ada		Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	ada
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/belum		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,52	59,90	66,28	72,66	79,04	85,42	85,42
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
11.3	Rasio KDRT	%	1	0	0	0	0	0	0
11.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	Ada	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK/ Tk. Partisipasi Angk Kerja)	%	24,3 0	24,80	25,20	25,70	26,20	26,80	26,80
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	9,09	20	30	40	50	60	60
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		3	3	3	3	3	3	3
12.2	Rasio akseptor KB		65	70	75	75	76	76	76
12.3	Cakupan peserta KB aktif	%	25.823	48.040	51.134	54.224	57.310	60.396	60.396
12.4	Keluarga Pra Sejahtera	%	8.478	10.660	11.421	12.182	12.943	13.704	13.704
	Keluarga Sejahtera I	%	25822	23.000	25.600	27.500	30.000	32.500	32.500
13	Sosial								
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi		3	4	4	5	5	5	5
13.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		269	20	20	20	20	20	100

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	Ketenagakerjaan								
14.1	Angka partisipasi angkatan kerja		73,	74,78	76,30	77,81	79,30	80,80	80,80
14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		28	20	17	15	10	10	10
14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja		73,28	74,7	76,30	77,81	79,30	80,80	80,80
14.4	Pencari kerja yang ditempatkan		45	55	70	85	100	125	125
14.5	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,01	2,70	2,40	2,10	1,80	1,50	1,50
14.6	Keselamatan dan perlindungan		30	50	70	90	120	140	100
14.7	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		Ada	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
15.1	Persentase koperasi aktif		67	70	75	80	80	85	85
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM		4093	5000	5200	5500	5700	5800	5800
15.3	Jumlah BPR/LKM		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
15.4	Usaha Mikro dan Kecil		3.611	3811	4011	4211	4411	4611	4611
16	Penanaman Modal								
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		247	259	268	276	283	290	290
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta rupiah)		756.000	981.000	1.204.000	1.427.000	1.650.000	1.874.000	1.874.000
16.3	Rasio daya serap tenaga kerja *)		166.773	183.568	200.362	217.157	233.952	250.746	250.746
16.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
16.5	Jumlah investor di Kota baru (Penanaman Modal)		35	1	1	1	1	1	55
16.6	Jumlah nilai investasi (juta Rupiah)		14.341.	16.334.007	18.326.554	20.319.102	22.311.650	24.304.197	24.304.197
17	Kebudayaan								
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		8	8	10	10	10	10	48
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
17.4	Jumlah grup kesenian		4	10	16	21	26	31	31
17.5	Jumlah gedung kesenian		0	0	1	0	0	0	1
18	Pemuda dan Olah Raga								
18.1	Jumlah organisasi pemuda	Buah	15	15	15	15	15	15	15
18.2	Jumlah organisasi olahraga	Buah	22	22	22	22	22	22	22
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Buah	5	5	5	5	5	5	5
18.4	Jumlah lapangan olah raga	Buah	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
18.5	Jumlah kegiatan olahraga	Buah	5	5	5	5	5	5	5
18.6	Jumlah Gedung olahraga	Buah	1	0	0	1	0	0	2
18.7	Lapangan olahraga		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
19.1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		10	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah		18	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Org : 10.000 pddk	30	33	36	40	50	60	60
20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Org : 10.000 pddk	700	700	710	715	720	750	750
20.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	buah	80	90	95	100	115	120	120
20.4	Pertumbuhan ekonomi	%	6,37	6,42	6,47	6,52	6,57	6,62	6,62
20.5	Kemiskinan	%	6,11	6,01	5,90	5,81	5,70	5,58	5,58
20.6	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada/tidak)		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
20.7	Penegakan PERDA		ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
20.8	Cakupan patroli petugas Satpol PP		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
20.9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
20.10	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
20.11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran		15	20	25	30	35	40	40
20.12	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		70	60	50	40	40	30	30
20.13	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
20.14	Sistim Informasi Manajemen Pemda		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
20.15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
21	Ketahanan Pangan								
21.1	Regulasi ketahanan pangan		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
21.2	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/1000 penduduk)		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
22.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK								
22.3	Jumlah LSM		45	45	45	45	45	45	45
22.4	LPM Berprestasi		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
22.5	PKK aktif		177	0	1	1	1	1	201
22.6	Posyandu aktif		201	206	209	211	212	214	214
22.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	meningkat
22.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat								
23	Statistik								
23.1	Buku "kabupaten dalam angka" (Ada/Tidak)		Ada	1	1	1	1	1	1
23.2	Buku "PDRB kabupaten" (Ada/Tidak)		Ada	1	1	1	1	1	1
23.3	Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK/HSU/HSBN)		Ada	1	1	1	1	1	1
23.4	Analisa Situasi Ibu dan Anak		Tidak Ada	-	-	-	-	-	-
23.5	Indeks pembangunan Manusia		Ada	1	1	1	1	1	1
23.6	Inflasi		Ada	1	1	1	1	1	1
24.	Kearsipan								
24.1	Pengelolaan arsip secara baku		ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		2	1	1	1	1	1	7
25	Komunikasi dan Informatika								
25.1	Jumlah jaringan komunikasi	unit	3	3	3	4	5	7	7

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25.2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	%	5	6	7	7	8	8	8
25.3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	buah	4	4	4	5	5	5	5
25.4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	unit	1	1	1	1	2	1	3
25.5	Web site milik pemerintah daerah		1	1	2	2	2	2	2
25.6	Pameran/expo		1	1	1	1	1	1	1
26	Perpustakaan								
26.1	Jumlah perpustakaan	Buah	39	42	45	45	45	45	45
26.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (Orang)	Orang	3.032	3.182	3.332	3.482	3.632	3.782	3.782
26.3	Jumlah koleksi buku (buah)	Buah	15.000	1000	1500	1500	2000	2000	23000
	Pelayanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian								
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya/ Ha		3,3	3.5	3.7	3.9	4,1	4,3	4,5
1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (Pertanian) (ADHB & ADHK)		23,32	22,02	20,72	19,42	19,42	18,12	18,12
1.3	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (ADHB & ADHK)		5,9	5,85	5,85	5,80	8,80	5,75	5,75
1.4	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (ADHB & ADHK)		4,94	4,80	4,80	4,66	4,66	4,52	4,52
1.5	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB		10,02	9,27	9,27	8,45	8,45	7,64	7,64
1.6	Cakupan bina kelompok petani		11,75	11,40	11,40	11,35	11,35	10,64	10,64
2.	Kehutanan								
2.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	517	519	521	523	525	527	529
2.2	Kerusakan kawasan hutan	Ha	1.055,75	3.605	3.505	3.500	3.505	3.505	3.505
2.3	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB		265.177,20	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.1	Pertambangan tanpa ijin		2,47	2,08	2,08	1,65	1,65	1,20	1,20
3.2	Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB (ADHB & ADHK)		ada	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
4.	Pariwisata								
4.1	Kunjungan wisata		23,11	24,31	24,31	25,52	25,53	26,77	26,77
4.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		23,7	25,19	25,19	26,69	26,69	28,11	28,11
5.	Kelautan dan Perikanan								
5.1	Produksi perikanan	ton	ada	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5.2	Konsumsi ikan	kg	23,11	24,31	24,31	25,52	25,53	26,77	26,77
5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	23,7	25,19	25,19	26,69	26,69	28,11	28,11
5.4	Produksi perikanan laut		0	0	0	0	0	0	0
6.	Perdagangan								
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB		17,41	17,50	17,60	17,80	17,90	18,00	18,00
6.2	Ekspor Bersih Perdagangan		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	kelompok	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
7.	Perindustrian								
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		4,69	4,80	4,85	4,87	4,90	4,93	4,93

NO	Aspek /Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
7.3	Pertumbuhan Industri.		309	442	575	708	841	974	974
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	kelompok	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
8.	Ketransmigrasian								
8.1	Transmigrasi swakarsa		Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
8.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB		Tida Ada	-	-	-	-	-	-
	Aspek Daya saing								
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Umum, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pengeluaran konsumsi Rumah tangga per kapita	Ada/Tidak	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
1.2	Pengeluaran Non pangan per kapita	Ada/Tidak	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
1.3	Produktivitas total daerah	Ada/Tidak	Ada	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2.	Pertanian								
2.1	Nilai Tukar Petani		99,85	99,87	99,89	99,91	99,93	99,95	99,95
2.2	Indeks Yang Diterima Petani (It)		136,4	148,22	160,43	172,87	184,9	196,93	196,93
2.3	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)		137,4	142,31	147,42	152,90	155,340	162,520	162,520
	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur								
1	Perhubungan								
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,04	0,10	0,16	0,22	0,28	0,34	0,34
1.2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ton	0,06	0,07	0,09	1,1	1,2	1,3	1,3
2	Penataan Ruang								
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Luas Wilayah Produktif	Ha	910.0	910.045	910.150	910.500	910.650	910.800	910.800



B.AB X
PEDOMAN TRANSISI DAN
K.AIDAH PELAKSANAAN DAERAH

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN DAERAH

10.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka :

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1 antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya yang kemudian direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD menyusun Renstra SKPD RSB SKPD yang menerapkan PPK BLUD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.

5. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian dana belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BARITO UTARA,

H. FAKHRI FAUZI, MH